ADIAN HUSAINI, M.A.
NUIM HIDAYAT

Kajian Politik

ISLAM LIBERAL
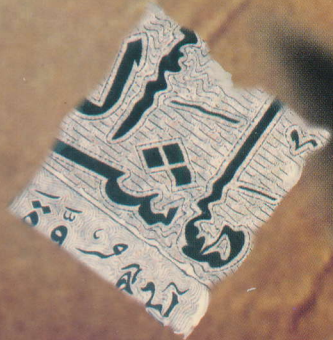
SEJARAH, KONSEPSI, PENYIMPANGAN, DAN JAWABANNYA

SEJARAH, KONSEPSI, PENYIMPANGAN, DAN JAWABANNYA

"ISLAM LIBERAL Memang MERESAHKAN"

"Kepada institusi PWNU Jatim agar segera menginstruksikan kepada warga NU agar mewaspadai dan mencegah pemikiran Islam Liberal dalam masyarakat. Apabila pemikiran Islam Liberal tersebut dimunculkan oleh pengurus NU (di semua tingkatan) diharap ada sanksi, baik berupa teguran keras (*istitaabah*) maupun sanksi organisasi (sekalipun harus dianulir dari kepengurusan NU)." (Rekomendasi Konferensi Wilayah PWNU Jawa Timur, Pasuruan 11-13 Oktober 2002)

"Jaringan Islam Liberal lebih liberal dari Cak Nur." (Salahuddin Wahid, Ketua PBNU, *Sabili*, no. 15, th. IX/25 Januari 2002)

"Apa yang ditawarkan Jaringan Islam Liberal hanyalah sebongkah kesesatan. Perbedaan dengan mereka mengalami pendangkalan yang berakhir dengan kesesatan." (K.H. A. Khalil Ridwan, Majelis Pimpinan Badan Kerja Sama Pondok Pesantren se-Indonesia [BKSPPI], *Sabili*, no. 15, th. IX/25 Januari 2002)

"Menuntut aparat penegak hukum untuk membongkar jaringan dan kegiatan yang secara sistematis dan masif melakukan penghinaan terhadap umat Allah swt., Rasulullah saw., Islam, umat Islam, dan para 'ulama'. Tulisan Ulil Abshar Abdalla pada HU *Kompas* edisi 18 November 2002 dengan judul 'Menyegarkan Kembali Pemahaman Islam' merupakan salah satu contoh perilaku nyata penghinaan tersebut. Oleh karena itu, harus ada sanksi hukum yang jelas bagi pelanggaran hukum yang berkualifikasi delik penghinaan agama seperti itu. Menurut syariat Islam, oknum yang menghina dan memutarbalikkan kebenaran agama dapat diancam dengan hukuman mati." (Pernyataan bersama Ulama dan Umat Islam Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, 25-26 Ramadhan 1423 H/30 November 1 Desember 2002 di Sekretariat FUUI [Forum Ulama Umat Indonesia], Masjid Al Fajr, Bandung, Jawa Barat)

"Jaringan Islam Liberal itu meresahkan umat Islam. Kalangan pesantren menilainya telah melecehkan Islam." (K.H. Luthfi Bashori, tokoh NU, pengasuh PP Al Murtadha, Malang, *Gatra*, 21 Desember 2002)

ISBN 979-561-752-4
9 799795 617524

ISLAM LIBERAL

SEJARAH, KONSEPSI, PENYIMPANGAN, DAN JAWABANNYA

ISLAM LIBERAL

SEJARAH, KONSEPSI, PENYIMPANGAN, DAN JAWABANNYA

ADIAN HUSAINI, M.A.
NUIM HIDAYAT

GEMA INSANI
Jakarta, 2002

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

HUSAINI, Adian dan Nuim Hidayat

Islam liberal: sejarah, konsepsi, penyimpangan, dan jawabannya/ penulis, Adian Husaini, Nuim Hidayat; penyunting, Harlis Kurniawan, Dendi Irfan, --Cet. 1-- Jakarta: Gema Insani Press, 2002.

xii, 236 hlm.; 21 cm

ISBN: 979-561-752-4

1. Politik Islam I. Judul II. Kurniawan, Harlis III. Irfan, Dendi

ISLAM LIBERAL: SEJARAH, KONSEPSI, PENYIMPANGAN, DAN JAWABANNYA

Penulis
Adian Husaini, M.A.
Nuim Hidayat
Penyunting
Harlis Kurniawan
Dendi Irfan

Perwajahan Isi & Penata Letak
Muchlis, Arifin
Ilustrasi
Edo Abdullah
Penerbit
GEMA INSANI
Jakarta: Jl. Kalibata Utara II No. 84 Jakarta 12740
Telp. (021) 7984391, 7984392, 7988593 Fax. (021) 7984388
Depok: Jl. Ir. H. Juanda, Depok 16418
Telp. (021) 7708891, 7708892, 7708893 Fax. (021) 7708894
http://www. gemainsani.co.id e-mail: gipnet @ indosat.net.id
Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Rabi'ul Awwal 1423 H / Juni 2002 M
Cetakan Ketiga, Shafar 1425 H / April 2004 M

ISI BUKU

PENGANTAR PENERBIT

Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Tiada daya dan kekuatan kecuali dari-Nya semata. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad saw. beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat.

Alhamdulillah, kali ini kami dapat menghadirkan satu buku dengan tema yang *up to date*, tema yang sedang hangat-hangatnya, yakni tentang Islam Liberal. Sebagaimana diketahui, belakangan ini marak dibicarakan tentang keberadaan Islam Liberal dengan bendera JIL (Jaringan Islam Liberal)-nya.

Keberadaan JIL cukup menyita perhatian masyarakat muslim Indonesia karena pesan-pesan atau wacana-wacana kontroversial yang dibawa oleh kelompok ini. Misalnya pertama, tentang teologi inklusif-pluralis; suatu gagasan yang mendangkalkan akidah umat dengan mengaburkan dan menyamakan semua agama. Kedua, penolakan kelompok ini terhadap syariat Islam karena mereka nilai memberangus kebebasan. Ketiga, tujuan dibentuknya JIL, yaitu untuk menghentikan--menurut penilaian mereka--gerakan Islam Fundamentalis atau Islam Militan yang mereka nilai berbahaya untuk perkembangan demokratisasi.

Buku ini mengupas JIL dengan memfokuskan pada ketiga

poin di atas. Harapannya agar buku ini menjadi sarana nasihat-menasihati antarsesama muslim dan meluruskan pemahaman-pemahaman yang keliru. Mudah-mudahan bermanfaat bagi umat.

Wallahu a'lam bish-shawab.
Billahit-taufiq wal-hidayah.

Jakarta, Rabi'ul Awwal 1423 H / Juni 2002 M

PENGANTAR

Pertengahan tahun 2001, nama "Islam Liberal" mulai dikenal luas di Indonesia. Segera nama itu menjadi perbincangan di tengah masyarakat, khususnya kaum muslimin Indonesia, yang belum usai dirundung berbagai kemalangan. Dengan semboyannya yang indah-menawan, "Islam yang membebaskan", kelompok yang kemudian mengusung bendera "Jaringan Islam Liberal"--disingkat JIL--ini berhasil membetot perhatian banyak kalangan, baik yang pro maupun yang kontra.

Mungkin sudah ratusan diskusi digelar untuk membahas sosok dan misi Islam Liberal ini. Penulis sendiri, selama bulan April dan Mei 2002, menghadiri berbagai diskusi dan seminar tentang Islam Liberal. Misalnya, pada 6 April 2002 di Aula Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, pada 7 April 2002 di Masjid Panglima Sudirman Cijantung, pada 14 April 2002 di Mataram Nusa Tenggara Barat, dan sebagainya. Pada 27 April 2002, penulis juga diminta mengisi ceramah bertemakan *"Islam Liberal dan Zionisme Internasional"* oleh satu Yayasan Dakwah di Cibubur. Lalu, pada 11 Mei 2002, di IAIN Jakarta digelar diskusi besar tentang Islam Liberal dan Islam fundamental.

Sebenarnya sudah cukup banyak yang memberikan tanggapan terhadap isu-isu atau wacana-wacana yang di-

kembangkan oleh kelompok JIL. Kritik-kritik terhadap JIL sudah mengalir cukup deras. Ada Hartono Ahmad Jaiz yang menulis buku *Bahaya Islam Liberal*. Ada juga Haidar Bagir, melalui sejumlah kolomnya di Harian *Republika*, yang juga mengkritik JIL dari sudut metodologi. Penulis sendiri berulangkali terlibat polemik di berbagai media massa dengan aktivis JIL atau yang sejenis JIL.

Menyimak berbagai isu dan tema yang dikembangkan oleh JIL kadangkala muncul keengganan dan kebosanan untuk menanggapinya. Selain wacana itu terkadang dilontarkan ke tengah masyarakat dalam bentuk "mentah" atau "setengah matang", berbagai wacana yang dilontarkan kelompok ini pun bukan tema-tema baru dalam khazanah pemikiran Islam. Yang baru barangkali modus dan gayanya. Tema-tema JIL tak jauh beda dengan wacana "neomodernis" yang dikembangkan oleh sejumlah tokoh di Indonesia, seperti Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid.

Ketika penulis sedang menyusun sejumlah jawaban terhadap berbagai tema yang dikembangkan JIL, sejumlah pihak juga mengingatkan agar sepak terjang dan wacana yang dikembangkan JIL tidak perlu ditanggapi. Alasan mereka, JIL akan bertambah "besar" (tanpa "kepala") jika terus ditanggapi. Dari satu sisi, argumentasi itu benar. Tapi, dari sisi lain, wacana-wacana tertentu yang dikembangkan JIL--sejauh pencermatan penulis--juga sudah menyebar luas ke tengah masyarakat melalui berbagai jenis media massa yang menjadi simpatisan JIL, dan menjadi konsumsi publik. Kunjungan penulis ke sejumlah daerah memberikan pelajaran tentang perlunya ada satu jawaban yang agak mendasar dan komprehensif terhadap wacana-wacana yang diusung oleh JIL. Meskipun Hamid Basyaib menyatakan, JIL tidak perlu dikhawatiri, karena "hanya mengeong", tetapi menurut Haidar Bagir--saat seminar di IAIN Jakarta, 11 Mei 2002--JIL ibaratnya kucing yang sedang birahi, mau kawin, lalu mengeong keras-keras, sehingga memekakkan telinga dan menjengkelkan banyak orang.

Tentu tidak semua wacana yang diusung oleh JIL perlu

ditanggapi serius. Ada tiga wacana yang penulis anggap penting untuk ditanggapi, yaitu seputar perusakan di bidang akidah Islamiah, terutama pengembangan teologi inklusif dan pluralis, yang ujung-ujungnya adalah gagasan penyamaan atau pengaburan agama. Wacana kedua, adalah soal penolakan dan pengebirian syariat Islam. Dan ketiga, adalah upaya penghancuran apa yang oleh JIL disebut sebagai "Islam fundamentalis" atau "Islam militan". Sejak awal dekade 1990-an, pasca-Perang Dingin, upaya penghancuran "Islam fundamentalis" sudah lama diusulkan oleh tokoh-tokoh Zionis Israel dan para politisi Amerika Serikat. Entah mengapa, sekitar satu dekade kemudian, JIL mengusung slogan yang sama.

Naskah ini sempat tertunda beberapa bulan, karena berbagai kesibukan yang sulit ditinggalkan. Penulisan buku ini semula sangat didorong oleh diskusi yang digelar di Yayasan Aksara Jakarta, pada 31 Januari 2001, yang menampilkan lima orang pembicara, yaitu Nurcholish Madjid, A. Syafii Ma'arif, Ulil Abshar Abdalla, Ja'far Umar Thalib, dan penulis sendiri (Adian Husaini). Tema diskusi itu memang membahas soal *"Clash of Civilization"* yang akhirnya juga merembet ke mana-mana, seperti soal syariat Islam, Ahli Kitab, dan sebagainya.

Dalam berbagai diskusi soal JIL, penulis banyak diingatkan agar jangan mudah "menyesatkan" orang. Peringatan itu bagus sekali. Penulis sangat berterima kasih. Karena itu, penulis mencoba sekuat tenaga untuk tidak membuat "cap sesat" pada siapa pun yang penulis kritik ide atau pemikirannya. Kritik adalah hal biasa dan harus dibiasakan. Antarorang mukmin juga wajib saling mengingatkan. Pada sisi lain, tentu penulis berdosa, jika membiarkan sesuatu kemungkaran atau kesalahan yang penulis yakini salah, dan tersebar luas ke tengah masyarakat. Rasulullah saw. sudah tegas-tegas memerintahkan agar jika melihat kemungkaran, wajib mengubah dengan tangan. Jika tidak mampu, dengan lisan. Jika tidak mampu, ya cukup dengan hati. Karena penulis merasa mampu mengubah dengan lisan, maka hal itu wajib penulis lakukan melalui berbagai forum lisan maupun lewat tulisan.

Pengembangan wacana melalui tulisan tentu lebih baik dibandingkan melalui lisan, karena lebih bertanggung jawab, dan memungkinkan dilakukannya koreksi jika ditemukan kekeliruan. Karena itu, betapa pun kecilnya, semoga buku ini memberikan manfaat bagi pengembangan wacana pemikiran Islam di Indonesia. Syukur-syukur, jika melalui buku ini, banyak orang yang mendapatkan manfaat, khususnya terselamatkan dari serangan pemikiran yang destruktif.

Pepatah klasik menyatakan bahwa tiada gading yang tidak retak. Atas kelemahan dan kekurangan dalam buku ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kepada sejumlah pihak yang terkritik dalam buku ini, khususnya kepada komunitas JIL, penulis berharap kritik-kritik *keras* dalam buku ini dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme *tawashau bil haqqi wa tawashau bis shabri.* Walhasil, penulis beristighfar kepada Allah SWT, sekiranya ada kesalahan--ide atau teknis--yang termuat dalam buku ini.

Sebagai penutup, ada baiknya, kita semua merenungkan sebuah firman Allah SWT dan hadits Rasulullah saw.,

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil sebagai 'wali' (pemimpin, teman kepercayaan, panutan), orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan." **(al-Maa`idah: 57)**

"Kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lobang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, 'Ya Rasulullah, apakah (mereka) itu Yahudi dan Nasrani?' Nabi saw. menjawab, 'Siapa lagi!'" **(HR Muslim)**

Jakarta, 1 Rabi'ul Awwal 1423H
14 Mei 2002

Penulis

Bab Ke-1
ISLAM LIBERAL DARI MASA KE MASA

"Pada zaman sekarang ini kita mendapati ada orang yang meragukan keharaman khamar atau riba, atau tentang bolehnya thalaq dan berpoligami dengan syarat-syaratnya. Ada yang meragukan keabsahan Sunnah Nabi saw. sebagai sumber hukum. Bahkan, ada yang mengajak kita untuk membuang seluruh ilmu-ilmu Al-Qur`an (Ulumul Qur'an) dan seluruh warisan ilmu pengetahuan Al-Qur`an ke tong sampah, untuk kemudian memulai membaca Al-Qur`an dari nol dengan bacaan kontemporer, tanpa terikat oleh suatu ikatan apa pun, tidak berpegang pada ilmu pengetahuan sebelumnya. Juga tidak dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan oleh ulama umat Islam semenjak berabad-abad silam." **(Yusuf Qaradhawi)**

Entah mengapa Charles Kurzman dalam bukunya *Wacana Islam Liberal*, memulai pengantarnya dengan membantah istilah "Islam Liberal", yang merupakan judul bukunya sendiri. Menurut Kurzman, ungkapan "Islam liberal" (*liberal Islam*) mungkin terdengar seperti sebuah kontradiksi dalam

peristilahan *(a contradictio in terms)*.[1] Mungkin ia bingung dengan istilahnya sendiri: Islam *kok* liberal? Meski ia menjawab di akhir tulisannya bahwa istilah Islam Liberal itu tidak kontradiktif, tapi ketidakjelasan uraiannya masih tampak di sana-sini.

'Islam' itu sendiri, secara *lughawi*, bermakna "pasrah", tunduk kepada Tuhan (Allah) dan terikat dengan hukum-hukum yang dibawa Nabi Muhammad saw. Dalam hal ini, Islam *tidak bebas*. Tetapi, di samping Islam tunduk kepada Allah SWT, Islam sebenarnya membebaskan manusia dari belenggu peribadahan kepada manusia atau makhluk lainnya. Bisa disimpulkan, Islam itu "bebas" dan "tidak bebas".

Kurzman juga tidak menjelaskan secara rinci apa yang dia maksud dengan "Islam Liberal". Untuk menghindari definisi itu, ia mengutip sarjana hukum India, Ali Asghar Fyzee (1899-1981) yang menulis, "Kita tidak perlu menghiraukan nomenklatur, tetapi jika sebuah nama harus diberikan padanya, marilah kita sebut itu Islam Liberal." Bahkan, Fyzee menggunakan istilah lain untuk Islam Liberal yaitu "Islam Protestan". Sebagaimana diungkap oleh salah satu pengajar Universitas Paramadina Mulya, Luthfi Assyaukanie, "Dengan istilah ini ("Islam Protestan" atau "Islam Liberal"), Fyzee ingin menyampaikan pesan perlunya menghadirkan wajah Islam yang lain, yaitu Islam yang nonortodoks; Islam yang kompatibel terhadap perubahan zaman; dan Islam yang berorientasi ke masa depan dan bukan ke masa silam."[2]

Kemunculan istilah Islam Liberal ini, menurut Luthfie, mulai dipopulerkan tahun 1950-an. Tapi mulai berkembang pesat--terutama di Indonesia--tahun 1980-an, yaitu oleh tokoh utama dan sumber rujukan "utama" komunitas atau Jaringan Islam Liberal, Nurcholish Madjid. Meski Nurcholish sendiri mengaku

---

[1] Charles Kurzman (editor), *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global* (Judul aslinya: *Liberal Islam: A Source Book*), Paramadina, Juni 2001. Buku ini menjadi buku pegangan utama kalangan Islam Liberal. Buku yang edisi Inggrisnya beredar di AS sejak tahun 1998 ini, sebenarnya penuh dengan "kekacauan", baik dalam istilah-istilah maupun penggolongan tokoh-tokoh Islam dalam Islam Liberal.

[2] Makalah Luthfie dalam diskusi *Wacana Islam Liberal di Timur Tengah* di Teater Utan Kayu (TUK), Jakarta. Rabu, 21 Februari 2001.

tidak pernah menggunakan istilah Islam Liberal untuk mengembangkan gagasan-gagasan pemikiran Islamnya, tapi ia tidak menentang ide-ide Islam Liberal.

Karena itu, Islam Liberal sebenarnya "tidak beda" dengan gagasan-gagasan Islam yang dikembangkan oleh Nurcholish Madjid dan kelompoknya. Yaitu, kelompok Islam yang tidak setuju dengan pemberlakuan syariat Islam (secara formal oleh negara), kelompok yang getol memperjuangkan sekularisasi, emansipasi wanita, "menyamakan" agama Islam dengan agama lain (pluralisme teologis), memperjuangkan demokrasi Barat dan sejenisnya.

Selanjutnya Luthfie menjelaskan tentang agenda-agenda Islam Liberal, "Saya melihat, paling tidak, ada empat agenda utama yang menjadi payung bagi persoalan-persoalan yang dibahas oleh para pembaru dan intelektual muslim selama ini. Yakni, agenda politik, agenda toleransi agama, agenda emansipasi wanita, dan agenda kebebasan berekspresi (bandingkan dengan Charles Kurzman, 1998). Kaum muslimin dituntut melihat keempat agenda ini dari perspektif mereka sendiri, dan bukan dari perspektif masa silam yang lebih banyak memunculkan kontradiksi ketimbang penyelesaian yang baik. Agenda pertama adalah agenda politik. Yang dimaksud dengan agenda ini adalah sikap politik kaum muslimin dalam melihat sistem pemerintahan yang berlaku. Secara teologis, persoalan ini boleh dibilang sudah selesai, khususnya setelah para intelektual muslim, semacam Ali Abd ar-Raziq, Ahmad Khalafallah (Mesir), Mahmud Taleqani (Iran), dan Nurcholish Madjid (Indonesia), menganggap persoalan tersebut sebagai persoalan ijtihadi yang diserahkan sepenuhnya kepada kaum muslimin..."

Islam Liberal juga "mendewakan modernitas", sehingga Islam harus disesuaikan dengan kemodernan. "Jika terjadi konflik antara ajaran Islam dan pencapaian modernitas, maka yang harus dilakukan, menurut mereka, bukanlah menolak modernitas, tetapi menafsirkan kembali ajaran tersebut. Di sinilah inti dari sikap dan doktrin Islam Liberal," kata Luthfi.

A. Munculnya Islam Liberal di Indonesia

Setelah Nurcholish Madjid meluncurkan gagasan sekularisasi dan ide-ide teologi inklusif-pluralis dengan Paramadinanya, kini "kader-kader" Nurcholish mengembangkan gagasannya lebih intensif lewat yang mereka sebut "Jaringan Islam Liberal." Jaringan Islam Liberal yang mereka singkat dengan JIL ini, mulai aktif pada Maret 2001 lalu. Kegiatan awal dilakukan dengan menggelar kelompok diskusi maya (milis) yang tergabung dalam islamliberal@yahoogroups.com , selain menyebarkan gagasannya lewat website **www.islamlib.com.**

Sejak 25 Juni 2001, JIL mengisi satu halaman Jawa Pos Minggu, berikut 51 koran jaringannya, dengan artikel dan wawancara seputar perspektif Islam Liberal. Tiap Kamis sore, JIL menyiarkan wawancara langsung (*talkshow*) dan diskusi interaktif dengan para kontributor Islam Liberal, lewat Kantor Berita Radio 68H dan puluhan radio jaringannya.[3] Dalam konsep JIL, *talkshow* itu dinyatakan sebagai upaya mengundang sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai "pendekar pluralisme dan inklusivisme" untuk berbicara tentang berbagai isu sosial-keagamaan di tanah air. Acara ini diselenggarakan setiap minggu, dan disiarkan oleh seluruh jaringan KBR 68H di seluruh Indonesia. Selain itu, media massa yang aktif meluncurkan gagasan-gagasan Islam Liberal di antaranya adalah *Kompas, Koran Tempo, Republika,* majalah *Tempo,* dan lain-lain.[4]

---

[3] Lihat majalah *Gatra,* 1 Desember 2001 dan website islamlib.com. Markas JIL yang berkantor di Jl. Utan Kayu 68 H, Rawamangun itu juga adalah markas ISAI yang banyak menerbitkan buku-buku kiri (sebagian berisi pembelaan terhadap PKI dan tokoh-tokohnya). Di markas itu juga sering dilaksanakan diskusi-diskusi, drama, teater, dan lain-lain. Tokoh penggerak dan donatur utama Markas 68H itu adalah Goenawan Mohamad. Sedangkan Kantor Berita Radio 68H, salah satu penggagas utamanya adalah Andreas H. (pengikut Kristen), mantan wartawan *Jakarta Post.* Dalam iklannya tanggal 22 April 2001 di *Koran Tempo* disebutkan, "Radio 68H: Independen, Bisa dipercaya, Mengudara serentak di 200 kota, dari Aceh sampai Papua."

[4] Meski didukung oleh dana yang besar (di antaranya oleh Ford Foundation) dan media massa nasional, anehnya JIL menyatakan bahwa suara Islam Liberal di media massa kalah dengan Islam Militan. JIL menyatakan bahwa meski sedikit jumlahnya, Islam Militan sangat agresif dalam menyebarkan pandangan-pandangannya, entah lewat media cetak atau elektronik. Pernyataan JIL ini tidak berdasarkan data sama sekali. Apakah JIL pernah mengadakan survei berapa jumlah penduduk Indonesia yang Islam militan dan berapa

Talkshow ini semula diikuti oleh 10 radio. Empat radio di Jabotabek yaitu Radio Attahiriyyah FM (Radio Islam), Radio Muara FM (Radio Dangdut), Radio Star FM (Tangerang), Radio Ria FM (Depok), dan enam radio di daerah yaitu Radio Smart (Menado), Radio DMS (Maluku), Radio Unisi (Jogyakarta), Radio PTPN (Solo), Radio Mara (Bandung), Radio Prima FM (Aceh), yang merupakan jaringan 68H. Lama-lama, jaringan Radio 68 H terus bertambah.

Pengelolaan JIL ini dikomandani oleh beberapa pemikir muda, seperti Luthfi Assyaukanie (Universitas Paramadina Mulya), Ulil Abshar-Abdalla (Lakpesdam NU), dan Ahmad Sahal (jurnal Kalam). Markas JIL yang berpusat di JL Utan Kayu ini, juga sering diramaikan dengan diskusi atau ngobrol-ngobrol para aktivis muda dari berbagai kalangan.

JIL juga bekerja sama dengan para intelektual, penulis, dan akademisi dalam dan luar negeri,untuk menjadi kontributornya. Mereka adalah sebagai berikut:

- Nurcholish Madjid, *universitas ParamadinaMulya, Jakarta.*
- Charles Kurzman, *University of North Carolina.*
- Azyumardi Azra, *IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.*
- Abdallah Laroui, *Muhammad V University, Maroko.*
- Masdar F. Mas'udi, *Pusat Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, Jakarta.*
- Goenawan Mohamad, *Majalah Tempo, Jakarta.*
- Edward Said.
- Djohan Effendi, *Deakin University, Australia.*
- Abdullahi Ahmad an-Naim, *University of Khartoum, Sudan.*
- Jalaluddin Rahmat, *Yayasan Muthahhari, Bandung.*
- Asghar Ali Engineer.
- Nasaruddin Umar, *IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.*
- Mohammed Arkoun, *University of Sorbonne, Prancis.*

---

yang Islam liberal? Selain itu–tampaknya meniru gaya Kurzman–JIL pura-pura kalah dalam ekspose media massa . JIL menutup mata mengenai kampanye intens media massa dalam penyebaran gagasan-gagasan Islam Liberal di *Tempo* dan *Kompas*. Memang dalam tradisi komunikasi forum-forum Islam, seperti tabligh akbar, pengajian, khotbah jumat dll, JIL kalah jauh dengan Islam Militan.

- Komaruddin Hidayat, *Yayasan Paramadina, Jakarta.*
- Sadeq Jalal Azam, *Damscus University, Suriah.*
- Said Agil Siraj, *PBNU, Jakarta.*
- Denny JA, *Universitas Jayabaya, Jakarta.*
- Rizal Mallarangeng, *CSIS, Jakarta.*
- Budi Munawwar-Rahman, *Yayasan Paramadina, Jakarta.*
- Ihsan Ali-Fauzi, *Ohio University, AS.*
- Taufik Adnan Amal, *IAIN Alauddin, Ujung Pandang.*
- Hamid Basyaib, *Yayasan Aksara, Jakarta.*
- Ulil Abshar Abdalla, *Lakpesdam-NU, Jakarta.*
- Luthfi Assyaukanie, *Universitas ParamadinaMulya, Jakarta.*
- Saiful Mujani, *Ohio State University, AS.*
- Ade Armando, *Universitas Indonesia, Depok.*
- Syamsurizal Panggabean, *Universitas Gadjahmada, Yogyakarta.*

Selain tokoh-tokoh di atas, beberapa orang tokoh Muhammadiyah juga aktif mendukung gagasan Islam Liberal, seperti Abdul Munir Mulkhan dan Sukidi. Bahkan Ketua PP Muhammadiyah, Syafii Maarif juga dapat dikategorikan ke dalam pendukung gagasan Islam Liberal. Seperti diketahui, Maarif adalah pendukung gagasan-gagasan liberal (neomodernisme) Fazlur Rahman. Ia juga dikenal getol dalam menolak dikembalikannya Piagam Jakarta ke dalam Konstitusi.

Di samping aktif kampanye lewat internet dan radio, sejumlah aktivis Islam Liberal juga menerbitkan jurnal *Tashwirul Afkar*, yang dikomandani juga oleh Ulil Abshar Abdalla (pemred). Jurnal yang terbit empat bulanan ini resmi dibawahi oleh Lakpesdam NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM) bekerja sama dengan *The Asia Foundation*. Wajah liberal dalam jurnal ini, misalnya, tampak dalam terbitannya edisi 11/2001. Dimana *Tashwirul Afkar* menampilkan tema *Menuju Pendidikan Islam Pluralis*. Di edisinya itu, ditampilkan tulisan tokoh-tokoh Islam Liberal seperti Nashr Hamid Abu Zeyd, Abdul Munir Mulkhan dll.

Khamami Zada, salah satu redaktur pelaksananya misalnya mengkritik pendidikan Islam yang hanya membenarkan agama Islam saja. Simaklah petikan tulisannya yang mengkritik keras pendidikan yang dijalankan para ulama selama ini, "Filosofi

pendidikan Islam yang hanya membenarkan agamanya sendiri, tanpa mau menerima kebenaran agama lain mesti mendapat kritik untuk selanjutnya dilakukan reorientasi. Konsep iman-kafir, muslim-nonmuslim, dan baik benar (*truth claim*), yang sangat berpengaruh terhadap cara pandang Islam terhadap agama lain, mesti dibongkar, agar umat Islam tidak lagi menganggap agama lain sebagai agama yang salah dan tidak ada jalan keselamatan."

B. Islam Liberal Melawan Islam Militan

Suatu gerakan biasanya memulai prioritas aktivitasnya dengan mempersepsikan terlebih dulu apa yang menjadi musuh atau ancamannya. Tanpa tedeng aling-aling, JIL menyatakan gerakannya bertujuan untuk melawan atau menghambat gerakan Islam militan atau Islam fundamentalis. Dalam latar belakang pendirian JIL dinyatakan,

> "Kekhawatiran akan bangkitnya 'ekstremisme' dan 'fundamentalisme' agama sempat membuat banyak orang khawatir akhir-akhir ini. Gejala yang menunjukkan perkembangan seperti itu memang cukup banyak. Munculnya sejumlah kelompok militan Islam, tindakan pengrusakan gereja (juga tempat ibadah yang lain), berkembangnya sejumlah media yang menyuarakan aspirasi 'Islam militan', penggunaan istilah 'jihad' sebagai alat pengesah serangan terhadap kelompok agama lain, dan semacamnya, adalah beberapa perkembangan yang menandai bangkitnya aspirasi keagamaan yang ekstrem tersebut."

Selain itu JIL juga berterus terang ingin menghambat kelompok-kelompok yang berjuang untuk menerapkan syariat Islam secara kafah dalam kehidupan. Dalam rencana penerbitan *booklet*nya, JIL menyatakan bahwa *booklet* itu berisi isu-isu yang acapkali menjadi bahan perdebatan dalam agama dan seringkali menjadi "alat" buat kelompok-kelompok tertentu untuk melancarkan kampanye mereka. Misalnya, jihad, penerapan syariat Islam, penerapan ajaran "memerintahkan yang baik, dan mencegah yang jahat" (*amr ma'ruf, nahy 'anil munkar*), konsep tentang dan pembangunan rumah ibadah, dll.

JIL merumuskan tujuan gerakannya ke dalam empat hal. *Pertama,* memperkokoh landasan demokratisasi lewat penanaman nilai-nilai pluralisme, inklusivisme, dan humanisme. *Kedua,* membangun kehidupan keberagamaan yang berdasarkan pada penghormatan atas perbedaan. *Ketiga,* mendukung dan menyebarkan gagasan keagamaan (utamanya: Islam) yang pluralis, terbuka, dan humanis. *Keempat,* mencegah agar pandangan-pandangan kegamaan yang militan dan prokekerasan tidak menguasai wacana publik.

Kontributor JIL, Denny JA menjelaskan lebih jauh tentang Islam Liberal ini. Menurutnya, Islam liberal adalah kelompok yang menginterpretasi Islam yang paralel dengan modernitas dan demokrasi. "Dan demokrasi sebagaimana yang diteorikan dan dipraktekkan di seluruh dunia adalah bersifar sekuler, di mana negara mengambil jarak yang sama atas pluralitas agama ataupun pluralitas interpretasi agama," kata Denny.

Lebih lanjut ia menyatakan, mengutip William Liddle (1995), bahwa kaum Islam Liberal bisa diberikan label Islam Substansialis. Menurut Liddle, ada empat ciri kaum substansialis ini di Indonesia. *Pertama,* mereka percaya bahwa isi dan substansi ajaran agama Islam jauh lebih penting daripada bentuk dan labelnya. Dengan menekankan substansi ajaran moral, sangat mudah bagi kaum substansialis ini untuk mencari *common ground* dengan penganut agama dan kaum moralis lainnya untuk membentuk aturan publik bersama.

Kedua, mereka percaya, walau Islam (Al-Qur`an) itu bersifat universal dan abadi, namun ia tetap harus terus menerus diinterpretasi ulang untuk merespons zaman yang terus berubah dan berbeda. Zaman pascaindustri menjelang abad ke-21 ini jelaslah berbeda, secara ekonomi, politik dan kultur, dengan zaman ketika Islam pertama kali turun di era sebelum industri, lebih dari seribu tahun lalu.

Ketiga, mereka percaya karena keterbatasan pikiran manusia, mustahil mereka mampu tahu setepat-tepatnya kehendak Tuhan. Kemungkinan salah menafsirkan kehendak Tuhan harus terus hidup dalam pikiran mereka. Dengan sikap ini, mereka akan

lebih bertoleransi atas keberagaman interpretasi dan membuat dialog dengan pihak yang berbeda. Kompromi untuk hal-hal yang bersifat publik, yang mengatur kehidupan bersama, lebih mudah dilakukan. Kesediaan berkompromi adalah salah satu sokoguru demokrasi.

Keempat, mereka menerima bahwa bentuk negara Indonesia sekarang--yang bukan merupakan negara Islam--adalah bentuk final. Dengan keyakinan ini, mereka tak akan berupaya mendirikan negara Islam yang menjadikan negara sebagai instrumen agama Islam saja. Netralitas negara terhadap pluralitas agama di Indonesia akan sangat mudah diterima.[5]

C. Buku Kurzman yang Membingungkan

Salah satu buku "bacaan penting" pengikut Islam Liberal adalah buku Charles Kurzman (editorial) yang berjudul *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global.* Buku bersampul coklat itu, memuat 32 karangan penulis dari 19 negara. Yaitu 8 orang dari Timur Tengah, 6 dari Asia Selatan, 4 dari Asia Tenggara, 8 dari Afrika Utara, 4 dari Afrika sub Sahara, 1 dari Eropa, dan 1 dari Amerika Utara.

Kurzman menyatakan bahwa buku antologinya ini didasarkan kriteria bahwa para penulis di bukunya itu adalah:

- "liberal" dalam beberapa pengertian (secara khusus, mereka yang bersikap oposan terhadap revivalis Islam),
- "Islam" dalam beberapa pengertian (mereka yang percaya bahwa Islam memiliki peran penting dalam dunia kontemporer, sebagai lawan dari kaum sekularis),
- (karya-karya mereka) dibaca secara luas baik di dalam maupun di luar negara mereka masing-masing,
- secara geografis mewakili seluruh dunia Islam,
- secara ideologis mewakili berbagai paham Islam Liberal,
- secara temporer mewakili masa pascakekhalifahan (1920-an

---

[5] *Media Indonesia,* 30 Juli 1999 dalam Saripudin HA (penyunting), *Negara Sekuler Sebuah Polemik, Putra Berdikari Bangsa,* Juni 2000 hal. 121-122.

hingga sekarang), tetapi dengan penekanan khusus pada periode kontemporer.

Jika dicermati, bisa dikatakan buku Kurzman ini membingungkan dan banyak kerancuan di sana. Misalnya, soal pemilihan penulis. Paling tidak ada tiga penulis yang tulisan-tulisan atau pribadi utuh penulis itu berseberangan dengan banyak penulis lainnya di buku Kurzman ini. Mereka adalah Muhammad Natsir (Revolusi di Indonesia), Yusuf al-Qaradhawi (Ekstremisme), dan Ali Syariati (Islam dan Kemanusiaan).

Di sini akan dibahas dua penulis, Natsir dan Qaradhawi, yang dimasukkan dalam buku itu. Pemasukan kedua tokoh dalam bingkai "Islam Liberal" itu bisa dianggap pembaca, masuk dalam kategori Islam Liberal dan itu tampaknya yang diinginkan Kurzman.

D. Yusuf Qaradhawi Bukan Islam Liberal

Qaradhawi (lahir 1926) memang mengulas tentang ekstremisme, kelemahan, dan bahaya-bahayanya yang terjadi pada sebagian kelompok umat Islam. Khususnya pemikiran-pemikiran Islam yang dikembangkan oleh *Jamaah Takfir wal Hijrah* (*The Society of Excoriation and Exodus*). Tapi, karya Qaradhawi itu tidak mengkritik sama sekali kaum revivalis Islam secara luas, seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaat Islami, Jamaah Salafiyah dan lain-lain. Di kalangan revivalis Islam sendiri cara-cara pengkafiran, seperti yang disebut oleh Qaradhawi, dilakukan secara hati-hati. Dan yang lebih penting Dekan Fakultas Hukum Universitas Qatar ini, tidak melakukan oposan terhadap kaum revivalis. Kritik Qaradhawi ke Jamaah Takfir wal Hijrah[6] itu adalah hal yang biasa saja.

Qaradhawi sendiri pernah dikenal sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin dan sampai sekarang terus mendukung perjuangan

---

[6] Dr Abdullah Azzam, pemimpin Jamaah Islamiah (guru Usamah bin Laden), menyatakan nama sebenarnya Jamaah Takfir wal Hijrah adalah Jamaatul Muslimin. Gerakan itu diteror oleh pemerintah Mesir bersamaan dengan ditangkap dan dibunuhinya tokoh-tokoh Ikhwanul Muslimin. Lihat Buku *Khilafah Islamiah dan Upaya Menegakkannya*, Pustaka Al-Alaq, 2001, hal. 59-60.

mereka. Dalam karya Kurzman itu, sebenarnya malah ada kalimat-kalimat dari Qaradhawi yang bertentangan dengan ide Islam Liberal umumnya. Yaitu, masalah kesesatan orang-orang Kristen dan Yahudi, karena berlebih-lebihan. Di situ Qaradhawi menyatakan, "Takutlah akan berlebih-lebihan dalam agama. (kaum) sebelumnya telah binasa karena berlebih-lebihan." Kaum yang dimaksud adalah kaum agama lain, khususnya Ahli Kitab—Yahudi dan Kristen dan terutama sekali Kristen. Pendapat Qaradhawi itu jelas bertentangan 180 derajat dengan konsepsi teologi inklusif-pluralis yang dikembangkan Islam Liberal, yang menganggap Nasrani dan Yahudi bukan kaum kafir.[7] Padahal, dengan tegas Qaradhawi menyatakan bahwa kaum Kristen dan Yahudi adalah kaum kafir.

Menurut Qaradhawi, kekafiran Yahudi dan Nasrani adalah sesuatu yang amat jelas. "Terlihat bagi individu muslim yang memiliki ilmu keislaman, walaupun hanya sebesar atom. Hal ini juga sesuatu yang disepakati oleh seluruh umat Islam dari seluruh mazhab dan aliran pemikiran, sepanjang masa; baik kalangan Ahli Sunnah, Syiah, Muktazilah dan Khawarij. Demikian juga dengan seluruh aliran umat Islam yang ada saat ini seperti Ahli Sunnah, Zaidiah, Ja'fariah, dan Ibadhiah."[8]

---

[7] Dalam acara *Mutiara Subuh* AN-TV, Rabu 14 Juni 2000, yang membahas buku *Tiga Agama Satu Tuhan*, tokoh kelompok Paramadina Dr. Komaruddin Hidayat mengatakan bahwa di masa Nabi Muhammad saw., orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak dikatakan sebagai orang "kafir", tetapi disebut sebagai "Ahlul Kitab". Hal senada juga diungkap pengikut Nurcholish lainnya, Budhy Munawar Rahman *(Direktur Pelaksana Lembaga Studi Agama dan Filsafat/LSAF)*. Melalui artikelnya di *harian Republika (24/6/2000)* yang berjudul "*Mengembalikan Kerukunan Umat Beragama*", Budhy mengajukan pemikiran bahwa kerukunan umat beragama hanya dapat dicapai jika para pemeluk agama menganut-dan mengembangkan-teologi **pluralis** atau **teologi inklusif**. Sebaliknya, **teologi eksklusif** tidak kondusif dan menjadi akar munculnya konflik agama (SARA).

Teologi pluralis, menurut BMR, melihat agama-agama lain dibanding dengan agamanya sendiri dalam rumusan, "*Other religions are equally valid ways to the same truth* (John Hick); *Other religions speak of different but equally valid truths* (John B Cobb Jr); *Each religion expresses an important part of the truth* (Raimundo Panikkar)." Intinya, penganut teologi pluralis meyakini bahwa "semua agama memiliki tujuan yang sama". Lihat juga Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis*, Paramadina, Maret 2001.hal.13

[8] Yusuf Qaradhawi, *Bagaimana Islam Menilai Yahudi dan Nasrani (Mauqiful Islami min Kufril Yahuudi wan Nashaara)*, Gema Insani Press, Mei 2000. hal. 13

Masalah kekafiran dua agama itu, menurut Qaradhawi, telah ditegaskan oleh puluhan ayat Al-Qur`an dan al-hadits. Bukan semata-mata oleh satu, dua ayat Al-Qur`an. Masalah itu adalah bagian dari *"al-ma'lum min diinil-Islam bidh-dharuurah"* (sesuatu ajaran Islam yang elementer, kalangan awam mengetahuinya). Qaradhawi sama sekali tidak respek terhadap "Islam Liberal". Bahkan, ia mengecam kelompok itu sebagai kelompok orang-orang yang berusaha menyerang dasar-dasar akidah dan tsaqafah Islam.

Di bawah ini sindiran tajam Qaradhawi yang "mirip" dengan agenda Islam Liberal saat ini, "Pada zaman sekarang ini kita mendapati ada orang yang meragukan keharaman khamar atau riba, atau tentang bolehnya thalaq dan berpoligami dengan syarat-syaratnya. Ada yang meragukan keabsahan Sunnah Nabi saw. sebagai sumber hukum. Bahkan, ada yang mengajak kita untuk membuang seluruh ilmu-ilmu Al-Qur`an (Ulumul Qur`an) dan seluruh warisan ilmu pengetahuan Al-Qur`an ke tong sampah, untuk kemudian memulai membaca Al-Qur`an dari nol dengan bacaan kontemporer, tanpa terikat oleh suatu ikatan apa pun, tidak berpegang pada ilmu pengetahuan sebelumnya. Juga tidak dengan kaidah dan aturan yang ditetapkan oleh ulama umat Islam semenjak berabad-abad silam."[9]

Karya Ali Abdul Raziq, *Islam wa Ushul al-Hukm* 'Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan', yang dipuji-puji dalam buku Kurzman juga *dikritik habis* oleh Yusuf Qaradhawi dengan menerbitkan buku berjudul *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam* (Fiqih Negara, 1997).[10] Dalam buku itu, Qaradhawi menerangkan kontroversi buku Raziq itu. Saat buku itu diluncurkan di tengah masyarakat, ulama-ulama Al-Azhar mengecamnya. Kemudian setelah mencermati buku itu dengan teliti, akhirnya dibentuk tim yang beranggotakan ulama-ulama senior Al-Azhar untuk

---

[9] *Ibid*, hal. 12

[10] Buku Qaradhawi yang membahas *Fiqih Negara* ini aslinya berjudul panjang, *Min Fiqh ad-Daulah fil-Islam Makaanatuha, Maalimuha, Thabiiatuha, Manfiquha min ad Dimaqratiyah wa at-Taaddudiyah wal Mar'ah wa Khairul Muslimin*", Darusy Syuruq, Kairo, 1997.

mengadili Raziq. "Para ulama itu memutuskan untuk mencabut ijazah Raziq dan mengeluarkannya dari kelompok ulama Al-Azhar. Di samping itu, banyak pula dari kalangan Al-Azhar atau non-Al-Azhar yang menanggapi buku tersebut," jelas Qaradhawi.[11] Tapi, memang ulama model Raziq beginilah yang digandrungi oleh Islam Liberal (dan para pemikir Barat).

Pemecatan Raziq dari anggota ulama Al-Azhar, dilakukan oleh Haiah Kibaril Ulama (Dewan Ulama Terkemuka) yang terdiri dari 19 orang ulama. Tujuh butir kesalahan fatal yang dibuat oleh Raziq adalah sebagai berikut.

1. Menjadikan syariat Islam hanya sebagai hukum agama yang tidak ada kaitannya dengan pengaturan atau penatalaksanaan urusan duniawi.
2. Berpendapat bahwa jihad Rasulullah ditujukan untuk meraih kekuasaan setingkat raja dan bukan untuk mensyiarkan agama ke seluruh dunia.
3. Menyatakan bahwa lembaga pemerintahan di masa Rasulullah tidak jelas, rancu, kacau, tidak komplit, dan membingungkan (bagi mereka yang mencoba memahaminya).
4. Berpendapat bahwa tanggung jawab (Muhammad) Rasulullah hanya menyebarluaskan syariat tanpa menjadi penguasa atau pemerintah.
5. Menganggap sepi ijma' (kesepakatan) para sahabat Rasul yang menetapkan umat mesti menunjuk seseorang untuk mengelola urusan keagamaan dan keduniaan serta mengakui adanya kewajiban untuk mengangkat seorang imam.
6. Mengingkari bahwa qudhat (kehakiman) merupakan fungsi syariat.
7. Berpendapat bahwa pemerintahan Abu Bakar dan Khulafaur Rasyidin merupakan pemerintahan sekuler.[12]

---

[11] Menurut Qaradhawi, yang pertama-tama membantah buku Raziq itu di antaranya adalah Syekh Muhammad Al-Khudar Hussain, Syekh Al-Azhar dalam bukunya "*Tanggapan terhadap Buku Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan*." Selain itu tercatat juga ulama-ulama lainnya seperti Dhiyauddin ar-Rais, Muhammad Abdul Qadir Abu Faris dan lain-lain. Buku Raziq mendapat tantangan keras juga karena diluncurkan bersamaan dengan rencana Muktamar Khilafah di Kairo, 1926.

[12] Lihat Leonard Binder, *Islam Liberal*, Pustaka Pelajar, November 2001. hal. 213

Bila dicermati, intinya Ali Abd Raziq menolak Daulah Islamiah atau Khilafah Islamiah bagi kaum muslimin. Atau, istilah anggota Hakim Mahkamah Syar'iyyah di Manshurah ini, "Risalah Bukan Pemerintahan, Agama Bukan Negara." Yang mengherankan ia juga menggunakan qiyas hadits-hadits Nabi tentang imamah, khalifah, baiat, dan yang sejenisnya, dengan pernyataan Yesus Kristus tentang masalah hak Kaisar dan hak Tuhan. Kata Raziq:

> *"Yesus Kristus memang pernah menyinggung masalah pemerintahan kekaisaran dan memerintahkan agar apa yang menjadi hak kaisar diberikan kepada kaisar dan yang menjadi hak Tuhan diberikan kepada Tuhan. Kendatipun demikian, pernyataan Yesus ini bukanlah merupakan pengakuan bahwa pemerintahan kekaisaran itu merupakan bagian dari Syariat Tuhan, dan tidak pula dimasukkan sebagai salah satu hukum agama Masehi. Siapa pun juga orangnya, tidak mungkin ia menjadikan ucapan Yesus ini sebagai dasar bagi teori seperti itu. Semua hadits Rasulullah saw. yang menuturkan tentang Imamah, khalifah, baiat dan istilah-istilah sejenis itu tidak menunjukkan suatu pengertian lebih banyak ketimbang yang ada dalam ucapan Yesus Kristus ketika yang disebut terakhir ini menyinggung berbagai hukum yang berkenaan dengan pemerintahan kekaisaran."*[13]

Sementara itu, Dhiyauddin ar-Rais meragukan buku *Islam wa Ushul al-Hukm* itu karya Raziq. Menurut Rais, setelah dilakukan penelitian yang mendalam, buku itu ternyata karangan pihak lain dan kemudian dinisbatkan ke Ali Abdul Raziq.

Pendapat Raziq tentang terpisahnya agama dan negara, diikuti jejaknya oleh Dr. Faraj Faudah, Dr. Wahid Raf'at, Dr. Fuad Zakaria, Dr. Luis Auwadh, Ustadz Syibli al Isami, dan lain-lain.[14] Kalangan intelektual-intelektual itu pada intinya menyerukan dua pilihan negara sekularisme atau negara kaum agamawan. Karena itu, Qaradhawi mengkritik keras ajakan komunitas

---

[13] Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam (terj. Al-Islam wa Ushul al-Hukm)*, Pustaka, 1985, hal 28-29.

[14] Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Negara*, Robbani Press, 1997, hal 65-67.

"intelektual" sekuler itu. Qaradhawi menegaskan kaum intelektual itu telah berbohong kepada masyarakat dan para dai Islam. Para dai itu, menuntut adanya negara islami bukan negara kaum agamawan. Karena ada perbedaan besar antara negara kaum agamawan (teokrasi)--sebagaimana Barat Kristen pada abad pertengahan--dengan negara yang islami.

Menurut Qaradhawi, negara Islam adalah negara madani yang ditegakkan berdasarkan pemilihan, baiat, dan musyawarah. Kepala negara bertanggung jawab di hadapan rakyatnya. Setiap individu masyarakat berhak untuk menasihati penguasa, menyuruhnya berbuat makruf dan melarangnya berbuat mungkar. "Penguasa menurut pandangan Islam terikat oleh ketentuan-ketentuan, nilai-nilai, dan hukum-hukum syariat," kata Qaradhawi. Penguasa tidak bisa seenaknya membuat hukum sendiri, berfoya-foya, otoriter, antikritik dan lain-lain sebagaimana yang terjadi pada negara teokrasi. "Setiap pribadi muslim dan muslimah boleh menentang bila disuruh penguasa untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan syariat Allah," jelasnya.

Karena ada perbedaan mendasar antara negara teokrasi dengan negara Islam, maka Abul A'la al-Maududi menyebut istilah negara Islam dengan negara teo-demokrasi.[15] Menurut Maududi, bentuk pemerintahan Islam sangat berbeda dengan teokrasi di Eropa dulu. "Tempat terjadinya pengalaman pahit karena adanya kelompok pendeta, yaitu suatu kelompok masyarakat khusus, yang melakukan dominasi tak terhingga dan menegakkan hukum-hukumnya sendiri atas nama Tuhan, dan pada akhirnya memaksakan keilahian dan ketuhanan mereka sendiri atas rakyat. Sistem pemerintahan semacam ini justru lebh bersifat *syaitaniyah (satanic)* daripada Ilahiyah (*divine*)," jelas Maududi.

Sementara itu, Qaradhawi menyebut negara Islam sebagai Negara Madani. Akhirnya, Qaradhawi mempertanyakan kelompok Islam yang memisahkan agama dengan politik/negara itu dengan menyatakan, "Wahai saudara, bila Islam tidak

---

[15] Abul Ala al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, 1990, hal 160.

menyentuh masalah politik, sosial, ekonomi, pengetahuan umum, lalu apa yang disentuh Islam itu?"

E. Muhammad Natsir Bukan Islam Liberal

Kekacauan buku Kurzman juga tampak dengan dimasukkannya karya Muhammad Natsir (1908-1993), sebagai bagian dari Islam Liberal. Di buku itu Kurzman menyatakan bahwa Natsir mendorong kaum muslimin Indonesia untuk menerima negara sekuler meskipun setelah PRRI, Natsir berubah sikapnya.

Pernyataan Kurzman soal Natsir ini perlu dipertanyakan. Perlu dicatat, meski Natsir menerima fakta–bahkan mensyukuri–proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, tapi perjuangan Natsir untuk meletakkan Islam sebagai landasan negara tidak pernah berhenti dan telah dimulai sejak tahun 1940-an. Yaitu, saat Natsir berpolemik keras dengan Soekarno di bulan Mei-Juli 1940 di majalah *Panji Islam* soal negara Islam.

Di majalah *Panji Islam* itu, Natsir beberapa kali menulis tanggapan terhadap Soekarno, di antaranya tentang masalah Turki. Artikel pertama Soekarno yang ditanggapi Natsir itu berjudul *"Apa Sebab Turki Memisah Agama dan Negara"*. Dengan mengutip beberapa pendapatnya dari Ali Abdur Raziq (*Al-Islam wa Ushul al-Hukm*), ayah Megawati ini memuji-muji tokoh sekularisme Turki Kemal Attaturk dan terus menyatakan, "...maka kemerdekaan Islam dari ikatan negara itu berarti juga kemerdekaan negara dari ikatan-ikatan yang jumud, yakni kemerdekaan negara dari hukum-hukum tradisi dan paham Islam kolot yang sebenarnya bertentangan dengan jiwanya Islam sejati, tetapi selalu menjadi rintangan nyata bagi gerak-geriknya negara ke arah kemajuan dan kemodernan. Islam dipisahkan dari negara agar Islam dapat menjadi merdeka dan negara pun menjadi merdeka, agar Islam berjalan sendiri, agar Islam dan negara pun subur pula."[16]

Natsir membantah pemikiran sekuler Soekarno itu dengan ungkapan yang menarik, "Kalau kita terangkan bahwa agama

---

[16] Ahmad Suhelmi, *Soekarno versus Natsir*, Darul Falah, Agustus 1999, hal.50

dan negara harus bersatu, maka terbayangkan sudah di mata seorang bahlul (*bloody fool*) duduk di atas singgasana, dikelilingi oleh 'haremnya' menonton tari 'dayang-dayang.' Terbayang olehnya yang duduk mengepalai 'kementerian kerajaan' beberapa orang tua bangka memegang hoga. Sebab, memang begitulah gambaran 'pemerintahan Islam' yang digambarkan dalam kitab-kitab Eropa yang mereka baca dan diterangkan oleh guru-guru bangsa Barat selama ini. Umumnya (kecuali amat sedikit) bagi orang Eropa, Khalifah=Harem; Islam=Poligami."

Dalam karya tahun 1955 yang dikutip Kurzman itu, Natsir sebenarnya menyerukan agar umat Islam mensyukuri dan menerima kemerdekaan RI ini. "Ada banyak kekurangan di Republik kita ini dan kebanyakan dari kekurangan itu adalah keterbatasannya. Kita banyak menemukan ketidakpuasan. Namun demikian, dengan seluruh kekurangan yang ada padanya, kita mesti menerima Republik ini dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, karena dalam ajaran Islam, berterima kasih atas sebuah rahmat adalah kewajiban," kata pendiri Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII) ini.

Konteks syukur ini sebenarnya lebih jelas bila dibaca artikel Natsir lain yang berjudul *Tanpa Toleransi Takkan Ada Kerukunan*.[17] Di artikel singkat yang ditulis Juli 1989 itu, ia menyatakan, "Tetapi ada peristiwa penting, berkaitan dengan proklamasi itu, yang oleh orang, biasanya tidak disebut-sebut. Yaitu peristiwa 18 Agustus 1945. Peristiwa ultimatum terhadap Republik Indonesia yang baru saja diproklamirkan itu. Datang seorang utusan dari Indonesia bagian Timur, melalui komandan tentara Jepang yang waktu itu masih berwenang di Jakarta. Utusan tersebut menyampaikan kepada Dwi Tunggal Bung Karno dan Bung Hatta satu pesan. Katanya dari umat Kristen di Indonesia bagian Timur..." Natsir melanjutkan dengan kata-kata yang lebih tegas,

"Hari 17 Agustus adalah Hari Proklamasi, hari raya kita. Hari raya 18 Agustus adalah hari ultimatum dari umat Kristen

---

[17] Lukman Hakim, *Fakta dan Data: Usaha-Usaha Kristenisasi di Indonesia*, Majalah *Media Dakwah*, 1991.hal. 44-45

Indonesia bagian Timur. Kedua peristiwa itu peristiwa sejarah. Kalau yang pertama kita rayakan, yang kedua sekurang-kurangnya jangan dilupakan. Menyambut hari proklamasi 17 Agustus kita bertahmid. Menyambut hari besoknya kita beristighfar. Insya Allah, umat Islam tidak akan lupa."

Keteguhan Natsir dalam memperjuangkan "ide-ide kaum revivalis", semakin jelas tahun 50-an. Ketika berpidato di depan Majelis Konstituante (1959), Natsir jelas-jelas ingin agar Islam menjadi falsafah negara. Sebuah ide besar yang sangat bertentangan dengan ideologi kaum Islam Liberal. Kata Mohammad Natsir dalam Majelis Konstituante,

"Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada Saudara-Saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang Saudara maksud ada terdapat di dalam Islam. Bukan sebagai 'pure concepts' yang steril, tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai falsafah negara, Saudara-Saudara pembela Pancasila sedikit pun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu 'state philosophy' yang hidup berjiwa, berisi tegas, dan mengandung kekuatan. Tak ada satu pun dari lima sila yang terumus dalam Pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila Saudara-Saudara menerima Islam sebagai dasar negara. Dalam Islam terdapat kaidah-kaidah yang tentu-tentu, di mana 'pure concepts' dari sila yang lima itu mendapat substansi yang riil, mendapat jiwa dan roh penggerak."[18]

F. Tokoh-Tokoh Islam Liberal

Ali Abdul Raziq (1866-1966) tampaknya adalah tokoh pertama yang merupakan rujukan kaum Islam Liberal. Bila Raziq dikenal hanya lewat karya tulisannya, maka Fazlur Rahman bisa kita sebut sebagai tokoh pertama Islam Liberal yang melakukan aksi gerakan, selain juga tulisan-tulisan.

---

[18] Endang Saifuddin Anshari, Piagam Jakarta, Gema Insani Press, 1997.hal. 83-84

Rahman (1919-1988) dilahirkan di Indo-Pakistan (sebelum terpecah dengan India). Ketika mulai dewasa, Rahman sempat berkenalan dengan Maududi. Tapi, ia merasa tak cocok dengan gerakan Jamaat Islami yang dirintis oleh Maududi. Akhirnya, karena tidak puas dengan suasana keislaman di Pakistan, Rahman lari ke Barat. Bibit-bibit liberalnya makin terasah ketika ia melanjutkan studi Islam ke Barat, yaitu di Universitas Oxford, Inggris (1946). Tahun 1950, Rahman berhasil merampungkan studi doktoralnya di Oxford dengan sebuah disertasi berjudul tentang Ibnu Sina.[19] Beberapa tahun kemudian Rahman mengabdikan dirinya untuk mengajar di Durham University Inggris, Mc Gill University, Kanada dan lain-lain.

Awal tahun 1960-an Rahman kembali ke Pakistan. Tahun 1962, Rahman ditunjuk pemerintah Pakistan sebagai Direktur Lembaga Riset Islam, setelah sebelumnya menjadi staf di negara tersebut. Di situ Rahman menuangkan pikiran-pikiran liberalnya di Jurnal Islamic Studies yang berbahasa Inggris dan *Jurnal Fikru Nazhr* berbahasa Urdu. Selain menerbitkan jurnal, Rahman juga mengirim staf-stafnya ke Universitas-Universitas Barat (sebagian ke Timur). Tahun 1964, Rahman juga mendapat jabatan ganda sebagai Dewan Penasihat Ideologi Islam Pemerintah Pakistan (Presiden Ayyub Khan).

Mendapat jabatan pemerintahan yang bergengsi itu, Rahman mulai agresif untuk menyerang hukum-hukum Islam yang *"qath'i"*. Rahman misalnya, menentang dalil-dalil kebolehan poligami, hak cerai laki-laki, mendukung keluarga berencana (KB), dan menurutnya, bunga bank kecil halal, bunga bank berlipat ganda haram.

Pendapat-pendapat Rahman yang aneh ini, akhirnya mendapat serangan-serangan tajam dari para ulama Islam Pakistan. Tapi, Rahman tidak kapok. Ia juga menyerang pemimpin Jamaat Islami, Abul A'la al-Maududi, yang disebutnya sebagai kaum neofundamentalis dan neorevivalis yang punya pendapat keras dan kaku. "Doktrin negara Islam yang paling keras dan kaku

---

[19] Tentang kehidupan dan karya-karya Fazlur Rahman ini bisa dilihat di buku Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Juni 1990.

adalah yang diformulasikan oleh Maududi dalam beberapa pamfletnya dan dalam jurnalnya *Tarjuman Al-Qur`an*. Menurutnya, Islam merupakan suatu sistem monolitik hingga setiap rincian kehidupan orang beriman telah ditentukan prinsip-prinsip dasar," kata ilmuwan Islam lulusan Amerika ini.

Mendapat serangan-serangan tajam dari ulama-ulama Islam Pakistan, Fazlur Rahman tidak tahan dan akhirnya "lari" kembali ke Amerika (1970). Kemudian di Chicago ia diberikan jabatan sebagai Guru Besar Kajian Islam di Department of Near Eastern Languages and Civilization, University of Chicago. Ahmad Syafii Maarif (sekarang Ketua PP Muhammadiyah), memuji kepindahan Rahman ini,

> *"Bila bumi muslim belum 'peka' terhadap imbauan-imbauannya (yakni Rahman –pen), maka bumi yang lain, yang juga bumi Allah, telah menampungnya, dan dari sanalah ia menyusun dan merumuskan pemikiran-pemikirannya tentang Islam sejak tahun 1970. Dan ke sanalah pula beberapa mahasiswa muslim dari berbagai negeri muslim belajar Islam dengannya."*[20]

Syafii Maarif adalah salah satu murid Rahman, selain Nurcholish Madjid, dan lain-lain. Entah ada utang budi menjadi mahasiswanya selama empat tahun atau ada hal yang lain, Syafii memuji Rahman setinggi-tingginya.

> "Rahman adalah seorang sarjana (scholar) muslim kaliber dunia. Pada dirinya berkumpul ilmu seorang alim yang alim dan ilmu seorang orientalis yang beken. Mutu kesarjanaannya ditandai oleh cara berpikirnya yang analitis, sistematis, komunikatif, serius, jelas, dan berani dalam mencari pemecahan terhadap masalah Islam dan umat."

Cara berpikir Rahman soal Islam ini, kini tampaknya berpengaruh besar terhadap murid-muridnya dan sebagian mahasiswa/dosen IAIN. Keterpengaruhan yang besar institusi Islam ke pemikiran Rahman ini, mungkin di samping Rahman aktif memberikan advis ke IAIN, juga banyak mahasiswanya yang

---

[20] *Ibid*, hal.105

kini menjadi dosen IAIN. Tahun 1985, Rahman berkunjung ke Indonesia Selain memberikan advis-advis yang penting ke IAIN, ia juga memberikan ceramah-ceramah "pembaharuannya". Bahkan, tak lupa, dalam sebuah wawancara dengan majalah *Tempo* (24 Agustus 1985), ia menyerang hukum Islam yang jelas-jelas *qath'i*. Yakni, tentang hukum potong tangan. Ia menyatakan, "Sangat mengerikan...merupakan tradisi yang lahir di Arab Saudi sebelum adanya Islam. Jadi bukan hukum Islam."

Selain Rahman, di Universitas Chicago, para mahasiswa juga dididik oleh ilmuwan politik beragama Yahudi yang bernama Leonard Binder. Rahman dan Binder seringkali bersama-sama mengadakan proyek penelitian, di antaranya penelitian tentang "Islam dan Perubahan Sosial". Riset yang dibiayai oleh Ford Foundation itu, melibatkan puluhan ahli dan meneliti lima masalah pokok. Pertama, pendidikan agama dan perubahan peran ulama dalam Islam. Kedua, syariat dan kemajuan ekonomi. Ketiga, keluarga dalam masyarakat dan hukum Islam masa kini. Keempat, Islam dan masalah legalitas politik. Kelima, perubahan konsepsi-konsepsi stratifikasi di dalam masyarakat muslim masa kini. Negeri-negeri muslim yang dipilih untuk riset itu adalah Indonesia, Pakistan, Mesir, Turki, Iran, dan Maroko. Hasil riset ini kemudian dibukukan oleh Rahman dalam karyanya *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (1982).[21]

Leonard Binder, teman Rahman, juga menyusun buku dari penelitian itu dengan judul *Islamic Liberalism* tahun 1988.[22] Di dalam buku itu Binder mengkritik pendapat-pendapat Maududi, Sayyid Quthb, dengan gaya "berputar-putar." Di samping ia juga mengkritik pendapat Dhiyauddin ar-Rais yang mengkritik buku Ali Abdul Raziq. Binder menyebut kritikan ke Abdul Raziq sebagai kritik yang penuh kegusaran dan emosional.[23] Binder mungkin termasuk intelektual Barat yang pertama-tama, di

---

[21] *Ibid*, hal. 107.

[22] Buku itu kini diterjemahkan dengan judul *Islam Liberal*, Pustaka Pelajar, November 2001.

[23] Leonard Binder, *Islam Liberal*, hal. 221.

samping Rahman yang "muslim", menghadapkan Islam liberal dan Islam fundamentalis.[24]

Pertarungan antara Islam fundamentalis dan Islam liberal ini, menurut Binder, mungkin akan dimenangkan oleh Islam fundamentalis. Karena Islam Liberal itu baru diminati oleh kalangan yang berpendidikan Barat, elite birokrasi modern, elite akademisi, praktisi hukum, dan kaum borjuis perkotaan. Meski demikian, kata Binder, fundamentalisme ini masih merupakan orientasi minoritas dan sulit untuk menggusur atau menguasai Islam tradisional kaum Mullah, kaum terdidik, dan majelis taklim.

Dalam buku yang tebalnya 524 halaman itu (terjemahan – pen), Binder akhirnya menyatakan secara terus terang keprihatin-annya terhadap Islam fundamentalis yang minoritas. Kata Binder,

> "Fundamentalisme Islam disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya revolusi Islam di Iran, terorisme domestik di Turki, dan terbunuhnya Anwar Sadat. Karena keprihatinan kami terhadap kecenderungan Islam yang sedang kuat-kuatnya ini, dan kecemasan kami mengenai di mana peristiwa selanjutnya akan meletus, kami sampai lupa bahwa fundamentalisme ini masih merupakan orientasi minoritas."

Liberalisme agama, menurut Binder, adalah memperlakukan agama sebagai pendapat. Karenanya, mentolelir keaneka-ragaman dalam bidang yang justru diyakini hitam putih oleh kaum tradisionalis. Menurutnya, agama dan politik boleh jadi tidak tergolong sebagai dua realitas hidup yang berlainan, namun keduanya tidak bisa dipahami secara persis. "Agama dapat diserap melalui nurani, sedangkan politik dipahami menggunakan nalar. Dengan sudut pandang yang demikianlah maka apa pun yang tidak bisa dinalar akan disisihkan dari wacana politik rasional," jelas Guru Besar Universitas Chicago ini.

Tapi, menurutnya, pemisahan agama dan politik ini belum berjalan mulus dan di banyak tempat keduanya masih tetap menyatu. Dalam bab pendahuluannya, Binder menyatakan, "Lagi

---

[24] Dalam bukunya itu, yang dimaksudkan Islam fundamentalis terutama adalah Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Islami. Penghadapan antara Islam liberal dan Islam fundamentalis oleh Binder ini, mungkin yang menjadi inspirasi terbentuknya JIL Utan Kayu.

pula, prinsip pemisahan gereja dari pemerintahan baru diterima sebatas kata-kata, belum dalam prakteknya oleh Kristen Barat."

Dalam bukunya itu, tampak ia juga mengakui bahwa sekularisme sebenarnya telah gagal di Timur Tengah (dunia Islam). Karena itu, kini ditawarkan liberalisme Islam (Islam liberal) untuk memperkuat liberalisme politik. "Buku ini mempertanyakan mungkin tidaknya liberalisme Islam diwujudkan dan menyimpulkan bahwa tanpa liberalisme Islam yang kuat, liberalisme politik tidak akan berhasil di Timur Tengah, terlepas dari munculnya negara-negara borjuis." Dengan kata lain, sebenarnya Binder ingin menyatakan bila sebuah negara ingin "politik liberalnya" kuat, maka Islam Liberal harus lebih dulu diperkuat.

Tokoh-tokoh Islam Liberal lainnya yang cukup berpengaruh di Dunia Islam, khususnya di Mesir adalah Dr. Faraj Faudah/ Fuda (1945-1993), Dr. Muhammad Khalafullah (lahir 1916), dan Dr. Fuad Zakaria. Faudah menjadi terkenal karena ia terbunuh oleh seseorang yang "tak begitu dikenal" (tersangka pembunuh Faudah akhirnya tertangkap dan diajukan ke pengadilan Mesir).

Faudah bersama-sama Dr. Muhammad Khalafullah--mewakili kelompok sekuler di Mesir--pernah ditampilkan dalam sebuah forum debat dengan kelompok Islam, tahun 1992. Saat itu kelompok Islam diwakili oleh Muhammad al-Ghazali, Muhammad Ma'mun al-Hudhaibi, dan Dr. Muhammad Imarah. Sebelumnya tahun 1987, pernah juga diadakan debat yang serupa, di mana pihak sekuler diwakili oleh Dr. Fuad Zakaria dan pihak Islam oleh Muhammad al-Ghazali dan Dr. Yusuf al-Qaradhawi.[25]

Kasus Faraj Faudah menarik perhatian Barat dan kalangan Islam liberal (sekuler), karena terbunuh setelah peristiwa "debat besar" itu. Yaitu enam bulan setelah acara debat, tepatnya pada April 1993, di Mesir. Syekh Muhammad al-Ghazali yang menjadi *teman debat* Faudah didatangkan oleh pengadilan sebagai saksi ahli atas terbunuhnya tokoh sekuler itu. Kesaksian al-Ghazali ini kemudian ramai di media massa Mesir, ada yang pro dan kontra. Hal itu karena ternyata di pengadilan al-Ghazali menyata-

---

[25] Lihat Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Liberal*, Pustaka Al Kautsar, 2002, hal. 20

kan tegas bahwa orang yang mengaku muslim tapi menolak terang-terangan pelaksanaan syariat Islam dan mengajak untuk mengganti syariat Allah dengan syariat thaghut, maka orang itu telah keluar dari agama Islam alias murtad.

Berikut ini cuplikan beberapa penggal pertanyaan hakim dan pembela dengan Muhammad al-Ghazali di pengadilan.

Pertanyaan : "Apa hukuman yang menimpa orang yang mengajak untuk mengganti hukum Allah dengan hukum positif (*syariat wadh'iyah*) di mana hukum positif itulah yang berhak menvonis segala sesuatunya dengan halal atau haram?"

Jawaban : "Secara keyakinan orang itu bukan muslim. Allah pernah berfirman tentang orang seperti ini, 'Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Mereka hendak berhukum kepada thaghut, padahal mereka telah diperintah mengingkari thaghut itu.'" (an-Nisaa': 60)

Pertanyaan : "Apakah tindakan semacam itu bisa dikatakan kekufuran hingga pelakunya praktis telah keluar dari agama?"

Jawaban : "Ya, sebab siapa yang menolak hukum yang telah diturunkan oleh Allah karena ia mengingkarinya atau mengejeknya jelas ia keluar dari agama."

Pertanyaan : "Adakah orang-orang yang melakukan tindakan atau ucapan kekufuran tersebut telah mengganti agamanya dan meninggalkan jamaah?"

Jawaban : "Ya, orangnya dianggap telah murtad dari agama."

Pertanyaan : "Anda telah mengatakan bahwa kadang orang yang mengucapkan kata kufur memiliki alasan tersendiri (syubhat) atau karena dalil belum sampai kepadanya. Apa yang akan terjadi bila dalil itu telah sampai kepadanya?"

Jawaban : "Ini sama dengan kekafiran Firaun. Ia meng-

ingkari keberadaan Allah dan durhaka kepada Musa. Ini adalah kemurtadan yang nyata-nyata."

Pertanyaan : "Siapa yang berhak memberlakukan hadd (hukum) atas orang murtad yang wajib dibunuh itu?"

Jawaban : "Sebenarnya pihak kehakiman yang berwenang dalam hal ini. Mereka yang berhak menjalankan hukuman dan qishash. Hak seperti ini tidak berlaku bagi individu-individu agar kekacauan tidak terjadi"

Pertanyaan : "Apa yang akan terjadi jika undang-undang yang berlaku tidak menghukum orang yang murtad dan karenanya pengadilan tidak menjatuhkan vonis?"

Jawaban : "Ini kesalahan pengadilan dan orang-orang yang bertanggung jawab terhadapnya. Undang-undangnya juga salah."

Pertanyaan : "Bagaimana jika undang-undang yang berlaku tidak menghukum orang murtad. Adakah hadd itu tetap seperti semula, dalam artian bahwa ia harus berlaku?"

Jawaban : "Tidak ada seorang pun yang berhak menghapus hukum Allah. Hadd harus berlaku."

Pertanyaan : "Bagaimana bila hadd itu dilakukan seseorang dari umat Islam. Adakah pelaksana itu bisa dianggap telah melakukan tindakan kriminal atau merongrong kekuasaan?"

Jawaban : "Ia dianggap merongrong kekuasaan, tapi sekaligus ia telah melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh kekuasaan."

Pertanyaan : "Apakah orang yang merongrong kekuasaan tersebut, dengan asumsi bahwa kekuasaan memberlakukan hadd ada pada penguasa, adakah orang itu mendapat hukuman dalam pandangan Islam?"

Jawaban : "Saya tidak pernah tahu bahwa orang seperti itu akan mendapat hukuman dalam ajaran Islam."[26]

---

[26] Teks selengkapnya tentang tanya jawab di pengadilan itu bisa dilihat di buku Yusuf Qaradhawi, *Syekh Muhammad Al-Ghazali Yang Saya Kenal*, Robbani Press, Februari 1999.hal. 390-397

Menurut Qaradhawi, kesaksian al-Ghazali itu menimbulkan kegemparan, mengingat kedudukan al-Ghazali yang tinggi dan dikenal sebagai tokoh Islam di Mesir, dunia Arab, dan dunia Islam. Seorang menteri Mesir yang bertanggung jawab atas kasus tersebut, mendatangi rumah al-Ghazali untuk menekannya agar ia memberikan penjelasan atau menarik kesaksiannya. Tapi, al-Ghazali menolaknya mentah-mentah, meski ia didesak berulangkali. Al-Ghazali akhirnya menyatakan, "Saya tidak menulis artikel di surat kabar, atau menyampaikan khutbah di sebuah masjid, atau ceramah di depan sebuah perkumpulan. Saya ini dipanggil untuk menyampaikan kesaksian di depan pengadilan. Saya lalu bersaksi dengan sesuatu yang saya yakini benar sesuai dengan ajaran agama Allah. Kalau dalam kesaksian itu memang ada yang belum jelas, maka pengadilan silakan memanggilku kembali untuk menjelaskan kembali sikapku."

Kesaksian al-Ghazali ini ternyata tidak sendiri. Pengadilan juga memanggil saksi ahli Prof. Dr. Mahmud Mazru'ah, Kepala Jurusan Akidah dan Agama, Fakultas Ushuluddin, Universitas Al-Azhar. Keterangan Mahmud senada dengan al-Ghazali bahkan lebih keras dan tegas. Dalam kesaksiannya, ia menyatakan Faraj Faudah telah murtad secara terang-terangan. Di depan pengadilan, Mahmud memperlihatkan artikel-artikel dan buku-buku yang mendukung pernyataannya itu.[27]

Selain Faraj Faudah cs, juga dikenal penganut paham Islam Liberal, yaitu Nashr Abu Zeid (*difasakh* dengan istrinya), Hassan Hanafi, Abdullahi Ahmed An-Na'im, Mohammad Arkoun, Mohammad Abed al-Jabiri dan lain-lain. Sedangkan, dari kalangan wanita (tokoh-tokoh feminis) antara lain Fatimah Mernissi dan Rif'at Hassan.

G. Peran Harun Nasution dan Nurcholish Madjid

Harun Nasution dan Nurcholish Madjid bisa dikatakan "pioner" dalam mengembangkan Islam Liberal di Indonesia. Bila Harun berhasil mengembangkan sayap gerakannya ke IAIN-

---

[27] *Ibid*, hal.398.

IAIN seluruh Indonesia, maka Nurcholish mempromosikan gagasan kontroversialnya ke masyarakat--khususnya kelas menengah ke atas--lewat Paramadinanya, baik lewat paket kajian-kajian Paramadina, kajian bulanan, Universitas Paramadina Mulya, atau buku-buku Paramadina.

Prof. Dr. Harun Nasution, lulusan Mc Gill University Kanada, berhasil mempengaruhi institusi lembaga Islam itu, setelah pada tahun 1973, bukunya *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, ditetapkan sebagai buku utama mahasiswa IAIN se-Indonesia. Buku yang diterbitkan pertama kali tahun 1974 itu, dijadikan bahan bacaan pokok untuk mata kuliah "Pengantar Ilmu Agama Islam", melalui Rapat Kerja Rektor IAIN se-Indonesia di Ciumbuluit, Bandung, Agustus 1973.[28]

Dalam bukunya itu, Harun sudah mulai "menyerempet-nyerempet" ke persamaan agama. Dalam Bab I : "Agama dan Pengertian Agama dalam Berbagai Bentuknya", ia menyatakan--setelah mengutip sebagian ayat-ayat Al-Qur`an--, "Dari ayat-ayat di atas, jelaslah kelihatan bahwa agama-agama Yahudi, Kristen, dan Islam adalah satu asal. Sejarah juga menunjukkan bahwa ketiga agama itu memang mempunyai asal yang satu. Tetapi, perkembangan masing-masing dalam sejarah mengambil jurusan yang berlainan, sehingga timbullah perbedaan di antara ketiga-tiganya."

Anehnya, dalam bukunya itu--khususnya Bab I--Harun tidak mengungkapkan adanya penyelewengan-penyelewengan agama Yahudi dan Nasrani, sehingga si pembaca menjadi kurang yakin akan keunggulan agama Islam. Harun hanya menjelaskan secara datar tentang pengertian agama, jalan-jalan ke Tuhan dan agama monoteisme dan politeisme. Memang Harun mengungkapkan dalam satu kalimat bahwa Nasrani tauhidnya sudah tidak murni lagi dengan adanya konsep trinitas, tapi yang gawat malahan Harun menyatakan bahwa kemurnian tauhid dipelihara oleh Islam dan Yahudi. Kata Harun, "Tetapi dalam pada

---

[28] Lihat sambutan buku Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (2 jilid), UI Press, 1986.

itu kemurnian tauhid dipelihara hanya oleh Islam dan Yahudi. Dalam Islam satu dari kedua syahadatnya menegaskan bahwa 'Tiada Tuhan selain Allah'. Dan dalam agama Yahudi, Syema atau syahadatnya mengatakan, 'Dengarlah Israel, Tuhan kita satu'."

Darimana Harun menyatakan bahwa Yahudi murni tauhidnya? Dalam berbagai ayat Al-Qur`an dijelaskan dengan gamblang bahwa hanya Islam yang benar ketauhidannya. Yahudi atau Nasrani telah sesat dan menyimpang. Al-Qur`an menyatakan,

"Orang-orang Yahudi berkata bahwa Uzair itu putra Allah dan orang Nasrani berkata bahwa Almasih itu putra Allah. Demikian itulah ucapan mereka meniru perkataan orang-orang kafir terdahulu. Dilaknati Allahlah mereka. Bagaimana mereka sampai berpaling?" **(at-Taubah: 30)**

Selain itu, ditegaskan dalam Al-Qur`an tentang laknat Allah terhadap kaum Yahudi karena membunuhi para nabi, hanya mengambil sebagian ayat yang menyenangkan dirinya, angkuh dan lain-lain (lihat al-Baqarah: 87-90).

Kengawuran Harun juga terlihat ketika ia memaparkan tentang tema aspek pembaharuan dalam Islam. Paham pembaharuan atau modernisasi, menurutnya, mempunyai pengaruh yang besar di Barat dan segera memasuki lapangan agama yang di Barat dipandang sebagai penghalang bagi kemajuan.

> "Modernisasi dalam hidup keagamaan di Barat mempunyai tujuan untuk menyesuaikan ajaran-ajaran yang terdapat dalam agama Katolik dan Protestan dengan ilmu pengetahuan dan falsafat modern. Aliran ini akhirnya membawa sekularisme di Barat. Pembaruan dalam Islam mempunyai tujuan yang sama. Tetapi dalam pada itu perlu diingat bahwa dalam Islam ada ajaran-ajaran yang bersifat mutlak yang tak dapat diubah-ubah. Yang dapat diubah hanyalah ajaran-ajaran yang tidak bersifat mutlak, yaitu penafsiran atau interpretasi dari ajaran-ajaran yang bersifat mutlak itu."

Harun jelas menyebutkan bahwa pembaharuan dalam Islam mempunyai tujuan yang sama dengan Barat. Dengan kata lain, diperlukan sekularisme (ini akan tampak dalam uraian Harun selanjutnya siapa tokoh-tokoh yang masuk dalam golongan

pembaharu). Meski kemudian ia membungkus kata-katanya bahwa yang dapat diubah adalah ajaran-ajaran yang tidak bersifat mutlak, tapi tetap tanpa penguraian. Di bagian penutup Harun menjelaskan, "Sebagaimana dilihat dalam aspek hukum, ajaran dasar itu jumlahnya sedikit sekali...dengan kata lain kata ajaran dasar yang bersifat absolut dan dogmatis dalam Islam sedikit jumlahnya."

Karena itu, tidak heran bila Harun kemudian memuji-muji tokoh-tokoh yang mengabaikan syariat seperti Rif'at-Tahtawi (1801-1873 M), Qasim Amin dan lain-lain. Tahtawi, misalnya dianggap memajukan Islam karena pendapatnya bahwa syariat harus disesuaikan dengan perkembangan modern, ulama harus mempelajari filsafat dan lain-lain. Sedangkan, Qasim Amin dipuji Harun karena pembelaannya terhadap gerakan feminisme, seperti buku-buku karangan Qasim yang berjudul *Emansipasi Wanita, Tahrir al-Mar'ah* 'Pembebasan Wanita' dan *al-Mar'ah al-Jadiidah* 'Wanita Modern'.

Dukungan Harun terhadap sekularisme terlihat ketika ia tidak mengecam sama sekali pendapat Ali Abdul Raziq (murid Mohammad Abduh) yang menyatakan sistem khilafah tidak ada dalam Islam. Kata Harun, "Juga Syekh Ali Abdul Raziq yang berpendapat bahwa sistem kekhalifahan tidak ada dalam Al-Qur`an dan oleh karena itu kalau dihapuskan oleh Mustafa Kemal, maka perbuatan itu tidak bertentangan dengan Islam."[29]

Harun juga membolak-balik sejarah Islam dengan ngawur. Sultan Abdul Hamid, khalifah Islam di Turki yang dipuji oleh para ulama Islam karena berpegang teguh pada syariat Islam dan tidak mau menyerahkan Palestina kepada Yahudi,[30] dijuluki Harun sebagai raja yang absolut. Karena itu, tidak heran apabila kemudian Harun menganggap Kemal Attaturk yang menghancurkan kekhilafahan Islam--bekerja sama Inggris dan Barat

---

[29] Harun Nasution, Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya, (Jilid II), UI Press 1986. hal. 101

[30] Lihat buku: Prof. Dr. Ali Muhammad Jarisyah dan M Syarif Az Zaibaq, *Taktik Strategi Musuh-Musuh Islam*, Pustaka Mantiq, Juni 1993 dan Dr. Abdullah Azzam, *Kehancuran Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Pustaka Al Alaq, 2001.

lainnya--sebagai salah satu tokoh gerakan pembaharuan. "Gerakan pembaharuan selanjutnya yang diadakan di bawah pimpinan Kemal Attaturk membawa kepada sekularisme dalam arti pemisahan agama dari negara di Turki modern."

Nurcholish Madjid. Tokoh Islam Liberal atau liberalisme Islam terkemuka di Indonesia tidak lain adalah Prof. Dr. Nurcholish Madjid. Doktor dari Chicago University ini, memelopori gerakan sekularisasi di Indonesia, sejak tahun 1970-an. Tonggak pembaharuannya diungkapkan ketika ia ceramah Halal bi Halal di Jakarta, pada 3 Januari 1970. Dalam acara yang dihadiri oleh aktivis-aktivis penerus Masyumi itu, HMI, PII, GPI, dan Persami (Pesatuan Sarjana Muslim Indonesia) itu, Nurcholish menyampaikan makalahnya yang berjudul *"Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat"*.[31]

Makalah Nurcholish itu sempat "menggegerkan" aktivis-aktivis Islam saat itu. Karena di situ ia mengajak ke arah sekularisasi dan liberalisasi pemikiran Islam. Nurcholish juga memperkenalkan sekularisasi yang menurutnya berbeda dengan sekularisme. Sebuah konsep yang tidak jelas maksudnya. "Sekularisasi tidaklah dimaksudkan sebagai penerapan sekularisme dan mengubah kaum muslimin menjadi sekularis. Tetapi dimaksudkan untuk menduniawikan nilai-nilai yang sudah semestinya bersifat duniawi, dan melepaskan umat Islam dari kecenderungan untuk mengukhrowikannya. Dengan demikian, kesediaan mental untuk selalu menguji dan menguji kembali kebenaran suatu nilai di hadapan kenyataan-kenyataan material, moral ataupun historis, menjadi sifat kaum muslimin," kata Nurcholish.[32] Selain itu ia juga memperkenalkan konsep *Islam Yes, Partai Islam No.*

Menurut Greg Barton, sebelum Nurcholish melontarkan gagasan pembaruannya, di Yogyakarta beberapa anak muda kerapkali diskusi soal itu. Sekitar tahun 1967, Ahmad Wahib, Djohan Effendi, Dawam Rahardjo sering mengadakan diskusi dan pertemuan di rumah HA Mukti Ali.

---

[31] Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, 1999. hal. 53-54

[32] Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, 1999.

Nurcholish menyelesaikan kuliah S1-nya di Fakultas Adab dengan skripsi berjudul *Al-Qur`an Arabiyun Lughatan wa Alamiyun Ma'nan* 'Al-Qur`an Secara Bahasa Adalah Bahasa Arab, Secara Makna Adalah Universal'. Tahun 1969, Nurcholish mendapatkan kesempatan untuk mengunjungi Amerika Serikat selama lima pekan. Beberapa pengamat, termasuk Ahmad Wahib, menyatakan bahwa kunjungan Nurcholish ke Amerika ini merupakan pengalaman penting. Bahkan, banyak kritisi yang menyatakan bahwa kunjungan Nurcholish ke AS itu adalah perubahan 180 derajat Nurcholish, yang tadinya anti-Amerika/Barat berubah dengan membabi buta menjadi pendirian yang pro-Amerika/Barat. Bahkan, menurut Barton, secara pribadi Nurcholish mula-mula mengakui bahwa pengalaman tersebut telah meninggalkan bekas mendalam dan kesan tidak terduga.

Kesan yang mendalam terhadap Amerika inilah tampaknya yang membuatnya sulit menolak ketika Fazlur Rahman dan Leonard Binder--keduanya Guru Besar Chicago University--menawarinya proyek penelitian di Amerika (1976). Proyek penelitian yang sebagian berbentuk seminar dan lokakarya itu, didanai oleh Ford Foundation, sebuah yayasan Amerika yang sampai kini masih bekerja sama dengan kegiatan-kegiatan Nurcholish (Paramadina).

Setelah penelitian di Chicago, kemudian Nurcholish ditawari melanjutkan studi Pascasarjana di Universitas Chicago (1978) dan sekaligus mengambil doktor di sana. Tahun 1984, ia lulus ujian doktornya dengan disertasi berjudul *Ibn Taymiya on Kalam and Falsafah: A Problem of Reason and Revelation in Islam* 'Ibnu Taimiyah dalam Ilmu Kalam dan Filsafat: Masalah Akal dan Wahyu dalam Islam'.

Laki-laki kelahiran Jombang, 17 Maret 1939 ini, makin menimbulkan kontroversi ketika ia menyampaikan pidato keagamaannya di TIM pada 21 Oktober 1992. Pidato yang makalahnya puluhan halaman itu, berjudul *"Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia"*. Isi pidato Nurcholish itu memang penuh sindiran dan kecaman yang keras kepada "bangkitnya fundamentalis" di Indonesia. Sehingga, dengan tanpa beban

ia menyamakan bahaya fundamentalis dengan narkotika. Bahkan menurut Nurcholish, fundamentalis lebih berbahaya dari narkotika. Cuplikan pidato yang menghebohkan itu adalah sebagai berikut,

> "Karena itu, bagaimana pun, kultus dan fundamentalisme hanyalah pelarian dalam keadaan tidak berdaya. Sebagai sesuatu yang hanya memberi hiburan ketenangan semu atau palliative, kultus dan fundamentalisme adalah sama berbahayanya dengan narkotika. Namun, narkotika menampilkan bahaya hanya melalui pribadi yang tidak memiliki kesadaran penuh ('teler'), baik secara perseorangan maupun kelompok (sehingga tidak akan menghasilkan sesuatu 'gerakan' sosial dengan suatu bentuk kedisiplinan keanggotaan para pengguna narkotika--bukan keanggotaan sindikat para penjualnya. Adapun kultus dan fundamentalisme dengan sendirinya melahirkan gerakan dengan disiplin yang tinggi. Maka, penyakit yang terakhir ini adalah jauh lebih berbahaya daripada yang pertama.... Sebagaimana mereka memandang narkotika dan alkoholisme sebagai ancaman kepada kelangsungan daya tahan bangsa, mereka juga berkeyakinan bahwa kultus dan fundamentalisme adalah ancaman-ancaman yang tidak kurang gawatnya."

Pidato di TIM tahun 1992 itu tentu saja menyakitkan banyak kaum muslimin Indonesia. Betapa tidak. Kutukan "fundamentalisme" tanpa disertai definisi yang jelas, pada akhirnya hanya berujung kepada proses "stigmatisasi" terhadap sebagian kalangan muslim yang berjuang menegakkan syariat Islam maupun melawan hegemoni imperialis Barat. Kecaman dan kutukan terhadap fundamentalisme agama, khususnya Islam, terus-menerus dilakukan oleh kalangan liberal. Kecaman itu berbarengan dengan gencarnya pihak Barat memojokkan gerakan-gerakan perjuangan Islam di berbagai penjuru dunia, pasca-Perang Dingin dan kalahnya musuh utama Barat, yaitu komunisme. (Masalah ini akan dibahas lebih lanjut dalam bab lain).

Yang jelas, sejak meluncurkan gagasan "sekularisasi" pada 3 Januari 1970, Nurcholish dijuluki sebagai "penarik gerbong"

kaum Pembaru oleh *Tempo*. Budhy Munawar Rachman mengelompokkan Nurcholish Madjid ke dalam golongan "neo-modernis Islam" bersama Utomo Dananjaya, Usep Fathudin, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Dawam Rahardjo, Adi Sasono, Harun Nasution, Jalaluddin Rahmat, Syafii Maarif, Amien Rais, dan Kuntowijoyo.

Kaum "neomodernis" mempunyai paradigma yang berbeda dengan kaum "modernis lama". Kaum "neomodernis" berusaha membangun visi Islam di masa modern, dengan sama sekali tak meninggalkan warisan intelektual Islam. Bahkan jika mungkin, mencari akar-akar Islam untuk mendapatkan kemodernan Islam itu sendiri. Sedangkan, kaum "modernis lama" lebih banyak bersifat apologetik terhadap modernitas.[33]

Karena begitu besar peran Nurcholish Madjid dalam proses liberalisasi Islam di Indonesia, maka masalah ini akan dibahas dalam bab berikutnya.

H. Liberalisme Kemal Attaturk

Bisa dikatakan, pada dasarnya, istilah "Islam progresif", "Islam Liberal", "Islam sekuler", "Islam reduksionis", "Islam akomodatif", dan sejenisnya sebenarnya merujuk pada "makhluk yang sama", yaitu tentang "Islam yang tunduk atau tersubordinasikan kepada Barat". Adalah menarik, dalam tulisannya di harian *Republika* (17-18 Juli 2001), yang berjudul *"Islam Liberal dan Masa Depannya"*, Komaruddin Hidayat menyatakan bahwa ekspresi pemikiran liberal dalam politik adalah menolak formula klasik, dengan contoh ekstremnya antara lain terlihat pada Ali Abdur Raziq dan Kemal Attaturk.

Komaruddin menulis,

> "Namun, kendati sangat apresiatif terhadap peradaban Barat, mereka tetap berpandangan bahwa kebebasan berpikir dan berekspresi tetap harus berpijak pada nilai-nilai islami.

---

[33] Budhy Munawar Rachman, *"Dari Tahapan Moral ke Periode Sejarah-Pemikiran Neomodernisme Islam di Indonesia"*, dalam buku *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, ed. Edy Effendy, 1999:hal 101.

Dengan kata lain, pemikiran liberal menekankan pada substansi kemanusiaan dan universalisme Islam, yang itu nantinya akan bergesekan dengan warisan pemikiran ortodoks yang sangat teguh pada komitmen terhadap simbol-simbol agama dan bercorak skripturalis. Di Indonesia, Soekarno dan Muhammad Hatta adalah contoh yang tidak bisa diabaikan. Karena itu Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya muslim, tidak menjadikan Islam sebagai dasar negara."

Dimasukkannya Kemal Attaturk dan Soekarno ke dalam barisan Islam Liberal semakin memperjelas sosok Islam Liberal, bahwa gerakan ini memang merupakan gerakan sekularisasi, yang merupakan rangkaian gerakan oleh Ali Abd Raziq, Kemal Attaturk, Soekarno, Nurcholish Madjid, dan Ulil Abshar Abdalla. Tentu dengan segala variannya masing-masing.

Untuk memperjelas, bisa disimak tindakan Kemal Attaturk di Turki saat ia berkuasa. Turki secara tegas menyebut dirinya sebagai negara sekuler. UUD Turki pasal 1 menegaskan, Turki adalah negara (1) Republik, (2) Nasionalis, (3) Kerakyatan, (4) Kenegaraan, (5) Sekularis, (6) Revolusioneris. Karena itulah, hal-hal yang dianggap membahayakan prinsip sekuler akan diserang.

Islam yang dipeluk oleh 99% rakyat Turki dianggap sebagai suatu ancaman paling potensial yang dapat menghancurkan prinsip sekuler tersebut. Apalagi, kenyataan menunjukkan bahwa Islam ternyata tidak pernah mati di Turki, meskipun segala macam cara telah dilakukan untuk "mensekulerkan" rakyat Turki. Bahasa Arab diganti bahasa Turki, lembaga pendidikan agama ditutup, wanita dan pria dipaksa berpakaian ala Barat, huruf Arab diganti huruf Latin, kalender Islam diganti dengan kalender Masehi, dan sebagainya. Pada Desember 1995, Partai Refah yang "berhaluan" Islam menang dalam pemilu, dengan meraih 21% suara.

Proses sekularisasi Turki secara resmi dimulai dengan proklamasi negara Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Mustafa Kemal terpilih sebagai presiden pertama. Ia lalu mengganti nama menjadi Kemal Attaturk (Bapak Bangsa Turki).

Attaturk ingin menjadikan negara Turki modern yang berdasarkan kebudayaan Barat. Setelah berkuasa, ia melakukan reformasi agama. Sejak awal, meskipun dilakukan dengan paksa, tidak semua keinginannya berhasil. Upaya untuk mengganti bacaan shalat dengan bahasa Turki gagal diwujudkan. Hanya azan untuk pertama kalinya secara resmi dikumandangkan dalam bahasa Turki pada bulan Januari 1932. Fakultas Teologi ditutup dan diganti dengan Institut Riset Islam pada tahun itu juga. Tahun 1935, libur mingguan hari Jumat diganti dengan libur mingguan mulai pukul 01.00 hari Sabtu sampai hari Senin pagi. Menurut Prof. Mukti Ali, rencana untuk mensekulerkan Turki sejak awal memang tidak sukses.[34]

Para pemimpin sekuler Turki modern selalu menerangkan bahwa reformasi yang mereka lakukan tidaklah ditujukan untuk melawan Islam, tetapi hanya ingin mengakhiri kekuasaan para ulama. Menempatkan Islam subordinasi terhadap negara juga menunjukkan kepercayaan yang mendalam dari orang-orang sekularis bahwa Islam bertanggung jawab terhadap kemunduran dan keterbelakangan bangsa Turki.

Jika reformasi agama tahun 1928 itu berhasil, maka akan lahirlah versi modern dari Islam yang didasarkan pada nasionalisme, filsafat, dan sains. Ia akan merupakan Islam lain di luar batas-batas Islam yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw.. Para reformis Turki menolak ciri universal Islam. Kesultanan atau kekhilafahan yang universal diganti dengan negara nasionalis Turki.

Pada mulanya, mereka juga bermaksud mengubah masjid menjadi gereja Islam modern, tetapi ternyata mustahil dilaksanakan, sebagaimana halnya usaha untuk menjadikan bahasa Turki sebagai bacaan shalat. Masyarakat menentang keras upaya tersebut. Yang kemudian berhasil adalah perubahan Aya Sofya (Hagia Sophia), gereja Byzantium, menjadi museum. Gereja ini telah dijadikan masjid oleh Sultan Muhammad II. "Sukses" sekularisasi lainnya adalah penggunaan bahasa Turki untuk azan tahun 1932. Azan versi Turki ini disiapkan oleh Himpunan

[34] Mukti Ali, *Islam dan Sekularisme di Turki Modern*, 1994:hal. 90.

Linguistik dan disiarkan oleh Kantor Kepresidenan Urusan Agama. Melodi azan versi Turki disetujui oleh Konservatori Musik Nasional, Ankara. Tahun 1933, keluar keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa azan dalam bahasa Arab merupakan pelanggaran.[35]

Gagasan sekularisme Attaturk dalam bidang kenegaraan pada dasarnya berupa pemisahan agama dari negara. Menurut Attaturk, apabila agama dipergunakan untuk memerintah masyarakat, ia senantiasa dipergunakan sebagai alat dalam tangan raja diktator untuk menghukum. Pemisahan agama dengan negara akan menyelamatkan bangsa dari malapetaka.

Pemisahan agama dari negara dimulai tahun 1928 dengan menghapus artikel 2 dari Konstitusi Turki yang menyebutkan bahwa agama negara adalah Islam. Sebelumnya, tahun 1924, Biro Syaikh Al Islam dihapuskan. Begitu juga Kementerian Syariat dan Mahkamah Syariat. Proses ini dimaksudkan untuk menggusur otoritas syariat dan meletakkan kedaulatan rakyat secara mutlak. Negara tidak ada lagi hubungannya dengan agama. Sembilan tahun kemudian, 1937, prinsip sekularisme dimasukkan ke dalam Konstitusi Turki, sehingga resmilah Turki menjadi negara republik sekuler.

Dalam soal perkawinan, hukum perkawinan tidak lagi dilakukan sesuai dengan Syariat Islam, tetapi dilakukan sesuai hukum sipil yang diadopsi dari Swiss (*Swiss civil code*). Wanita mendapat hak cerai sama dengan laki-laki. Poligami dilarang. Secara hukum, wanita muslimah mendapat hak untuk menikah dengan pria nonmuslim. Hak untuk pindah agama juga dijamin undang-undang. Menurut James A. Bill dan Carl Leiden, bentuk serangan Attaturk terhadap agama yang penting adalah politik nasionalis-revolusioner yang diterapkannya melalui semboyan "Turki adalah untuk bangsa Turki". Mereka mencatat, *"As important as Ataturk's direct attack on religion was his political nationalist revolution of Turkey for the Turks."*[36]

---

[35] Mukti Ali, ibid hal. 110-111.

[36] James A. Bill and Carl Leiden, *Politicis in The Middle East*, 1979:hal. 55-56.

Tahun 1924, dikeluarkan UU Penyatuan Pendidikan yang mewajibkan seluruh sekolah berada di bawah pengawasan Kementerian Pendidikan. Madrasah-madrasah ditutup dan digantikan dengan sekolah yang membina imam dan khatib. Selanjutnya, pendidikan agama ditiadakan di sekolah-sekolah perkotaan pada tahun 1930 dan di sekolah-sekolah perdesaan pada tahun 1933. Pelajaran bahasa Arab dan Persia dihapuskan pada tahun 1928. Pada tahun ini juga tulisan Arab diganti dengan tulisan Latin.

Di bidang budaya, proses sekularisasi--juga westernisasi--dilakukan antara lain dengan pelarangan penggunaan topi adat Turki, Terbus, tahun 1925. Sebagai gantinya dianjurkan pemakaian topi Barat. Pakaian keagamaan juga dilarang dan rakyat Turki, baik pria maupun wanita, diharuskan mengenakan pakaian Barat.[37]

Menurut Harun Nasution, gagasan Attaturk berdasar pada westernisme, sekularisme, dan nasionalisme. Dalam salah satu pidatonya, Attaturk mengatakan bahwa kelanjutan hidup di dunia peradaban modern menghendaki dari sesuatu masyarakat supaya mengadakan perubahan dalam diri sendiri. Di zaman yang dalamnya ilmu pengetahuan membawa perubahan terus-menerus, bangsa yang berpegang teguh pada pemikiran dan tradisi yang tua lagi usang, tidak akan dapat mempertahankan wujudnya. Masyarakat Turki harus diubah menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban Barat, dan segala kegiatan reaksioner harus dihancurkan.[38]

Attaturk menjalankan pemerintahannya secara diktator. Ia tak segan-segan menghukum mati orang-orang yang enggan kepada pemerintahan Kemalis. Pada tanggal 13 Juli 1926, 15 orang digantung di muka umum. Tahun 1930, 800 orang anti-Kemalis ditangkap dan dihukum mati. Tahun 1931, keluar peraturan yang melarang media massa mengeluarkan propaganda yang dianggap membahayakan pemerintahan Kemalis.[39]

---

[37] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, 1975, hal. 151-152.

[38] *Ibid*, hal. 148.

[39] Abdullah Shodiq, *Sekularisme Soekarno dan Mustafa Kemal*, 1994 hal. 74.

Soekarno memang dikenal sebagai pengagum berat Kemal Attaturk. Apa yang dilakukan Attaturk, meskipun menindas Islam, dipuji-puji Soekarno. Dalam majalah *Pandji Islam*--pimpinan tokoh Masyumi Zainal Abidin Ahmad--nomor 12 dan 13 tahun 1940, Bung Karno menulis sebuah artikel berjudul "Memudakan Islam". Dalam tulisannya, Bung Karno memuji langkah-langkah sekularisasi yang dijalankan Attaturk di Turki.

Bung Karno menyebut langkah pemisahan agama dari negara oleh Attaturk sebagai langkah "paling modern" dan "paling radikal". Kata Bung Karno, "Agama dijadikan urusan perorangan. Bukan Islam itu dihapuskan oleh Turki, tetapi Islam itu diserahkan kepada manusia-manusia Turki sendiri, dan tidak kepada negara. Karena itu, salahlah kita kalau kita mengatakan bahwa Turki adalah antiagama, anti-Islam. Salahlah kita, kalau kita samakan Turki itu dengan, misalnya, Rusia."

Mengutip Frances Woodsmall, Bung Karno mencatat, *"The attitude of modern Turkey towards Islam has been anti-orthodox, or anti-ecclesiatical, rather than anti-religious... The validity of Islam as a personal belief has not been denied. There has been no cessation of the services in the mosque, or rather religious observances."* (Turki modern adalah antikekolotan, antieklesiastikal (model kekuasaan gereja / ulama), tetapi tidak antiagama. Islam sebagai kepercayaan individual tidak ditolak. Sembahyang di masjid tidak dilarang, malahan ketaatan pada agama pun tidak dilarang).

Menurut Soekarno, apa yang dilakukan Turki sama dengan yang dilakukan negara-negara Barat. Di negara-negara seperti Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Jerman, dan lain-lain, urusan agama diserahkan kepada individu pemeluknya. Agama menjadi urusan pribadi, dan tidak dijadikan sebagai urusan negara, tidak dijadikan sebagai agama resmi negara.

Untuk memperkuat pendapatnya, Soekarno mengutip pendapat Halide Edib Hanoum dalam bukunya *Turkey Faces West*, "Kalau Islam terancam bahaya kehilangan pengaruhnya di atas rakyat Turki, maka itu bukanlah karena tidak diurus oleh pemerintah, tetapi ialah karena diurus oleh pemerintah... Umat Islam terikat kaki tangannya dengan rantai kepada politiknya

pemerintah itu. Hal ini adalah suatu halangan yang besar sekali buat kesuburan Islam di Turki... Dan bukan saja di Turki, tetapi di mana saja, di mana pemerintah campur tangan di dalam urusan agama, di situ ia menjadi satu halangan besar yang tak dapat dienyahkan..."

"Karena itu, menurut pemimpin-pemimpin Turki, justru buat kesuburan Islam itu, maka Islam dimerdekakan dari pemeliharaan pemerintah. Justru buat kesuburan Islam, maka khalifah dihapuskan, kantor komisariat syariat ditutup. Kode (undang-undang) Swiss sama sekali diambil oper buat mengganti hukum famili yang tua. Bahasa Arab dan huruf Arab yang tidak dimengerti oleh kebanyakan rakyat Turki diganti dengan bahasa Turki dan huruf Latin. Seluruh pergaulan hidup, terutama kedudukan perempuan, dipermodern oleh negara, oleh karena negara tidak menanya lagi, 'Diperbolehkan atau tidak, aturan ini oleh syariat?' Umat, yang tidak lagi takut-takut bertabrakan dengan negara ditentang urusan agama--oleh karena negara memang tidak campur tangan lagi di dalam urusan agama--lantas mempermodern pula agamanya itu. Azan kini ia dengungkan dengan bahasa Turki. Qur`an sama sekali diturkikan, sebagaimana Bijbel dibelandakan atau diinggriskan, kedudukan perempuan dimerdekakan juga dari ikatan-ikatan kekolotan," kata Soekarno, memuji langkah-langkah sekularisasi Turki.

Mengutip pendapat Mahmud Essey Bey, Menteri Kehakiman Turki saat pengoperan Civiele Code Swiss, Soekarno menyebutkan, "Manakala agama dipakai buat memerintah masyarakat-masyarakat manusia, ia selalu dipakai sebagai alat penghukum di tangannya raja-raja, orang-orang zalim, dan orang-orang tangan besi. Manakala zaman modern memisahkan dunia dari banyak kebencanaan, dan ia memberikan kepada agama itu satu singgasana yang mahakuat di dalam kalbu kaum yang percaya."

Jadi, simpul Soekarno, buat keselamatan dunia dan buat kesuburan agama--bukan untuk mematikan agama itu--urusan dunia diberikan kepada pemerintah dan urusan agama diberikan kepada yang mengerjakan agama. "*Geef den Keizer wat des Keizers*

is, en God wat Godes is," kata Soekarno mengutip Bijbel.[40]

Siapa Kemal Attaturk? Tokoh sekuler ekstrem ini dilahirkan tahun 1881 di daerah Salonika. Ayahnya, Ali Riza, bekerja sebagai pegawai kantor di kota itu, dan ibunya, Zubaidah, seorang yang taat beragama dan selalu memakai purdah. Maryam Jameela, dalam bukunya *Islam dan Modernisasi* mencatat bahwa Ali Riza adalah seorang pecandu alkohol. Sebagian penulis Barat menyebutkan, Kemal adalah anggota Free Masonry, organisasi rahasia Yahudi yang didirikan di London, 1717. Dalam buku *Wajah Dunia Islam,* Dr. Muhammad Sayyid al-Wakkil, (1998:314), menyebutkan bahwa Kemal juga merupakan tokoh organisasi "Persatuan dan Kemajuan" yang mayoritas anggotanya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Turki menamakan orang-orang Yahudi dengan sebutan "Dunamah", yang berarti kafir atau ateis.

Dalam bukunya, *Islam versus The West,* (1994:32), Maryam Jameela mencatat perbedaan antara dua tokoh sekularis Turki, yaitu Ziya Gokalp dan Attaturk. Ziya Gokalp, menurut Jameela, selalu tampil sebagai muslim yang baik. Sedangkan, Attaturk tidak menyembunyikan dirinya sebagai seorang ateis. *"In contrast to Kemal Ataturk who made no secret of his atheism, Ziya Gokalp always regarded himself as a good Moslem,"* tulis Maryam Jameela, seorang keturunan Yahudi Amerika yang sebelum masuk Islam bernama Margaret Marcus. Attaturk meninggal pada 10 November 1938 pada usia 57 tahun. Jenazahnya disimpan di Museum Etnografi Ankara hingga tahun 1953, lalu disimpan ke Musoliumnya.

Hingga kini, warisan sekulerisme Attaturk masih dikeramatkan di Turki. Mengenakan jilbab di kantor pemerintah dan parlemen masih tetap dilarang. Inilah buah sekularisme atau liberalisme Islam yang kini dibangga-banggakan oleh kaum liberal. Jika Kemal Attaturk yang menindas Islam dikatakan sebagai "liberal", maka sulit untuk tidak menyatakan bahwa "Islam Liberal" memang ancaman bagi kebangkitan Islam.

* * *

---

[40] M. Thalib dan Haris Fajar, *Dialog Bung Karno-A. Hassan,* 1985, hal. 25-28.

Bab Ke-2

NURCHOLISH MADJID: LOKOMOTIF YANG NYARIS DIKULTUSKAN

"Sementara yang meributkan umumnya datang dari aktivis-aktivis Islam kota yang tidak memiliki akses intelektual pada rujukan kitab klasik yang dicantumkan."
(Komaruddin Hidayat)

""Sihir-sihir" Nurcholish lebih canggih dan lebih memukau daripada Harun (Nasution). karena dikemas dengan gaya ilmiah yang menarik."
(Daud Rasyid)

Membahas tentang Islam Liberal, tidak dapat dilepaskan dari nama besar Nurcholish Madjid, meskipun kepada majalah *Sabili* Nurcholish Majid mengaku, istilah "Islam Liberal" itu bukanlah berasal dari dia. Namun, Nurcholish tidak menolak dirinya dimasukkan sebagai bagian dari kelompok Islam Liberal. Selain tercantum sebagai salah seorang kontributor situs Jaringan Islam Liberal (www.islamlib.com), Nurcholish juga merestui penerbitan buku Greg Barton yang berjudul *Gagasan Islam Liberal di*

Indonesia oleh penerbit Paramadina. Buku Greg Barton itu sendiri diberi judul kecil, *Pemikiran Neomodernisme dari Empat Tokoh, Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, dan Abdurrahman Wahid.* Selain itu, jika diteliti lebih jauh, gagasan-gagasan yang diusung kelompok Islam Liberal, banyak sekali persamaannya dengan gagasan yang selama puluhan tahun dikampanyekan oleh Nurcholish Madjid.[1]

A. Nyaris Dikultuskan

Karena kepeloporan dan kecanggihannya dalam mengolah gagasan pembaruan Islam di Indonesia, maka Nurcholish Madjid pernah dijuluki oleh Majalah *Tempo,* sebagai "Penarik Gerbong Kaum Pembaharu". Greg Barton juga menyebut peran Nurcholish Madjid dan Abdurrahman Wahid sangat sentral dalam gerakan kaum neomodernis pada akhir tahun 1960-an dan awal tahun 1970-an. Gerakan ini mendapat julukan berbagai nama, seperti "Pembaruan Pemikiran Islam", "akomodasionis", "substansialis", "progresif", dan "liberal".

Maka, bagi kaum muslim Indonesia dan banyak penulis asing, nama Nurcholish Madjid dianggap sebagai jaminan mutu. Bahkan, ada yang memandangnya sebagai "dewa". Nurcholish telah menjadi "mitos". Ucapan-ucapan dan tulisannya dianggap sebagai kebenaran yang sulit terbantahkan. Kecerdasan dan kepiawaiannya dalam menulis dan bertutur kata telah memukau begitu banyak manusia. Tutur katanya santun. Jarang ia bicara meledak-ledak. Almarhum K.H. Hamam Ja'far, pimpinan Pondok Pesantren Pabelan, pernah menyatakan bahwa Nurcholish Madjid itu ibarat perpustakaan yang berjalan. Keterangan itu tidak terlalu berlebihan. Media massa Barat kadangkala menyebut Nurcholish Madjid sebagai *"voice of reason"* 'suara kebenaran' atau *"heart of his nation"* 'nurani bangsanya'.[2]

---

[1] Kepada *Sabili*, Nurcholish Madjid mengatakan, "Istilah itu bukan dari saya. Saya tidak pernah menamakan diri saya liberal atau sipil." (*Sabili*, No 15 Th IX, 25 Januari 2002).

[2] Keterangan Kiai Hamam Ja'far (alm) kepada penulis saat berkunjung ke Pesantren Pabelan di tahun 1980-an. Lihat juga *New York Times.com*, 16 Maret 2002.

Berikut sejumlah contoh kekaguman para cendekiawan terhadap Nurcholish. Dalam tulisannya di *Republika*, 8 Februari 1993, yang berjudul "*Di sekitar Cara Mendiskusikan Pemikiran Keagamaan Akhir-akhir Ini*", Prof. Dawam Rahardjo mencatat,

> "Sebagai seorang yang mempunyai rasa tanggung jawab ilmiah yang tinggi, ia menyertakan catatan kaki yang lengkap. Lebih dari ilmuwan yang lain, ia bahkan mencatatkan kutipan-kutipan yang lebih lengkap misalnya kata-kata tertentu A.N. Wilson atau Erick From. Bahkan untuk Abdul Hamid Hakim dan Ibnu Taimiyah, ia kutipkan teks aslinya dalam bahasa Arab. Demikian pula sejumlah ayat Al-Qur`an yang penting dan relevan untuk tulisannya itu. Catatan kaki itu mencakup sepuluh halaman sendiri."

Imaduddin Abdul Rahim dalam wawancara dengan Majalah *Salman* no. 15, tanggal 14 Januari 1993, mengatakan, "Ridwan Saidi 'kan cuma S-1, Nurcholish Madjid S3, *cumlauder* dari Chicago."[3]

Ungkapan Dawam Rahardjo dan Imaduddin bisa diambil sebagai contoh kasus bagaimana kekaguman dan pemujaan yang berlebihan sudah diberikan kepada Nurcholish Madjid, seolah-olah ia tidak dapat berbuat salah, atau Nurcholish *can do no wrong*. Sehingga, apa pun yang diucapkan atau ditulis oleh Nurcholish adalah suatu kebenaran. Sikap ini tentu juga jauh dari ilmiah. Sebaliknya, juga tidak *fair* dan tidak benar, jika menyatakan bahwa apa pun yang keluar dari mulut Nurcholish Madjid, adalah kebusukan dan kesalahan. Di sinilah diperlukan sikap kritis yang cermat, jujur, dan terbuka terhadap kritik.

Tidak diragukan, Nurcholish Madjid merupakan sosok kontroversial. Para pengkritiknya memberikan kecaman yang sangat keras. Daud Rasyid menyebut ceramah pembaruan Nurcholish Madjid yang disampaikan di Taman Ismail Marzuki (TIM), pada 21 Oktober 1992, yang berjudul "*Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia*, sebagai suatu

---

[3] Dikutip dari buku *Menelusuri Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish Madjid*, karya Abdul Qadir Djaelani. 1994, hal. 5.

"kesesatan yang dikemas dengan gaya ilmiah". Nurcholish dinilai sebagai murid dan penerus "Neo-Muktazailahnya" Harun Nasution. Hanya saja, kata Daud Rasyid, *"sihir-sihir" Nurcholish lebih canggih dan lebih memukau daripada Harun, karena dikemas dengan gaya ilmiah yang menarik".*[4]

Dalam buku berjudul *Anatomi Budak Kuffar dalam Perspektif Al-Qur`an* karya Muhammad Yaqzhan yang diterbitkan Al-Ghirah Press, disebutkan bahwa ceramah Nurcholish di TIM pada tanggal 21 Oktober 1992 merupakan "puncak gagasan Nurcholish Madjid dalam upaya menyeret manusia ke dalam comberan ateisme baru yang intinya menggusur syariat, bahkan menuduhnya sebagai simbolisme yang mengarah pada berhalaisme". Gagasan Nurcholish yang mendapat sambutan gegap gempita di Indonesia, menurut Yaqzhan, merupakan prestasi puncak dari seorang anak didik orientalis dalam menyesatkan orang Islam.[5]

Kritikan-kritikan tajam terhadap gagasan-gagasan pembaruan Islam atau sekularisasi Nurcholish Madjid sudah disampaikan oleh berbagai tokoh. Misalnya, Prof. Rasjidi (alm.), Endang Syaifuddin Anshari (alm.), Ridwan Saidi, Abdul Qadir Djaelani, Daud Rasyid, dan Hartono A. Jaiz. Tetapi, nama Nurcholish terus melambung dan media massa di Indonesia sering menjulukinya sebagai "cendekiawan muslim". Nurcholish tetap melenggang dalam berbagai arena kajian ilmiah, pengajian, dan media-media massa terkemuka. Dukungan terhadapnya pun terus mengalir tiada henti. Yayasan Paramadina yang dipimpinnya juga semakin mengembangkan sayapnya, mulai sekolah lanjutan atas (SMU Madania School) sampai Universitas Paramadina yang dia sendiri menjadi rektornya. Kader-kader dan pelanjut-pelanjutnya juga terus bermunculan, seperti Prof. Dr. Komaruddin Hidayat, Budhi Munawar Rachman, Luthfie Asysyaukani, dan Sukidi.

Tak kalah vokal dengan para pendukungnya, para pendukung Nurcholish Madjid juga sangat partisan dan terkadang sangat galak dalam membela lelaki kelahiran Jombang, Jawa

---

[4] Daud Rasyid, *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, 1993, hal.11-15.
[5] Muhammad Yaqzhan, *Anatomi Budak Kufar*, Al Ghirah Press, 1993, hal. 62-63.

Timur, 17 Maret 1939 ini. Bisa disebut di sini nama Prof. R. William Liddle yang sangat fanatik dalam membela Nurcholish Madjid. Menurut Liddle, obsesi Nurcholish adalah membujuk muslim Indonesia menerima visi rasional, toleran, dan sekuler Islam. Nurcholish merasa hal itu tidak mudah. Pasalnya, pada akar bawah komunitas Islam anti-Baratisme, anti-Kristenitas, sungguh-sungguh tidak toleran kepada apa saja yang dipandang sebagai non-Islamik.[6] Liddle menunjuk contoh penentang Nurcholish Madjid yang keras, yaitu Dewan Dakwah Islamiah Indonesia (DDII). Dikatakannya bahwa mental anggota Dewan Dakwah--setidaknya beberapa ciri penting sebagaimana ditunjukkan dari Media Dakwah--adalah **picik, naif, berpikir dangkal,** dan **tak canggih.**[7]

Untuk lebih melengkapi gambaran tentang "kehebatan" sosok Nurcholish Madjid, dapat disimak gambaran yang diberikan oleh "calon pewaris takhta Nurcholish di Paramadina", Komaruddin Hidayat, sebagai berikut:

> "Cak Nur, yang jika bicara mengesankan tanpa emosi dan tanpa semangat menggurui, kaya dengan ilustrasi dan rujukan kepustakaan serta kemampuannya mengartikulasikan gagasan dengan jernih, baik dalam tulisan maupun pembicaraan. Jadi, mengapa gagasan Cak Nur selalu dijadikan sasaran kritik dan sekaligus pujian? Salah satu sebabnya, barangkali, adalah karena Cak Nur adalah tipe pemikir independen yang tidak memiliki obsesi untuk memperoleh masa pengikut kecuali setia pada tradisi dan sikap keilmuan. Juga mempunyai obsesi untuk selalu mendekati kebenaran meski kadang kala harus berbeda dari pemahaman ulama umumnya yang telah melembaga dan menjadi ideologi.... Bagi Cak Nur, iman dan akidah suatu hal yang berbeda. Iman menuntut sikap rendah hati, selalu

---

[6] Lihat: R. William Liddle, *Islam, Politik, dan Modernisasi*, Pustaka Sinar Harapan, 1997, hal. 37.

[7] Pendapat Liddle tentang Dewan Dakwah dikutip oleh Greg Barton dari makalahnya yang berjudul *Media Dakwah Scripturalism: One Form of Islamic Political Thought and Action in New Order Indonesia*. Lihat Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, 1999, hal. 33.

terbuka bagi semua informasi kebenaran, tetapi sekaligus juga dinamis untuk mengejar kebenaran itu dari sumbernya, yaitu Sang Kebenaran itu sendiri yang oleh Al-Qur`an, Dia Yang Mahabenar itu disebut Allah.... Bagi mereka yang akrab benar dengan tradisi intelektual Islam abad tengah, berbagai pikiran keagamaan Cak Nur tentu saja tidak akan mengagetkan. Bukankah Cak Nur selalu merujuk pada sumbersumber 'kitab kuning' yang klasik itu? Itulah sebabnya mengapa para kiai tenang-tenang saja membaca makalah-makalah Cak Nur, sementara yang meributkan umumnya datang dari aktivis-aktivis Islam kota yang tidak memiliki akses intelektual pada rujukan kitab klasik yang dicantumkan. Dan sayangnya lagi, mereka yang selalu mengkritik pikiran-pikiran Cak Nur tidak mau berdialog langsung ke Paramadina, baik secara pribadi maupun dalam forum.... Pikiran kritis yang mencoba mencari alternatif di mana pun dan kapan pun pasti akan mengundang reaksi. Munculnya reaksi terhadap sebuah pemikiran baru tentu saja tidak berarti setiap pemikiran yang baru mesti salah dan pihak pengkritik yang benar, tidak juga harus berarti sebaliknya. Namun, sebuah paradigma ataupun teori sosial pasti terlibat dalam sebuah proses dialektik dan kadangkala hiruk pikuk pro dan kontra. Salah satu bukti historis yang paling nyata adalah awal mula lahirnya gerakan Muhammadiyah yang oleh para pengkritiknya kala itu 'dikafir-kafirkan' dan sekian caci maki lain yang sangat keras. Tetapi, apa yang bisa kita katakan tentang Muhammadiyah hari ini? Ia telah menjadi aset dan alternatif gerakan Islam di Indonesia yang pengaruh dan jasanya demikian besar. Karena itu, kita tidak bijak untuk cepat-cepat memvonis setiap pemikiran yang dianggap baru. Yang dituntut adalah repons kritis-apresiatif. Karena, ilmu pengetahuan dan peradaban itu akan berkembang dan bertahan hanya jika di sana terdapat cukup rabuk, yaitu kritik yang sehat dan berkelanjutan."[8]

---

[8] Lihat kata pengantar Komaruddin Hidayat untuk buku Nurcholish Madjid berjudul *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, 2000 (cetakan II), hal. xiv-xvi.

Berangkat dari pernyataan Komaruddin tersebut, tulisan dalam bab ini akan mencoba menyorot dan mengkritisi sejumlah pendapat Nurcholish Madjid yang terungkap melalui berbagai media massa dan buku yang sudah terbit di Indonesia. Tulisan ini merupakan bentuk respons kritis-apresiatif yang sangat perlu untuk mencegah kultus terhadap sosok dan pemikiran Nurcholish Madjid oleh sebagian orang. Namun, sungguh mengherankan bahwa Nurcholish Madjid tidak memberikan bantahan tertulis apa pun terhadap kritik-kritik yang pernah diberikan oleh Dr. Daud Rasyid, misalnya. Padahal, kritik-kritik Daud Rasyid, seperti tertuang dalam buku *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, sangat menarik, ilmiah, dan tajam. Kritik Daud Rasyid itu, setajam apa pun, seharusnya mendapat tanggapan dari Nurcholish, sehingga terjadi perdebatan ilmiah yang sehat.

Penulis sendiri beberapa kali memberikan kritik terhadap pendapat-pendapat Nurcholish Madjid yang tertulis di media massa, baik dengan menulis surat pembaca di media massa maupun mengirim surat langsung ke Paramadina. Sebagai contoh, sebuah surat penulis tentang pembagian wilayah Palestina di masa Umar ibnul-Khaththab. Ketika itu, harian *Kompas* (24 Januari 2000) menurunkan ucapan Nurcholish Madjid, "Perjanjian Aelia ini berisi tentang kebebasan beragama bagi masyarakat Palestina. Bahkan, Umar membagi Palestina menjadi empat wilayah, yaitu wilayah Armenia, Kristen, Yahudi, dan Islam."

Sehubungan dengan itu, penulis bertanya tentang sumber literatur yang dipakai oleh Cak Nur tentang hal itu. Sebab, teks Perjanjian Aelia (*Alia, Iliya'*) yang dikutip oleh ath-Thabari (310 H) dan diterjemahkan oleh tokoh NU, K.H. Irfan Zidny, M.A. (1986), antara lain menyebutkan,

> "Bismillaahirrahmaanirrahiim. Inilah perdamaian yang diberikan oleh hamba Allah Umar, Kepala Negara Islam, kepada rakyat Iliya'. Dia menjamin mereka atas keamanan diri mereka, harta bendanya, gereja-gerejanya, salib-salibnya, yang sakit maupun yang sehat dan semua aliran agamanya. Tidak boleh mengganggu gereja mereka baik membongkar-

nya, mengurangi maupun menghilangkan sama sekali. Juga tidak boleh memaksa mereka meninggalkan agamanya dan tidak boleh mengganggunya. **Tidak boleh bagi penduduk Iliya' untuk memberi tempat tinggal kepada orang Yahudi."**

Dalam teks asli Perjanjian Aelia, kalimat terakhir itu berbunyi, *"Wa laa yuskanu bi-iliyaai ma'ahum ahadun minal yahuud."* Terjemahan bebasnya, "Tidak diizinkan seorang pun dari orang Yahudi untuk tinggal bersama penduduk Yerusalem."

Aelia (Iliya') adalah sebutan lain untuk Yerusalem. Jelas, ada perbedaan yang sangat mendasar antara penjelasan Nurcholish dan teks Perjanjian Aelia tersebut. Khususnya, tentang sikap yang harus diambil oleh kaum Nasrani Palestina dan kaum muslimin terhadap kaum Yahudi. Apakah Nurcholish Madjid memiliki literatur lain yang menyatakan hal yang berbeda dengan teks Perjanjian tersebut? Tidak pernah ada ralat tentang berita *Kompas* tersebut. Padahal, dalam buku *Islam Doktrin dan Peradaban*, cetakan III, yang terbit tahun 1995, Nurcholish Madjid memuat lengkap teks Perjanjian Aelia. Di antaranya disebutkan, *"Dan di Aelia tidak seorang Yahudi pun boleh tinggal bersama mereka."* [9]

Klarifikasi tentang berita *Kompas* itu begitu penting, mengingat ratusan ribu pembaca *Kompas* kemungkinan besar tidak membaca buku Nurcholish tersebut. Mereka mendapatkan informasi yang keliru bahwa orang Yahudi dari dulu memang berhak tinggal di Palestina, sebagaimana ditetapkan oleh Khalifah Umar ibnul-Khaththab. Pendapat bahwa orang Yahudi memiliki *"historical right"* terhadap wilayah Palestina selalu dikembangkan oleh kaum Zionis Yahudi. Pemerintah Israel, misalnya, menerbitkan buku *Facts about Israel*, yang menyatakan, *"The establishment of Israel (1948) grew out of their 2,000 year-old dream to return to their ancestral homeland and revive its national life and sovereignty* 'Pendirian negara Israel (1948) menghapus 2000 tahun impian kaum Yahudi untuk kembali ke tanah air leluhur mereka dan membangun kembali kehidupan nasional dan kedaulatan mereka'."[10]

---

[9] Lihat Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, 1995, hal. 193-194.

[10] Ellen Hirsch, *Facts About Israel*, Israeli Information Center, 1996, hal. 285.

Deklarasi negara Israel tahun 1948 juga menyebutkan, "*By virtue of our natural and historic right ... (we) do hereby proclaim the establishment of a Jewish State in the Land of Israel--The State of Israel* 'Atas dasar hak alamiah dan hak historis kita ..., dengan ini (kami) memproklamasikan berdirinya sebuah negara Yahudi di Tanah Israel, Negara Israel'."[11]

Dalam tulisan-tulisannya, Nurcholish banyak berkampanye tentang "sikap toleransi Islam". Ia seolah-olah ingin menunjukkan kepada Barat dan pihak-pihak nonmuslim lainnya bahwa Islam adalah agama yang toleran, melebihi agama Yahudi dan Nasrani, atau Islam adalah sangat menekankan "pluralisme". Kata Nurcholish, "Jadi pluralisme sesungguhnya adalah sebuah Aturan Tuhan (*Sunnah Allah*, 'Sunnatullah') yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari." Kemudian kisah penyelamatan kaum Yahudi di Andalusia oleh kaum muslimin diungkap dengan sangat baik oleh Nurcholish Madjid dalam beberapa tulisannya. Misalnya, ia mengutip pernyataan Max I. Dimont dalam buku *The Indestructible Jews*,

> "Penaklukan Spanyol oleh bangsa Arab pada tahun 711 telah mengakhiri pemindahan agama kaum Yahudi ke Kristen secara paksa yang telah dimulai oleh Raja Recared pada abad keenam. Di bawah kekuasaan kaum muslimin selama 500 tahun setelah itu, muncul Spanyol untuk tiga agama dan 'satu tempat tidur'. Kaum muslimin, kaum Kristen, dan kaum Yahudi secara bersama menyertai satu peradaban yang cemerlang, suatu percampuran yang mempengaruhi 'garis darah' justru lebih banyak daripada mempengaruhi afiliasi keagamaan."[12]

Nurcholish juga banyak mengutip Piagam Madinah untuk menunjukkan sikap toleransi Islam kepada agama-agama lainnya. Hanya saja, pengungkapan "fakta sepihak" seperti ini juga bermanfaat "sepihak", yaitu menunjukkan "wajah lembut"

---

[11] Paul Findley, ***Deliberate Deceptions-Facing the Facts about the US-Israeli Relationship***, 1993, hal. 3.

[12] Nurcholish Madjid, ***Islam Doktrin dan Peradaban***, hal. lxxvii.

Islam. Hal ini biasanya dimaksudkan untuk membantah anggapan lama kaum orientalis bahwa "Islam berwajah garang" karena "disiarkan dengan pedang".

Dalam kasus Piagam Madinah tentu menjadi bukti bahwa Islam memiliki sikap toleransi yang sangat tinggi. Tetapi, untuk mengimbangi hal itu, mestinya juga diungkap tentang peperangan dan pengusiran terhadap kaum Yahudi dari Madinah oleh Rasulullah. Dalam kasus Perjanjian Aelia, terlihat sikap Umar ibnul-Khaththab yang sangat toleran terhadap kaum Nasrani. Tetapi, di dalam Perjanjian itu secara tegas juga disebutkan, kaum Yahudi tidak diizinkan tinggal di Jerusalem. Sikap Umar r.a. inilah yang menjadi landasan Sultan Abdul Hamid untuk menolak tawaran tokoh Zionis Theodore Herzl, agar kaum Yahudi diizinkan tinggal di Jerusalem. Kisah ini sangat populer.

Jika tidak diimbangi dengan kisah-kisah tentang ketegasan sikap Islam terhadap kaum Zionis-Yahudi, maka kisah-kisah toleransi Islam terhadap kaum Yahudi dapat memberikan gambaran yang salah, seolah-olah kaum Yahudi berhak menduduki wilayah Palestina. Sejak Kongres Zionis Internasional pertama di Basel, 1897, kaum Zionis terus berusaha menetap di Palestina. Berbagai upaya mereka lakukan untuk membujuk Sultan Turki Utsmani agar mengizinkan kedatangan imigran Yahudi ke Palestina.

Pada tahun 1902, misalnya, sebuah delegasi Yahudi yang dipimpin tokoh Theodore Herzl mendatangi Sultan Abdul Hamid dan menyodorkan sejumlah tawaran. Pertama, memberikan hadiah sebesar 150 juta poundsterling untuk pribadi Sultan. Kedua, membayar semua utang pemerintah Turki Utsmani yang mencapai 33 juta poundsterling. Ketiga, membangun kapal induk untuk menjaga pertahanan pemerintahan Utsmani yang bernilai 120 juta frank. Keempat, memberikan pinjaman tanpa bunga sebesar 35 juta poundsterling. Kelima, membangun sebuah universitas Utsmani di Palestina. Namun, tawaran delegasi Yahudi itu ditolak oleh Sultan Abdul Hamid. Itulah ketegasan Sultan Abdul Hamid. Sehingga, Jerusalem baru

dapat diduduki Inggris dan pasukan sekutu pada 1918, saat pasukan Sekutu pimpinan Lord Allenby mendarat di sana.[13]

Jadi, pendapat Nurcholish Madjid soal pembagian Palestina menjadi empat wilayah memang tidak klop dengan tulisannya sendiri sebelumnya. Apakah *Kompas* yang ceroboh dan salah kutip? Tampaknya tidak. Sebab, penulis juga hadir dalam acara di Hotal Borobudur tanggal 22 Januari 2000, saat Nurcholish mengungkapkan pendapatnya. Mestinya seorang Nurcholish Masjid tidak ceroboh dalam menyampaikan pendapat, dan segera meralat opini yang keliru dan fatal tersebut.

Kasus lain, pada berita *Kompas* edisi 9 April 2001 yang berjudul "Nurcholish Madjid: Teologi Inklusif Mengakui Adanya Kebenaran Agama Lain", ditulis, *"Dan itu tidak ada salahnya. Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar isi kitab-kitab suci lama itu masih benar. Yang disebut adanya pengubahan itu dalam hal-hal yang bersifat berita. Terutama berita tentang kedatangan Nabi Muhammad saw.."*

Benarkah Ibnu Taimiyah mengucapkan seperti itu? Apalagi, sejumlah kutipan dari ulama (seperti Ibnu Taimiyah) tidak diberi rujukan kitab/buku yang jelas, sehingga sulit dicek validitas dan kejujurannya. Saat peluncuran buku *Teologi Inklusif Cak Nur* karya Sukidi, Nurcholish menyatakan, *"Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa sebagian besar isi kitab-kitab suci lama itu masih benar. Yang disebut adanya pengubahan itu dalam hal-hal yang bersifat berita. Terutama berita tentang kedatangan Nabi Muhammad saw..""*

Ucapan Nurcholish itu sangat diragukan kebenarannya. Dalam kitab *al-Jawaab ash-Shahih li man Baddala Diin al-Masiih*, yang beberapa kali dikutip Nurcholish Madjid dalam tulisannya, Ibnu Taimiyah dengan panjang lebar menguraikan kekeliruan dan kesesatan teologi Kristen. Di kitab ini pula, justru dinyatakan oleh Ibnu Taimiyah bahwa sebagian besar isi kitab suci lama itu telah diubah. Dalam kitab tersebut dicatat, *"... wa syahida 'alaihim biannahum harrafuu katsiiran min ma'aniya at-tauraati wa al-injili*

---

[13] Dikutip dari buku *Palestina Nasibmu Kini*, Yayasan SIDIK Jakarta, 1994, hal.16. Juga, Yusuf Qardhawi, *Al Quds Masalah Kita Bersama (terj.)*, 1999 hal. 87-88.

qabla nubuwwatihi 'Dan Rasulullah saw. telah bersaksi bahwa kaum Ahlul Kitab itu telah mengubah sebagian besar dari makna-makna Taurat dan Injil sebelum masa kenabian beliau saw.'."[14]

Itu dua contoh bagaimana untuk hal-hal yang membutuhkan keakuratan dan ketelitian serta kehati-hatian, Nurcholish Madjid bertindak tidak cermat. Padahal, kedua masalah tersebut, yaitu keharusan orang-orang Yahudi meningggalkan Jerusalem dan porsi perubahan pada Injil dan Taurat, merupakan hal yang berdampak serius. Jika Umar membagi wilayah Palestina menjadi empat bagian, seperti dikatakan Nurchilish Madjid, maka kaum Yahudi mempunyai hak historis untuk mencaplok Palestina. Jika isi sebagian besar kitab Injil itu benar, maka itu bertentangan dengan penjelasan Ibnu Taimiyah yang diidolakan oleh Nurcholish Madjid sendiri. Masalah hubungan Nurcholish Madjid dan Ibnu Taimiyah akan dibahas pada bagian berikutnya.

B. Promosi Pendapat Lemah: Kasus "Ahlul Kitab"

Penilaian Komaruddin Hidayat bahwa "bagi mereka yang akrab benar dengan tradisi intelektual Islam abad tengah, berbagai pikiran keagamaan Cak Nur tentu saja tidak akan mengagetkan", tentu tidak tepat. Sebab, orang seperti Daud Rasyid adalah pakar syariat dan doktor ilmu hadits lulusan Universitas Kairo yang sangat akrab dengan tradisi intelektual Islam abad tengah. Kritik-kritik Daud Rasyid dalam bukunya yang terbit tahun 1993 itu justru ditujukan pada kitab-kitab klasik yang dijadikan rujukan oleh Nurcholish Madjid. Tentu juga sangat ceroboh jika Komaruddin secara gegabah menyatakan bahwa yang meributkan pemikiran Nurcholish Madjid adalah "yang umumnya datang dari aktivis-aktivis Islam kota yang tidak memiliki akses intelektual pada rujukan kitab klasik yang dicantumkan". Bisa dikatakan, inilah satu bentuk kultus yang memprihatinkan dari kalangan intelektual, dan penistaan kepada pengkritik-pengkritik Nurcholish yang tidak perlu dilakukan oleh seorang akademisi.

---

[14] Ibnu Taimiyah, *Al-Jawaab ash-Shahih li man Baddala Diin al-Masiih*, Juz I, hal. 350.

Sebagai contoh, bisa dilihat dalam kritik ilmiah yang sangat bagus dari Daud Rasyid terhadap catatan kaki nomor "46" dari makalah Nurcholish Madjid yang berjudul *"Beberapa Renungan Kehidupan Keagamaan untuk Generasi Mendatang"* yang dibacakan di TIM pada 21 Oktober 1992. Dalam makalah Nurcholish tercatat, *"Dan patut kita camkan benar-benar pendapat Sayyid Muhammad Rasyid Ridha sebagaimana dikutip Abdul Hamid Hakim bahwa pengertian sebagai Ahlul Kitab tidak terbatas hanya kepada kaum Yahudi dan Kristen seperti tersebut dengan jelas dalam Al-Qur`an serta kaum Majusi (pengikut Zoroaster) seperti tersebutkan dalam sebuah hadits, tetapi juga mencakup agama-agama lain yang mempunyai suatu bentuk kitab suci."*[15]

Di belakang kata "hadits", Nurcholish meletakkan nomor "46", yang dalam catatan kakinya tertulis, "Yaitu hadits, '*Sannuu 'alaihim sunnata ahlil kitaab*' (al-hadits) 'Perlakukanlah mereka (kaum Majusi) seperti perlakuan kepada Ahlul Kitab (Yahudi dan Kristen)'." Bagian ini dikritik dengan baik oleh Daud Rasyid, dengan menyatakan bahwa tulisan itu tidak memenuhi standar ilmiah sebab tidak dicantumkan sumber atau perawi hadits tersebut, teks hadits itu dipotong dan tidak lengkap, serta teks itu sendiri justru bermakna bahwa Majusi bukanlah Ahlul Kitab.[16]

Sayangnya, Nurcholish sepertinya kurang mempedulikan kritik ilmiah Daud Rasyid tersebut. Sikap tidak peduli kritik Nurcholish, misalnya, terlihat dari penerbitan makalah tersebut dalam buku *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat* pada tahun 1999, tanpa revisi apa pun. Catatan kaki nomor 46 yang dikritik dengan baik oleh Daud Rasyid tetap seperti semula. Hadits yang sepenggal tanpa rawi itu pun dibiarkan begitu saja, tanpa koreksi. Padahal, hal seperti ini, mestinya tidak dilakukan oleh seorang Nurcholish Madjid, yang dikatakan Prof. Komaruddin Hidayat, sebagai "tipe pemikir yang independen, yang tidak memiliki obsesi untuk memperoleh masa pengikut kecuali setia pada tradisi dan sikap keilmuan serta obsesi untuk selalu mendekati kebenaran".

---

[15] Lihat *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, Zaman Wacana Mulia, 1999, hal. 9-58.

[16] Daud Rasyid, *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, hal. 53.

Hadits sepotong yang dikutip oleh Nurcholish Madjid untuk mendukung pendapatnya tentang Ahlul Kitab itu diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas. Teks lengkapnya sebagai berikut.

"Disampaikan kepadaku dari Malik, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali, dari bapaknya, sesungguhnya Umar ibnul-Khaththab menyebut Majusi, lalu dia berkata, 'Saya tidak tahu bagaimana saya berbuat tentang urusan mereka.' Maka Abdurrahman bin Auf berkata, 'Saya bersaksi sungguh saya telah mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti Ahli Kitab.'"

Jadi, Nurcholish justru keliru saat mengutip hadits tersebut untuk memperkuat pendapatnya bahwa Majusi termasuk Ahli Kitab. Dalam disertasinya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diberi judul *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Dr. Muhammad Galib M. mencatat:

> "Dalam masalah ini, para ulama sepakat bahwa term *ahl al-kitab* menunjuk kepada dua komunitas penganut agama samawi sebelum Islam, yaitu kaum Yahudi dan Nasrani. Orang-orang Islam, walaupun mempunyai kitab suci yang juga berasal dari Allah dan juga dinamai Al-Kitab, di samping nama-nama lainnya, tetapi Al-Qur`an tidak pernah menyebut umat Islam sebagai *ahl al-kitab*, sebagaimana halnya orang Yahudi dan Nasrani.
>
> Pada masa awal perkembangan Islam, khususnya masa Rasulullah saw. dan para sahabatnya, term *ahl al-kitab* selalu digunakan untuk menunjuk kepada komunitas agama Yahudi dan Nasrani. Selain kedua komunitas tersebut, mereka tidak menyebutnya sebagai *ahl al-kitab*. Kaum Majusi, misalnya, meskipun pada masa Nabi dan sahabat sudah dikenal, tetapi mereka tidak disebut sebagai *ahl al-kitab*. Meskipun demikian, Rasulullah memerintahkan supaya memperlakukan mereka seperti halnya *ahl al-kitab*."

Mengomentari hadits tentang perlakuan terhadap kaum Majusi tersebut, Muhammad Galib mencatat:

> "Riwayat hadits tersebut memberikan gambaran bahwa Rasulullah saw. tidak memasukkan kaum Majusi sebagai

ahl al-kitab. Hal demikian diperkuat dengan kenyataan bahwa Umar ibnul-Khaththab banyak membicarakan sekitar permasalahan orang-orang Majusi. Karena, kalau sekiranya dia memahami term *ahl al-kitab* mencakup kaum Majusi, tentu Umar tidak mempermasalahkan mereka."[17]

Setelah meneliti pendapat berbagai ulama tentang Ahlul Kitab, termasuk Muhammad Rasyid Ridha dan Abdul Hamid Hakim, yang dijadikan rujukan utama oleh Nurcholish Madjid, Muhammad Galib tetap pada kesimpulan bahwa istilah Ahlul Kitab menunjuk pada dua komunitas--yaitu Yahudi dan Nasrani. Pendapat itu diperkuat dengan surat-surat yang dikirimkan Rasulullah saw. kepada raja-raja di sekitar Madinah. Kepada raja-raja beragama Kristen, seperti Heraklius dan Muqauqis, surat Nabi saw. itu diakhiri dengan seruan kepada Ahli Kitab untuk mengadakan kata sepakat (*kalimatin sawa'*), atau paling tidak mengakui eksistensi kaum muslimin. Sedangkan kepada Kaisar Persia, Kisra, yang beragama Majusi, surat Nabi saw. tidak diakhiri dengan ajakan kepada Ahli Kitab. Ini menunjukkan bahwa Majusi bukan termasuk Ahli Kitab.[18]

Setelah menguraikan pendapat sejumlah ulama tentang siapa yang disebut sebagai Ahlil Kitab, Quraish Shihab juga berpendapat bahwa Ahlul Kitab adalah semua penganut agama Yahudi dan Nasrani. Dasarnya adalah penggunaan Al-Qur`an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan itu (Yahudi dan Nasrani), dan sebuah ayat dalam Al-Qur`an, surah al-An'aam ayat 156, *"(Kami turunkan Al-Qur`an ini) agar kamu (tidak) mengatakan bahwa, 'Kitab itu hanya diturunkan kepada dua golongan saja sebelum kami, dan sesungguhnya kami tidak memperhatikan apa yang mereka baca.'"* [19]

Buku Quraish Shihab itu diterbitkan pertama kali tahun 1996. Sedangkan, buku Muhammad Galib dicetak tahun 1998 oleh

---

[17] Muhammad Galib M., *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Paramadina, 1998, hal. 28-29.

[18] Muhammad Galib, *op cit*, hal. 37.

[19] M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, cetakan XI, 2000, hal. 370.

penerbit Paramadina sendiri. Anehnya, Paramadina juga menerbitkan kembali buku karangan Nurcholish Madjid berjudul *Islam Agama Peradaban* pada tahun 2000 (cetakan kedua). Cetakan pertama buku ini diterbitkan tahun 1985. Dalam buku ini, terdapat satu bab yang diberi judul *Ahl al-Kitab* (hlm. 59-76). Tanpa mengurangi arti wajarnya perbedaan pendapat, seharusnya jika suatu pendapat sudah dilemahkan oleh pendapat yang lebih kuat, maka seyogianya Nurcholish Madjid mengubah pendapatnya tentang cakupan Ahlul Kitab atau setidaknya mengurangi kampanye tentang pendapat lemah tersebut.

Ditulis oleh Nurcholish dalam bukunya bahwa para ahli mengakui keunikan konsep ini dalam Islam. Sebelum Islam, menurutnya, praktis konsep itu tidak pernah ada, sebagaimana dikatakan oleh Cyril Glasse, "... *the fact that one Revelation should name others as authentic is an extraordinary event in the history of religions* 'kenyataan bahwa sebuah Wahyu (Islam) menyebut wahyu-wahyu yang lain sebagai absah adalah kejadian luar biasa dalam sejarah agama-agama'." Lalu Cak Nur menambahkan bahwa Bertrand Russel, seorang ateis radikal yang sangat kritis pada agama-agama, mengakui kelebihan Islam atas agama-agama yang lain sebagai agama yang lapang atau "kurang fanatik". Sehingga, sejumlah kecil tentara muslim mampu memerintah daerah kekuasaan yang amat luas dengan mudah, berkat konsep tentang Ahli Kitab.

Nurcholish juga menegaskan bahwa Ahlul Kitab tidak tergolong muslim. Pasalnya, mereka tidak mengakui atau bahkan menentang kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad saw. dan ajaran yang beliau sampaikan. Oleh karena itu, dalam terminologi Al-Qur`an mereka disebut "kafir", yakni "yang menentang" atau "yang menolak". Maksudnya, menentang atau menolak Nabi Muhammad saw. beserta ajaran beliau, yaitu ajaran agama Islam.

Di dalam subbab yang berjudul "Ahli Kitab di Luar Yahudi dan Nasrani?" Nurcholish mengungkap hadits-hadits tentang pemungutan jizyah terhadap kaum Majusi, yang dia jadikan sebagai dalil bahwa kelompok Majusi adalah Ahlul Kitab. Sebab,

menurutnya, "hanya Ahlul Kitab yang boleh dipungut jizyah". Kutipan dari ungkapan Nurcholish adalah sebagai berikut.

> "... Tetapi juga menyebutkan beberapa kelompok agama lain, yaitu kaum Majusi dan Shabi'in, yang dalam konteksnya mengesankan seperti Ahli Kitab. Digabung dengan ketentuan dalam praktik Nabi saw. bahwa beliau memungut jizyah dari kaum Majusi di Hajar dan Bahrain. Kemudian praktik Umar ibnul-Khaththab memungut jizyah dari kaum Majusi Persia, dan Utsman ibnu Affan memungut jizyah dari kaum Berber di Afrika Utara. Maka, banyak ulama yang menyimpulkan adanya golongan Ahli Kitab di luar Yahudi dan Nasrani. 'Sebab, jizyah dibenarkan dipungut hanya dari Ahli Kitab' (yang hidup damai dalam Negeri Islam), dan tidak dipungut dari golongan yang tidak termasuk Ahli Kitab seperti kaum musyrik (yang umat Islam tidak boleh berdamai dengan mereka ini)."

Pendapat Nurcholish Madjid itu tidak populer dan hanya pendapat minoritas ulama. Sebab, seperti telah disebutkan terdahulu, sebagaimana diuraikan panjang lebar oleh Muhammad Galib, justru hadits "perlakukanlah mereka (orang-orang Majusi) seperti Ahlil Kitab" menunjukkan bahwa kaum Majusi bukanlah termasuk Ahlul Kitab. Juga perlu dipertanyakan, kesimpulan Nurcholish bahwa hanya Ahlul Kitab yang boleh dipungut jizyah. Menurut Yusuf Qaradhawi, jizyah adalah pajak tahunan atas tiap kepala *ahlu dzimmah*, berupa sejumlah kecil uang yang dikenakan atas kaum pria yang baligh dan memiliki kemampuan, sesuai dengan besarnya kekayaan masing-masing. *Ahlu dzimmah* adalah kaum nonmuslim yang hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Jadi, *ahlu dzimmah* adalah orang-orang nonmuslim, bisa dari golongan Ahlul Kitab dan bisa pula di luar Ahlul Kitab. [20]

Tentang siapa yang boleh ditarik jizyahnya, telah menjadi

---

[20] Masalah hak-hak *ahlu dzimmah* dapat dilihat dalam buku *Minoritas non-Muslim dalam Masyarakat Islam* karya Yusuf Qaradhawi, cetakan III, 1994.

perdebatan di kalangan ulama. Mazhab Maliki berpendapat, jizyah dipungut dari warga pemeluk agama non-Islam, baik dari orang Yahudi dan Nasrani maupun selain keduanya seperti orang Majusi dan yang lainnya, baik Arab maupun bukan Arab. Imam al-Bukhari, ahli hadits, menerangkan bahwa peraturan jizyah berlaku bagi semua golongan nonmuslim, tidak terbatas pada golongan Yahudi dan Nasrani saja. Karena, Nabi saw. juga melakukan perjanjian damai yang berakhir dengan pembayaran jizyah dengan golongan yang beragama Majusi. Imam Syafii berpendapat, jizyah hanya dapat ditarik dari kaum Ahlul Kitab, baik Arab maupun non-Arab, dan boleh juga dari orang Majusi. Karena, mereka dipandang memiliki apa yang disebut sebagai *syibh al-kitab* 'yang menyerupai kitab'. Akan tetapi, menurutnya, jizyah tidak ditarik dari para penyembah berhala secara mutlak.

Ibnul Qayyim al-Jauziyah membantah pendapat asy-Syafii, dengan menyatakan bahwa orang Majusi adalah penganut agama politeisme (syirik) yang tidak memiliki kitab. Sehingga, pengambilan jizyah dilakukan pula terhadap semua orang musyrik, termasuk penyembah berhala. Di dalam Islam tidak ada perbedaan dan pengutamaan antara kelompok-kelompok orang kafir, yakni memberatkan satu kelompok dan meringankan kelompok lain.

Menurutnya, kekafiran penyembah berhala tidak lebih berat daripada kekafiran orang Majusi. Bahkan, jika dilihat dari ajarannya, seharusnya kekafiran orang Majusi lebih berat. Pasalnya, para penyembah berhala, dari kaum musyrik Arab, masih mengakui tidak ada pencipta selain Allah SWT. Mereka menyembah berhala adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Mereka tidak memperbolehkan seorang laki-laki mengawini ibu atau anak atau saudara wanitanya sendiri. Sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim a.s. masih terlihat dalam kepercayaan mereka. Sedangkan, orang Majusi mempercayai adanya dua pencipta alam, yaitu pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Mereka menghalalkan seorang laki-laki mengawini ibunya sendiri atau anak atau saudara wanitanya sendiri. Agama Majusi tidak mempunyai kitab dan tidak pula menganut agama salah

seorang nabi. Tentang kaum musyrik Arab yang tidak dipungut jizyah, Abu Hanifah menjelaskan bahwa kaum musyrik di Mekah dan Madinah hanya punya dua pilihan, masuk Islam atau diperangi.[21]

Penjelasan Nurcholish bahwa "kaum musyrik yang umat Islam tidak boleh berdamai dengan mereka ini", juga mengherankan. Selama ini, tidak ada larangan bagi kaum muslimin untuk berdamai dengan kaum musyrik. Bahkan, dengan kaum musyrik Quraisy pun, Rasulullah saw, pernah membuat perjanjian damai al-Hudaibiyah. Setelah kota Mekah ditaklukkan, Nabi saw. juga tidak memaksa mereka memeluk Islam. Mereka diberikan kebebasan memeluk agama mereka, meskipun sebagian besar kemudian memeluk Islam. Hanya saja, ada perbedaan antara nonmuslim Ahlul Kitab dan nonmuslim musyrik. Misalnya, dalam soal perkawinan dan binatang sembelihan.

Di dalam tulisannya tersebut, untuk mendukung pendapatnya bahwa Majusi adalah termasuk Ahlul Kitab--begitu juga agama-agama lain seperti Hindu, Budha, dan Konghucu--Nurcholish banyak mengutip secara panjang lebar pendapat Muhammad Rasyid Ridha.[22] Keterangan Rasyid Ridha, seperti dikutip Nurcholish, adalah sebagai berikut.

> "Yang tampak ialah bahwa Al-Qur`an menyebut para penganut agama-agama terdahulu, kaum Shabi'in dan Majusi--dan tidak menyebut kaum Brahma (Hindu), Buddha, dan para pengikut Konfusius--karena kaum Shabi'in dan Majusi

---

[21] Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, 1999, Jld III, hlm. 824-825). Tentang status musyrikin Arab, lihat surah at-Taubah ayat 5.

[22] Dalam wawancaranya yang dimuat di situs Jaringan Islam Liberal, Zainun Kamal, salah satu kontributor Islam Liberal, juga menyatakan, "*Penganut Budha dan Hindu adalah Ahlul Kitab.*" Kata Zainun, dalam konteks Indonesia, agama Budha, Hindu, Konghucu, atau Shinto--menurut Mohammad Abduh--dalam kitab tafsirnya, *al-Manar*, juga disebut *ahlul kitab*. Alasannya karena ada kitab sucinya. Dan tentu saja, kitab suci tersebut dibawa oleh seorang nabi. Pengertian nabi di sini diartikan sebagai pembawa pesan moral. Itu dikaitkan dengan ajaran Al-Qur'an bahwa "*Allah mengutus kepada setiap umat seorang rasul* (*fabaatsna likulli ummatin rasula*)". Jadi setiap umat itu ada nabinya. Dalam hal agama Budha, bisa dikatakan bahwa Sidharta Gautama adalah seorang nabi yang membawa kitab suci.

dikenal oleh bangsa Arab yang menjadi sasaran mula-mula Al-Qur`an. Pasalnya, kaum Shabi'in dan Majusi itu berada berdekatan dengan mereka di Irak dan Bahrain. Mereka (orang-orang Arab) belum melakukan perjalanan ke India, Jepang, dan Cina sehingga tidak mengetahui golongan lain. Tujuan ayat suci telah tercapai dengan menyebutkan agama-agama yang dikenal (oleh bangsa Arab), sehingga tidak perlu membuat keterangan yang terasa asing (*ighrab*) dengan menyebut yang tidak dikenal oleh orang yang menjadi sasaran pembicaraan itu di masa turunnya Al-Qur`an, berupa penganut agama-agama yang lain. Setelah itu tidak diragukan bagi mereka (orang Arab) yang menjadi sasaran pembicaraan (wahyu) itu bahwa Allah juga akan membuat keputusan perkara antara kaum Brahma, Buddha, dan lain-lain."

Pendapat Rasyid Ridha itu tidak populer di kalangan para ulama, sebagaimana telah dijelaskan oleh Dr. Muhammad Galib M. dalam disertasinya. Pendapat Quraish Shihab menguatkan bahwa makna "Ahlul Kitab" memang menunjuk kepada kelompok Yahudi dan Nasrani. Tapi, pendapat minoritas itulah yang terus dikampanyekan oleh Nurcholish Madjid dan kalangan yang kini menyebut kelompoknya sebagai Islam liberal, seperti bisa dibaca dalam penerbitan mereka.[23]

Entah apa motif penyebaran paham seperti ini. Karena pada praktiknya, akan sangat sulit untuk mengetahui apakah kitab suci suatu agama yang tidak secara tegas disebutkan dalam Al-Qur`an (Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur`an) merupakan wahyu dari Allah SWT yang kemudian diselewengkan, atau murni pikiran manusia biasa. Adalah menarik untuk mencermati sejumlah daftar agama besar, kitab suci, dan pendirinya, berikut ini.

---

[23] Sebagai contoh, dalam diskusi di Yayasan Aksara, 31 Januari 2002, Nurcholish masih mempromosikan gagasannya tersebut. Ketika itu, usai diskusi, penulis sempat bertanya langsung kepada Nurcholish, kalau dasarnya adalah memiliki "kitab", apakah Darmogandul dan Gatholoco juga masuk kategori Ahlul Kitab? Nurcholish menjawab, "Tidak." Nurcholish juga menyebut Hamka termasuk yang berpendapat seperti itu. Kepada penulis, Nurcholish katakan, hal itu ada dalam *Tafsir al-Azhar*. Tetapi, kenyataannya, dalam *Tafsir al-Azhar* juzu' VI, saat membahas surah al-Maa'idah ayat 5, Hamka menjelaskan bahwa Ahlul Kitab itu adalah Yahudi dan Nasrani.

No.	Nama Agama	Pembangun Agama	Kitab Suci
1.	Yahudi	Musa (lk. 1200 SM)	Taurat
2.	Brahma	.... (lk 2000 SM)	Veda
3.	Zarathustra	Zarathustra (660-583 SM)	Avesta
4.	Buddha	Sidharta (563-483 SM)	Tripitaka
5.	Jaina	Mahavira (556-429 SM)	Agamas
6.	Shinto	..... (lk 660 SM)	Kojiki/Nihongi
7.	Konghuchu	Konghuchu (551-479 SM)	Lun Yu, dll.
8.	Tao	Lao Tze (604-524 SM)	Tao The King
9.	Kristen	Jesus (lk 1-30 M)	New Testament
10.	Islam	Muhammad saw. (570-632 M)	Al-Qur'an
11.	Sikh	Guru Nanak (1469-1538)	Adi Granth

Dikutip dari buku *Agama-Agama Besar di Dunia*, karya Joesoef Sou'yb, Al-Husna Zikra, 1996, hlm. 12.

Selain ke-11 agama yang disebutkan tersebut, masih banyak agama lain yang kini dikenal di muka bumi, seperti agama Baha'i yang berpusat di Israel dan Jainisme (agama nonkekerasan dari India yang diajarkan oleh Mahavira pada abad ke-5 SM, bersamaan dengan kemunculan Budhisme, yang kini mempunyai sekitar 70.000 pengikut di AS). Dalam daftar penandatangan naskah deklarasi bernama *"Declaration Toward a Global Ethic"*, pada 28 Agustus 1993 di Chicago, tercatat sejumlah wakil-wakil dari agama/kelompok seperti Baha'i, Brahma Kumaris, Budhisme, Kristen, agama-agama Asli, Hinduisme, Jainisme, Yudaisme, Islam, Neo Pagan, Sikh, Taois, Teosofis, Zoroasterian, dan sebagainya.[24]

Dalam *Atlas of The World's Religions* (1999), disebutkan daftar agama-agama di dunia beserta jumlah pemeluknya.

World Population by Religion: mid-1998	
Christian	1,965,993,000
Muslim	1,179,326,000

[24] Lihat Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, *Etik Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999, hal. 42-47.

Hindu	767,424,000
Non-religious	766,672,000
Buddhist	356,875,000
Tribal Religion	244,164,000
Atheist	146,406,000
New Religions	99,191,000
Sikh	22,874,000
Daoist	20,050,000
Jewish	15,050,000
Baha'i	6,251,000
Confucian	5,067,000
Jain	4,152,000
Shinto	3,571,000
Parsi (Zoroastrian)	479,000

Melihat begitu banyaknya jenis agama, maka jika pendapat yang menyatakan bahwa Hindu, Budha, Konghucu, Sinto, adalah termasuk Ahlul Kitab, lalu bagaimana halnya dengan agama-agama lain--seperti Sikh, Jainisme, Baha'i, dan sebagainya? Bagaimana pula dengan berbagai aliran kebatinan yang juga memiliki kepercayaan dan ritualitas tersendiri, sehingga mereka menuntut diakui sebagai agama? Seperti dikatakan seorang tokoh Kebatinan Indonesia, Wongsonegoro, sebagai berikut:

> "Agama dan kebatinan, kedua-duanya mempunyai unsur yang sama, ialah satu Panembah (kebaktian kepada Tuhan Yang Maha Esa) dan budi luhur. Perbedaan hanya terdapat pada pemberian stres atau tekanan. Bagi agama, stresnya diberikan pada Panembah, sedang kebatinan memberikan tekanan kepada tercapainya budi luhur dan kesempurnaan hidup. Lagipula ide tentang Ketuhanan Yang Maha Esa bukan monopoli agama-agama. Pengikut-pengikut gerakan kebatinan bukanlah orang-orang ateis, karena mereka semua percaya kepada Tuhan." [25]

[25] Lihat Rahmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama*, Kanisius, 1976, hal. 69-70. Dalam sebuah rapat tentang rencana acara *Rekonsiliasi Indonesia untuk Era Tanpa Kekerasan* di Kantor PGI, Jakarta, 19 Oktober 2000, di mana penulis hadir mewakili MUI, seorang tokoh kebatinan, menyatakan, "Mengapa agama impor diakui di Indonesia, tetapi agama asli malah tidak diakui."

Di antara aliran kebatinan juga ada yang mempunyai "kitab" yang disucikan pengikutnya. Misalnya, kelompok "Pangestu" (Paguyuban Ngesti Tunggal) memiliki kitab suci yang dinamakan *Sasangka Jati*. Ada juga kitab *Hidayat Jati, Darmo Gandul, Gatholoco*, dan sebagainya. Manakah yang merupakan agama dan yang manakah yang disebut sebagai "kitab suci"? Akhirnya, jika mau memperlebar konsepsi Ahlul Kitab di luar Yahudi dan Nasrani, maka mau tidak mau harus mendefinisikan terlebih dahulu apa yang disebut agama. Inilah soal yang sangat rumit.

Sebagai ilustrasi, bisa disimak definisi yang diberikan oleh Mircea Eliade tentang orang yang beragama (*religious man*), "*A Religious man is one who recognises the essential differences between the sacred and the profane and prefers the sacred* 'Seorang beragama ialah orang yang menyadari perbedaan-perbedaan pokok antara yang suci dan yang biasa (profan), serta mengutamakan yang suci'." Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai, "*Religion ia an interdependent whole composed of beliefs ant rites (faiths and practices) related to sacred things, unites adherents in a single community known as a Church* 'Agama itu adalah suatu keseluruhan yang bagian-bagiannya saling bersandar, terdiri dari akidah-akidah (kepercayaan) dan ibadat-ibadat, semuanya dihubungkan dengan hal-hal yang suci, dan mengikat pengikutnya dalam suatu masyarakat yang disebut gereja'."[26]

Definisi agama yang diberikan oleh Endang Saifuddin Anshari tampak lebih pas, "Agama, religi, dan din (pada umumnya) adalah sistem kredo (tata keimanan atau tata keyakinan) atas adanya sesuatu Yang Mutlak di luar manusia dan satu sistem ritus (tata peribadatan) manusia kepada yang dianggapnya Yang Mutlak itu serta sistem norma (tata-kaidah) yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam lainnya, sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan termaksud."[27]

---

[26] HM Rasjidi, ***Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi***, Bulan Bintang, 1974, hal. 48-49.

[27] Dikutip dari buku ***Pluralisme Agama Menurut Al-Qur'an***, karya Muhammad Amin Suma, Pustaka Firdaus, 2001, hal. 12.

Dengan bersandarkan pada definisi Endang Saifuddin Anshari itu, maka akan terdapat banyak agama di dunia, dan tetap akan sangat sulit untuk menentukan mana agama di luar Yahudi dan Kristen yang termasuk ke dalam kategori "Ahlul Kitab". Memang dalam argumentasinya, Rasyid Ridha--seperti dikutip Nurcholish--menyatakan bahwa penggunaan umum perkataan "Ahli Kitab" untuk dua kelompok (Yahudi dan Nasrani) karena adanya kepastian asal kitab-kitab suci mereka dan tambahan sifat-sifat khusus mereka, tidak mesti berarti bahwa di dunia ini tidak ada Ahli Kitab selain mereka. Padahal, diketahui bahwa Allah mengutus rasul-rasul dalam setiap umat untuk membawa berita gembira dan berita ancaman. Bersama para rasul itu, Dia (Allah) menurunkan Kitab Suci dan Ajaran Keadilan (*al-Mizan*) agar manusia bertindak dengan keadilan.[28]

Adanya banyak nabi yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia, hal itu sudah dimaklumi. Tetapi, sangat sulit untuk memberikan kepastian bahwa suatu "kitab yang disucikan" oleh suatu pemeluk agama yang ada di dunia saat ini, adalah berasal dari wahyu atau karya manusia. Karena itulah--meskipun sudah dikenal pada masa Nabi saw.--Majusi tidak disebut sebagai Ahlul Kitab. Tetapi, diperintahkan oleh Nabi saw. agar mereka diperlakukan sebagaimana Ahlul Kitab, dalam hal penarikan jizyah. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ketika ditanya apakah kaum Budha punya "kitab", menjawab, "Kita tidak pernah tahu mereka punya kitab samawi, maka hukum atas mereka adalah sama dengan hukum penyembah berhala."[29]

Bin Baz juga pernah ditanya, "Siapa Ahlul Kitab sekarang, mengingat kaum Yahudi dan Nasrani saat ini adalah kaum musyrik kepada Allah SWT?" Dia menjawab bahwa Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dalam kondisi kemusyrikan mereka. Kemusyrikan mereka itu telah terjadi ketika turunnya Al-Qur`an kepada Nabi Muhammad saw.. Ketika itu, Allah SWT telah memberi kabar bahwa mereka memang kafir dan musyrik,

---

[28] Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, 2000, hal.71.

[29] Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmu'ul Fataawa wa-Maqaalaat al-Mutanawwi'ah*, Jld. II, hal. 441.

seperti disebut dalam firman Allah SWT,

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah ialah Almasih Putra Maryam.' Padahal Almasih sendiri berkata, 'Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempat orang itu ialah di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.' Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.'" **(al-Maa`idah:72-73)**

"Mereka menjadikan pendeta-pendeta dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan (juga mereka mempertuhankan) Almasih putra Maryam. Padahal, mereka hanya disuruh menyembah Tuhan Yang Maha Esa; tidak ada Tuhan selain Dia. Mahasuci Allah dari apa yang mereka persekutukan." **(at-Taubah: 31)**

"Katakanlah, 'Hai Ahli Kitab, marilah (berpegang) kepada satu kalimat (ketetapan) yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali Allah, kita tidak mempersekutukan Dia dengan sesuatu pun, dan tidak (pula) sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan selain Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, 'Saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang muslim.'" **(Ali Imran: 64)**

"Orang-orang Yahudi berkata, 'Uzair itu putra Allah', dan orang-orang Nasrani berkata, 'Almasih itu putra Allah.' Demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allahlah mereka, bagaimana mereka sampai berpaling?" **(at-Taubah: 30)**

Sejumlah ayat Al-Qur`an tersebut menunjukkan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani memang sudah kufur dan syirik saat ayat-ayat Al-Qur`an diturunkan, namun mereka tetap disebut sebagai

"Ahlul Kitab".[30]

Penjelasan Abdullah bin Baz ini sejalan dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Ketika ditanya tentang hukum menikahi wanita Ahlul Kitab yang melakukan tindakan syirik, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa hal itu dibolehkan. Kaum Yahudi dan Nasrani melakukan tindakan syirik (*bil fi'li*) tetapi Al-Qur`an tidak menyebut mereka sebagai kaum musyrik (*bil ismi*). Namun, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mereka tetap golongan kafir. Pembahasan tentang hal ini diletakkan dalam bab tentang "*Nikahul Kuffaar*" dari kitab *Majmu'ul Fataawa*. [31]

Pendapat yang menyatakan bahwa Ahlul Kitab juga mencakup agama-agama di luar Yahudi dan Kristen dapat membawa dampak yang sangat serius. Yaitu, berujung pada "penyamaan agama" yang populer disebut sebagai "teologi pluralis". Sebab, penganut teologi tersebut biasanya tidak mau repot-repot untuk meneliti perbedaan mendasar pada masing-masing agama. Tetapi, hanya membuat simplifikasi yang gegabah bahwa "semua agama pada intinya sama".

Agak menarik bahwa pendapat semacam ini dipopulerkan oleh Rasyid Ridha, murid dari Muhammad Abduh dan Jamaluddin al-Afghani. Di kalangan sejarawan dan pakar tafsir Al-Qur`an, banyak yang menyorot keanggotaan al-Afghani dan Abduh di organisasi Freemasonry. Yakni, sebuah organisasi mantel Yahudi yang mengusung slogan "kebebasan, persamaan, dan persaudaran" dan mempromosikan persaudaraan universal tanpa memandang etnis, bangsa, dan agama.[32]

---

[30] Abdullah bin Baz, *op.cit.*, hal. 302.

[31] Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fataawa*, Jld. XXXII, hlm. 179, Darul Arabiyah, Beirut, 1398.

[32] Tentang Freemasonry, misalnya, dapat dilihat dalam buku ***Rahasia Gerakan Freemasonry dan Rotary Club*** karya Muhammad Fahim Amin, Al-Kautsar, 1991. Dalam buku ini disebutkan bahwa Freemasonry adalah organisasi Yahudi Internasional yang bekerja untuk menghancurkan kesejahteraan manusia dan tujuan akhirnya mengembalikan bangunan Haikal Sulaiman. Pada tahun 1978, Lembaga Penelitian dan Perkembangan Agama (LPPA) Muhammadiyah menerbitkan sebuah buku berjudul ***Sorotan terhadap Protokolat***, yang isinya antara lain mengingatkan bahaya organisasi Freemasonry ini bagi umat manusia.

Apakah ada pemikiran-pemikiran Freemasonry yang ikut berpengaruh terhadap *Tafsir Al-Manar*? Hal ini masih sangat kontroversial. Kritik terhadap *Tafsir al-Manar* misalnya dilakukan oleh Dr. Abdussalam Majid Abdussalam al-Muhtasib dalam buku *Ittijaahaat at-Tafsir fi al-Ashri ar-Rahin*.[33]

Terlepas dari pro-kontra soal keterlibatan guru Rasyid Ridha dalam gerakan Freemasonry, pendapatnya yang menyatakan bahwa kaum Ahlul Kitab bisa dilebarkan ke berbagai penganut agama lain, sudah terbukti merupakan pendapat yang lemah dan minoritas di kalangan ulama. Maka, dalam soal ini, perlu dilakukan kritik terhadap Nurcholish Madjid dan kawan-kawan atas "kengototannya" dalam mempromosikan gagasan semacam itu ke tengah-tengah umat Islam.

C. Nurcholish Madjid dan Ibnu Taimiyah

Seringnya nama Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah disebut-sebut dan dikutip ucapannya oleh Nurcholish Madjid menimbulkan

---

[33] Diindonesiakan oleh Moh. Maghfur Wachid dengan judul *Visi dan Paradigma Tafsir Kontemporer*, Penerbit al-Izzah, 1997. Buku ini memberikan sorotan tajam terhadap kiprah al-Afghani dan muridnya, Muhammad Abduh, termasuk sejumlah pemikiran Rasyid Ridha dalam *Tafsir al-Manar*. Kontroversi seputar soal ini, misalnya, juga dapat dilihat dalam buku karangan Hamka yang berjudul *Said Jamaluddin al-Afghani*. Dalam bukunya tersebut, Hamka menyebut al-Afghani sebagai "Pelopor Kebangkitan Muslimin". Tentang keanggotaan al-Afghani di Freemasonry (Masoni) Hamka menyebutkan, al-Afghani tanpa ragu-ragu masuk ke Masoni pada mulanya untuk "melatih kebebasan pikiran". Tapi karena kecewa dengan Masoni, maka al-Afghani akhirnya keluar dari organisasi tersebut. (Lihat Hamka, *Said Jamaluddin al-Afghani*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981, hlm. 65-67). Kritik terhadap al-Afghani juga datang dari Dr. Abdullah Azzam. Menurut tokoh penting mujahidin Afghanistan ini, al-Afghani ikut serta menghancurkan Khilafah Islamiah dan belum pernah melaksanakan ibadah haji, meskipun sudah berkeliling ke berbagai penjuru dunia. (Lihat: Abdullah Azzam, *Runtuhnya Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Pustaka al-Alaq, Solo, 2001, hlm. 102-103). Tanpa mengurangi jasa-jasa yang telah diperbuat oleh Abduh dan Rasyid Ridha, perdebatan seputar ini perlu dibahas secara terbuka agar dicapai kesimpulan yang benar, mengingat mereka tetap manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Yang menjadi pertanyaan, mengapa tokoh-tokoh sekaliber al-Afghani dan Abduh "mau" memasuki organisasi seperti Freemasonry, padahal ketika itu, Freemasonry sedang terlibat dalam penghancuran Khilafah Islamiah, dengan–antara lain–menyusupkan seorang kadernya bernama Musthafa Kemal Attaturk untuk menghancurkan kekhalifahan. Dalam buku *Wajah Dunia Islam* karya Dr. Muhammad Sayyid al-Wakkil, (1998, hlm. 314), disebutkan bahwa Kemal merupakan tokoh organisasi "Persatuan dan Kemajuan" yang mayoritas anggotanya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Turki menamakan orang-orang Yahudi dengan sebutan "Dunamah", yang berarti kafir atau ateis.

kesan, seolah-olah gagasan Nurcholish Madjid sejalan dengan gagasan Ibnu Taimiyah. Jika diteliti lebih jauh, akan terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara sejumlah pemikiran Nurcolish dan Ibnu Taimiyah. Tulisan berikut ini akan menguraikan hal tersebut.

Bagi Nucholish Madjid, nama dan sosok Ibnu Taimiyah tentu sudah tidak asing lagi. Disertasi Nurcholish Madjid dalam bidang *"Islamic thought"* dari Universitas Chicago diberi judul *Ibn Taymiyya on Kalam and Falasifa*--entah mengapa hingga kini, disertasi tersebut belum diterbitkan di Indonesia. Karena itu, tak heran, jika Nurcholish begitu banyak mengutip Ibnu Taimiyah dalam ceramah-ceramah dan tulisannya. Dalam buku *Islam Doktrin dan Peradaban*, nama Ibnu Taimiyah disebut lebih dari 70 kali. Di buku *Islam Agama Peradaban*, nama Syaikhul Islam ini juga disebut di 19 tempat. Tapi, kekaguman Nurcholish Madjid terhadap Ibnu Taimiyah, sepertinya tidak selalu tercermin dalam pemikiran-pemikirannya. Bahkan dalam beberapa hal, Nurcholish menempatkan sosok Ibnu Taimiyah dalam gambaran yang sangat kontradiktif dengan sang Syaikhul Islam.

Sebagai contoh, dalam pengantarnya untuk buku *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, terbitan *Kompas* tahun 2001, Nurcholish mencatat:

> "Di zaman klasik, Ibnu Taimiyah juga sudah terlibat dalam usaha menjelaskan kepada masyarakatnya berkaitan dengan masalah persamaan misi antarpara pengikut kitab suci, dengan memberikan penjelasan yang sejalan dengan apa yang kemudian dipertegas oleh Rasyid Ridha di atas. 'Sesungguhnya,' ucap Ibnu Taimiyah dalam *Ahkam az-Zawaj*, 'Ahli Kitab tidaklah termasuk ke dalam kaum musyrikin. Memandang Ahli Kitab sebagai bukan kaum musyrikin dengan argumen bahwa asal-usul agama mereka ialah mengikuti kitab-kitab yang diturunkan Allah yang membawa ajaran Tauhid, bukan ajaran syirik. Jadi, jika dikatakan bahwa Ahli Kitab itu dengan alasan bukan kaum musyrik, karena kitab suci yang berkaitan dengan mereka itu tidak mengandung syirik, sama dengan jika dikatakan bahwa kaum muslimin dan umat

Muhammad tidaklah terdapat pada mereka itu syirik dengan alasan yang sama, ... walaupun dalam kenyataannya kaum muslimin juga banyak melakukan bid'ah dan syirik kepada Allah.'" [34]

Kutipan Nurcholish Madjid tentang pendapat Ibnu Taimiyah tersebut kurang akurat dan memotong bagian-bagian penting dari ungkapan Ibnu Taimiyah, yang pernah dia kutip sendiri, saat membahas masalah Ahli Kitab dalam buku *Islam Agama Peradaban* (2000, hal. 67-68). Misalnya, kutipan Ibnu Taimiyah, "...*Kalau dikatakan bahwa Allah telah menyifati mereka dengan syirik dalam firman-Nya, 'Mereka (Ahli Kitab) itu mengangkat para ulama dan pendeta-pendeta mereka, serta Isa putra Maryam, sebagai tuhan-tuhan selain Allah, padahal mereka tidaklah diperintah melainkan agar hanya menyembah Tuhan Yang Maha Esa yang tiada tuhan selain Dia. Mahasuci Dia dari apa yang mereka persekutukan itu.* **(at-Taubah: 31)**.'"

Jadi, Ibnu Taimiyah sendiri menegaskan bahwa Ahli Kitab itu melakukan aktivitas syirik, sebagaimana disebutkan dalam sejumlah ayat Al-Qur`an. Nurcholish mengutip pendapat Ibnu Taimiyah itu dari Kitab *Ahkam az-Zawaj*. Kutipan itu persis sama dengan apa yang terdapat dalam Kitab *Majmu'ul Fataawa*, Jld. XXXII, hlm. 179. Masalah Ahli Kitab tersebut diletakkan di bawah judul *"Nikahul Kuffaar"*. Konteksnya, ketika itu Ibnu Taimiyah ditanya tentang hukum menikahi wanita Ahlul Kitab yang melakukan tindakan syirik. Lalu, Ibnu Taimiyah menjawab bahwa hal itu dibolehkan karena kaum Yahudi dan Nasrani melakukan tindakan syirik (*bil fi'li*), tetapi Al-Qur`an tidak menyebut mereka sebagai kaum musyrik (*bil ismi*). Namun, Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa mereka tetap golongan kafir.[35]

Penegasan Ibnu Taimiyah bahwa Ahli Kitab itu melakukan syirik, tetapi Al-Qur`an membedakan mereka dengan kaum musyrik lainnya, sehingga tidak disebut sebagai "musyrik" (*bil ismi*), itu terpotong dari kutipan di buku *Islam Agama Peradaban*. Pada halaman 74 buku itu, kutipan Nurcholish terakhir adalah,

---

[34] *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, terbitan *Kompas*, 2001, hal. 1-8.
[35] *Majmu' al-Fataawa*, Jld. XXXII, hal. 179, Darul Arabiyah, Beirut, 1398 H.

"Wa lam yukhbir Allahu 'Azza wa Jalla 'an ahli kitaabi annahum musyrikuuna bil-ismi." Padahal, setelah kata *bil-ismi*, ada kelanjutan ungkapan Ibnu Taimiyah yang sangat penting, yaitu, *"Bal qaala ('ammaa yusyrikuuna) bil-fi'li, wa aayatul baqarah minhaa (al-musyrikiina) wal (musyrikaati) bil-ismi. Wal ismu awkadu mina fi'li."*

Mengapa ketelitian dalam soal kutipan Ibnu Taimiyah itu penting? Sebab, oleh Nurcholish Madjid, pendapat bahwa Ahli Kitab itu bukan musyrik diletakkan dalam konteks pembahasan "Teologi Inklusif". Teologi inklusif Nurcholish Madjid, seperti dipaparkan oleh Sukidi dalam buku *Teologi Inklusif Cak Nur*, dikatakan sebagai alternatif dari "Teologi Eksklusif" yang menganggap bahwa kebenaran dan keselamatan (*truth and salvation*) suatu agama, menjadi monopoli agama tertentu. Karena itu, dalam perspektif "Teologi Inklusif", klaim bahwa hanya agamanya saja yang benar dan menjadi jalan keselamatan, adalah teologi yang dianggap salah.

Hampir semua agama formal (*organized religion*), kata Sukidi, memiliki klaim keselamatan bahwa "hanya agama sayalah yang memberikan keselamatan, sementara agama Anda tidak, dan bahkan menyesatkan". Menurutnya, klaim-klaim keselamatan seperti itu bersifat *latent*, dan terkadang juga manifes, terekspresikan keluar, ke berbagai tradisi agama-agama, sehingga mengakibatkan perang (keselamatan) antaragama. Sukidi berkata, "Padahal, bukankah klaim keselamatan itu tidak saja mengakibatkan sikap menutup diri terhadap kebenaran agama lain, tetapi juga berimplikasi serius atas terjadinya konflik atas nama agama dan Tuhan?" [36]

Dalam buku *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman* (halaman 2), terbitan *Kompas*, Nurcholish menulis kata pengantar panjang yang isinya menjelaskan tentang teologi inklusif dan pluralis. Di antaranya tercatat, *"Umat Islam pun diperintahkan untuk senantiasa menegaskan bahwa kita semua, para penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa, dan sama-sama pasrah (muslimun) kepada-Nya."*

---

[36] Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Kompas, 2001, hal. xii-xiii.

Ungkapan Nurcholish Madjid itu wajib dikritisi. Benarkah umat Islam, Kristen, Hindu, Budha, Khonghucu, dan sebagainya, sama-sama menyembah "Tuhan Yang Maha Esa" dan sama-sama pasrah kepada-Nya? Bukankah antara Islam dan Kristen terdapat perbedaan akidah yang sangat prinsip, sehingga Allah SWT menegaskan,

"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah ialah Almasih Putra Maryam.' Padahal Almasih sendiri berkata, 'Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempat orang itu ialah di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.' Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Almasih Putra Maryam itu hanyalah seorang rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa rasul." **(al-Maa`idah: 72-75)**

Menyimak firman Allah dalam Al-Qur`an tersebut, jelas bertentangan dengan pernyataan Nurcholish Madjid. Jelas sekali, kaum Nasrani--apalagi penganut Hindu, Budha, dan sebagainya--telah melakukan tindakan syirik dan kezaliman. Bagaimana mungkin seorang Nurcholish Madjid berani menyatakan bahwa umat Islam diperintahkan untuk menegaskan bahwa kaum Nasrani, Hindu, Budha, Khonghucu, dan penganut "kitab suci" lainnya, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa?

Dalam subjudul "Satu Tuhan, Beda Jalan" Nurcholish menguraikan secara panjang lebar bahwa Islam juga mengakui keabsahan agama-agama lain dan kitab sucinya. Misalnya, kutipannya berikut.

"... Namun, Al-Qur`an mengakui keabsahan keduanya (Taurat dan Injil-pen.) sekaligus. Al-Qur`an juga menegaskan bahwa

Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Almasih itu menguatkan kebenaran Taurat, memuat petunjuk dan cahaya serta nasihat bagi kaum yang bertakwa. Mereka harus mengakui kenyataan ini, kalau tidak, sekali lagi, mereka termasuk orang-orang yang fasik (berkecenderungan yang jahat) (al-Maa`idah: 46-47)." [37]

Melalui tulisan-tulisannya itu, Nurcholish seperti menutup mata terhadap kritik-kritik keras yang diungkapkan Al-Qur`an terhadap kepercayaan Yahudi dan Nasrani. Memang, Al-Qur`an menyebutkan adanya kitab-kitab Taurat, Injil, dan Zabur, yang wajib diimani oleh kaum Muslimin. Tetapi, keimanan bahwa "Allah pernah menurunkan sejumlah kitab suci di masa lalu", tidak berarti kitab-kitab suci itu benar sampai sekarang. Sebab, kitab-kitab suci itu telah diselewengkan oleh pengikutnya. Ibnu Taimiyah sendiri sudah menulis Kitab *al-Jawaab as-Shahih li man Baddala Diin al- Masiih* sebanyak empat jilid. Jika membaca kitab tersebut, jauh sekali pengertian dan sikap Ibnu Taimiyah dengan pemikiran dan sikap Nurcholish Madjid.

Sebagai contoh, dalam menafsirkan surah al-Maa'idah ayat 66, Nurcholish Madjid menulis:

"Sebuah firman Allah yang ditujukan kepada para penganut kitab suci mana saja menyatakan bahwa kalau mereka benar-benar beriman dan bertakwa, Allah akan mengampuni segala kejahatan mereka dan akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga kebahagiaan abadi. Kemudian firman lainnya yang ditujukan kepada kaum Yahudi dan Nasrani--yang langsung atau tidak langsung menunjukkan pengakuan akan eksistensi agama dan ajaran mereka--menjanjikan kemakmuran yang melimpah ruah dari atas mereka (langit) dan dari bawah kaki mereka (bumi), jika mereka benar-benar menegakkan ajaran Taurat dan Injil serta ajaran yang diturunkan Tuhan kepada mereka (al-Maa`idah: 66).

Sementara itu, kaum muslimin yang di negeri ini merupakan golongan umat terbesar, diajarkan untuk beriman kepada

---

[37] *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, hal. 5.

kitab-kitab Taurat dan Injil, ditambah Kitab Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Dawud a.s., termasuk kitab suci yang lainnya. Hal ini dapat kita simpulkan dari suatu penegasan Allah kepada Nabi Muhammad saw., bahwa beliau harus menyatakan beriman kepada kitab suci apa saja yang diturunkan Allah kepada umat manusia. Sikap ini ada dalam rangkaian petunjuk dasar hubungan beliau dengan agama-agama yang ada pada waktu itu, yaitu agama-agama yang berdasarkan kitab suci yang diturunkan Allah SWT kepada mereka yang hidup sezaman dengan Rasulullah saw. (an-Nahl: 26)." [38]

Ayat 66 surah al-Maa'idah yang dijadikan landasan oleh Nurcholish Madjid itu berbunyi sebagai berikut.

"Dan sekiranya mereka sungguh-sungguh menegakkan Taurat dan Injil, dan apa-apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, niscaya mereka akan mendapat makanan dari atas mereka dan dari bawah mereka. Di antara mereka ada golongan yang adil. Alangkah buruknya apa yang dikerjakan oleh kebanyakan mereka."

Imam Ibnu Katsir memberi penjelasan tentang ayat tersebut sebagai berikut.

"Jika mereka mengamalkan apa yang terdapat dalam dalam kitab-kitab mereka dari para nabi sebagaimana adanya tanpa mengubah, mengganti, dan membelokkan maksudnya, niscaya pengalaman itu akan menuntun mereka kepada kepatuhan atas kebenaran dan pengamalan sesuai dengan tuntunan Al-Qur`an yang dibawa oleh Muhammad saw.. Sebab, kitab mereka menuturkan keharusan membenarkan Nabi saw. dan kewajiban mengikutinya."[39]

Senada dengan Ibnu Katsir, Hamka juga memberikan penekanan yang sama bahwa jika kaum Yahudi dan Nasrani berpegang teguh pada kitab mereka dan tidak melakukan

---

[38] *Ibid*, hal. 5-6.

[39] Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jld. 2, hal. 122.

perubahan-perubahan pada kitab Taurat dan Injil, tentu mereka akan beriman kepada kenabian Muhammad saw.. Hamka mencatat dalam tafsirnya:

> "... tetapi mereka tidak mau memegang betul isi kitab mereka, lalu mereka elakkan kepada penafsiran lain kalau akan bertemu dengan nama Muhammad, bukan lain sebabnya, bukan karena Muhammad tidak benar, melainkan karena politik belaka. Karena takut hilang pengaruh. Karena tidak suka kebesaran pindah dari tangan Bani Israel ke tangan bangsa Arab." [40]

Jadi, jika diteliti dengan cermat dan dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Qur`an lainnya, ayat 66 surah al-Maa'idah tersebut, jauh sekali dari makna "teologi inklusif" atau "teologi pluralis" yang mempersepsikan bahwa semua agama itu pada dasarnya sama saja. Seolah-olah tidak menjadi masalah bagi muslim, apakah manusia memeluk Kristen atau Yahudi. Dalam hal ini, Nurcholish terlihat menghindar dari ayat-ayat Al-Qur`an yang mengecam atau mengutuk sikap kaum Yahudi dan Nasrani. Dalam ayat 72-75 surah al-Maa'idah, Allah SWT mengecam keras (dengan menyatakan sebagai kafir) kepercayaan kaum Nasrani. Dan dalam ayat 64, Allah SWT mengutuk sikap kaum Yahudi. Bahkan, apa-apa yang diturunkan kepada Muhammad saw., justru semakin menambah sikap melampaui batas dan kekufuran di kalangan sebagian besar kaum Yahudi. Pengkhianatan kaum Yahudi dalam mengubah-ubah kitab suci mereka telah dilaknat keras oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

"Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia di dalam Alkitab, mereka itu dilaknati oleh Allah dan dilaknati oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat." **(al-Baqarah: 159)**

Jika semua agama di zaman Rasulullah saw. dianggap sama saja, lalu untuk apa Rasulullah sangat aktif mengajak kaum

---

[40] Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Juz. VI, hal. 309.

Yahudi dan Nasrani untuk masuk ke dalam agama Islam. Bahkan, Nabi saw. juga menantang delegasi Nasrani Najran untuk bermubahalah, setelah mereka menolak sejumlah argumentasi yang disampaikan oleh Rasulullah kepada mereka. Namun, delegasi Nasrani Najran itu menolak tantangan Rasulullah untuk melakukan mubahalah.[41] Hal ini digambarkan dalam surah Ali Imran ayat 61-63,

> "Siapa yang membantahmu tentang kisah Isa, sesudah datang ilmu, maka katakanlah kepadanya, 'Marilah kita memanggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu, diri kami dan diri kamu, kemudian marilah kita bermubahalah kepada Allah dan kita minta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tidak ada Tuhan selain Allah, dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Kemudian jika mereka berpaling (dari kebenaran), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui orang-orang yang berbuat kerusakan.'"

Misi Rasulullah saw. sebagaimana misi para rasul lainnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah semata dan menjauhi para thaghut (an-Nahl: 36). Karena itu, Rasulullah bersikap sangat tegas terhadap kepercayaan kaum Nasrani dan agama-agama lain yang menyesatkan. Rasulullah tidak membiarkan mereka dalam kesesatan, tetapi kepada mereka senantiasa disampaikan dakwah Islam, dan diajak masuk Islam. Rasulullah memang diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab suci yang diturunkan Allah kepada para nabi pendahulu beliau saw.. Tetapi, Nabi saw. juga memahami dan memberikan penjelasan bahwa kitab-kitab itu sudah diubah, sehingga tidak valid lagi dijadikan sebagai pedoman. Sebagai contoh, ketika Rasulullah saw. mulai menjalankan misi kenabiannya (610 M), kaum Nasrani telah 300 tahun lamanya tenggelam dalam ke-

---

[41] Tentang perdebatan Rasulullah saw. dengan delegasi Nasrani Najran, lihat Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jld. 1, GIP, 2001, hal. 522-527.

sesatan, karena menjadikan Isa a.s. sebagai Tuhan atau anak Tuhan.[42]

Jika ditelaah tanpa perlu terlalu mendalam, akan tampak bahwa pemikiran Nurcholish Madjid dalam soal teologi inklusif atau pluralis, sangat kontradiktif dengan pemikiran Ibnu Taimiyah. Ibaratnya seperti membadingkan yang batil dengan yang hak. Simaklah pemikiran-pemikiran Ibnu Taimiyah dalam kitab *Iqtidla' ash-Shirath al-Mustaqim Mukhaalafata Ashhabil Jahiim*, yang isi kitab ini terkadang juga dikutip oleh Nurcholish Madjid.[43] Ada satu subbab yang berjudul *"Al-Maghdhuubi 'alahim: al-yahuud, wa adh-dhaalluuna: an-Nashaara* 'Kaum yang Dimurkai Allah adalah Yahudi, yang Tersesat adalah Nasrani'". Di kitab ini, Ibnu Taimiyah memaparkan panjang lebar larangan Allah untuk menyerupai orang-orang kafir, khususnya Yahudi dan Nasrani, termasuk menghadiri perayaan hari-hari besar mereka.

Dalam kitabnya, Syaikhul Islam mengutip sebuah sabda Nabi saw. yang menyatakan,

"Sesungguhnya orang-orang Yahudi adalah yang dimurkai, sedangkan kaum Nasrani adalah kaum yang tersesat." **(HR Tirmidzi)**

Al-Qur`an menggambarkan kemurkaan Allah SWT kepada orang-orang Yahudi dalam sejumlah ayat,

"Katakanlah, 'Apakah akan Aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari (orang-

---

[42] Konsep Ketuhanan Yesus ditetapkan dalam Konsili ekumenis yang pertama, yaitu Konsili Nicea, tahun 325. Dalam Konsili inilah ditetapkan "doktrin trinitas", yang oleh sebagian kalangan Nasrani disebut sebagai "Syahadat dari Kaesarea". Di antara bunyinya adalah, *"Kami percaya akan satu Allah, Bapa Yang Mahakuasa, Pencipta hal-hal yang kelihatan dan tak kelihatan. Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus, Putra Allah, dilahirkan dari Bapa, satu-satunya yang dilahirkan, dari hakekat Bapa, Allah dari Allah, Terang dari Terang, Allah benar dari Allah benar, dilahirkan, bukan dijadikan, sehakikat dengan Bapa..."* (Lihat: Alex I. Suwandi PR, *Tanya Jawab Syahadat Iman Katolik*, Kanisius, 1992, hlm. 11) Jika dicermati, konsep-konsep akidah Islam banyak yang sepertinya menjawab langsung kesesatan iman kaum Nasrani tersebut. Seperti surah al-Ikhlash yang menegaskan bahwa Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan (*lam yalid wa lam yuulad*).

[43] Kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Abu Fudhail, dengan judul *Jalan Islam versus Jalan Setan*, at-Tibyan, Solo, 2001.

orang fasik) itu di sisi Allah, yaitu orang-orang yang dikutuk dan dimurkai Allah. Di antara mereka (ada) yang dijadikan kera dan babi (dan orang yang) menyembah thaghut." **(al-Maa`idah: 60)**

"Tidakkkah kamu perhatikan orang-orang yang menjadikan suatu kaum yang dimurkai Allah sebagai teman. Orang-orang itu bukan dari golongan kamu dan bukan (pula) dari golongan mereka." **(al-Mujaadalah: 14)** [44]

Adapun tentang kaum Nasrani, sudah ditegaskan Allah SWT bahwa mereka adalah kaum kafir, karena menuhankan Isa a.s.. Kaum Nasrani itu telah melampaui batas dalam agamanya, dengan memperlakukan Isa a.s. sebagai Tuhan (an-Nisaa: 171). Jadi, kaum Yahudi tak memenuhi hak Nabi Isa a.s.. Sedangkan, kaum Nasrani justru berlebihan dalam memperlakukan Isa a.s.. Karena itulah, mereka (Yahudi) adalah orang yang dimurkai Allah, dan kaum Nasrani adalah kaum yang tersesat.

Maka, Ibnu Taimiyah menguraikan secara panjang lebar kewajiban kaum muslimin untuk tidak mencontoh atau menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Sejumlah ayat Al-Qur`an yang ia kutip adalah surah al-Baqarah ayat 104, al-An'aam ayat 159, Ali Imran ayat 105, al-Bayyinah ayat 4, dan al-Maa'idah ayat 14. Nabi Muhammad saw. juga sangat keras dalam melarang kaum muslimin agar jangan menyerupai kaum Yahudi dan Nasrani. Beliau melarang keras sahabatnya untuk hidup membujang, dengan ungkapan, "Tidak ada 'kependetaan' dalam Islam", dan, "Itulah sisa-sisa keberadaan mereka di biara-biara."

Membaca kitab Ibnu Taimiyah ini akan mendapatkan pemahaman bahwa begitu tegasnya sikap yang harus ditunjukkan oleh kaum muslimin dalam urusan akidah terhadap kaum Yahudi dan Nasrani. Hal itu tampak, misalnya dari uraian Ibnu Taimiyah, tentang larangan menghadiri perayaan hari besar kaum kafir. Dalam sebuah hadits riwayat Abu Dawud, Anas bin Malik meriwayatkan, "Ketika Rasulullah saw. tiba di Madinah, orang-orang Madinah telah memiliki dua hari yang

[44] Berkenaan dengan orang-orang Yahudi, lihat juga Al-Qur'an surah Ali Imran ayat112, al-Baqarah ayat 161 dan 90.

mereka jadikan untuk bersuka cita. Rasulullah saw. bertanya kepada mereka, 'Ada apa dengan dua hari ini?' Dijawab mereka, 'Di masa jahiliah, kami biasa bermain-main pada dua hari itu.' Maka, Rasulullah saw. menasihati mereka, 'Sesungguhnya Allah telah menggantikan untuk kalian hari yang lebih baik dari itu, yakni Hari Idul Fitri dan Idul Adha.'"

Bandingkanlah pernyataan Ibnu Taimiyah berikut ini dengan tulisan-tulisan Nurcholish Madjid. Ibnu Taimiyah menegaskan:

> "Jadi, hal itu meyakinkan bahwa Imam kaum yang bertakwa (Rasulullah saw.), telah memberikan larangan keras terhadap umatnya untuk mengikuti (merayakan) hari-hari raya orang kafir. Bahkan, beliau saw. juga berupaya keras untuk menghapus dan menghilangkannya dengan berbagai cara. Pengakuan Rasulullah terhadap Ahlil Kitab tidaklah berarti beliau saw. merestui diperingatinya hari-hari raya mereka di kalangan umatnya. Sebagaimana beliau juga tidak menyetujui untuk melestarikan segala bentuk kemaksiatan dan kekufuran yang pernah dilakukan umatnya sebelumnya. Bahkan, Rasulullah sangat tegas dalam memerintahkan umatnya agar membedakan diri dengan kaum Ahlil Kitab dalam banyak hal yang mubah dan tata cara ibadah. (Itu) agar tidak menjadi jalan mempersamakan diri dengan mereka dalam soal-soal lainnya. Sebab, sesungguhnya semakin banyak perbedaan Anda dengan para penghuni neraka Jahim, maka Anda juga semakin jauh dari (persamaan) dengan perbuatan para penghuni neraka Jahim tersebut."[45]

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah juga menunjuk sikap Umar ibnul-Khaththab r.a. dalam soal hari besar kaum kafir. Umar pernah menyatakan, "*Ijtanibuu a'daaa 'llaahi fii 'idihim,'*(jauhilah musuh-musuh Allah pada hari-hari besar keagamaan mereka')" Kaum nonmuslim ketika itu dilarang oleh Umar untuk merayakan hari besar mereka secara mencolok sehingga menarik perhatian masyarakat. Menurut Ibnu Taimiyah, keputusan Umar itu merupakan ijma sahabat dan disepakati jumhur ulama. Umar

---

[45] *Iqtidlaa' ash-Shirathil Mustaqiim*, hal. 192-193.

juga mengatakan, "Janganlah kalian memasuki tempat-tempat ibadah kaum musyrik pada hari besar agama mereka. Sebab, sesungguhnya kemurkaan Allah pada hari itu sedang turun atas mereka." [46]

Dengan membandingkan pendapat-pendapat Ibnu Taimiyah dan Nurcholish Madjid akan tampak bahwa kutipan-kutipan pendapat Ibnu Taimiyah yang diambil oleh Nurcholish Madjid, dan meletakkannya dalam bingkai "teologi inklusif dan pluralis", merupakan tindakan yang tidak etis. Selama puluhan tahun, Nurcholish Madjid berhasil membonceng nama besar Ibnu Taimiyah untuk memuluskan misinya, Gerakan Pembaruan Islam dan Liberalisasi Islam. Sayang sekali, kaum muslimin kurang mencermati hal yang sangat serius bagi akidah Islam ini.

* * *

---

[46] *Ibid.*, hal. 199-202.

Bab Ke-3
PENGHANCURAN AKIDAH ISLAM

"Prinsip lain yang digariskan oleh Al-Qur`an, adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan, dengan begitu, layak memperoleh pahala dari Tuhan."
(Alwi Shihab)

"Agama yang membawa misi Tauhid adalah Yahudi, Nasrani (Kristen), dan Islam."
(Said Aqiel Siradj)

"... tetapi 'muslim' itu sendiri (secara generik) juga dapat menjadi kualifikasi bagi penganut agama lain, khususnya para penganut kitab suci, baik Yahudi maupun Kristen. Maka, konsekuensi secara teologis bahwa siapa pun di antara kita--baik sebagai orang Islam, Yahudi, Kristen, maupun shabi'in--yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan Hari Kemudian, serta berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan ... (al-Baqarah: 62, al-Maa'idah: 69). Dengan kata lain, sesuai firman Tuhan ini, terdapat jaminan teologis bagi umat beragama, apa pun "agama"-nya, untuk

menerima pahala (surga) dari Tuhan."
(Sukidi)

Other religions are equally valid ways to the same truth (John Hick); Other religions speak of different but equally valid truths (John B. Cobb Jr); Each religion expresses an important part of the truth (Raimundo Panikkar)
(Dikutip oleh Budhy Munawar Rachman)

Menyimak situs www.islamlib.com, tampak di sana begitu banyak lontaran pemikiran yang sangat bervarisasi dalam berbagai bidang, mulai bidang akidah, syariat, sosial, budaya, politik, sampai politik internasional. Dalam lapangan akidah, yang akan disorot adalah promosi kelompok ini terhadap teologi inklusif dan pluralis. Penyebaran pemikiran teologis inklusif-pluralis ini dapat dipandang sebagai hal yang sangat serius dalam penghancuran akidah Islam. Apalagi, yang menyebarkan teologi jenis ini justru orang-orang yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Islam, cendekiawan, kiai, dan aktivis organisasi Islam.

Di tahun 1970-an, tatkala Nurcholish mengajukan gagasan sekularisasi, umat Islam sudah heboh. Tahun 1992, ketika Nurcholish mengguncang dengan pidatonya di TIM, yang menggugat kultus dan fundamentalisme agama, polemik dan protes berlangsung marak di mana-mana. Tapi, akhir-akhir ini, ketika serbuan "teologi inklusif-pluralis" berlangsung gencar, justru respons dari umat Islam seperti tenang-tenang saja. Lembaga-lembaga dan organisasi Islam juga tidak menganggapnya sebagai hal serius. Apa yang sebenarnya terjadi dengan umat Islam di Indonesia?

Dulu, para sekularis hanya mengajukan pemikiran "sekularisasi", atau reduksi ajaran Islam sebagai suatu sistem ajaran yang mencakup seluruh aspek kehidupan, baik kehidupan privat, keluarga, sosial, maupun kenegaraan. Namun, kini melalui penyebaran teologi inklusif-pluralis, mereka melangkah lebih jauh lagi dengan "menggempur" konsepsi Islam yang paling dasar, yaitu konsepsi di bidang akidah Islam.

Sudah menjadi keyakinan yang pasti (*qath'i*) di kalangan kaum muslimin bahwa jalan keselamatan dan kebenaran

hanyalah melalui agama Islam. Artinya, di luar Islam adalah jalan kesesatan. Orang Nasrani yang meyakini konsep Trinitas bahwa Isa a.s. adalah Tuhan Anak atau Anak Tuhan, adalah kepercayaan kufur (al-Maa'idah: 72-75). Begitu pula kepercayaan agama Yahudi, yang menolak kenabian Muhammad saw., juga merupakan kepercayaan kufur. Keduanya dimasukkan ke dalam golongan kafir Ahli Kitab. Agama-agama lain, selain Islam, juga tergolong kepercayaan kufur.

A. Mengaburkan Konsep "Tauhid Islam"

Al-Qur`an sudah menegaskan bahwa orang-orang kafir (baik Ahli Kitab maupun kafir musyrik), akan menjadi penghuni neraka (al-Bayyinah: 6). Kekufuran Yahudi dan Nasrani sangatlah jelas. Karena itu, amatlah mengherankan jika muncul orang-orang yang mengkampanyekan bahwa "inti semua agama" bahkan agama itu sendiri adalah sama. Para penganjur paham "persamaan agama" ini biasanya menggunakan dalil Al-Qur`an surah al-Baqarah ayat 62 dan al-Maa'idah ayat 69 untuk dijadikan pijakan.

"Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Shabi-in dan orang-orang Nashara, barangsiapa yang beriman kepada Allah, hari kemudian, dan beramal saleh, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati." **(al-Maa`idah: 69)**

Bisa dilihat dalam berbagai pendapat yang diungkap kaum inklusif-pluralis, ayat tersebut dianggap memberikan legitimasi, bahwa agama apa pun pada dasarnya adalah benar dan dapat dijadikan sebagai jalan menuju keselamatan. Dalam bahasa Anand Krishna, paham penyamaan agama itu dikatakan sebagai berikut.

"Jalan bisa berbeda. Jelas berbeda. Orang Iran ke Mekah tidak harus lewat Indonesia. Orang Indonesia ke Mekah tidak harus lewat Cina. Orang India ke Mekah tidak harus lewat Amerika. Orang Mesir ke Mekah tidak harus lewat Eropa. Orang Eropa ke Mekah tidak harus lewat Australia. Jalan berbeda, jelas-jelas berbeda. Tetapi, apabila kita menganggap tujuan pun berbeda, maka sesungguhnya

kita musyrik. Justru kita yang menduakan Allah, menduakan Tuhan." (*Republika*, 3 Agustus 2000)

Sejumlah pakar, cendekiawan, ulama yang menggunakan kedua surah tadi untuk menjustifikasi konsep pluralisme agama adalah Alwi Shihab, KH Said Aqiel Siradj, Nurcholish Masjid, dan sebagainya. Kalangan yang lebih muda dari mereka lebih banyak lagi yang berpikiran serupa, bahkan kadang dalam wujud yang lebih radikal. Pendapat Alwi Shihab dapat dilihat dalam bukunya *Islam Inklusif.* Simaklah tulisan Alwi Shihab berikut ini.

> *"Prinsip lain yang digariskan oleh Al-Qur`an, adalah pengakuan eksistensi orang-orang yang berbuat baik dalam setiap komunitas beragama dan, dengan begitu, layak memperoleh pahala dari Tuhan. Lagi-lagi, prinsip ini memperkokoh ide mengenai pluralisme keagamaan dan menolak eksklusivisme. Dalam pengertian lain, eksklusivisme keagamaan tidak sesuai dengan semangat Al-Qur`an. Sebab, Al-Qur`an tidak membeda-bedakan antara satu komunitas agama dari lainnya. Prinsip ini digariskan oleh dua ayat Al-Qur`an, sebuah eksposisi yang jarang sekali terjadi sebuah ayat Al-Qur`an tampil dua kali dan hampir mirip kata per kata, yang menyatakan, 'Sesungguhnya mereka telah beriman, Yahudi, Kristen, dan kaum Shabi-in. Mereka yang percaya pada Tuhan dan Hari Akhir dan berbuat kebaikan, akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Mereka tidak akan merugi dan tidak akan berduka cita.* **(al-Baqarah: 62 dan al-Maa`idah: 69).'"**[1]

Jadi, menurut Alwi Shihab, komunitas agama apa pun dapat menerima pahala, sebab Al-Qur`an tidak membeda-bedakan komunitas agama yang ada. Ini tentu pemahaman yang sangat aneh. Sebab, begitu banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang menyatakan kesesatan dan kekufuran kaum Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin lainnya. Pendapat aneh seperti Alwi Shihab ini diperkuat lagi dengan pendapat yang "luar biasa berani" dari

---

[1] Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, 1997, hal. 108-109.

KH Said Aqiel Siradj tentang persamaan konsepsi Tauhid antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Berikut kutipan pendapat Said Aqiel Siradj dalam sebuah tulisannya yang diberi judul *"Laa Ilaha Ilallah Juga"*,

> *"Agama yang membawa misi Tauhid adalah Yahudi, Nasrani (Kristen), dan Islam. Ketiga agama tersebut datang dari Tuhan melalui seorang rasul dan nabi pilihan. Agama Yahudi diturunkan melalui Musa, Nasrani diturunkan melalui Isa (Yesus), dan Islam melalui Muhammad. Kedekatan ketiga agama samawi yang sampai saat ini masih dianut oleh umat manusia itu semakin tampak jika dilihat dari genealogi ketiga utusan (Musa, 'Isa, dan Muhammad) yang bertemu pada Ibrahim (Abraham). Ketiga agama tersebut mengakui Ibrahim sebagai "the foundation father's" bagi agama tauhid. Singkatnya, ketiga agama tersebut sama-sama memiliki komitmen untuk menegakkan kalimat Tauhid... Dari ketiga macam tauhid di atas, tauhid Kanisah Ortodoks Syria tidak memiliki perbedaan yang berarti dengan Islam."*[2]

Tulisan Said Aqiel Siradj itu dimuat dalam buku karya Bambang Noorsena, tokoh Kristen Ortodoks Syria, berjudul *Menuju Dialog Teologis Kristen-Islam*. Benarkah antara konsepsi Tauhid Islam dan "tauhid" Kristen Ortodoks Syiria tidak ada perbedaan yang berarti. Klaim Said Aqiel Siradj itu tentu sangat tidak benar. Sebab, dalam Al-Qur`an ditegaskan bahwa Allah adalah Esa, Tidak Beranak dan Tidak Diperanakkan. Sedangkan, konsepsi Syahadat Kristen Ortodoks, seperti dimuat dalam buku Bambang Noorsena tersebut adalah,

> *"Kami percaya kepada satu-satunya Ilah (sembahan) yaitu Allah, Bapa, (al-Wujud, Yang berdiri pada zat-Nya sendiri) yang Mahakuasa, Khaliq langit dan bumi, segala sesuatu yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Dan kepada satu-satunya Tuhan (Rabb), yaitu 'Isa Almasih, Putra Allah Yang Tunggal (Akal Allah atau firman yang kekal), yang dilahirkan dari Bapa (al-Wujud) sebelum segala abad..."* [3]

---

[2] Bambang Noorsena, *Menuju Dialog Teologis Kristen-Islam*. Yayasan Andi: Yogyakarta, 2001, hal. 165-169.

[3] *Ibid*, hal. 168-169.

Jadi, Tuhannya orang Kristen adalah Tuhan yang mempunyai anak. Dalam Matius 3:17 disebutkan, *"Maka suatu suara dari langit mengatakan, 'Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya Aku berkenan."* Juga, Lukas 4:41 menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Anak Allah.' Konsep teologis Kristen dirumuskan pada Konsili Nicea, tahun 325. Konsisi dihadiri 318 orang bapa konsili, yaitu tokoh-tokoh gereja dan pemerintahan yang diundang menghadiri sidang itu. Menurut kaum Katolik, Konsili ini diadakan untuk melawan ajaran sesat (bidah) yang muncul pada awal abad IV yang dibawa oleh Arius, seorang imam Alexandria yang lahir tahun 280. Ia mengajarkan bahwa Yesus bukanlah Allah sejati. Ia menyangkal keilahian Yesus. Dalam Konsili itulah dirumuskan syahadat Katolik, yang juga dikenal sebagai *Syahadat dari Kaesarea.* Jika dicermati, isinya sama saja dengan syahadat Kristen Ortodoks Syiria. Berikut sebagian bunyi syahadat Katolik tersebut.

"Kami percaya akan satu Allah,
Bapa yang Mahakuasa,
Pencipta hal-hal yang kelihatan dan tak kelihatan,
Dan akan satu Tuhan Yesus Kristus,
Sang Sabda dari Allah,
Terang dari Terang
Hidup dari Hidup,
Putra Allah yang Tunggal
Yang pertama lahir dari semua ciptaan,
Dilahirkan dari Bapa,
Sebelum segala abad ..." [4]

Diutusnya Nabi Muhammad saw. adalah untuk meluruskan penyimpangan ajaran Nabi Isa a.s. oleh kaum Kristen, seperti yang diputuskan dalam Konsili Nicea tersebut. Karena itu, Al-Qur`an menegaskan,

"Katakan, 'Dialah Allah Yang Maha Esa
Allah tempat meminta

---

[4] Alex I. Suwandi PR, *Tanya Jawab Syahadat Iman Katolik.* Kanisius: Yogyakarta, 1992, hal. 9-10.

Tidak Beranak dan Tidak Diperanakkan
Dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengan Dia.'" **(al-Ikhlash: 1-4)**

Bahkan, Al-Qur`an mengecam keras kepercayaan kaum Kristen itu. *"Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah ialah Almasih Putra Maryam.' Padahal Almasih sendiri berkata, 'Hai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya orang yang mempersekutukan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan surga baginya, dan tempat orang itu ialah di neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun.' Sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Padahal, sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan Yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka ucapkan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Maka mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampun kepada-Nya? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Almasih Putra Maryam itu hanyalah seorang Rasul yang sesungguhnya telah berlalu sebelumnya beberapa Rasul."* **(al-Maa'idah: 72-75)**

Membandingkan konsepsi teologis kaum Kristen dan konsepsi Tauhid Islam sangatlah jauh sekali bedanya. Maka tidak benar pendapat Said Aqiel Siradj bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara konsepsi Tauhid Islam dan Kristen Ortodoks. Penggunaan istilah "tauhid" untuk konsepsi teologis Kristen juga sangat tidak tepat. Jangan-jangan nanti juga akan ada penggunaan istilah yang semena-mena, seperti "tauhid Hindu", "tauhid Budha", "tauhid Konghucu", "tauhid Darmogandul", "tauhid Gatoloco", dan seterusnya.

Sebagai contoh, dalam kasus penyaliban Isa a.s. terdapat perbedaan yang fundamental antara Bibel dan Al-Qur`an. Umat Islam memang diwajibkan beriman kepada para rasul dan nabi serta kitab-kitab yang dibawa mereka. Tetapi, itu bukan berarti umat Islam sekarang harus beriman kepada isi kitab-kitab suci agama lain, seperti Bibel, Weda, Talmut, dan sebagainya. Soal Injil, misalnya, begitu banyak perubahan yang telah dilakukan,

sehingga sangat diragukan lagi kebenarannya. Nabi Muhammad saw. diutus adalah untuk meluruskan kembali ajaran tauhid para nabi sebelumnya yang sudah terlalu jauh diselewengkan oleh pengikut-pengikut agama mereka. Misalnya, kisah tentang penyaliban Isa a.s. yang disebutkan dalam Bibel jelas bertentangan dengan penjelasan yang tegas dalam Al-Qur`an.

Dalam buku *Tanya Jawab Syahadat Iman Katolik*, hlm. 53 disebutkan,

> "Kitab Suci, misalnya Yohannes 19, menceritakan bahwa Yesus sungguh mati di kayu salib. Yohanes sendiri melihat hal itu dan ia memberikan kesaksiannya dan kesaksian itu benar (Yoh 19:35; 21:24). Para rasul, berkat anugerah Roh Kudus, berkhotbah dan bersaksi tentang kematian Yesus (lih. Kis 3:12-15; 5:29-32). Tak mungkinlah suatu yang bohong akan ditulis di dalam Kitab Suci, dan dapat bertahan berabad-abad lamanya. Dan tidak masuk akal sehatlah bila begitu banyak orang yang rela mati hanya demi sesuatu yang bohong."

Cerita penyaliban Isa a.s. versi Injil itu dibantah keras oleh Al-Qur`an,

> *"Dan karena ucapan mereka, 'Sesungguhnya kami telah membunuh Almasih Putra Maryam, rasul Allah.' Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya. Tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang (pembunuhan) Isa, benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang yang mereka bunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak (pula) yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa."* **(an-Nisaa`: 157)**

Tentu sangat gegabah dan ceroboh jika dikatakan bahwa cerita Al-Qur`an dan Injil soal penyaliban Isa a.s. itu "intinya" sama dan tidak ada perbedaan yang berarti. Sudah begitu jelas terdapat perbedaan yang substansial antara konsepsi teologis Islam dan Kristen. Sehingga, sangatlah tidak benar jika dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang berarti antara konsepsi "tauhid

Islam" dengan "tauhid Katolik/Kristen".

Kekeliruan fatal seperti itu juga dilakukan oleh Nurcholish Madjid, seperti dibahas dalam bagian sebelumnya. Dalam buku *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*, terbitan *Kompas*, Nurcholish menulis kata pengantar panjang yang isinya menjelaskan tentang teologi inklusif dan pluralis. Di antaranya tercatat, "*Umat Islam pun diperintahkan untuk senantiasa menegaskan bahwa kita semua, para penganut kitab suci yang berbeda-beda itu, sama-sama menyembah Tuhan Yang Maha Esa, dan sama-sama pasrah (muslimun) kepada-Nya.*"

Dalam subjudul "*Satu Tuhan, Beda Jalan*" Nurcholish menguraikan secara panjang lebar bahwa Islam juga mengakui keabsahan agama-agama lain dan kitab sucinya. Misalnya, kutipannya berikut.

"*... namun Al-Qur`an mengakui keabsahan keduanya (Taurat dan Injil. Pen.) sekaligus. Al-Qur`an juga menegaskan bahwa Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa Almasih itu menguatkan kebenaran Taurat, memuat petunjuk dan cahaya serta nasihat bagi kaum yang bertakwa. Mereka harus mengakui kenyataan ini. Kalau tidak, sekali lagi, mereka termasuk orang-orang yang fasik (berkecenderungan yang jahat).* **(al-Maa`idah: 46-47).**"[5]

Dengan menyatakan bahwa para penganut Kitab Suci juga menyembah Tuhan Yang Maha Esa, sebagaimana umat Islam, serta dikatakan bahwa Al-Qur`an mengakui keabsahan Taurat dan Injil--tanpa memberikan kritik dan koreksi terhadap keduanya--menunjukkan, Nurcholish pun ingin mengaburkan sikap Islam yang tegas terhadap kekeliruan berbagai konsepsi teologis agama Kristen. Mestinya para tokoh ini secara jujur mengungkap berbagai kejanggalan yang terdapat dalam Bibel, sehingga dapat ditentukan, apakah benar Al-Qur`an mengesahkan "Kitab Suci" seperti itu. Misalnya, berbagai cerita porno dan tidak pantas yang ditulis dalam Bibel saat ini. Sebagai contoh,

---

[5] Lihat buku *Pluralitas Agama: Kerukunan dalam Keragaman*. Kompas, 2001, hal. 2-5.

Kitab Yehezkiel 23 yang menggunakan kata-kata vulgar, seperti "mereka bersundal pada masa mudanya; di sana susunya dijamah-jamah dan dada keperawanannya dipegang-pegang" (ayat 3), "ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal, yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda" (ayat 20).

Cerita tentang Dawud a.s. dalam Bibel juga sangat menyeramkan. Digambarkan di sana, selain merebut dan menzinai istri pembantunya sendiri, Dawud juga menjebak suaminya agar terbunuh di medan perang. Kisah ini diceritakan dalam 2 Samuel 11:2-5 dilanjutkan ayat 14-17, sebagai berikut.

> "Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Dawud bangun dari tempat pembaringannya lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana, tampak kepadanya dari atas sotoh istana itu seorang wanita sedang mandi; wanita itu sangat elok rupanya. Lalu Dawud menyuruh orang bertanya tentang wanita itu dan orang berkata, 'Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu.' Sesudah itu, Dawud menyuruh orang mengambil dia. Wanita itu datang kepadanya, lalu Dawud tidur dengan dia. Wanita itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah wanita itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah wanita itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Dawud, 'Aku mengandung.'
> Paginya Dawud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu, 'Tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, kemudian kamu mengundurkan diri dari padanya, supaya ia terbunuh mati.' Pada waktu Yoab mengepung kota Raba, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud; juga Uria, orang Het itu, mati."[6]

---

[6] Teks dikutip dari Alkitab, terbitan Lembaga Alkitab Indonesia tahun 2000.

Jauh sekali gambaran Bibel tentang Dawud a.s. dengan gambaran Al-Qur`an tentang Dawud. Allah berfirman,

"Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan, dan ingatlah hamba Kami Dawud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Allah." **(Shaad: 17)**

Jika dikatakan Nurcholish Madjid bahwa Al-Qur`an juga mengabsahkan Taurat dan Injil, maka dapat ditanyakan kepadanya, apakah Al-Qur`an juga mengesahkan cerita-cerita yang merendahkan martabat para utusan Allah yang mulia? Contoh lain lagi adalah cerita-cerita tentang kekejaman dan mengesahkan kekejaman, seperti yang tersebut dalam Kitab Yosua dan lain-lain. Contoh lain bisa dilihat bagaimana hukum perang dalam Bibel, seperti tersebut dalam Kitab Ulangan 20:10-13,

"Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi hamba kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Setelah Tuhan, Allahmu, menyerahkannya ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang."

Soal perang, disebutkan dalam Matius 10:34-39,

"Jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak wanita dari ibunya, menantu wanita dari ibu mertuanya, (dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya). Barangsiapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku; dan barangsiapa mengasihi anaknya laki-laki atau wanita lebih daripada-Ku, ia tidak layak bagi-Ku. Barangsiapa tidak memikul dan mengikut Aku, ia tidak layak bagi-Ku. Barang-

siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya; dan barangsiapa kehilangan nyawanya karena Aku, ia akan memperolehnya."

Apakah Al-Qur`an juga mengesahkan penjelasan-penjelasan dalam Bibel seperti itu? Mengingat sulitnya menelusuri kembali keaslian Injil, sangatlah tidak beralasan untuk menyatakan bahwa Al-Qur`an mengesahkan Injil yang sekarang ini. Dalam soal Kitab-kitab para nabi itu, Rasulullah saw. mengajarkan,

"Janganlah kamu benarkan Ahli Kitab dan jangan pula kamu dustakan, melainkan ucapkanlah, 'Kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu.'" **(HR Bukhari)**

Allah pernah menurunkan kitab-kitab kepada sejumlah Nabi-Nya. Tetapi, dijelaskan dalam Al-Qur`an, orang-orang Yahudi dan Nasrani telah mengubah-ubah kitab yang diturunkan Allah, menyembunyikan kebenaran, dan menulis kitab menurut keinginan dan hawa nafsu mereka sendiri.

"Sebagian dari orang-orang Yahudi mengubah kalimat-kalimat dari tempatnya." **(an-Nisaa`: 46)**

"Maka apakah kamu ingin sekali supaya mereka beriman karena seruanmu, padahal sebagian mereka ada yang mendengar firman Allah, lalu mengubahnya sesudah mereka memahaminya, sedangkan mereka mengetahuinya." **(al-Baqarah: 75)**

"Sungguh celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka, lalu mereka katakan, 'Ini adalah dari Allah.' (Mereka lakukan itu) untuk mencari keuntungan sedikit. Sungguh celakalah mereka karena aktivitas mereka menulis kitab-kitab (yang mereka katakan dari Allah itu), dan sungguh celakalah mereka akibat tindakan mereka." **(al-Baqarah: 79)**

Salah satu tugas penting dari Rasulullah saw. adalah melanjutkan dan memurnikan kembali ajaran-ajaran para nabi sebelumnya yang telah diselewengkan oleh kaum oportunis yang mengubah-ubah kebenaran *al-wahyu* dari Allah, sekadar mencari keuntungan duniawi. Karena itu, Rasulullah saw. aktif

mengajak semua pemeluk agama lain untuk memeluk Islam. Kaum Quraisy diajak untuk masuk Islam. Mereka diajak menjauhi cara-cara ibadah kepada Allah yang tidak benar, misalnya dengan menggunakan perantaraan patung atau berhala. Kalau Rasulullah saw. mengembangkan pluralisme teologis, buat apa capek-capek mengajak mereka masuk Islam? Toh, orang kafir Quraisy itu menyatakan bahwa mereka menyembah patung sekadar sebagai perantara (*washilah*) untuk mendekatkan diri kepada Allah.

"Ingatlah, hanya kepunyaan Allahlah agama yang bersih (dari syirik). Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah (berkata), 'Kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami dengan Allah sedekat-dekatnya.'" (az-Zumar: 3)

Soal patung ini begitu penting, karena ada kecenderungan hampir semua agama menggunakan patung dalam ritual peribadahan mereka. Meskipun mereka mengaku tidak menyembah patung. Kaum Nasrani, misalnya, banyak sekali menggunakan patung-patung dalam ibadah mereka. Dalam sebuah buku berjudul *Mempertanggungjawabkan Iman Katolik* (1990), tulisan Dr. H. Pidyarto O.Carm, Uskup Malang, ada satu bab berjudul *"Apakah Gereja Katolik Menyembah Patung?"* Menurut Uskup Malang, kritik dan kecaman pernah datang kepada Gereja Katolik karena "menyembah patung". Si pengkritik menyatakan bahwa penghormatan patung bertentangan dengan perintah pertama dari Sepuluh Perintah Allah seperti yang tertulis dalam Kel 20:4-5 yang berbunyi,

> "Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apa pun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, sebab Aku, TUHAN, Allahmu, adalah Allah yang cemburu..."

Di jawab oleh Uskup Pidyarto,

"Manusia itu makhluk yang membutuhkan lambang atau simbol. Untuk menjelaskan hal ini, baiklah kita ambil beberapa contoh. Contoh dari dunia profan adalah bendera... Sebab Tuhan Yesus,

Maria, dan lain-lain tidaklah kelihatan. Maka dari itu, banyak orang Katolik suka memasang gambar atau patung Yesus, Maria, atau siapa pun juga supaya mereka mudah diingat *pada pribadi-pribadi yang digambarkan di sana."*[7]

Tradisi "simbolisasi" Tuhan melalui "patung" terjadi pada hampir semua agama. Persis seperti yang digambarkan Al-Qur`an, dimana Nabi Ibrahim a.s. menyatakan dalam doanya, "*Rabbi innahunna adhlalwa katsiiran minan naas*. (Ya Rabbi, sesungguhnya patung-patung itu telah menyesatkan sebagian besar manusia) (Ibrahim: 36)." Kaum Quraisy juga menolak jika dikatakan mereka menyembah patung. Kata mereka, penggunaan patung itu hanyalah sebagai wasilah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan.

Sejak menerima *al-wahyu*, sampai akhir hayat, Rasulullah saw. tidak pernah berhenti mengajak umat manusia untuk menerima kebenaran Islam dan melepaskan kepercayaan yang salah, meskipun Nabi saw. dilarang memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Bayangkan, jika Nabi Muhammad saw. berpendapat bahwa "semua agama sama", maka tentu tidak ada penyebaran Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena itu, dengan logika yang tidak terlalu canggih, asalkan mau mendalami masalah ini sedikit saja, seseorang akan dapat memahami bahwa hanya akidah Islam yang benar, yang lain salah. Itu keyakinan kaum muslimin.

Dampak serius dari pengaburan Tauhid Islam terlihat pada sikap liberal dalam menaati syariat Islam. Misalnya, dalam soal perkawinan antaragama. Sebuah majalah yang cukup beredar luas di Jakarta bernama "SYIR'AH" memuat sejumlah tulisan yang mempromosikan perkawinan antaragama, termasuk antara seorang muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Pada edisi 25 Februari-25 Maret 2002, majalah yang bersemboyan "*Nadwah Li Ulil Abshar*" ini membuat laporan utama berjudul BEDANYA NIKAH BEDA AGAMA. Isinya membantah pandangan bahwa menikah antaragama itu menimbulkan masalah.

---

[7] Dr. H. Pidyarto O. Carm, *Mempertanggungjawabkan Iman Katolik*, Dioma, Malang, 1990, hal. 1-6.

Dikutiplah ungkapan Nurul Arifin, istri Mayong Suryoleksono yang Katolik, "Terus terang, antara saya dan Mayong tidak pernah ada masalah berkaitan dengan agama kita masing-masing. Yang menganggap perkawinan kami bermasalah justru orang lain."

Pada bagian lain ditulis, "Tokh, pasangan Nurul Arifin-Mayong Suryoleksono sudah sepuluh tahun hidup bersama. Berbedanya agama yang mereka anut tidak membuat rumah tangga penuh masalah, mereka juga bahagia. Malah menurut pengakuannya, Nurul tetap shalat dan puasa, termasuk puasa Senin-Kamis. Mayong juga tetap aktif ke gereja."

Itulah contoh pengaburan tauhid yang sangat serius, sehingga berani memberikan legitimasi bagi sebuah perkawinan yang jelas-jelas batil.

Di kalangan ulama selama ini, tidak ada perbedaan pendapat tentang haramnya seorang muslimah menikah dengan laki-laki nonmuslim, apa pun agamanya, apakah Yahudi, Kristen, Hindu, Budha, Gatholoco, Darmogandul, Konghucu, dan sebagainya. Selama si laki-laki tidak memeluk agama Islam, maka haram menikahkannya dengan seorang wanita muslimah. Imam Ibnu Hazm menceritakan dalam *al-Muhalla* (Jilid VII, hlm. 313), bahwa suatu ketika Khalifah Umar Ibnul-Khaththab mendengar Hanzalah bin Bishr menikahkan anak wanitanya dengan keponakannya yang masih beragama Nasrani. Maka, Umar r.a. menyampaikan pesan kepada Hanzalah, "jika si laki-laki masuk Islam, maka biarkan pernikahan itu berlangsung. Jika si laki-laki tidak mau masuk Islam, maka pisahkan mereka." Karena si laki-laki menolak masuk Islam, maka mereka dipisahkan.

Umar r.a. juga pernah menyatakan, "Tidak halal bagi laki-laki nonmuslim menikahi wanita muslimah, selama si laki-laki tetap belum masuk Islam." Sikap Sayyidina Umar yang tegas itu didasarkan pada Al-Qur`an surah Mumtahanah ayat 10,

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu wanita-wanita beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Jika kamu telah mengetahui bahwa mereka*

(benar-benar) beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka."

Dalam banyak ayat Al-Qur`an (al-Bayyinah: 6, al-Maa'idah: 72-75) dijelaskan siapa yang disebut sebagai kafir. Mereka adalah kafir Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dan kafir musyrik (non-Yahudi dan Nasrani). Di luar muslim adalah kafir. Ini rumusan yang jelas. Karena itu, jelas haram hukumnya menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki nonmuslim. Jika ada yang berani melanggar ketentuan Allah ini, ya tentu sangat disesalkan. Apalagi, bila yang melanggar ketentuan-ketentuan Allah adalah orang-orang yang memiliki ilmu, meskipun *ngawur*.

B. Teologi Pluralis yang Berbahaya

Ketika dibuka pada 13 Januari 2002, dalam situs www.-islamlib.com termuat tulisan Budhy Munawar Rachman yang berjudul *"Memudarnya Kerukunan Hidup Beragama, Agama-agama Harus Berdialog"*. Tulisan Budhy Munawar Rachman itu sebenarnya hampir sama dengan tulisannya di harian *Republika*, 24 Juni 2000, yang diberi judul *"Mengembalikan Kerukunan Umat Beragama"*.

Untuk lebih memperjelas masalahnya, berikut ini dikutip agak panjang pendapat Budhy Munawar Rachman tentang teologi pluralis.

"Tulisan ini tidak akan membahas latar belakang ekonomi, sosial, dan politik dari peristiwa-peristiwa ketegangan dalam kehidupan antaragama di Indonesia belakangan ini tetapi justru ingin kembali ke pertanyaan dasar. Adakah dasar teologis yang diperlukan untuk suatu basis kerukunan hidup beragama? Pertanyaan ini penting, karena selama ini teologi dianggap sebagai ilmu dogmatis yang karena menyangkut masalah akidah (baca: kebenaran), tidaklah perlu dibicarakan--apalagi dicarikan titik temunya. Sehingga, terkesanlah teologi sebagai ilmu yang tertutup, dan menghasilkan masyarakat beragama yang tertutup. Padahal iklim masyarakat global dan pascamodern dewasa ini bersifat terbuka

dan pluralistis.

Teologi Eksklusif atau Teologi Pluralis? Memang, dalam sejarah telah lama berkembang doktrin mengenai eksklusivitas agama sendiri **bahwa agama sayalah yang paling benar, agama lain sesat dan menyesatkan.** Pandangan semacam ini masih sangat kental, bahkan sampai sekarang, seperti termuat dalam buku-buku polemis maupun ilmiah. Rumusan dari Ajith Fernando, teolog kontemporer, masih menarik untuk diungkapkan di sini, '**Other religions are false paths, that mislead their followers 'Agama lain adalah jalan yang sesat, dan menyesatkan pengikutnya'.**' Ungkapan Ajith Fernando yang dibahas dalam bukunya *The Christian's Attitude toward World Religions* (1987) ini memang sangat keras dan langsung tergambar eksklusivitasnya.

Adapun yang menjadikan kita kaget adalah kitab suci ternyata dianggapnya membenarkan hal tersebut. Ayat yang sering dikutip dari Alkitab, 'Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa, kalau tidak melalui Aku' (Yohanes 14: 6), atau 'Dan keselamatan tidak ada di dalam siapa pun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan' (Kisah Para Rasul 4:12).

Pandangan eksklusif memang bisa dilegitimasikan lewat kitab suci. Tetapi, itu bukan satu-satunya kemungkinan. Sejak **Konsili Vatikan II**, sudah jelaslah bahwa pandangan gereja menjadi sangat terbuka ke arah adanya kebenaran dan keselamatan dalam agama-agama non-Kristiani. **Karl Rahner**, teolog besar yang menafsirkan Konsili Vatikan II, merumuskan teologi inklusifnya kira-kira dengan mengatakan, '***Other religions are implicit forms of our own religion*** **(agama lain adalah bentuk-bentuk implisit dari agama kita).**'

Dalam pemikiran Islam, masalah ini juga terjadi secara ekspresif. Walaupun dalam Islam sejak awal sudah ada konsep *ahlul kitab* 'ahli kitab' yang memberi kedudukan kurang lebih setara pada kelompok nonmuslim, dan ini dibenarkan oleh Al-Qur`an sendiri. Tetapi selalu saja ada

interpretation away, sebuah cara penafsiran, yang pada akhirnya menafsirkan sesuatu yang tidak sesuai lagi dengan bunyi tekstual Kitab Suci. Misalnya, yang jelas-jelas mendukung keterbukaan terhadap keberadaan dan keselamatan agama-agama lain. **Penafsiran eksklusif** dalam Islam bisa muncul misalnya dalam pembacaan ayat berikut.

'Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam.' **(Ali Imran: 19)**

'Barangsiapa mencari agama selain dari agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi.' **(Ali Imran: 85)**

Padahal kalau ayat ini dibaca dengan semangat **inklusif**, semangat agama universal (*al-din al-jami'*) dengan mengembalikan makna Islam di sini dalam arti generiknya sebagai 'pasrah sepenuhnya (kepada Allah)', maka maknanya akan berbeda sekali. Yakni, agama yang diterima di sisi Allah adalah agama yang membawa kepasrahan kepada-Nya. Barangsiapa yang mencari agama selain dari kepasrahan kepada-Nya, maka agama itu tidak akan diterima, dan ia di akhirat termasuk orang yang merugi.
Mengenai masalah keselamatan dalam agama-agama non-Islam, menarik memperhatikan ayat 62 surah al-Baqarah dan ayat 5 al-Maa'idah berikut.

'Mereka yang beriman (kepada Al-Qur`an), orang Yahudi, Kristiani, dan Sabi`in, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan melakukan kebaikan, pahala mereka ada pada Tuhan, mereka tak perlu khawatir, tak perlu sedih.'

Ayat ini secara literal sangat jelas meneguhkan mengenai adanya keselamatan dalam agama-agama. Tetapi anehnya, mayoritas komentator muslim dengan sia-sia telah berusaha untuk tidak menerima maksud yang jelas dinyatakan kedua ayat tersebut, bahwa keselamatan seseorang di akhirat sebenarnya hanya tergantung pada tiga hal: (1) apakah ia percaya kepada Allah, (2) apakah ia percaya pada hari akhirat

(adanya pembalasan atas perbuatan baik dan buruk), dan (3) apakah ia melakukan perbuatan kebaikan kepada sesama umat manusia. **Jadi bukan pada apa agama formalnya!** Pada umumnya penafsir Al-Qur`an sepanjang sejarah banyak yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sabi'in dalam ayat ini adalah mereka yang telah masuk Islam. Penafsiran yang jelas sekali salah, karena mereka dalam ayat tersebut ditaruh dalam rangkaian dengan kaum muslimin. Ada juga pendapat lain bahwa yang dimaksudkan dengan orang-orang Yahudi, Kristen, dan Sabi'in itu adalah mereka yang saleh sebelum kedatangan Nabi Muhammad. Penafsiran ini jelas lebih salah lagi! Begitulah, kita baik kaum muslimin maupun umat Kristiani telah mewarisi begitu mendalam teologi eksklusif itu. Rumusan inti ajarannya adalah--seperti ditulis oleh filsuf agama terkemuka Alvin Plantinga--'*the tenets of one religions are in fact true; any propositions that are incompatible with these tenets are false*'. Atau, kata Joh Hick, '*The exclusivists think that their description of God is the true description and the others are mistaken insofar they differ from it.*' Karena pandangan tersebut, maka mereka menganggap bahwa hanya ada satu jalan keselamatan: yaitu agama mereka sendiri! Pandangan ini jelas mempunyai kecenderungan fanatik.

Oleh karena itulah, diperlukan suatu perspektif baru dalam melihat, 'Apa yang dipikirkan oleh suatu agama, mengenai agama lain dibandingkan dengan agama sendiri?' Jawaban atas pertanyaan ini akan menentukan apakah seorang beragama itu menganut suatu teologi yang eksklusif, inklusif, atau pluralis. Apakah ia seorang yang terbuka atau otoriter? Menganut suatu teologi eksklusif dalam beragama bukan hal yang sulit. Karena secara umum, sepanjang sejarah sebenarnya cukup umum tekanan-tekanan untuk beragama secara eksklusif. Kalau batasnya adalah Konsili Vatikan II, maka baru sejak 1963-1965-lah secara resmi ada usaha-usaha global untuk memulai perkembangan teologi ke arah yang inklusif. Baru belakangan ini saja berkembang teologi yang lebih

pluralis, yang lebih menekankan lebih luas sisi yang disebut paralelisme dalam agama-agama, yang dapat lebih digali lewat kajian teologi agama-agama.
Teologi pluralis melihat agama-agama lain sebanding dengan agama-agama sendiri, seperti dalam rumusan, '*Other religions are equally valid ways to the same truth* (John Hick); *Other religions speak of different but equally valid truths* (John B. Cobb Jr); *Each religion expresses an important part of the truth* (Raimundo Panikkar).' Atau, setiap agama sebenarnya mengekspresikan adanya *The One in the many* (Seyyed Hossein Nasr). Di sini jelas teologi pluralis menolak paham eksklusivisme, sebab dalam eksklusivisme itu ada kecenderungan opresif." (Budhy Munawar-Rachman, Pengajar filsafat pada Universitas Paramadina, Jakarta)

Tulisan-tulisan yang mempromosikan gagasan teologi pluralis seperti itu bertebaran di media massa dan buku-buku. Penulisnya juga bukan orang-orang sembarangan. Kaum muslimin pengasuh media massa--seperti *Republika*—sepertinya tidak menyadari bahaya dari promosi pemikiran yang sangat berbahaya seperti itu. Apa mereka tidak berpikir bahwa jika ada seorang saja membaca tulisan seperti itu dan kemudian menganut keyakinan, bahwa akidah Islam dan Kristen adalah sama saja, bukankah mereka juga ikut bertanggung jawab?

Sebagai contoh, tulisan Muhammad Ali yang berjudul "*Hermenetika dan Pluralisme Agama*" di harian *Republika* (14 Maret 2002), membuktikan bahwa *Republika* juga aktif mempromosikan gagasan pluralisme agama, dalam konteks teologis. Jauh sebelumnya, 24 Juni 2000, artikel Budhi Munawar Rachman sudah dimuat. Artikel Budhy itu sudah dijawab. Lalu, pada 3 Agustus 2000, artikel Anand Krishna yang berjudul "*Inti Agama dan Keagamaan*" juga dimuat. Inti artikel ini juga mempromosikan teologi pluralisme, bahwa semua agama adalah sama saja tujuannya, yang berbeda hanya cara atau jalan menuju Tuhan. Untuk itu Anand mengutip Al-Qur`an surah al-Maa`idah ayat 59.

Dalam menafsirkan ayat tersebut, Anand Krishna menulis, "Jalan bisa berbeda. Jelas berbeda. Orang Iran ke Mekah tidak

harus lewat Indonesia. Orang Indonesia ke Mekah tidak harus lewat Cina... Jalan berbeda, jelas-jelas berbeda. Tetapi, apabila kita menganggap tujuan pun berbeda, maka sesungguhnya kita musyrik." Artikel Anand Krishna tersebut kemudian dilengkapi dengan wawancara satu halaman pada edisi 20 Agustus 2000. Setelah diprotes oleh berbagai kalangan umat Islam, barulah dimuat beberapa bantahan terhadap artikel Anand Krishna.

Artikel Muhammad Ali, dosen IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang berjudul *Hermenetika dan Pluralisme Agama* di harian *Republika* (14 Maret 2002) itu isinya hampir sama dengan berbagai tulisan Muhammad Ali lainnya, antara lain yang dimuat di harian *Kompas* (14 Juli 2000), yang berjudul "*Paradigma Baru Misi Agama-agama*". Jika dicermati, isinya pun senada dengan artikel Budhi MR dan Anand Krishna.

Dalam artikelnya di *Kompas*, Ali menulis:

> "Dalam paradigma lama, kegiatan misi agama-agama penuh dengan prasangka teologis seperti klaim satu-satunya kebenaran *(claim of the only truth)* dan label kufur terhadap agama lain, ungkapan tidak ada penyelamatan selain pada agamaku, dan sejenisnya. Dalam paradigma baru, sikap yang dikembangkan adalah saling menghormati *(mutual respect)*, saling mengakui eksistensi *(mutual recognition)*, berpikir dan bersikap positif *(positive thinking and attitude)*, serta pengayaan iman *(enrichment of faith)*. Sejalan dengan paradigma baru, sikap lain yang perlu dikembangkan adalah sikap *relatively absolute* atau *absolutely relative*, bahwa yang saya miliki memang benar, tetapi tetap relatif bila dikaitkan dengan yang lain."

Sedangkan dalam artikelnya di *Republika* tersebut, Ali menyatakan adanya dua kelompok ayat Al-Qur`an, yang satu bercorak inklusif (seperti Ali Imran: 84, al-Baqarah: 62, al-Maa'idah: 69) dan yang lain bercorak eksklusif (seperti Ali Imran: 19 dan 85). Kata Ali, "Sepintas, apabila kita menafsirkan dua kelompok ayat di atas secara *parsial* dan *tekstual*, maka apa yang terjadi adalah kontradiksi. Kelompok ayat pertama menganjurkan pluralisme, inklusivisme, atau setidaknya toleransi, sementara kelompok ayat yang kedua mengandung pengertian eksklusif

dan bahkan bagi sementara pihak, pengertian ekstrem yang dalam banyak kasus membawa aktivitas fundamentalistik."

Selama ini, Ali Imran: 19 dan 85 memang dipahami oleh kaum muslimin dalam bingkai "teologi eksklusif", yakni keyakinan bahwa jalan kebenaran dan jalan keselamatan (*the truth and salvation*) bagi manusia hanyalah dapat dilalui melalui "jalan Islam". Keyakinan seperti inilah yang kini dibongkar melalui penyebaran teologi pluralis atau teologi inklusif. Padahal, pada tataran teologis, mestinya justru harus dibangun keyakinan eksklusif--bahwa hanya agamanya saja yang benar. Seorang yang meragukan kebenaran agamanya sendiri, tentu dengan mudah melepaskan diri dari aturan-aturan (syariat) agamanya, sehingga dengan enteng melaksanakan dosa dan maksiat, sejenis *freesex* atau miras.

Menurut Muhammad Ali, agar tidak terjadi kontradiksi, maka ayat-ayat itu harus ditafsirkan dalam kerangka pluralisme, yakni "Islam" di dalam ayat itu, harus diartikan sebagai "agama penyerahan diri" (iman kepada Allah dan berbuat kebaikan), maka yang muncul adalah *penafsiran pluralis*. Penafsiran yang kedua inilah, katanya, tampaknya yang didukung oleh konteks redaksional ayat-ayat sebelumnya. "Ayat sebelumnya (84) menegaskan keimanan terhadap semua nabi termasuk Nabi Musa dan Isa, di mana mereka semua adalah muslim, sekaligus larangan mendiskriminasi nabi-nabi itu."

Pemahaman versi Muhammad Ali seperti itu hanya sepotong dan semaunya sendiri. Banyak ayat-ayat Al-Qur`an yang menjelaskan bahwa kaum Yahudi dan Nasrani--saat Islam dilahirkan--sudah terjebak ke dalam kesesatan. Mereka mengubah kitab suci mereka. Maka, kaum Nasrani disebut sebagai kaum yang tersesat (*adh-dhaalliin*) dan kaum Yahudi adalah kaum yang dimurkai Allah (*al-maghdhuub*). Penjelasan yang komprehensif tentang hal ini, misalnya, diberikan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *al-Jawaab as-Shahih liman Baddala diin Almasih* (Jawaban yang Benar terhadap Orang-orang yang Mengubah Agama Almasih) dan Kitab *Iqtidla' ash-Shirath al-Mustaqim Mukhaalafata Ashhabil Jahiim*.

Ajakan Muhammad Ali agar umat Islam berteologi pluralis dipertajam lagi dengan uraiannya tentang Ahli Kitab, yang diartikannya sebagai "orang-orang yang memiliki Alkitab." Dia katakan:

"Sebagian mufassir memahami Ahli Kitab hanya mencakup orang Yahudi dan Nasrani pada zaman diturunkannya Al-Qur`an, namun sebagian pakar menafsirkan Ahli Kitab sebagai semua penganut agama Yahudi, Nasrani, dan agama manapun, kapan dan di manapun. Imam al-Qasimi (w.1914) bahkan memasukkan Budha sebagai nabi yang benar. Imam Abu Hanifah menyatakan, siapa pun yang mempercayai salah seorang nabi atau kitab yang diturunkan Tuhan, maka ia termasuk Ahli Kitab. Orang-orang Majusi, ash-Shabi'un, penyembah tuhan di India, Cina, Jepang, dan sebagainya adalah Ahli Kitab."

Jika dicermati, ungkapan Muhammad itu sangat sembrono. Pegiat "pluralisme agama" rajin sekali mengkampanyekan pemikiran bahwa Ahli Kitab bukan hanya Yahudi dan Nasrani. Jika diteliti, pendapat Muhammad Ali "lebih maju" dari Nurcholish Madjid, dengan menyatakan, agama apa pun dan di mana pun adalah Ahli Kitab. Bahkan, Budha juga disebutnya sebagai nabi yang benar, meskipun ia mengutip Imam al-Qasimi yang tidak jelas rujukannya. Al-Qur`an (surah al-Bayyinah) sudah membedakan orang kafir ke dalam dua golongan, yaitu kaum kafir musyrik dan kafir Ahli Kitab. Soal Budha ini, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, pernah ditanya apakah kaum Budha punya "kitab"? Ia menjawab, "Kita tidak pernah tahu mereka punya kitab samawi, maka hukum atas mereka adalah sama dengan hukum penyembah berhala." (Baca bab sebelumnya tentang Ahli Kitab).

Paham teologi pluralis atau penyamaan agama sebenarnya telah mendapat tantangan keras dari kalangan umat Islam. Dalam fatwa yang dikeluarkan oleh *Lajnah Daimah lil Buhuts Ilmiyah wal-Ifta'* pimpinan Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz tanggal 25 Muharram 1418 H, disebutkan bahwa propaganda "penyatuan agama" merupakan kampanye sesat.

Disebutkan, *"Apabila propaganda penyatuan agama bersumber dari seorang muslim, maka hal itu jelas termasuk kemurtadan dari agama Islam, karena jelas-jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar akidah. Propaganda tersebut meridhai kekufuran terhadap Allah, membatalkan kebenaran Al-Qur`an,.. "*[8]

Tokoh besar lain yang rajin menganjurkan teologi inklusif dan pluralis, seperti dibahas pada bagian sebelumnya, adalah Nurcholish Madjid. Untuk menambah fakta tentang pemihakan Nurcholish Madjid terhadap teologi inklusif dan pluralis, berikut ini sejumlah pendapat dan tulisannya di sejumlah tempat. Masalah pemikiran Nurcholish Madjid ini perlu dipaparkan secara saksama dan hati-hati, mengingat banyak sekali yang terkagum-kagum dengan Nurcholish Madjid, tanpa mau meneliti pemikiran-pemikirannya secara mendalam.

Dalam buku *Teologi Inklusif Cak Nur* (2001), Sukidi mengurai-kan bangunan epistemologis teologi inklusif Cak Nur, *"Bangunan epistemologis teologi inklusif Cak Nur diawali dengan tafsiran al-islam sebagai sikap pasrah ke hadirat Tuhan. Kepasrahan ini, kata Cak Nur, menjadi karakteristik pokok semua agama yang benar. Inilah world view Al-Qur`an, bahwa semua agama yang benar adalah al-Islam, yakni sikap berserah diri ke hadirat Tuhan (al-Ankabuut: 46). "*

Dengan ungkapan "semua agama yang benar" jelas sekali bahwa Nurcholish Madjid mengakui ada banyak agama yang benar. Jadi, bukan hanya agama Islam yang benar. Hal ini lebih diperjelas dalam ungkapan berikutnya,

> *"Dalam konteks inilah, sikap pasrah menjadi kualifikasi signifikan pemikiran teologi inklusif Cak Nur. Bukan saja kualifikasi seorang yang beragama Islam, tetapi 'muslim' itu sendiri (secara generik) juga dapat menjadi kualifikasi bagi penganut agama lain, khususnya para penganut kitab suci, baik Yahudi maupun Kristen. Maka konsekuensi secara teologis bahwa siapa pun di antara kita— baik sebagai orang Islam, Yahudi, Kristen, maupun shabi'in —, yang benar-benar beriman kepada Tuhan dan Hari Kemudian, serta berbuat kebaikan, maka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan ...*

---

[8] Lihat buku *Propaganda Sesat Penyatuan Agama* karya Syaikh Bakr bin Abdullah Abu Zaid, Darul Haq, 2001.

(al-Baqarah: 62, al-Maa`idah: 69). Dengan kata lain, sesuai firman Tuhan ini, terdapat jaminan teologis bagi umat beragama, apa pun 'agama'-nya, untuk menerima pahala (surga) dari Tuhan. Bayangkan betapa inklusifnya pemikiran teologi Cak Nur ini."[9]

Itulah teologi inklusif yang, bukan hanya dipeluk, melainkan juga dipromosikan oleh Nurcholish Madjid dan kawan-kawan. Inti pemikiran itu begitu gamblang, bahwa jalan kebenaran dan keselamatan (*the truth and salvation*) bukan hanya monopoli agama Islam. Orang bisa disebut "muslim" tanpa harus memeluk agama Islam. Yang penting, ia bersikap pasrah. Bahkan, lebih jauh lagi, orang Yahudi, Kristen, Islam, dapat masuk surga. Cobalah baca berulang-ulang makna teologi inklusif versi Nurcholish Madjid itu. Jika kurang yakin, baca lagi tulisan Nurcholish Madjid berikut ini, yang merupakan kata pengantar untuk buku *Tiga Agama Satu Tuhan* (1999).

Menurut Nurcholish, ada tiga sikap dialog agama yang dapat diambil. Yaitu, **pertama**, sikap *eksklusif* dalam melihat agama lain (agama-agama lain adalah jalan yang salah, yang menyesatkan bagi pengikutnya). **Kedua**, sikap *inklusif* (agama-agama lain adalah bentuk implisit agama kita). **Ketiga**, sikap *pluralis* yang bisa terekspresi dalam macam-macam rumusan. Misalnya, "Agama-agama lain adalah jalan yang sama-sama sah untuk mencapai Kebenaran yang Sama", "Agama-agama lain berbicara secara berbeda, tetapi merupakan Kebenaran-kebenaran yang sama sah", atau "Setiap agama mengekspresikan bagian penting sebuah Kebenaran".

Lalu, tulis Nurcholish lagi, *"Sebagai sebuah pandangan keagamaan, pada dasarnya Islam bersifat inklusif dan merentangkan tafsirannya ke arah yang semakin pluralis. Sebagai contoh, filsafat perenial yang belakangan banyak dibicarakan dalam dialog antaragama di Indonesia merentangkan pandangan pluralis dengan mengatakan bahwa setiap agama sebenarnya merupakan ekspresi keimanan terhadap Tuhan yang sama. Ibarat roda, pusat roda itu adalah Tuhan, dan jari-jari itu adalah jalan dari berbagai agama. Filsafat perenial juga membagi agama*

---

[9] Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Kompas, 2001, hal. 21-22.

pada level esoterik (batin) dan eksoterik (lahir). Satu agama berbeda dengan agama lain dalam level eksoterik, tetapi relatif sama dalam level esoteriknya. Oleh karena itu, ada istilah 'Satu Tuhan Banyak Jalan'."[10]

Itulah sikap seorang penganut (teologi) inklusif-pluralis. Bukankah sudah begitu jelas dan gamblang, bahwa menurut Nurcholish, orang bisa masuk surga meskipun ia bukan sebagai Muslim secara formal sebagai suatu *"organized religion"*? Artinya, Anda bisa saja selamat dan masuk surga, meskipun Anda beragama Kristen atau Yahudi.

C. Sembarangan Menafsirkan Al-Qur`an

Dalam buku *Penyesatan Opini* sudah banyak diuraikan berbagai kelemahan dan dampak negatif teologi inklusif dan teologi pluralis. Dalam tulisan ini akan ditambahkan beberapa hal yang cukup mendasar dalam membuktikan kesesatan teologi pluralis tersebut. Para penganut teologi pluralis memang lebih bersikap seperti burung unta, dengan memendamkan kepalanya ke pasir, enggan menelaah adanya perbedaan yang substansial antara teologi satu agama dengan agama lain. Kutipan satu dua orang yang dianggap pakar keagamaan tidak dicermati dan direnungkan secara mendalam, tetapi langsung dijadikan sebagai pijakan teori atau pemikiran.

Kaum pluralis senantiasa menggunakan al-Baqarah: 62 dan al-Maa'idah: 69 untuk melegitimasi pendapatnya. Seperti yang dilakukan Budhy Munawar Rachman, yang mencatat,

> "Mengenai masalah keselamatan dalam agama-agama non-Islam, menarik memperhatikan ayat Al-Qur`an berikut (al-Baqarah: 62 juga al-Maa`idah: 69), 'Mereka yang beriman (kepada Al-Qur`an), orang Yahudi, Kristiani, dan Sabi`in, yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan melakukan kebaikan, pahala mereka ada pada Tuhan, mereka tak perlu khawatir, tak perlu sedih.' Ayat ini secara literal sangat jelas meneguhkan mengenai adanya keselamatan dalam agama-agama. Tetapi anehnya, mayoritas komentator

---

[10] Lihat buku *Tiga Agama Satu Tuhan*, Bandung, 1999, hal. xix.

muslim dengan sia-sia telah berusaha untuk tidak menerima maksud yang jelas dinyatakan kedua ayat tersebut, bahwa keselamatan seseorang di akhirat sebenarnya hanya tergantung pada tiga hal: (1) apakah ia percaya kepada Allah, (2) apakah ia percaya pada hari akhirat (adanya pembalasan atas perbuatan baik dan buruk), dan (3) apakah ia melakukan perbuatan kebaikan kepada sesama umat manusia. **Jadi bukan pada apa agama formalnya!**

Itulah pendapat Budhy Munawar Rachman. Bandingkan, misalnya, pendapat itu dengan pendapat Muhammad Rasyid Ridha tentang makna ayat yang diklaim oleh kaum pluralis sebagai "ayat inklusif" atau "ayat pluralis" itu. Menurut Rasyid Ridha, al-Baqarah: 62 memberikan penjelasan tentang tiga tiang agama, yaitu (1) iman kepada Allah, (2) iman kepada Hari Kebangkitan dan Pembalasan, (3) amal perbuatan yang saleh.

> "Inilah masing-masing tiang agama yang tiga secara singkat. Sebab, maksud ayat itu hanya menerangkan bahwa tiang agama yang dibawa Al-Qur`an lebih sempurna dan lebih lengkap dibanding dengan yang sudah dikenal dalam semua agama terdahulu. Di dalamnya termasuk perbaikan agama-agama para nabi yang sudah dirusak oleh para pemeluknya sendiri berupa penghapusan dan perubahan yang mereka lakukan pada kitab-kitabnya, upacara-upacara keagamaan yang dibuat-buat demi kepuasan hawa nafsu mereka serta taklid buta."[11]

Terhadap rukun (tiang) agama yang pertama, Rasyid Ridha mencatat kesalahan kepercayaan Yahudi dan Nasrani,

> "Terhadap rukun yang pertama inilah banyak kaum dan bangsa yang telah sesat, hatta bangsa yang hidupnya paling dekat dengan masa bimbingan para rasul sekalipun. Orang-orang Yahudi, misalnya, yang masih hidup tidak lama sepeninggal Rasulnya, daripada memelihara pokok kepercayaan tauhid, mereka malah secara dominan menganut

---

[11] Muhammad Rasyid Ridha, *Wahyu Ilahi kepada Muhammad*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, 1984, hal. 275-276.

kepercayaan bahwa Allah memiliki sifat yang menyerupai manusia... Mereka pun beranggapan bahwa Allah nampak dalam bentuk manusia di saat berkelahi dengan Ya'qub dan Ia kalah. Ia tidak bisa lepas dari cengkeraman Ya'qub hingga memberi berkah dahulu, lalu Ia memberi berkah, dan lepaslah Ia..."[12]

Tentang kesesatan kaum Nasrani, Rasyid Ridha mencatat, "Orang-orang Nasrani memperbaharui agama keberhalaan purba dari masa Konstantine dan mereka menganggap Al-masih sebagai tuhan. Mereka menyembah orang-orang suci serta membuat patungnya, sehingga gereja mereka jadi seperti haikal-haikal agama keberhalaan primitif, penuh dengan gambar dan patung yang disembah. Padahal, kepercayaan akan trinitas, salib, dan penebusan dosa yang mereka jadikan sebagai asas agamanya itu adalah kepercayaan Krisna dan trinitas dalam agama Hindu, baik dalam garis besarnya maupun dalam perinciannya. Kepercayaan seperti ini berdasar kepada falsafah khayalan yang tidak masuk akal dan dalam pelaksanaannya berdasar pada aturan yang ditegakkan oleh para raja dan kaisar. Sedangkan, jalan menuju ke arahnya dihampari emas dan perak. Sejak kecil generasi mudanya dididik dengan pendidikan dogmatis khayali yang sudah barang tentu tidak berdasarkan dalil yang kuat dan keterangan yang jelas. Karena itu, sangat tidak aneh jika di muka bumi ini tersebar luas berbagai bentuk kemusyrikan dan penyembah-penyembah berhala--juga dengan berbagai bentuk dan menifestasinya--yang merajalela dengan leluasa."[13]

Al-Qur`an, menurut Ridha, datang membongkar kubu-kubu kemusyrikan dan benteng kepercayaan keberhalaan dari setiap akal dan hati manusia. Penjelasan Ridha tentang "iman kepada Allah" sebagaimana tercantum dalam al-Baqarah: 62, jelas-jelas mengacu kepada konsep iman Islam. Memang sangat aneh jika

---

[12] *Ibid.*, hal. 277.
[13] *Ibid*, hal. 277-278.

sebagian orang dengah mudah menyederhanakan makna "iman kepada Allah" sebagai "percaya kepada Tuhan", apa pun sifat Tuhan yang dipercayai mereka, apakah Tuhan mereka itu punya anak, punya cucu, atau digambarkan dengan sangat tidak patut.

Ketika menjelaskan pilar agama yang kedua, yaitu iman kepada Hari Kebangkitan, Rasyid Ridha juga memberikan kritik keras terhadap kepercayaan-kepercayaan agama lain seputar Hari Kebangkitan. Kaum musyrikin Arab sebagian besar sangat mengingkarinya. Adapun kaum Ahli Kitab dan penganut agama-agama lainnya, pada umumnya percaya akan adanya hidup sesudah mati dan adanya pembalasan, meskipun tentang sifatnya terjadi perselisihan. Namun, Rasyd Ridha menegaskan,

> *"Akan tetapi kepercayaan mereka itu sudah sangat parah, sudah rusak, sebab sudah dicampuri dengan berbagai bid'ah, diwarnai dengan berbagai paham buatan, sehingga faedahnya yang utama musnah, yakni memperbaiki keadaan umat manusia... Apa yang menjadi kepercayaan agama Nasrani tentang Almasih yang jadi penebus dosa manusia, juga tentang kelahiran, pengangkatan dan kebangkitannya kembali, sangat sesuai dengan kepercayaan agama Hindu tentang Krishna, dan Budha, baik kata-katanya maupun isinya. Hanya berbeda namanya saja, yang satu Krishna yang lain Jesus."* [14]

Demikianlah penjelasan yang diberikan Rasyid Ridha tentang makna al-Baqarah: 62 dan juga al-Maa'idah: 69. Hal ini sangat jauh berbeda dengan penjelasan kaum inklusif atau pluralis, yang menyatakan bahwa siapa pun, agama apa pun, asalkan beriman kepada Allah dan adanya Hari Kemudian, berarti akan mendapatkan pahala dari Allah. Pandangan seperti itu jelas-jelas sulit diterima akal sehat, alias ngawur. Sangat tidak masuk akal, Al-Qur`an dan hadits Nabi begitu banyak mengingatkan kesesatan kepercayaan kaum Yahudi dan Nasrani,

---

[14] Ibid, hlm. 287-288. Rasyid Ridha juga memberi catatan kaki dalam bukunya, bahwa kepercayaan Trinitas dan Penebusan dosa sudah dikenal pada agama keberhalaan kuno bangsa Mesir, Babilonia, dan juga Eropa. Hal ini secara terperinci dijelaskan dalam buku khusus dengan bukti-bukti sejarah, yakni buku *Al Aqidatu'l Watsaniyah fi'd-Diyanati'n-Nashraniyyah*, karangan Ustad Muhammad Thahir at-Tannir, terbit 1330 H.

tetapi pada saat yang sama juga membenarkan kepercayaan dan memberikan legitimasi kepada mereka.

Menjelaskan al-Baqarah: 62 itu, Ibnu Katsir menyatakan bahwa setelah pada ayat-ayat terdahulu Allah menjelaskan kondisi kaum kafir, kaum munafik, Yahudi, orang-orang yang menyalahi berbagai perintah-Nya, dan melampaui batas dengan melakukan perbuatan yang tidak diizinkan Allah atas mereka, juga menjelaskan siksa yang menimpa mereka, maka kini Allah mengingatkan bahwa walaupun demikian, ada pula umat terdahulu yang baik dan menaati berbagai perintah Allah sebagaimana yang telah diperintahkan-Nya, dan bagi mereka balasan yang baik. Hal itu terjadi sampai Hari Kiamat. Maka, setiap orang yang mengikuti Rasulullah saw. sebagai nabi yang ummi, baginya kebahagiaan yang abadi. Tiada kekhawatiran atas mereka mengenai apa yang akan diterimanya di akhirat, dan mereka tidak bersedih hati karena apa yang mereka tinggalkan ketika di dunia.[15]

D. Jebakan Misionaris Kristen?

Sejumlah pendukung dan penyebar propaganda teologi pluralis biasanya menyebut-nyebut adanya Konsili Vatikan II, yang katanya, sudah mengubah doktrin dalam agama Kristen/Katolik untuk bersikap inklusif dan pluralis, serta sudah melepas konsep Teologi Eksklusif. Budhy Munawar Rachman, misalnya, menulis:

> "Kalau batasnya adalah Konsili Vatikan II, maka baru sejak 1963-1965-lah secara resmi ada usaha-usaha global untuk memulai perkembangan teologi ke arah yang inklusif. Baru belakangan ini saja berkembang teologi yang lebih pluralis--yang lebih menekankan lebih luas sisi yang disebut paralelisme dalam agama-agama--yang dapat lebih digali lewat kajian teologi agama-agama."

Sukidi juga menulis,

> *"Gereja Katolik misalnya, sejak Konsili Vatikan II tahun 1963-1965 sudah merevisi prinsip* extra ecclesium nulla salus*-nya ke*

---

[15] Lihat *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jld I, GIP, 1999, hal. 143-144.

arah teologi inklusif. Sehingga, keselamatan tidak lagi menjadi otoritas mutlak gereja, keselamatan tidak lagi menjadi monopoli umat Kristiani dengan keharusan mengeksplisitkan iman kepada Yesus Kristus. Revisi ke arah teologi inklusif ini tertera jelas pada dokumen Konsili Vatikan II, terutama teologi inklusif dalam konteks agama-agama lain pada poin "Deklarasi tentang Hubungan Gereja dan Agama-Agama non-Kristiani" (Nostra Aetate, zaman kita). Sejak dideklarasikannya teologi inklusif ini, Gereja Kristen mengakui adanya keselamatan di luar Kristen, yang menurut teolog Katolik yang berhaluan inklusif seperti Karl Rahner disebutnya sebagai 'Anonymous Christian'."[16]

Pertanyaannya, apakah pernyataan dan sikap gereja Katolik dan Kristen pasca-Konsili Vatikan II memang bersikap inklusif seperti yang diklaim oleh Budhy dan Sukidi? Konsili Vatikan II, konsili umum atau pertemuan akbar paling akhir dalam Gereja Katolik, diselenggarakan dari 1962-1965 dan menghimpun sekitar 2.000 orang uskup dari segala penjuru dunia. Dalam sebuah tulisannya yang berjudul *Konsili Vatikan II dan Dialog Antar-Agama di Indonesia*, TH Sumartana, mencatat bahwa pernyataan sikap tentang Islam dalam Konsili Vatikan II sangat positif dan diterima secara menyeluruh pada tanggal 28 Oktober 1965. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut.

"But the plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place among these there are the Moslems, who, professing to hold the faith of Abraham, along with us adore the one and merciful God, who on the last day will judge mankind.

(Tetapi rencana keselamatan juga mencakup orang-orang yang mengakui Sang Pencipta. Pada tempat pertama diantara mereka adalah kaum muslimin, yang mengaku memeluk agama Ibrahim, yang seperti kita juga memuja Tuhan yang Penuh Kasih, Yang pada Hari Akhir akan mengadili umat manusia.)

Dikatakan oleh Th Sumartana, "Konsili Vatikan II mengubah peta hubungan antaragama, baik pada tingkat dunia, maupun

---

[16] Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Kompas, Jakarta, 2001, hal. xiv.

merembes sampai pada tingkat lokal; merambah pada tingkat global dan mempunyai pengaruh mendalam dalam kehidupan jemaat-jemaat lokal. Bukan hanya umat Kristiani saja yang dengan gembira merujuk pada dokumen Konsili Vatikan II, tetapi banyak penganut agama lain menunjuk dokumen tersebut selaku sebuah milik dan pencapaian bersama. Dokumen tersebut diterima sebagai sebuah harapan, sebagai munculnya semangat baru dalam menjalankan dialog antaragama."[17]

Teks Konsili Vatikan II, seperti dikutip oleh Th Sumartana itu memang mengakui jalan keselamatan bukan hanya pada Gereja. Komentar lain tentang Konsili Vatikan II diberikan oleh Pendeta Joas Adiprasetya, M.Th., yang menyatakan, bahwa Deklarasi Katolik mengenai hubungan Gereja dengan agama-agama non-Kristen (*Nostra Aetate*) mencatat suatu sikap baru gereja Katolik yang amat inklusif dan menerima kebaikan-kebaikan dalam agama-agama lain. Dinyatakan dalam teks Konsili tersebut,

> "Gereja Katolik tak menolak apa pun yang benar dan kudus dalam agama-agama ini. Ia menyikapi dengan rasa hormat yang tulus jalan-jalan perilaku dan kehidupan ini, aturan-aturan dan ajaran-ajaran yang sekalipun berbeda dalam banyak segi dari yang dipegang dan diteruskan oleh Gereja, namun kerap memantulkan sinar Kebenaran yang menerangi semua manusia."[18]

Mencermati teks semacam itu, muncul pertanyaan, mengapa teks tersebut berbeda dengan kenyataan di lapangan. Jika kaum Nasrani mengakui bahwa Islam dan agama-agama non-Kristen juga diakui sebagai jalan kebenaran dan keselamatan, mengapa mereka begitu antusias dan menggebu-gebu untuk tetap melakukan kegiatan misionaris di berbagai negeri Islam. Paus sendiri terbukti tidak mengikuti isi teks dokumen Konsili Vatikan tersebut. Sejumlah bukti berikut ini menunjukkan adanya sikap

---

[17] Lihat buku *Gereja Indonesia Pasca Vatikan II, Refleksi dan Tantangan*, Kanisius, 1997, hal.. 353-356.

[18] Joas Adiprasetya, *Mencari dasar Bersama*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2002, hal.. 66.

tidak konsisten tersebut.

Jika ditelusuri lebih jauh, ternyata Konsili Vatikan sendiri memang "tidak konsisten" dan tidak sungguh-sungguh "mengakui kebenaran pada agama lain." Itu terbukti Konsili sendiri tetap menegaskan keharusan untuk menyebarkan misi Injil,

> "Tentu saja, ia mewartakan dan harus terus mewartakan Kristus, 'jalan kebenaran dan kehidupan' (Yoh. 14:6), yang di dalam-Nya manusia dapat menemukan pemenuhan kehidupan keagamaan, yang di dalam-Nya Allah telah mendamaikan segala sesuatu dengan diri-Nya."

Pendeta Joas Adiprasetya menyimpulkan, "Para teolog inklusivis dan eksklusivis sepakat menyatakan bahwa Kristus menjadi norma keselamatan dunia. Mereka sama-sama mengakui bahwa Alkitab ingin menyatakan bahwa hanya mereka yang terhisab dalam anugerah melalui Kristus yang diselamatkan."[19]

Membaca petikan teks Konsili Vatikan Konsili Vatikan II yang menyerukan agar terus dilakukan gerakan misionaris, ternyata sesuai dengan fakta-fakta di lapangan, yang menunjukkan gencarnya kaum Kristen melakukan aksi pemurtadan terhadap kaum muslimin. Sejumlah fakta berikut ini patut disimak.

Pertama, dalam sebuah imbauan bertajuk "*Pope Calls On Catholics To Spread Christianity*", Paus John Paul II mengeluarkan fatwa gerejani agar kaum Katolik mengambil tindakan untuk menyebarkan ajaran Katolik. Ia menegaskan pentingnya melakukan kristenisasi terhadap semua bagian dunia (*to evangelise in all parts of the world*), termasuk negeri-negeri di mana hukum Islam melarang perpindahan agama. Paus menekankan agar negeri-negeri Islam, demikian juga negara-nagara lainnya, segera mencabut peraturan-peraturan yang melarang orang-orang Islam memeluk agama lain. Tanpa me' ebut nama negara secara langsung, Sri Paus menyinggung negara-negara di kawasan Timur Tengah, Afrika dan Asia di mana para misionaris ditolak kehadirannya. Kepada mereka, Paus menyerukan, "Bukakanlah

---

[19] *Ibid*, hal.. 63.

pintu untuk Kristus!" (*Open the doors to Christ!*). Dokumen ini, merupakan surat edaran pertama sejak tahun 1959 yang ditujukan untuk kegiatan misionaris dan yang menekankan pandangan yang demikian keras bahwa penyebaran ajaran Kristen merupakan satu di antara tugas terpenting setiap pemeluk ajaran Katolik. Surat edaran berjudul *"Redemtori Missio"* atau judul Inggrisnya *"The Churchs Missionary Mandate"* (Mandat Misionaris Gereja) ini, merupakan surat edaran ke-8 yang telah dikeluarkan oleh Paus John Paulus II.[20]

Kedua, Paus Yohannes Paulus sendiri tetap mengaku risau karena manusia yang tidak mengenal Injil terus bertambah. Tidak benar sama sekali jika ada yang menyatakan bahwa misi Kristen untuk memurtadkan kaum muslimin sudah berakhir. Simaklah pidato Paus Yohannes Paulus saat menyongsong Yubileum Agung Tahun 2000,

> *"Jumlah mereka yang tidak mengenal Kristus dan tidak menjadi anggota Gereja terus-menerus bertambah. Sungguh, sejak akhir Konsili (Vatikan II) jumlahnya hampir dua kali lipat. Bila kita memperhatikan bagian umat manusia yang besar ini yang dicintai Bapa dan kepada mereka Bapa mengutus Putra-Nya, mendesaknya tugas perutusan Gereja jelas sekali... Di hadapan Gereja, Allah membuka cakrawala kemanusiaan yang lebih siap untuk penaburan Injil. Saya merasa bahwa saatnya sudah tiba, yaitu saat untuk mengabdikan seluruh tenaga Gereja untuk penginjilan baru dan untuk perutusan kepada bangsa-bangsa (ad gentes).* ***Tak ada satu pun orang yang beriman akan Kristus, tidak satu pun lembaga Gereja dapat menghindari tugas luhur ini: memaklumkan Kristus kepada semua bangsa. (RM no. 3).***"[21]

Ketiga, masih merupakan mitos bahwa kaum Kristen *mainstream* sudah melepaskan "teologi eksklusif" mereka--yakni hanya mengakui bahwa agama mereka saja yang benar. Bacalah buku *Lima Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-gereja di*

---

[20] *The Strait Times*, 24 January 1991.

[21] Lihat buku *Bersatu dengan Roh Yang Menghidupkan*, Yubileum Agung Tahun 2000, Kanisius, 1998, hal.. 91-92.

Indonesia (LDKG-PGI) yang memuat keputusan Sidang Raya XII PGI di Jayapura (1994). Dalam buku ini disebutkan ikrar kaum Kristen, yang menyatakan bahwa Allah telah mengaruniakan Anak-Nya yang Tunggal, Yesus Kristus, dan di dalam Dia, Allah menyediakan keselamatan bagi orang-orang yang percaya (Yoh. 3:16, Kis. 16:31). Di dalam Kristus Allah mulai mewujudkan rencana penyelamatan-Nya (Ef. 1:9-10). Penyataan Kerajaan Allah secara penuh baru akan terjadi ketika "dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi, dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa (Flp. 2:10-11).

Pada bagian *"Symbolum Athanasianum"* dalam buku itu juga disebutkan beberapa hal. (1) **Bila seseorang ingin diselamatkan, maka pertama-tama haruslah ia memegang erat kepercayaan Gereja Katolik (*Catholic Church*).** (2) Bila ia tidak dengan seluruhnya dan sebenar-benarnya memegang kepercayaan ini, pasti ia akan binasa. (3) Kepercayaan Gereja Katolik ialah bahwa kita beribadat kepada Allah yang bertubuh satu tetapi beroknum tiga dan beroknum tiga tetapi bertubuh satu. (4) Oknum-Nya tidak bercampur baur, dan tubuh-Nya tidak bercerai-berai.[22]

Keempat, di kalangan Kristen sendiri, konsep teologi pluralis itu masih menjadi perdebatan sengit. Apakah benar, jalan keselamatan juga dapat dilalui tanpa beriman kepada Yesus Kristus? Dalam bukunya, *Agama dan Kerukunan*, tokoh Kristen Indonesia, Dr. A.A. Yewangoe, membahas satu subbab berjudul "Keselamatan Hanya dalam Kristus?" Setelah menguraikan panjang lebar dialektika di antara sejumlah ilmuwan Kristen, Yewangoe mencatat,

> "Kepentingan epistemologis menegaskan bahwa kontak langsung dengan Kristus melalui firman adalah satu-satunya jalan keselamatan yang dapat diperantarai. Sebab, hanya itulah satu-satunya jalan keselamatan yang dapat dipahami secara layak. Di luar Kristus, seseorang tidak mampu memahami bagaimana keselamatan bekerja. Karena itu, dia merasa

---

[22] Lihat *buku Lima Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia* (LDKG-PGI), BPK Gunung Mulia, 1996.

tidak penting menerimanya secara psikologis kognitif. Pertama-tama hal ini berarti bahwa hanya di dalam Kristus seseorang menyadari bahwa ia diselamatkan hanya oleh iman. Tanpa Kristus, manusia tidak dapat memahami secara penuh keberdosaannya... Agaknya dengan penggambaran ini kita sudah dapat memahami sedikit klaim model Protestan arus utama mengenai keutamaan Yesus sebagai satu-satunya Juru selamat."[23]

Yewangoe adalah salah satu Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI), yang pernah menggugat angka statistika pemerintah Indonesia, karena menyebut jumlah orang Kristen hanya 6 persen. Padahal, katanya, misi Kristen banyak mencatat sukses.

Yewangoe mengkritik mantan Menteri Agama Tarmizi Taher yang selalu mengemukakan bahwa jumlah orang Kristen itu hanya 5-6 persen. Selanjutnya, Yewangoe menulis,

> *"Ia (Tarmizi. pen.) sebenarnya hendak memperlihatkan bahwa agama Kristen hanyalah minoritas di Indonesia. Saya sendiri tidak percaya statistik itu. Masa dalam sekian tahun tidak pernah jumlah orang Kristen bertambah, padahal kita tahu betul bahwa* ***di banyak tempat terjadi baptisan-baptisan massal.*** *Kalau sungguh-sungguh jujur, sebaiknya diadakan sensus dengan cara yang terbuka pula. Saya menaksir jumlah orang Kristen di Indonesia sekarang ini antara 16-17%, kalau lebih optimis 20%. Malah bisa lebih. Agar kita mempunyai 'counter data', sebaiknya gereja-gereja mengadakan sensus sendiri, lalu data-data itu dikirim kepada Balitbang PGI. Kalau kita punya data-data yang akurat, maka kita dapat menolak penyajian data yang tidak tepat yang dilakukan oleh lembaga apa saja. Tetapi, memang persentase yang kecil itu dengan sengaja dikemukakan berulang-ulang agar kita dirasuki 'sikap mental minoritas'. Sikap mental ini sangat berbahaya, apalagi kalau sudah memasuki generasi muda. Ini akan membawa mereka (dan kita sekalian) kepada 'minderwaardigheids conplex (mc)'. Lalu terus-menerus menganggap diri warga negara kelas dua. Gereja-*

---

[23] A.A. Yewangoe, ***Agama dan Kerukunan***, BPK Gunung Mulia, 2001, hal..189-190.

gereja harus tegas dalam hal ini. Walaupun jumlah kita kurang dari orang lain, itu tidak berarti bahwa minoritas, lebih-lebih dalam proses pengambilan keputusan."[24]

Jika konsep teologi pluralis itu sendiri masih diragukan di kalangan Kristen *mainstream*, mengapa beberapa orang dari kalangan Muslim begitu getol untuk menyebarkannya di kalangan Muslim? Apakah mereka tidak menyadari bahaya teologi semacam itu bagi keselamatan akidah Islam. Teologi semacam itu, intinya melepaskan keyakinan pada akidah Islam, dan untuk selanjutnya melepaskan akidah Islam, dengan mengakui bahwa "jalan" yang terdapat pada agama-agama lain juga sah dan sampai juga kepada Tuhan.

Kelima, gencarnya gerakan misi Kristen dengan berbagai cara menunjukkan bahwa konsep Konsili Vatikan II--yang oleh sejumlah kalangan dipotong bagian proyek Kristenisasinya--terbukti hanya indah di atas kertas, tetapi tidak dilaksanakan di lapangan. Apakah cara ini bukan merupakan suatu bentuk pengelabuan terhadap kaum muslimin, agar tidak lagi mewaspadai gerakan misi Kristen? Sebagai contoh, hingga tulisan ini dibuat, kaum Kristen tetap menolak untuk mengajarkan pelajaran agama Islam bagi siswa-siswa sekolah Kristen/Katolik, sesuai dengan perintah UU No 2 tahun 1989. Ini menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk memurtadkan umat Islam.

UU Sistem Pendidikan Nasional (UU No. 2 1989), mengenai Penjelasan Pasal 28 ayat (2) berbunyi, "Tenaga pengajar pendidikan agama harus beragama sesuai dengan agama yang diajarkan dan agama peserta didik yang bersangkutan." Penjelasan ini dengan sangat gigih ditolak oleh kalangan Kristen. Mereka meminta kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan agar lebih dirinci lagi dalam Peraturan Pelaksanaan. Pada tahun 1990, Peraturan Pelaksanaan UU Sistem Pendidikan Nasional dikeluarkan Pemerintah dan sejauh itu tak satu pun dari PP UU Sistem Pendidikan Nasional itu yang bertentangan dengan

---

[24] Dikutip dari tulisan A.A. Yewangoe berjudul *Gereja di Era Reformasi*. dalam buku *Gereja dan Reformasi*, ed. Victor Silaen, 1999, hal.. 31-32.

materi undang-undangnya.

Namun, mereka berhasil mempengaruhi pejabat-pejabat tertentu yang berwenang sehingga terjadi berbagai penyimpangan penafsiran.

Bulan Oktober 1990, Komisi IX DPR telah mengadakan rapat kerja dengan Mendikbud Fuad Hasan. Dalam rapat tersebut telah terjadi selisih pendapat tentang kewajiban sekolah dan hak siswa menerima pelajaran agama, berkenaan dengan pasal 16 PP 28/1990 dari UU No. 2/1969 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal-pasal itu disebutkan bahwa "siswa berhak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya". Dengan demikian, dapat diartikan bahwa seorang siswa penganut agama lain di lingkungan sekolah yang berciri khas keagamaan tertentu akan memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianut siswa bersangkutan.

Menurut Sekjen DDII, Hussein Umar, sikap kalangan Kristen dalam soal UU Pendidikan Nasional, lebih mencerminkan sikap menghindari dari kewajiban mematuhi UU tentang Sistem Pendidikan Nasional dengan cara menyalahtafsirkan pengertian yang sesungguhnya sangat jelas dan seharusnya. Hal ini menimbulkan konsekuensi yakni anak didik (siswa) yang beragama Islam yang berada di sekolah-sekolah Kristen tidak saja akan tidak memperoleh hak-haknya mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama yang dianutnya (sesuai dengan tuntutan undang-undang). Bahkan, berpeluang untuk dimurtadkan melalui proses pendidikan yang dilaluinya karena keharusan mengikuti pendidikan agama yang "tidak sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai anak didik".

Hal ini menjadi sangat mengkhawatirkan apabila dihubungkan dengan tujuan sekolah-sekolah Kristen (Katolik) sebagaimana dicantumkan dalam Surat Kongregasi Pendidikan Katolik tentang Sekolah Katolik, S.K.n.45, S.K.n.49, sebagai berikut.

"... membangun manusia seutuhnya, karena di dalam Kristus, Manusia Sempurna, semua nilai manusia dipenuhi dan disatukan. Di sinilah letak ciri khas Katolik dari sekolah." (Surat Kongregasi Pendidikan Katolik tentang Sekolah Katolik, S.K.n.35)

"Sekolah Katolik mempunyai tugas khusus membentuk murid-muridnya menjadi Kristus seutuhnya, dan tugas itu mempunyai arti istimewa sekarang, karena keluarga dan masyarakat tidak memadai." (S.K.n.45)

"Sekolah Katolik harus membentuk murid-muridnya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh. Untuk dapat mencapai tujuan itu 'tujuan pengajaran Injil benar-benar merupakan unsur dasar dalam proses pendidikan karena membantu murid mampu memilih secara sadar penghayatan cara hidup yang bertanggung jawab." (SK.n.49)[25]

Jadi, berbagai bukti tersebut menunjukkan betapa misi Kristen terus berjalan di tengah umat Islam, tanpa mempedulikan konsep Konsili Vatikan II. Bahkan, Paus sendiri yang menyerukan agar misi Kristen terus dijalankan. Di kalangan Kristen, memang ada juga yang gencar menyuarakan teologi pluralis, tetapi terkadang itu hanya sebagai kedok untuk memperlancar misi Kristennya, seperti yang dilakukan oleh kelompok Apostolos.

Penyebaran paham pluralisme teologis di tengah kaum muslimin sangat merugikan umat Islam dalam menghadapi misionaris Kristen yang bertekad melakukan pemurtadan kaum muslimin. Tidak terlalu sulit untuk membuktikan bahwa pengembangan teologi pluralis di kalangan umat Islam merupakan bagian dari upaya penghancuran umat Islam. Simaklah strategi Sekolah Tinggi Teologi Apostolos yang rajin mengkampanyekan teologi pluralis ini.

Dalam berbagai publikasinya yang disebarkan ke tengah masyarakat, Sekolah Tinggi Teologi (STT) Apostolos mengumumkan bahwa mereka tidak mengemban misi Injil untuk melakukan Kristenisasi ke tengah masyarakat muslim, karena mereka menganut paham teologi pluralis, yang intinya memandang bahwa semua agama adalah benar. Dalam sebuah tulisan yang disebarkan oleh pengelola STT Apostolos berjudul *"Teror atas STT Apostolos"*, ditulis, "... mahasiswa STT Apostolos

---

[25] Lihat tulisan Hussein Umar berjudul "Intoleransi Kaum Nasrani terhadap Umat Islam" dalam buku *Gereja-Gereja Dibakar: Membedah Akar konflik SARA di Indonesia*, karya Adian Husaini, DEA Press, 2000.

sendiri sering mendapat peringatan tegas dari Ketua STT Apostolos agar meninggalkan semangat-semangat Kristenisasi dan beralih ke semangat pluralis. Setiap agama memiliki nilai kebenarannya sendiri-sendiri, karena itu, biarlah yang Islam tetap Islam, Hindu tetap Hindu, Budha tetap Budha, dan sebagainya."

Klaim bahwa Apostolos menganut *teologi pluralis* dan tidak menjalankan aktivitas Kristenisasi tidak benar sama sekali. Di dalam liflet penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2000-2001, yang disebarkan oleh Apostolos, tertulis bahwa Dasar-Dasar STT Apostolos adalah (a) STT Apostolos mempunyai keyakinan bahwa Alkitab adalah satu-satunya sumber berita tentang "Sang Firman" dan satu-satunya sumber berita yang benar tentang "Sang Kebenaran", (b) STT Apostolos mempunyai pengajaran *Orthodox* dalam arti kata sebenarnya sebagai "Pengajaran yang lurus" yang bersumber dari gereja mula-mula, (c) STT Apostolos mempunyai penerapan Kontekstual Injil sebagai "Kabar Baik" dalam dialogis masyarakat majemuk.

Adapun tujuan pendidikan STT Apostolos adalah sebagai berikut. (a) Mempersiapkan hamba Tuhan yang mampu berteologi secara kontekstual, kritis, dan mandiri. (b) Mempersiapkan pemimpin dan pelopor Gereja masa depan yang mampu "berdialog" lintas teologi dengan dunia Islam. (c) Mampu menciptakan pola-pola pelayanan yang selalu relevan di dalam konteks Indonesia yang pluralis.

Menyimak dasar-dasar dan tujuan pendidikan Apostolos, maka sulit dikatakan bahwa Apostolos menganut paham teologi pluralis. Hal itu ditegaskan lagi dalam penjelasan tentang kurikulum Apostolos, *"Kurikulum STT dirancang sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan Pemimpin Kristen dan Teolog yang independen dan mampu berkomunikasi dengan "dunia Islam". Untuk itu STT Apostolos memiliki mata kuliah keahlian khusus, yaitu yang ditangani oleh dosen-dosen IAIN Jakarta dan para ahli di bidang Studi Islamika."*

Bukti lain bahwa Apostolos dan Jusuf Roni tetap menjalankan misi Kristennya adalah pendirian Yayasan Diaspora Ministry (didirikan tanggal 2 Juni 1994 pukul 10.00 WIB, Notaris Ibu

Rohani, Jakarta Selatan). Pendirinya adalah Pdt. KAM Jusuf Roni, Pdt. Dr. LN Panggabean, Pdt. Freddy Djaja Saputra, dan lain-lain. Kegiatan yayasan ini antara lain menerbitkan Majalah Pensyil (Pendidikan Syiar Injil) dan STT Apostolos. Untuk meningkatkan tata layanan yang lebih terpadu dan terkonsentrasi kepada satu kekuatan besar dan memacu diri dalam meningkatkan mutu pelayanan sekaligus menyongsong tahun 2000, Yayasan Diaspora Ministry bekerjasama dengan Asia Mission Association (AMA).

Jadi, melalui teologi pluralis ini, umat Islam diprovokasi agar melepaskan akidahnya, tidak lagi meyakini agamanya saja yang benar, dan kemudian diajak untuk mengakui bahwa agama Kristen juga benar. Maka, bisa dikatakan, teologi pluralis sebenarnya adalah "pembuka pintu" bagi misi Kristen dan sejalan dengan imbauan Paus Yohannes Paulus agar misi Kristen tetap dijalankan.

Strategi misionaris Kristen untuk mengaburkan Islam bukan hal baru. Dalam Konferensi Misionaris di kota Quds tahun 1935, Samuel Zweimer, seorang Yahudi yang menjabat direktur organisasi misi Kristen, menyatakan, *"Misi utama kita bukan menghancurkan kaum muslimin sebagai orang Kristen, namun mengeluarkan seorang muslim dari Islam, agar jadi orang yang tidak berakhlak sebagaimana seorang muslim. Dengan begitu akan membuka pintu bagi kemenangan imperialis di negeri-negeri Islam. Tujuan kalian adalah mempersiapkan generasi baru yang jauh dari Islam. Generasi muslim yang sesuai dengan kehendak kaum penjajah, generasi yang malas, dan hanya mengejar kepuasan hawa nafsunya."*

Dalam salah satu bukunya (edisi Arab: *al-Gharah 'Alal-'Alam Islamiy*, hlm. 275), Zweimer menulis, *"Di dalam mata rantai kebudayaan Barat, gerakan misi punya dua tugas: menghancurkan peradaban lawan (baca: peradaban Islam) dan membina kembali dalam bentuk peradaban Barat. Ini perlu dilakukan agar si muslim dapat berdiri pada barisan budaya Barat untuk melawan umatnya sendiri."* [26]

Salah satu strategi misi Kristen saat ini adalah "merusak

[26] Majalah *Sabili*, No 19 Th VII, 8 Maret 2000.

Islam". Mereka hanya membujuk orang Islam masuk Kristen, tetapi juga berusaha menjauhkan umat Islam dari ajaran agamanya. Harry Dorman, dalam bukunya *Towards Understanding Islam*, mengungkapkan pernyataan seorang misionaris Kristen, "Boleh jadi, dalam beberapa tahun mendatang, sumbangan besar misionaris di wilayah-wilayah muslim akan tidak begitu banyak memurtadkan orang muslim, **melainkan lebih banyak menyelewengkan Islam itu sendiri. Inilah bidang tugas yang tidak bisa diabaikan.**" Dr. Cragg, seorang misionaris terkenal asal Inggris, menyatakan, "Tidak perlu diragukan bahwa harapan terakhir misi Kristen hanyalah melakukan perubahan sikap umat muslim, sedemikian rupa sehingga mereka mau bertoleransi."[27]

E. Mencermati Jerat-Jerat Zionisme

Sidik Jatnika, penulis buku *Gerakan Zionis Berwajah Melayu* mencatat strategi gerakan zionis untuk menghancurkan umat Islam,

> "Agen gerakan Zionisme di Indonesia yang paling mutakhir adalah gerakan dengan membonceng euforia reformasi. Atas nama kebebasan, hak asasi manusia, dan tetek bengeknya, mereka secara terang-terangan mulai memperjuangkan pengakuan terhadap berbagai perilaku penyimpangan sosial maupun seksual sebagai realitas yang harus dihargai dan diberi hak hidup di Indonesia. Mereka dengan lantang mengkampanyekan supaya komunisme dan ateisme ataupun pemujaan terhadap setan diberi hak hidup di Indonesia sebagai layaknya sebuah agama ataupun ideologi. Bahkan, mereka tidak malu-malu lagi memperjuangkan supaya pelacuran, homoseksual, lesbian, dianggap sebagai profesi dan perilaku yang sah keberadaannya. **Anehnya, jika masyarakat melakukan penggerebekan atau penggropyokkan terhadap para pelaku penyimpangan sosial tersebut,**

---

[27] Lihat buku *Islam dan Orientalisme*, karya Maryam Jameela (Margareth Marcus), 1994:8-9, 51-52.

bukan para pesakitan yang disalahkan, tetapi justru masyarakatlah yang disalahkan karena telah melanggar hak asasi individu manusia untuk berzina, melakukan homoseksual, maupun lesbian."[28]

Penyebaran paham teologi pluralis, yang intinya adalah paham pengesahan kebenaran semua agama, akan berujung pada penghancuran agama itu sendiri. Logikanya sangat sederhana. Jika ada orang yang menyatakan bahwa semua agama itu sama, maka logikanya ia sudah tidak yakin akan kebenaran agamanya sendiri, yang pasti bersifat unik. Walhasil, ikatannya dengan ajaran-ajaran agamanya semakin longgar. Dia dapat bertindak semaunya sendiri, menuruti kehendak dan jalan pikirannya sendiri, untuk menentukan apakah sesuatu dianggap baik atau buruk.

Paham penyamaan agama atau "penghancuran agama secara terselubung" inilah yang pernah secara gencar dikampanyekan oleh organisasi rahasia Yahudi Freemasonry.

Dalam bukunya, *Menelanjangi Yahudi*, Fuad Kauma (1997:12-13), mencatat, "*Organisasi ini mempunyai tiga semboyan yang selalu didendangkan, yaitu **Liberty, Egality,** dan **Fraternity** (kemerdekaan, persamaan, dan persaudaraan) Masing-masing semboyan itu mengandung nilai tinggi yang didambakan setiap orang.*"

Dalam sejarahnya, Freemasonry--yang sebagian organnya memiliki keterkaitan dengan kelompok Theosofi--pernah berhasil menggaet tokoh-tokoh penting di berbagai belahan dunia. Tanpa sadar, banyak tokoh terjebak gerakan Theosofi karena gerakan ini menawarkan berbagai idealisme yang seolah-olah ideal bagi kemanusiaan di samping keuntungan materi dan "gengsi duniawi". Studi kasus tentang Gerakan Theosofi di Indonesia menarik untuk dicermati.

Buku yang ditulis oleh Iskandar P. Nugraha berjudul *Mengikis Batas Timur dan Barat: Gerakan Theosofi dan Nasionalisme Indonesia* (2001), memberikan gambaran besarnya pengaruh gerakan Theosofi pada tokoh-tokoh nasional di Indonesia. Misalnya, orang tua Soekarno (R. Soekemi) ternyata anggota

---

[28] Sidik Jatnika, *Gerakan Zionis Berwajah Melayu*, 2001, hal.. 196.

Theosofi. Hatta juga mendapat beasiswa dari Ir. Fournier dan van Leeuwen, anggota Theosofi. Tokoh-tokoh lain yang menjadi anggota atau dekat sekali hubungannya dengan Theosofi adalah Moh. Yamin, Abu Hanifah, Agus Salim, Achmad Subardjo, Radjiman Widijodiningrat (aktivis Theosofi), Tjipto Mangoenkoesoemo, Douwes Dekker, Armijn Pane, Sanoesi Pane, dan sebagainya.[29]

Tahun 1909, dalam Kongres Theosofi di Bandung, jumlah anggota Theosofi adalah 445 orang (271 Belanda, 157 Bumiputera, dan 17 Cina). Dalam Kongres itu juga disepakati terbitnya majalah Theosofi berbahasa Melayu *Pewarta Theosofi* yang salah satu tujuannya menyebarkan dan mewartakan perihal usaha meneguhkan persaudaraan. Pada tanggal 15 April 1912, berdirilah *Nederlandsch Indische Theosofische Vereeniging* (NITV), yang diakui secara sah sebagai cabang Theosofi ke-20, dengan Presidennya D. van Hinloopen Labberton. Tahun 1915, dalam Kongres Theosofi di Yogyakarta, jumlah anggotanya sudah mencapai 830 orang (477 Eropa, 286 bumiputera, 67 Cina).

Anggaran Dasar NITV kemudian disetujui Pemerintah Hindia Belanda tanggal 2 November 1912. Dengan demikian, NITV menjadi organisasi yang sah dan berdasar hukum. Pusatnya di Batavia. **Cita-cita yang dicanangkan NITV adalah keinginan untuk memajukan kepintaran, kebaikan, dan keselamatan "saudara-saudara" pribumi, agar dengan bangsa Barat dapat saling berdekatan.** Berdasarkan cita-cita tersebut, ternyata NITV mengandung cita-cita sama dengan kaum asosiasi, yaitu suatu hubungan yang bersifat paternalistik.[30]

Gerakan Theosofi, seperti dirumuskan oleh ketuanya Dr. Annie Besant, mempunyai beberapa tujuan. (1) Membentuk suatu inti persaudaraan universal kemanusiaan, tanpa membeda-bedakan ras (bangsa), kepercayaan, jenis kelamin, kasta, ataupun warna kulit. (2) Mengajak mempelajari perbandingan agama-agama, filsafat, dan ilmu pengetahuan. (3) Menyelidiki

---

[29] Iskandar P. Nugraha, Mengikis Batas Timur dan Barat: Gerakan Theosofi dan Nasionalisme Indonesia, 2001, hal.. 47-62.

[30] *Ibid*, hal. 17-22.

hukum-hukum alam yang belum dapat diterangkan dan menyelidiki tenaga-tenaga yang masih tersembunyi dalam manusia. Selain memimpin Theosofi, Annie Besant juga memimpin organisasi Freemasonry, Moeslim Bond, Theosofische Wreld Universiteit, The Liberal Catholic Church, dan beberapa organisasi lainnya.[31]

Kisah Gerakan Theosofi dalam merekrut elite-elite bangsa Indonesia, dapat dijadikan sebagai satu telaah yang serius. Pasalnya, suatu gerakan yang sebenarnya memiliki misi penghancuran akidah Islam, ternyata begitu memikat banyak elite bangsa. "Persaudaraan universal tanpa memandang batas-batas agama" seolah-olah merupakan sesuatu yang utama dalam kehidupan manusia. Padahal, Islam telah menegaskan bahwa persaudaraan sejati haruslah dibangun di atas landasan iman. *Innamal mu'minuuna ikhwatun* (al-Hujuraat:10).

Penegasan tentang persaudaraan dan kasih sayang bisa disimak juga dalam ayat Al-Qur`an berikut.

> *"Kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya, sekalipun mereka itu orang tua sendiri, anak, saudara kandung atau keluarga. Mereka itulah yang Allah telah tuliskan keimanan di hatinya dan menguatkannya dengan pertolongan dari-Nya. Dan dimasukkan-Nya mereka ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap mereka dan mereka pun ridha terhadap (limpahan rahmat) Allah.* ***Mereka itulah 'hizbullah'. Ketahuilah bahwa sesungguhnya 'hizbullah' itulah yang pasti menang."*** **(al-Mujaadalah: 22)**

Persaudaraan tanpa memandang agama adalah misi penting dari Theosofi. Secara lebih jelas, misi Theosofi digambarkan oleh Ketua Theosofische Vereeniging Hindia Belanda, D. Van Hinloopen Labberton, pada majalah *Teosofi* bulan Desember 1912,

"Kemajuan manusia itu dengan atau tidak dengan agama? Saya kira bila beragama tanpa alasan dan bila beragama tidak

---

[31] *Ibid*, hal.. 11-12.

dengan pengetahuan agama yang sejati, mustahil bisa maju batinnya. **Tidak usah peduli agama apa yang dianutnya.** Sebab yang disebut agama itu sifatnya, cinta pada sesama, ringan memberi pertolongan, dan sopan budinya. Jadi yang disebut agama yang sejati itu bukannya perkara lahir, tetapi perkara dalam hati, batin."

Semoga kasus Theosofi ini dapat disimak dengan cermat. Begitu halusnya benih-benih destruktif ini ditebarkan ke tengah muslim. Dibuatlah slogan-slogan indah untuk mengelabui umat manusia, seperti slogan Freemasonry, yaitu "Liberty, Egality, dan Fraternity" 'Kebebasan, Persamaan, dan Persaudaraan.' Intinya, jangan terlalu peduli pada agama Anda karena Anda semua adalah umat manusia yang satu! Maka, setelah umat muslim dihancurkan akidahnya, tidak menjadi fanatik/militan, dihancurkanlah agama Islam. Tanpa disadari oleh muslim itu sendiri. Bahkan, tak jarang, banyak yang menyangka mereka telah berbuat baik, padahal apa yang mereka kerjakan dan mereka kampanyekan adalah suatu kebatilan.

"Katakanlah, 'Apakah akan Kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya? Yaitu orang-orang yang sia-sia amalnya di dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya.'" **(al-Kahfi: 103-104)**

Persaudaraan sejati adalah persaudaraan antarmukmin. Bahkan, untuk mempertahankan iman itulah banyak para sahabat Nabi yang sampai rela berhadapan dalam peperangan dengan saudara-saudara yang memiliki hubungan darah. Jika persaudaraan berdasarkan iman sudah dihancurkan, diganti dengan dasar ras, hubungan darah, atau wilayah, maka itu adalah kemunduran bagi umat manusia. Inilah arti strategis penghancuran solidaritas Islam oleh kelompok seperti Theosofi. Karena itulah, bisa dipahami mengapa keberadaan Theosofi didukung penuh oleh penjajah Belanda.

Jika keraguan akan kebenaran Islam mulai merasuk, maka muncullah ungkapan seperti yang disampaikan Ahmad Wahib dalam catatan hariannya, *"Aku tak tahu, apakah Tuhan sampai hati*

memasukkan dua orang bapakku itu ke dalam api neraka. Semoga tidak." (Yang dimaksud Wahib dengan dua orang bapaknya adalah Romo HJ Stolk SJ dan Romo Willem). Wahib pun mengaku sangat terkesan dengan kehidupan para Romo Katolik. Ia mencatat, "Dalam gereja mereka, Tuhan adalah pengasih dan sumber segala kasih. Sedang di masjid atau langgar-langgar, dalam ucapan dai-dai kita, Tuhan tidak lebih mulia dari hantu yang menakutkan dengan neraka di tangan kanannya dan pecut di tangan kirinya." [32]

Wallahu a'lam.

* * *

[32] Lihat buku *Pergolakan Pemikiran Islam* terbitan LP3ES, cetakan kelima tahun 1995.

Bab Ke-4
PENGHANCURAN SYARIAT ISLAM

"Korban pertama dari penerapan syariat adalah wanita."
(Muslim Abdurrahman)

"Islam liberal bisa menerima bentuk negara sekuler... sebab, negara sekuler bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus."
(Ulil Abshar Abdalla)

"Bangsa-bangsa Arab di Asia Barat pada akhirnya telah mendapatkan cahaya kebenaran bahwa jika syariat tidak diubah secara drastis sejalan dengan konsep-konsep hukum Barat, mereka tidak dapat maju."
(JND Anderson)

"Kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga jikalau mereka masuk ke lobang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, 'Ya Rasulallah, apakah (mereka) itu Yahudi dan Nasrani?' Nabi saw. menjawab, 'Siapa lagi!'"
(HR Muslim)

Salah satu misi penting dari kelompok Islam Liberal adalah penolakan terhadap syariat Islam, khususnya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Merujuk pada berbagai tulisan dan wawancara di www.islamlib.com, maupun komentar para tokoh dan kontributor Islam Liberal, dapat dipahami bahwa penolakan terhadap pemberlakuan syariat Islam di Indonesia termasuk salah satu isu dan misi pokok yang diemban oleh kelompok Islam Liberal. Sebagai contoh, wawancara Muslim Abdurrahman dengan Ulil Abshar Abdalla di situs www.-islamlib.com yang diberi judul "Dr. Muslim Abdurrahman: Korban Pertama dari Penerapan Syariat Adalah Wanita."

Dijelaskan dalam tulisan itu, "Banyak dampak negatif yang bakal muncul dari pemaksaan penerapan syariat Islam di Indonesia. Dari soal kemiskinan, ketidakadilan hukum, hingga perampasan hak-hak kewarganegaraan akibat sentralisme kekuasaan pada hanya satu penafsiran. Korban pertama yang bakal muncul akibat penerapan syariat Islam itu adalah kaum wanita. Karena, menurut Dr. Muslim Abdurrahman, banyak sekali regulasi dalam Islam yang membatasi ruang gerak kaum wanita."

Kaum Liberal Islam ini secara tegas menyatakan mendukung suatu negara sekuler. Mereka berpandangan, jika syariat Islam diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka prinsip negara sekuler akan runtuh, dan negara itu berganti menjadi negara yang antidemokrasi.

> "Adapun hal prinsip misalnya negara demokrasi, emansipasi wanita, dan kebebasan berpikir. Islam liberal bisa menerima bentuk negara sekuler, yang lebih unggul dari negara ala kaum fundamentalis. Sebab, negara sekuler bisa menampung energi kesalehan dan energi kemaksiatan sekaligus," kata Ulil, yang disambut ledakan tawa peserta diskusi.[1]

A. Bagian dari "Peperangan Global"

Sejak penjajah Barat menancapkan kuku imperialnya di negeri-negeri Islam, di samping aspek akidah, aspek syariat Islam

---

[1] Majalah *Tempo*, 19-25 November 2001.

juga menjadi sasaran penghancuran. Syariat Islam dianggap sebagai genjalan serius untuk mempertahankan hegemoni imperial mereka. Maryam Jameela menceritakan, dalam suatu ceramahnya di depan mahasiswa muslim di Universitas Punjab, Prof. JND Anderson dari Universitas London menyatakan bahwa ia memberikan penghargaan kepada negara-negara yang menggunakan bahasa Arab atas keberanian mereka dalam melancarkan usaha-usaha untuk menyelaraskan syariat dengan tuntutan-tuntutan peradaban abad ke-20. "Bangsa-bangsa Arab di Asia Barat pada akhirnya telah mendapatkan cahaya kebenaran bahwa jika syariat tidak diubah secara drastis sejalan dengan konsep-konsep hukum Barat, mereka tidak dapat maju," kata Anderson.[2]

Realitasnya, kini dunia dikuasai oleh kaum sekuler. Kaum Kristen dan Yahudi tidak menggunakan hukum Taurat sebagai hukum positif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Setelah kaum sekuler Barat menjadi penguasa dan menggusur agama Kristen ke pojok-pojok gereja, mereka kemudian mengembangkan kekuasaannya ke negeri-negeri Islam. Melalui imperialisme, paham sekuler itu kemudian dipaksakan ke negeri-negeri Islam. Donald E. Smith menyebutkan, sebagai paham yang inhern dengan budaya Kristen Barat yang disebarkan ke seluruh dunia, paham "pemisahan gereja dan negara--yang kemudian dilebarkan menjadi "pemisahan negara dengan agama"--memang telah menjadi suatu **fenomena global**. Proses menuju sekulerisme (**sekularisasi**), menurut Smith, merupakan fenomena masyarakat politik modern sejak satu setengah abad yang lalu.

Dominasi paham sekuler melalui proses yang panjang. Ketika berkuasa, pemerintah imperialis Barat di Asia dan Afrika gigih melaksanakan sekularisasi. Para penguasa Barat mencopot raja-raja suci dari tahta mereka (seperti di Burma), **mengganti hukum Islam dengan hukum sekuler**, menganaktirikan sistem pendidikan agama dengan menganakemaskan sekolah-sekolah pemerintah yang bersifat sekuler dan sekolah-sekolah misi

---

[2] Maryam Jemeela, *Islam dan Orientalisme*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, hal.. 7.

Kristen (seperti di Mesir), dan pada umumnya memperkecil arti dan pengaruh agama-agama dalam kehidupan sosial maupun politik. [3]

Van Leeuwen mencatat bahwa pertemuan antara budaya sekuler Barat (secara implisit, Kristen) dan budaya-budaya religius di Timur Tengah dan Asia "memulai babak baru dalam sejarah sekulerisasi. Budaya sekuler, menurut Leeuwen, merupakan hadiah Kristen kepada dunia. Dengan sekulerisasi, diharapkan umat Islam akan melepaskan "mitos otoritas syariat yang mengatur kehidupan".[4]

Benturan antara sistem sekuler Barat dengan syariat Islam itu diuraikan oleh Arend Th. Van Leeuwen sebagai berikut.

> *"Shari'a, hukum kanonik Islam, adalah suatu tatanan peraturan-peraturan yang luas jangkauannya mengenai seluruh bidang kehidupan, baik agama, politik, sosial, rumah tangga, maupun pribadi. Bagian pertama berisi petunjuk-petunjuk mengenai hal-hal agama dan ritual. Bagian kedua, yang membahas persoalan-persoalan yuridis dan politik adalah sejalan dengan bagian terdahulu, seperti juga petunjuk-petunjuk cermat yang melimpah ruah mengenai tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan sosial budaya. Sebab, fungsi utama dan hakiki dari shari'a adalah pengendalian teokratis dari seluruh kehidupan. Hanya dalam instansi kedua ia hendak merupakan pula suatu korpus hukum dalam arti yuridis murni. Tatkala tatanan ini bertabrakan dengan peradaban modern yang sudah tersekulerisasikan, maka itu bukanlah kali pertama ikatan batinnya diuji."*[5]

Selanjutnya, van Leeuwen mencatat, "Perkembangan perundang-undangan Islam di bawah pengaruh-pengaruh Barat, mencerminkan kelangsungan yang tak dapat dibendung dari sekularisasi di dunia Islam."[6]

---

[3] Donald E. Smith, ***Agama dan Modernisasi Politik***, Rajawali, Jakarta, 1985, hal.. 11.

[4] Mark Jurgensmayer, ***Menentang Negara Sekuler***, Bandung, 1998, hal.. 29.

[5] Arend Th. Van Leeuwen, ***Agama Kristen dalam Sejarah Dunia***, BPK Gunung Mulia, 1997, hal.. 101.

[6] *Ibid.*, hal. 109.

Kehancuran khilafah di Turki dan naiknya kekuatan sekuler pimpinan Kemal Attaturk bisa dikatakan sebagai simbol kekalahan syariat Islam versus tatanan sekuler Barat. Negeri-negeri Islam kemudian satu persatu melepaskan ikatan dari syariat Islam dalam banyak aspek kehidupan dan menggantinya dengan hukum-hukum buatan Barat.

Struktur religiopolitik Islam yang menempatkan "syariat" dalam posisi yang tinggi dalam kenegaraan dan kemasyarakatan telah berlangsung sejak masa Nabi Muhammad sampai dihapusnya kekhalifahan oleh Kemal Attaturk tahun 1924. Secara gasir besar, menurut Donald E. Smith, "syariat" mencakup tugas besar untuk mengatur segala aspek kehidupan sosial, baik kehidupan pribadi maupun bermasyarakat. Hukum tersebut merupakan suatu sistem kewajiban yang bersifat total yang tidak dapat dibandingkan dengan apa yang dikenal dalam ilmu hukum modern sebagai norma-norma agama, kesusilaan, dan norma hukum. Ia mencakup segala bidang hukum, baik perdata maupun pidana, dan bahkan aturan-aturan terperinci mengenai cara bersuci sebelum shalat.

Hingga abad ke-19 Masehi, kecenderungan umum para ulama adalah mengembangkan penerapan hukum Islam, yang secara teroretis bersifat abadi dan universal, untuk memberikan nilai keagamaan pada setiap kegiatan dan aspek kehidupan. Karena itulah, sekulerisasi hukum di negara-negara Islam menimbulkan satu di antara sekian banyak perbedaan yang tajam mengenai modernisasi.[7]

Puncak sekularisasi di dunia Islam terjadi ketika Kemal Attaturk menghapus kekhilafahan di Turki pada tahun 1924. Penghapusan kekhilafahan ini menimbulkan reaksi keras di berbagai dunia Islam. Bahkan, umat Islam Indonesia, yang secara geografis sangat jauh dari Turki dibanding negara-negara muslim lainnya, turut bereaksi. Pada tahun yang sama, 1924, di Surabaya berdiri Komite Khilafat, dipimpin Wondoamiseno dari Sarekat Islam dan wakilnya K.H. Wahab Hasbullah dari NU.[8]

---

[7] Donald E. Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, 1985, hal. 71.

[8] Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990, hal. 242.

Peristiwa itu diikuti oleh Kemal dengan melakukan proses sekulerisasi dalam kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan di Turki. Kasus sekularisasi di Turki menyulut konflik dan polemik di seluruh dunia Islam. Perlawanan kaum muslimin Turki terhadap sekulerisasi tidak pernah berhenti, hingga kini. Di Indonesia, polemik tentang Kemal Attaturk dan sekulerisasi berlangsung seru dan tak pernah berhenti. Tahun 1930-an, berlangsung polemik seru antara Soekarno vs Natsir dan A. Hassan. Di dunia Islam, pertarungan Islam vs sekulerisme menjadi fenomena global yang sedang dan terus berlangsung. Kaum muslimin masih melihat sekulerisme sebagai ancaman global bagi mereka, sehingga berbagai bentuk perlawanan dilakukan. Setiap usaha untuk memasukkan unsur-unsur pemikiran-pemikiran Barat, meskipun telah dimodifikasi dan dicoba disesuaikan dengan Islam, senantiasa menghadapi benturan atau perlawanan dari kalangan muslim sendiri.

Contohnya adalah reaksi keras terhadap buku *Islam* karya Fazlur Rahman, guru besar Chicago University. Buku itu disebut oleh Ziauddin Sardar sebagai "usaha murid-murid orientalis untuk menunjukkan keunggulan peradaban Barat dan penyokong spiritualnya (Kristen)". Menurut Sardar, kerangka analisis buku itu mengikuti alur pikir yang dibangun oleh Joseph Schacht, H.A.R. Gibbs, dan W.C. Smith--tiga orientalis terkenal. "Karena Islam bertentangan dengan jiwa Barat, dia harus dihancurkan. Peradaban Barat berusaha mengelak dari sifat kedangkalannya. Para orientalis dan murid orientalis pun mengikuti jejaknya," kata Sardar.[9]

Padahal, seorang murid Fazlur Rahman, Prof. Dr. A. Syafii Maarif, memuji gurunya itu. Ia katakan bahwa orang yang mengikuti jalan pikiran Rahman akan tahu bahwa ia "sangat berkepentingan untuk membangunkan kembali kesadaran umat Islam akan tanggung jawab sejarahnya dengan fondasi moral yang kokoh". [10]

---

[9] Ziaudin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung, 1986, hal. 76.
[10] Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, Pustaka, Bandung, 1985, hal. v

Kasus-kasus seperti Rahman ini misalnya juga dijumpai pada kasus gagasan "Reaktualisasi Pemikiran Keagamaan" yang diluncurkan oleh Munawir Sjadzali, Nurcholish Madjid, dan lain-lain. Gagasan para "pembaru" itu dinilai oleh kalangan muslim lainnya sebagai bentuk sekularisasi dan dilawan dengan keras. Mereka juga dianggap sebagai perpanjangan tangan Barat dalam "menguasai" kaum muslimin dan merusak kemurnian ajaran Islam. Gagasan reaktualisasi hukum Islam versi Munawir Sjadzali disebut oleh K.H. Ahmad Husnan sebagai "suatu reaktualisasi yang menunjukkan goyahnya iman, kacaunya cara berpikir, dan tidak mapannya argumen yang diajukan serta kurang adanya ketelitian". Karena itu, menurut Husnan, gagasan Munawir itu adalah sesat dan merusak ajaran Islam. [11]

Sekularisme, sebagai paham yang inhern dengan sifat peradaban dan imperialisme Barat, dilihat oleh kaum muslimin sebagai hal yang "harus dilawan". Apa yang terjadi di Turki dan Indonesia dapat dijadikan sebagai studi kasus, bagaimana sekulerisme dalam bentuknya yang paling moderat sekali pun (seperti gagasan reaktualisasi pemikiran keagamaan) selalu mendapat perlawanan yang sengit dari kalangan muslim sendiri. Apalagi, "sekulerisme ekstrem" yang dilakukan oleh Attaturk, yang dikatakan oleh Komaruddin Hidayat juga merupakan contoh ekstrem dari Islam Liberal.

Menyimak peta pertarungan global seperti itu, bisa dengan mudah dipahami, mengapa gerakan sekularisasi yang menolak penerapan syariat Islam akan dengan mudah disokong oleh Barat. Para penulis di rubrik Kajian Islam Utan Kayu (KUK) yang setiap pekan terbit di Koran *Jawa Pos* dan jaringannya, mendapatkan biaya dari *The Asia Foundation*. (*Gatra*, 8 Desember 2001). Dengan berbagai alasan, syariat Islam dipandang sebagai ancaman bagi hegemoni Barat. Contoh kasus yang menarik terjadi di Sudan.

Negara Sudan tak henti-hentinya menjadi sorotan dan

---

[11] Ahmad Husnan, ***Hukum Islam tidak Mengenal Reaktualisasi***, Solo, Pustaka Mantiq,1989, hal..123.

tindakan keras AS. Hubungan AS-Sudan menegang sejak Jafar Muhammad Nimeiri memberlakukan syariat Islam di Sudan pada 8 September 1983. Nimeiri, yang mulanya tokoh Uni Sosialis Sudan (SSU) menjadi sekutu dekat AS, setelah gagalnya kudeta komunis tahun 1971. Maka, Sudan menjadi satu-satunya negara Arab yang tidak memutuskan hubungan diplomatik dengan Mesir, menyusul ditandatanganinya Perjanjian Camp David tahun 1977.

Islamisasi Nimeiri, meskipun diyakini bermotif untuk membangun legitimasi pemerintahannya yang goyah, memang cukup dramatis. Sebanyak 30.000 tahanan dibebaskan dan diberi kesempatan untuk bertobat dan hidup di bawah hukum Islam. Minuman keras senilai 11 juta dolar AS ditumpahkan ke Sungai Nil, dengan liputan media nasional dan internasional. Ia pun melarang tari-tarian gaya Eropa dan menerapkan hukum cambuk 25 kali bagi pemilik klab malam yang mengizinkan dansa-dansi laki-laki-wanita. Sistem perekonomian juga diubah menjadi sistem total. Tahun 1984, pemerintah mengeluarkan Akta Zakat yang mengganti seluruh sistem perpajakan.

Menurut Esposito, kebijaksanaan Islam Sudan itu sangat mengganggu banyak orang di Sudan dan juga kepentingan asing, khususnya perusahaan-perusahaan multinasional Amerika yang beroperasi di Sudan. Sejumlah pihak menuduh program Islamisasi lebih memecah-belah ketimbang menyatukan Sudan. Tentara Pembebasan Rakyat Sudan (SPLA) pimpinan John Garang berontak lagi. AS dan organisasi HAM internasional mengungkapkan keprihatinannya terhadap pelanggaran HAM yang disebabkan atas penerapan hukum Islam atas orang-orang nonmuslim. AS akhirnya menghentikan bantuannya sebesar 114 juta dolar AS dan bekerja sama dengan IMF dalam menekan Sudan agar melakukan pembaruan di bidang ekonomi.[12]

"Mereka tak mau lagi membantu kami, setelah syariat Islam diterapkan secara resmi di sini," kata Rektor Universitas Inter-

---

[12] John. L. Esposito, *The Islamic Threat, Myth or Reality?*, 1992, hal. 87-93.

nasional Afrika, Abdul Rahim Ali M. Ibrahim, kepada Majalah *Tempo* edisi 2 April 1994.

Tekanan AS lumayan berhasil. Tahun 1985, Nimeiri mencari dukungan AS dengan memojokkan Ikhwanul Muslimin, menahan sejumlah pimpinannya termasuk Hasan at-Turabi. Muncul isu kuat di sejumlah negara Arab bahwa langkah-langkah Nimeiri itu dilakukan menyusul kunjungan Wapres George Bush ke Khartoum. Bush mengajukan empat syarat bagi cairnya bantuan AS: (1) dicabutnya hukum kriminalitas Islam (huduud), (2) pemecatan para aktivis Islam dari pemerintahan, (3) menghentikan hubungan dengan Libya, (4) menerima pembaruan ekonomi seperti yang diminta oleh IMF.

Nimeiri akhirnya terguling pada 5 April 1985, menyusul maraknya aksi-aksi anti-AS dan ambruknya perekonomian Sudan. Para aktivis Islam menilai, AS yang anti-Islam terus mengadakan campur tangan mendiktekan kebijaksanaan dan mengontrol jalan hidup mereka. AS dinilai bersikap munafik dalam pelaksanaan HAM di Sudan. Selama ini, AS mau mentoleransi rezim otokratis dan otoriter di Sudan dan negara Dunia Ketiga lainnya. Soal HAM dan demokrasi tidak dimajukan. Tapi, ketika Islam terlibat dalam pemerintahan maka kriteria soal demokrasi dan HAM mulai dimajukan.

Namun sejak itu, hubungan AS dan Sudan belum menunjukkan tanda-tanda menaik. Pengganti Nimeiri, Shadiq Al-Mahdi, lebih bersikap mandiri terhadap AS dan mengadakan pertemuan dengan Libya dan Irak. Tampilnya Omar al-Basyir melalui kudeta tak berdarah tahun 1989, masih belum menyelesaikan persoalan hukum Islam di Sudan. Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan (SPLM) yang berbasis di Sudan Selatan tetap bersikeras menolak pemberlakuan hukum Islam. Negosiasi yang dilakukan mantan Presiden AS untuk menjembatani al-Basyir dengan SPLM tahun 1989 juga menemui kegagalan.

Al-Basyir yang semula menyingkirkan aktivis-aktivis Islam akhirnya berbalik. Hasan at-Turabi, mantan Jaksa Agung di masa Nimeiri yang juga tokoh NIF (*National Islamic Front*), dibebaskan dan menjadi tokoh penting yang berpengaruh besar dalam

pemerintahan al-Basyir. Sejak itu, Turabi dan NIF-nya menjadi sasaran tembak AS. Sejak 1993, Sudan masuk langganan daftar negara teroris versi Deplu AS bersama Kuba, Iran, Irak, Libya, Korea Utara, dan Syiria.

B. Syariat Islam di Indonesia

Perlukah syariat Islam diterapkan di Indonesia? Jika yang menjadi rujukan adalah jajak pendapat di majalah *Tempo* edisi 24-30 Desember 2001, maka jawabnya adalah "Ya". Dalam jajak pendapat yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mayoritas responden (61,4 persen) menyatakan setuju pelaksanaan syariat Islam di Indonesia. Lebih dari separo (57,8 persen), menyatakan setuju pada pemerintahan Islam, yakni pemerintahan yang diselenggarakan atas dasar ajaran Al-Qur`an dan As Sunnah dan di bawah kepemimpinan para ahli Islam (ulama atau kiai).

Tuntutan pemberlakuan syariat Islam bukanlah hal baru. Gagasan ini sempat meramaikan perjalanan sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Para tokoh nasional yang duduk di BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) sempat berdebat keras tentang masalah ini. Para tokoh dari kalangan Islam, nasionalis sekuler, maupun Nasrani, yang tergabung dalam panitia sembilan akhirnya memutuskan dirumuskannya "Piagam Jakarta" sebagai jalan kompromi. Soekarno menyebut keputusan BPUPKI itu sebagai "kompromi untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama".

Ada baiknya diingat kembali petikan perdebatan seputar masalah Piagam Jakarta yang mengandung tujuh kata yang diperdebatkan hingga kini, yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dalam sidang BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, wakil Kristen dari Indonesia Timur, Latuharhary, menggugat kesepakatan soal "tujuh kata" yang telah dicapai dalam sidang sebelumnya. "Kalimat semacam itu dapat membawa kekacauan yang bukan kecil terhadap adat istiadat. Oleh sebab itu, baiklah kita mencari modus lain yang tidak membawa akibat yang bisa mengacaukan rakyat," kata Latuharhary.

Namun Soekarno, ketua Tim Kecil (Panitia Sembilan) menolak keberatan Latuharhary. Kata Soekarno, "Barangkali tidak perlu diulangi bahwa preambule adalah hasil jerih payah untuk menghilangkan perselisihan paham antara golongan-golongan yang dinamakan golongan kebangsaan dan golongan Islam. Jadi, manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima praembule ini. Jadi, perselisihan nanti terus."

Pendapat Soekarno diperkuat oleh Wachid Hasjim, "... jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya. Bahkan, ada yang menanyakan pada saya, apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyebarkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini."

Lalu, Soekarno menegaskan lagi, "Saya ulangi lagi bahwa ini satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama. Kompromis itu pun terdapat sesudah keringat kita menetes. Tuan-tuan, saya kira sudah ternyata bahwa kalimat 'dengan didasarkan kepada Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya' sudah diterima oleh Panitia ini."

Dalam risalah sidang BPUPKI disebutkan, pada rapat tanggal 13 Juli 1945, Wachid Hasjim mengusulkan agar syarat presiden ditambah "yang beragama Islam". Juga, pasal 29 ditambahkan, "Agama negara ialah agama Islam." Bahkan, pada rapat tanggal 14 Juli 1945, tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikoesoemo mengusulkan agar kata "bagi pemeluk-pemeluknya" dicoret. Jadi, bunyinya hanya "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam". Tetapi, usul ini ditolak.

Sampai dengan rapat terakhir BPUPKI tanggal 16 Juli 1945, tidak ada pencabutan kesepakatan tentang Piagam Jakarta. Bahkan ketika itu, Soekarno menegaskan disepakatinya klausul, "Presiden Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam." Dan pasal 29 tetap berbunyi, "Negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya." Terakhir, ketua BPUPKI yang merupakan aktivis Gerakan Thosofi, menyimpulkan, "Jadi,

rancangan ini sudah diterima semuanya... dengan suara bulat diterima Undang-Undang Dasar ini."[13]

Seperti diketahui, pada 18 Agustus 1945, kesepakatan di BPUPKI itu kemudian dihapus. Jika dicermati fakta-fakta sejarah, penerimaan tokoh-tokoh Islam pada 18 Agustus 1945, untuk mencoret "tujuh kata" dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hal itu, lebih merupakan pertimbangan situasional. Bukan soal konsep pluralitas atau polaritas. Terbukti, mereka kemudian gigih kembali memperjuangkan konsep "Piagam Jakarta" tersebut dalam Majelis Konstituante. Bahkan, menurut Prof. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikoesoemo sampai meninggal dalam penantian akan kembalinya Piagam Jakarta. Kasman, dalam biografinya, juga menyatakan bahwa Piagam Jakarta sebenarnya merupakan *"Gentlemen's Agreement"* dari bangsa ini. Sayang, jika generasi pelanjutnya justru mengingkari sejarah.

Adalah menarik membandingkan sikap tokoh-tokoh Islam di masa lalu dan sekarang dalam soal penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti dipaparkan oleh Sekjen DDII Hussein Umar di majalah *Media Dakwah* (Maret 2002). Pada tanggal 27 Januari 1953, Soekarno berpidato di Amuntai Kalsel yang isinya menghebohkan. Kata Soekarno, "Kalau kita dirikan negara berdasarkan Islam, maka banyak daerah-daerah yang penduduknya tidak beragama Islam akan melepaskan diri." Pidato Soekarmo tersebut menyiratkan hal yang sangat mendasar bahwa seolah-olah syariat Islam dan Islam itu sendiri, jika diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, akan menjadi kontraproduktif; negara Indonesia akan berantakan gara-gara syariat Islam.

Yang sangat menarik, ketika itu umat Islam dari berbagai organisasi secara kompak memprotes ucapan Soekarno. Tanggal 31 Januari 1953, K.H. M. Isa Anshari mengirim surah protes. Beliau katakan, "Pidato Presiden Soekarno itu, jiwa dan semangatnya adalah tidak demokratis dan tidak konstitusional. Pidato itu juga

---

[13] *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Setneg RI, 1995.

bukan merupakan suatu kebijaksanaan yang dapat dihargakan, karena berisi 'penantangan' terhadap ideologi Islam yang dianut oleh sebagian terbesar dari warga negara Indonesia."

Protes juga datang dari NU. Pada tanggal 4 Februari 1953, PBNU mengeluarkan surah protes yang ditandatangani oleh K.H. Wahid Hasjim (bapak Abdurrahman Wahid) dan ditujukan kepada Presiden Soekarno. Isinya antara lain, "... pernyataan bahwa pemerintahan Islam tidak akan dapat memelihara persatuan bangsa dan akan menjauhkan Irian, menurut pandangan hukum Islam, adalah merupakan pernyataan mungkar yang tidak dapat dibenarkan syariat Islam dan wajib bagi tiap-tiap muslim menyatakan ingkar atau tidak setujunya."

Reaksi juga datang dari Perti. Dalam surahnya yang ditandatangani oleh K.H. Sirajuddin Abbas, pada tanggal 5 Februari 1953, Perti menyatakan, "Pidato Presiden kali ini bertendensi adu domba dan menggelisahkan umat Islam." Sementara GPII, dalam surahnya kepada Soekarno tanggal 12 Februari 1953, menyatakan, "Kini, Bapak sudah menanam benih-benih separatisme kepada rakyat ... Dan ternyata dengan itu Bapak telah menyatakan memihak kepada segolongan rakyat yang tidak setuju dengan ideologi Islam."

Ditulis oleh Hussein Umar, "*Begitulah, dulu umat Islam begitu kompak dalam membantah bahwa ideologi dan syariat Islam adalah faktor penyebab disintegrasi bangsa. Para tokoh kita itu tidak gentar dengan gertakan kaum minoritas dan kaum sekuler. Entah bagaimana jika para tokoh itu kini menyaksikan para pelanjutnya justru menentang dan melecehkan argumentasi-argumentasi yang pernah mereka sampaikan. Sementara itu, pada pihak lain, kaum minoritas tersenyum penuh kemenangan, menyaksikan tokoh-tokoh Islam justru menggunakan argumentasi kaum ninoritas untuk menghantam saudara-saudaranya sendiri.*"

Kaum Islam Liberal malah "lebih maju" dalam soal syariat Islam. Simaklah ungkapan Ulil Abshar Abdalla dalam wawancara di *Koran Tempo* (13 Januari 2002). Ulil menyatakan, "*Makanya, kita termasuk orang yang menentang pelaksanaan syariat Islam di Indonesia, karena bukan di situ permasalahannya.*"

Ucapan itu sangat aneh. Syariat Islam sudah diterapkan di Indonesia, jauh sebelum datangnya penjajah. Setelah penjajah pergi, banyak hukum publik–seperti KUHP dan KUHD–warisan kolonial yang diterapkan dan dipertahankan hingga kini. Mengapa Ulil tidak sibuk menentang "syariat kolonial" dan malah sibuk menentang syariat Islam? Jika penerapan hukum Islam pada masyarakat dikatakan sebagai penindasan, apakah penerapan "hukum setan" (kolonial) secara paksa terhadap umat Islam saat ini, bukan merupakan penindasan? Apakah Ulil memandang hukum kolonial sebagai *"rahmatan lil 'alamin"*? Sementara penerapan hukum Islam sebagai bencana sehingga harus dilawan?

Lagipula, jika menolak penerapan syariat Islam, apakah saat menikah, Ulil tidak menggunakan syariat Islam? Apakah Ulil--jika meninggal nanti–mau dikubur dengan "syariat lain", misalnya mayatnya dibakar atau ditaruh di atas pohon?

Jika yang dimaksud Ulil adalah penerapan syariat Islam oleh negara, di Indonesia ini begitu banyak syariat Islam yang sudah diatur oleh negara, seperti UU Perkawinan, UU Peradilan Agama, UU Pokok Perbankan, UU Zakat, UU Haji, dan sebagainya. Banyak juga peraturan di bawah UU yang mengatur masalah agama, seperti SKB No 1/1969, dan sebagainya. Apakah Ulil berniat melenyapkan semua UU tersebut, dengan alasan menolak syariat Islam? Jika itu yang dimau para penentang syariat Islam, maka mereka sedang berusaha memutar jarum jam ke belakang. Dan yakinlah, itu akan sia-sia, sebab sesungguhnya menegakkan syariat Islam adalah kewajiban yang jelas-jelas diperintahkan Allah SWT kepada kaum muslimin. Dalam soal penerapan syariat Islam, Hamka memberikan nasihat yang sangat menarik,

> "Sebagai muslim, janganlah kita melalaikan menjalankan hukum Allah. Sebab, di awal surah al-Maa`idah sendiri yang mula-mula diberi peringatan kepada kita ialah supaya menyempurnakan segala 'uqud. Maka, menjalankan hukum Allah adalah salah satu 'uqud yang terpenting di antara kita dengan Allah.
>
> Selama kita hidup, selama iman masih mengalir di seluruh

pipa darah kita, tidaklah sekali-kali boleh kita melepaskan cita-cita agar hukum Allah tegak di dalam alam ini, walaupun di negeri mana kita tinggal. Moga-moga tercapai sekadar apa yang dapat kita capai. Karena Tuhan tidaklah memikulkan kepada kita suatu beban yang melebihi dari tenaga kita. Kalau hukum Allah belum jalan, janganlah kita berputus asa. Dan kufur, zalim, fasiklah kita kalau kita percaya bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Allah.
Jika kita yang berjuang menegakkan cita Islam ditanya orang, 'Adakah kamu, hai umat Islam bercita-cita, berideologi, jika kamu memegang kekuasaan, akan menjalankan hukum syariat Islam dalam negara yang kamu kuasai itu?' Janganlah berbohong dan mengolok-olokkan jawaban. Katakan terus terang bahwa cita-cita kami memang itu. Apa artinya iman kita kalau cita-cita yang telah digariskan Tuhan dalam Al-Qur`an itu kita pungkiri?

Dan kalau ditanyakan orang pula, 'Tidakkah dengan demikian kamu hendak memaksakan agar pemeluk agama lain yang golongan kecil (minoritas) dipaksa menuruti hukum Islam?' Jawablah tegas, 'Memang akan kami paksa mereka menuruti hukum Islam. Setengah dari hukum Islam terhadap golongan pemeluk agama yang minoritas itu ialah agar mereka menjalankan hukum Taurat, Ahli Injil diwajibkan menjalankan hukum Injil. Kita boleh membuat undang-undang menurut teknik pembikinannya, memakai fasal-fasal dan ayat-ayat suci, tapi dasarnya wajiblah hukum Allah dari kitab-kitab suci, bukan hukum buatan manusia atau diktator manusia.'
Katakan itu terus terang dan jangan takut!
Dan insaflah bahwa rasa takut orang menerima Hukum Islam ialah karena propaganda terus-menerus dari kaum penjajah selama beratus tahun. Sehingga, orang-orang yang mengaku beragama Islam sendiri pun kemasukan rasa takut itu, karena dipompakan oleh penjajahan." [14]

---

[14] Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Juz 6.

Penerapan syariat Islam adalah kewajiban bagi setiap muslim. Para pakar Kristen, seperti van Leeuwen mengakui bahwa syariat Islam itu mencakup dan mengatur berbagai aspek kehidupan. Aneh sekali jika kemudian dari kalangan muslim sendiri justru muncul orang-orang yang meremehkan, melecehkan, memandang rendah, mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghina syariat Islam, hanya karena terpukau pada tata aturan dan peradaban bangsa penjajah.

Kewajiban penerapan syariat Islam dapat dilihat pada sejumlah ayat Al-Qur`an. Pembangkangan atau keengganan kaum muslimin untuk melaksanakan syariat Islam adalah sesuatu yang aneh, alias tidak normal, ditinjau dari aspek teologis. Sebab, begitu banyak ayat Al-Qur`an yang mengaitkan langsung soal syariat Islam dengan aspek keimanan. Sebutlah contoh, al-Maa'idah ayat 44, 45, dan 47,

"Sesungguhnya Kami telah menurunkan Taurat yang di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang) menerangi, yang dengan Kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerahkan diri kepada Allah, (dan juga diputuskan) oleh orang-orang alim mereka dan pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu, janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. Dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir."

"Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisasnya), maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu orang-orang yang zalim."

"Dan hendaklah orang-orang pengikut Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang

diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik."

Ketiga ayat Al-Qur`an itu dengan tegas menyebutkan bahwa barangsiapa yang tidak memutuskan perkara (menghakimi) menurut hukum-hukum Allah, maka ia bisa masuk kategori kafir, zalim, atau fasik. Meskipun ketiga ayat itu berbicara tentang ancaman kepada kaum Yahudi dan Nasrani, tetapi ayat itu juga ditujukan kepada kaum muslimin. Sa'id bin Jubair pernah ditanya, apakah ayat-ayat tersebut hanya ditujukan kepada Bani Israel, ia menjawab, "Tidak! Bahkan dia diturunkan atas kita."[15]

Yusuf Qaradhawi juga menyatakan bahwa meskipun konteks ayat-ayat Al-Qur`an tersebut adalah mengenai Ahlul Kitab, tetapi ayat-ayat itu menggunakan lafaz *'am* 'umum', yang mencakup semua orang, baik untuk Ahlul Kitab maupun orang muslim. Karena itu, para ahli ushul dari kalangan ulama kaum muslimin menetapkan bahwa "yang terpakai adalah keumuman lafaz, bukan yang dikhususkan untuk melatarbelakangi turunnya ayat".[16]

Menurut Abu Fariz, orang yang menolak hukum Allah dan mencari hukum selain hukum Allah, atas dasar pilihan dan kemauannya sendiri dipandang sebagai kufur dan keluar dari Islam. Allah SWT berfirman,

"Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman, sehingga mereka menjadikan kamu (Muhammad) sebagai hakim (pemutus perkara) yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan terhadap putusan yang kamu tetapkan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya." (an-Nisaa`: 65)

"Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu (Muhammad) dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu; mereka hendak bertahkim kepada thaghut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari thaghut

---

[15] *Ibid.*

[16] Yusuf Qaradhawi, ***Fatwa-fatwa Kontemporer***, Jilid II, GIP, Jakarta, 1998, hal. 1023.

itu. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. (an-Nisaa`: 60)

Menurut Ibnu Katsir, surah an-Nisaa' ayat 65 diturunkan Allah berkenaan dengan peristiwa pertengkaran dua laki-laki di masa Nabi saw.. Dikabarkan, keduanya menemui Nabi saw., lalu beliau memutuskan tidak bersalah atas pihak yang benar. Pihak yang diputus bersalah oleh Nabi menyatakan menolak keputusan tersebut. Ia lalu mengajak menemui Abu Bakar ash-Shiddiq. Sahabat utama Nabi ini pun mengatakan agar mereka menerima keputusan Nabi saw.. Akan tetapi, pihak yang diputus bersalah, tetap tidak mau terima, dan mengajak untuk menemui Umar ibnul Khaththab. Setelah mendengarkan penjelasan mereka, Umar r.a. masuk ke dalam rumah dan kembali lagi dengan membawa pedang, lalu orang yang tidak mau menerima keputusan Rasulullah tersebut ditebas lehernya. Kemudian turunlah firman Allah SWT dalam surah an-Nisaa' ayat 65. [17]

C. Syariat Islam di Indonesia: Konstitusional!

Jika tujuh kata dalam Piagam Jakarta, yakni "Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" ditetapkan dalam konstitusi, maka bangsa Indonesia memiliki landasan konstitusional yang kuat untuk menerapkan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan bangsa. Sayangnya, banyak elite-elite muslim sendiri yang justru menentang ditegaskannya pelaksanaan syariat dalam konstitusi.

Ketua PP Muhammadiyah Prof. Dr. A. Syafii Ma'arif, pada Rabu (5 September 2001) membuat pernyataan, "Muhammadiyah sebenarnya tidak menolak penerapan syariat Islam sebagai dasar negara. Namun, sebagai bagian dari bangsa yang majemuk, Muhammadiyah juga harus bersikap realistis." Menurut Syafii, banyak faktor yang menyebabkan Muhammadiyah lebih bersikap moderat dalam soal ini. Selain masalah kemungkinan terjadinya disintegrasi bila Piagam Jakarta diterapkan, juga disebabkan realitas bahwa mayoritas anggota MPR

---

[17] *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz 2, hal. 331-332.

tak mungkin mendukung usulan itu. "Jadi, hanya akan menguras energi dan sumber daya, bila orang meributkan soal Piagam Jakarta," jelasnya. Piagam Jakarta, kata Syafii, di masa Bung Karno hanya mampu bertahan 52 hari. Itu terjadi karena kondisi bangsa yang majemuk tak memungkinkan penetapan Piagam Jakarta sebagai dasar negara. (*Republika*, 7 September 2001).

Sikap Syafii Maarif itu senada dengan sikap KH Hasyim Muzadi, Ketua Umum PBNU, Nurcholish Madjid, dan berbagai tokoh lainnya. Sikap itulah yang, hingga tulisan ini dibuat, masih menjadi sikap mayoritas fraksi-fraksi di MPR. Karena itu, untuk jangka waktu dekat, masih agak berat untuk mengharapkan masuknya "tujuh kata" itu dalam Konstitusi RI.

Karena perjuangan tidak mengenal kata berhenti, maka upaya untuk menerapkan syariat Islam harus diupayakan melalui berbagai cara, dan tidak semata-mata tergantung pada Piagam Jakarta. Dengan ditolaknya "tujuh kata" secara formal untuk dikembalikan ke dalam konstitusi negara, maka perlu dicatat oleh para anggota DPR/MPR, pejabat negara, dan tokoh masyarakat, bahwa hukum Islam sebenarnya secara konstitusional sudah secara sah berlaku dan wajib diberlakukan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang jadi masalah adalah apakah ada *political will* dari berbagai kekuatan politik. Di sinilah perlunya upaya dakwah yang secara terus-menerus dilakukan kepada masyarakat, agar mereka menyadari bahwa hukum Islam, atau hukum-hukum Allah, adalah alternatif terbaik bagi bangsa ini. Jadi, bukan hukum kolonial atau hukum buatan manusia yang dha'if dan terkadang sok pintar melebihi Sang Khaliq.

Karena itu, seharusnya para petinggi negara dan masyarakat juga wajib secara serius melaksanakan dan menerapkan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, seharusnya di dalam negara Indonesia, tidak boleh ada peraturan atau perundang-undangan yang bertentangan dengan syariat Islam. Pejabat negara, apalagi yang berasal dari partai Islam, seharusnya tidak membuat RUU yang bertentangan dengan syariat Islam. Begitu juga, anggota DPR/MPR wajib menolak RUU yang

bertentangan dengan hukum dan ketentuan Allah SWT.

Berikut ini sejumlah argumentasinya.

1. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*"

   Pakar hukum adat dan hukum Islam dari Universitas Indonesia, Prof. Hazairin berpendapat bahwa kata "beribadat" sebagai kelanjutan dari jaminan negara bagi tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dalam pasal 29 ayat (2) adalah dengan pengertian menjalankan syariat (hukum) agama. *Negara berkewajiban menjalankan syariat agama Islam sebagai hukum dunia untuk umat Islam*, syariat agama Kristen untuk umat Kristen dan seterusnya sesuai syariat agama yang dianut oleh bangsa Indonesia bila agama tersebut mempunyai syariat agama untuk penganutnya.[18]

   Secara harfiah, lafaz "ibadah" artinya pengabdian, penyembahan, ketaatan, menghinakan/merendahkan diri, dan doa. Yusuf Qaradhawi mendefinisikan ibadah sebagai "sebutan bagi semua hal yang membuat Allah senang dan ridha, baik yang terdiri atas perkataan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahir maupun batin". Menurut ulama Mazhab Syafii, ibadah ialah perbuatan yang dibebankan Allah SWT kepada hamba-Nya yang tidak selamanya sesuai dengan keinginan yang bersangkutan. Ibnu Taimiyah mendefinisikan ibadah sebagai "ketaatan dan ketundukan yang sempurna", juga adanya unsur "kecintaan terhadap yang disembah sehingga ketundukan dan ketaatan yang merupakan ibadah haruslah berdasarkan kecintaan terhadap yang disembah". Berdasarkan penjelasan Ibnu Taimiyah, Yusuf Qaradhawi mengatakan bahwa segenap aspek kehidupan manusia dapat bernilai ibadah, seperti makan, minum, pergaulan dalam masyarakat, dan mengunjungi orang sakit.[19]

---

[18] Lihat Hazairin, ***Demokrasi Pancasila***, hal. 75, seperti dikutip oleh Rifyal Ka'bah, ***Hukum Islam di Indonesia*** (Desertasi S-3 di Universitas Indonesia), Universitas Yarsi Jakarta, 1999, hal. 77-78.

[19] Lihat ***Ensiklopedi Hukum Islam***, 1999, hal. 592.

2. Dekrit Presiden, 5 Juli 1959, yang menyatakan, *"Kami berkeyakinan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai Undang-undang Dasar 1945 dan merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan konstitusi tersebut."*

   Prof. Notonagoro, guru besar Universitas Gadjah Mada dan pakar soal Pancasila, memberikan arti terhadap kata "menjiwai" dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 itu, sebagai berikut.

   "Piagam Jakarta menjiwai UUD 1945, khususnya terhadap pembukaannya dan pasal 29, pasal mana harus menjadi dasar bagi kehidupan hukum di bidang keagamaan. Dengan demikian, kepada perkataan ***"Ketuhanan"*** *dalam Pembukaan UUD 1945 dapat diberikan arti* ***"Ketuhanan dengan kewajiban bagi umat Islam menjalankan syariatnya"****, sehingga atas dasar ini dapat diciptakan perundang-undangan ... atau peraturan pemerintah lain ... bagi para pemeluk agama Islam, yang dapat disesuaikan ... (atau yang) tidak bertentangan ... dengan hukum syariat Islam, dengan tidak mengurangi ketetapan yang termaktub dalam pasal 29 UUD 1945 bagi pemeluk agama lain."*[20]

Sebagian kalangan muslim kini berupaya memperjuangkan tegaknya hukum Islam di Indonesia melalui pelaksanaan otonomi daerah. Daerah Istimewa Aceh, sejak 1 Muharram 1423 H (15 Maret 2002), telah secara resmi menerapkan syariat Islam di wilayahnya. Di Sulawesi Selatan, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) giat melakukan upaya penerapan syariat Islam di wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum penjajah Belanda menjajah daerah ini, syariat Islam sudah berlaku. Begitu juga di berbagai daerah lain di Indonesia.

Ada yang menyatakan, jika pasal 29 UUD 1945 yang ada saat ini sudah dapat dijadikan sebagai pijakan untuk melaksanakan syariat Islam, lalu untuk apa menuntut kembalinya "tujuh kata" dalam Piagam Jakarta? Jawaban seperti itu tidak tepat, mengingat dalam proses politik senantiasa terjadi proses tawar-menawar untuk meraih sesuatu yang maksimal. Jika

---

[20] Notonagoro, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, 1971, dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945*, 1997, hal. 132.

"tawaran" umat Islam sudah terlalu kecil, maka dapatnya pun akan kecil. Kasus perumusan Piagam Jakarta dapat dijadikan sebagai contoh. Piagam Jakarta bukanlah sesuatu yang paling ideal bagi umat Islam, tetapi itu merupakan hasil kompromi maksimal yang dapat diraih.

Dalam rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945, yang menggugat Piagam Jakarta hanya Latuharhary. Itu pun kemudian dibantah oleh Soekarno, Wachid Hasjim, dan lain-lain. Ketika itu, Soekarno menyebut Piagam jakarta sebagai **"satu kompromis untuk menyudahi kesulitan antara kita bersama"**.

Jika dicermati fakta-fakta sejarah, penerimaan tokoh-tokoh Islam pada 18 Agustus 1945, untuk mencoret "tujuh kata" dan pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan hal itu, lebih merupakan pertimbangan situasional. Bukan soal konsep pluralitas atau polaritas. Terbukti, mereka kemudian gigih kembali memperjuangkan konsep "Piagam Jakarta" tersebut dalam Majelis Konstituante. Bahkan, menurut Prof. Kasman Singodimedjo, Ki Bagus Hadikoesoemo sampai meninggal dalam penantian akan kembalinya Piagam Jakarta. Kasman, dalam biografinya, juga menyatakan bahwa Piagam Jakarta sebenarnya merupakan *"Gentlemen's Agreement"* dari bangsa ini.

Mestinya perjuangan para pendahulu Islam untuk menegakkan syariat Islam diikuti oleh generasi pelanjutnya. Bukan malah diingkari. Sebab, dalam kondisi apa pun, syariat Islam wajib dilaksanakan, baik dalam tataran pribadi, keluarga, komunal, maupun negara dan dunia internasional. Tentu, semampu kaum muslimin. Jika ingin berjuang meraih 100, tetapi baru mendapat 50, maka perjuangan berarti belum mencapai hasil maksimal. Hasil yang ada perlu disyukuri, tetapi perjuangan tetap dilanjutkan.

D. Syariat Islam: Indah, Tapi Sering Disalahpahami

Di era keterbukaan dan globalisasi yang memberikan kesempatan terbuka terhadap akses-akses informasi, masih ada saja orang yang salah paham terhadap syariat Islam. Bahkan, ada yang menganggap bahwa jika syariat Islam diterapkan, maka akan terjadi "pembantaian" terhadap masyarakat. Pasal-

nya, banyak orang yang dihukum qishas, dipotong tangannya, dirajam, dicambuk, dan sebagainya.

Pemahaman terhadap syariat Islam yang sepotong-sepotong, atau ketakutan terhadap bayang-bayang kejahatan yang dilakukannya sendiri, atau kesilauan yang berlebihan terhadap ideologi Barat-sekuler, tampaknya menjadi alasan yang cukup dominan di kalangan muslim untuk menolak pemberlakuan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Karena itu, perlu dijelaskan secara ringkas, apa dan bagaimana indahnya kondisi masyarakat jika syariat Islam diterapkan di Indonesia. Hukum Islam, misalnya, mengenal pidana cambuk untuk peminum minuman keras, pedagang yang menimbun barang (untuk mempermainkan harga), dan berbagai tindak pidana lainnya.

Hukum cambuk, yang juga diterapkan di Malaysia dan Singapura, merupakan cara praktis untuk membuat pelaku kejahatan kapok. Selain itu, hukum ini juga praktis dan murah biayanya. Sistem pidana penjara banyak menimbulkan kezaliman, karena orang-orang baik harus membiayai orang-orang jahat. Para pengguna narkoba tidak perlu dipenjara dan ditanggung nafkahnya oleh negara, tetapi cukup dicambuk di muka umum. Para pengedar narkoba dapat dijatuhi hukuman *ta'zir*, yang dapat berupa hukuman mati. Saat ini, penjara-penjara di Indonesia yang kapasitasnya sekitar 62.000, sudah penuh. Anehnya, para pakar hukum belum terpikir untuk menerapkan pidana cambuk ini dalam sistem hukum di Indonesia.

Contoh lain yang sering disalahpahami adalah hukum potong tangan bagi pencuri, yang jelas-jelas disyariatkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya,

> *"Laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, potonglah kedua tangannya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."* **(al-Maa`idah: 38)**

Padahal, jika diteliti, hukum potong tangan ini sangat adil. Pasalnya, orang yang mencuri atas motif untuk sekadar memenuhi kebutuhan pangannya (terpaksa karena lapar), maka si

pencuri itu dibebaskan. Orang yang mencuri makanan karena kelaparan, wajarnya makanan untuk sekadar mengganjal perutnya tidak memenuhi nisab pencurian, yaitu $^1/_4$ dinar emas, atau sekitar 1,125 gram emas. Mazhab Hanafi malah menyebut nisab pencurian senilai 4,5 gram emas.

Jadi, untuk memahami konsepsi Islam tentang pidana pencurian, perlu juga dilihat konsepsi Islam tentang jaminan sosial dalam Islam. Sudah menjadi kewajiban negara atau pemerintah untuk menjamin kebutuhan pokok bagi rakyatnya. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seorang penguasa (imam) adalah pemelihara dan pengatur urusan (rakyat), dan mereka akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya. Sang penguasa yang baik dan bertanggung jawab tentu tidak akan tega hidup bergelimang kemewahan, apalagi sampai korupsi, melihat negaranya dalam kondisi krisis dan dilanda bencana serta banyak rakyatnya menderita kelaparan dan kesulitan hidup.

Karena itu, Rasulullah memberikan sanksi yang keras terhadap penyelewengan harta negara. Bahkan, Rasulullah tak segan-segan mengungkap aib para pencuri uang negara, sekalipun orang itu gugur di medan jihad. Yusuf Qaradhawi menceritakan kisah seorang sahabat bernama Karkarah, yang terbunuh di dalam peperangan jihad. Rasulullah mengatakan, "Dia masuk neraka." Setelah diteliti, ternyata Karkarah ditemukan melakukan kecurangan, yaitu, menyembunyikan baju mantel yang diambilnya dengan curang.

Ada cerita lain tentang seorang sahabat yang meninggal dalam Perang Khaibar. Meskipun sudah meninggal dunia, Rasulullah tetap mengungkapkan aib (kecurangan) yang dilakukan sahabat tersebut. Rasulullah menerapkan sanksi *tasyhir* 'mengumumkan kecurangan' untuk seorang yang meninggal dunia. Padahal secara umum, diperintahkan untuk menceritakan halhal yang baik-baik saja pada diri seorang muslim yang meninggal. Rasulullah berkata kepada para sahabat yang menemuinya, "Shalatilah temanmu. Sesungguhnya temanmu itu curang, mengambil harta hasil perang untuk dirinya sendiri dalam perang fi sabilillah."

Maka ketika diperiksa, ternyata ditemukan barang perhiasan milik orang Yahudi yang nilainya tidak mencapai dua dirham. Harta itu seharusnya dilaporkan dan diserahkan kepada negara, karena merupakan harta milik umum. Hanya untuk harta senilai dua dirham, Rasulullah menolak menyalatkan si jenazah. Begitulah sikap Rasulullah dalam menegakkan kebersihan dalam soal harta negara.[21]

Bukan hanya pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kaum miskin dan kaum lemah. Orang-orang kaya yang diberi kemudahan rezeki oleh Allah SWT, juga memiliki tanggung jawab sosial. Rasulullah bersabda,

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan kewajiban terhadap orang-orang muslim yang berkecukupan atas harta mereka, tergantung banyaknya orang-orang fakir yang ada di sekitar mereka. Tidaklah orang-orang fakir itu akan berpayah-payah dan sengsara hidupnya, tatkala mereka lapar dan telanjang, kecuali karena ulah orang-orang kaya itu juga. Jika mereka (orang-orang kaya itu) tidak memperhatikan urusan mereka (kaum fakir), maka Allah akan menghisab mereka dengan hisab yang berat, dan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih."[22]

Masalah kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi sangat diperhatikan Rasulullah di Negara Madinah, sebelum diturunkannya ayat-ayat tentang pidana. Menarik apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw. saat beliau baru tiba di kota Madinah. Setelah membangun masjid maka beliau mengurusi nasib rakyatnya, khususnya kaum muhajirin yang papa dan miskin karena meninggalkan seluruh harta benda mereka di Mekah. Rasulullah membagi-bagikan rumah dan tanah kepada rakyat yang miskin. Para muhajirin yang menempati tanah kosong, maka diberikan tanah buat mereka. Sedangkan mereka yang tiba di Madinah dan menempati suatu perkampungan kaum

---

[21] Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Prioritas*, GIP, Jakarta, 1995, hal.158.

[22] Hadits sahih riwayat Bukhari, Muslim, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan Malik, seperti dikutip oleh Abdul Aziz al-Badri dalam bukunya "*Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*", GIP, Jakarta, 1999, hal.39.

Anshar, maka kaum Ansharlah yang memberikan tanah dan tempat tinggal bagi mereka.[23]

Begitulah perhatian Rasulullah yang sangat besar terhadap kehidupan, kesejahteraan, dan keadilan rakyat. Karena itu, beliau juga dengan tegas mengharamkan para pegawainya yang telah dicukupi kebutuhan hidupnya untuk menerima pemberian (hibah dan sejenisnya) di luar gaji resmi yang diterimanya.

Rasulullah bersabda,

> *"Barangsiapa yang aku beri amanah dan telah aku beri gaji, maka apa yang dia ambil di luar itu adalah suatu pengkhianatan atau pencurian."* **(HR Abu Dawud)**

Berbagai kasus itu menunjukkan bahwa dalam mencermati syariat Islam, hendaknya tidak dilakukan secara parsial. Tetapi, harus secara menyeluruh agar didapati gambaran yang utuh. Adalah menarik uraian yang pernah disampaikan oleh Prof. Dr. M. Amien Rais ketika masih aktif di PP Muhammadiyah. Ketika itu, ia pernah mencatat,

> "Syariat bertujuan membangun kehidupan manusia berdasarkan nilai-nilai kebajikan (*ma'rufat*) dan membersihkan dari pelbagai kejahatan (*munkarat*). Dalam hal ini, ma'rufat mencakup segala kebajikan (*virtues*) dan seluruh kebaikan (*good qualities*) yang diterima oleh nurani manusia sepanjang masa. Sedangkan, *munkarat* menunjuk pada segenap kejahatan dan keburukan yang selalu bertentangan dengan nurani manusia. Syariat bukan hanya menunjukkan apa yang termasuk dalam *ma'rufat* dan apa yang tergolong dalam *munkarat*, melainkan juga menentukan skema kehidupan untuk menumbuhkan *ma'rufat* dan mencegah agar *munkarat* tidak merancukan kehidupan manusia. Konsekuensi logis dari pemahaman ini ialah bahwa syariat mengatur kehidupan individual dan kolektif manusia. Ketentuan-ketentuan syariat menyentuh seluruh kegiatan hidup manusia, yang mencakup ibadat dalam arti ritual, akhlak pribadi, moral, hubungan antaranggota keluarga, masalah-masalah

---

[23] Lihat Syihabudin al-Hamuy, *Mu'jamul Buldan*, Jld. V hal. 85-86.

sosial-ekonomi, administrasi pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, sistem peradilan, hukum perang dan damai, hukum internasional, dan sebagainya."

Dengan mengutip pernyataan tokoh muslim Pakistan Abul A'la Maududi, Amien Rais menyatakan,

"Syariat adalah skema kehidupan yang lengkap dan suatu tata sosial yang serba-mencakup, di mana tidak ada yang tidak bermanfaat dan tiada yang kurang. Dengan perkataan lain, syariat adalah suatu kesatuan organis, yang harus diterima secara utuh. Bila kita mengambil sebagian ketentuan syariat dan melepaskannya dari bagian-bagian lainnya, maka syariat akan kehilangan fungsinya. Sebagai contoh sederhana, sebuah tangan hanya berfungsi baik kalau ia berada dalam suatu kesatuan badan yang utuh. Bila tangan itu kita lepaskan dari badan tersebut, ia kehilangan fungsi dan maknanya. Dari sudut pandang seperti ini, kiranya menjadi jelas bahwa suatu bagian dari syariat mustahil dapat ditempelkan pada suatu ideologi atau isme tertentu."

Karena itulah, menurut Amien Rais, untuk menerapkan syariat Islam secara utuh, dibutuhkan satu kekuasaan politik. Sebab, syariat adalah sistem hukum yang lengkap dan terpadu. "Karena suatu hukum hanya bisa dilaksanakan jika ada otoritas yang melaksanakan penerapan hukum (*law enforcement*), maka pelaksanaan syariat memang memerlukan kekuasaan politik. Jelas kiranya bahwa yang memiliki kekuatan untuk melaksanakan penerapan hukum itu adalah negara, sehingga dalam pandangan Islam, negara adalah penjaga Syariat supaya Syariat tidak mengalami deteriorasi dan penyelewengan," tulis Amien Rais.[24]

E. Menjawab Logika-Logika yang Salah

1. Penerapan Syariat Islam Berarti Menzalimi Umat Beragama Lain

Logika ini pernah disampaikan oleh Prof. Olaf Schumann (Universitas Hamburg Jerman) dalam diskusi yang diadakan

---

[24] Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Mizan, Bandung, 1997, hal. 51-52.

oleh Masyarakat Dialog Antaragama (MADIA). Diskusi yang mengambil tema *"Menyoal Pemberlakuan Syariat Islam di Indonesia"* itu diselenggarakan di PPIM-IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pembicara lain adalah Ali Munhanif (Dosen IAIN Jakarta lulusan Temple University Philadelphia AS) dan penulis sendiri (Adian Husaini).

Dalam diskusi itulah penulis mengkritik panitia yang mengangkat tema tersebut, *"Mengapa baru beberapa bagian dari hukum Islam diterapkan di Indonesia, sudah dipersoalkan. Mengapa kita tidak mempersoalkan hukum kolonial yang sudah ratusan tahun berlaku di Indonesia? Jadi, ada yang tidak adil dan tidak fair dalam memandang masalah penerapan hukum di Indonesia."*

Prof. Olaf Schumann, pendeta gereja Luteran, yang pernah bertugas di Dewan Gereja Indonesia (1971-1981), misalnya, mengungkap tentang perlunya "unifikasi hukum" untuk keberlangsungan sebuah negara. Secara halus, ia mengkritik kalangan agama yang meminta pemberlakuan hukum sendiri, yang berbeda dengan hukum nasional. Secara implisit, Schumann menyatakan bahwa jika hukum satu agama diterapkan, maka itu merupakan ketidakadilan terhadap pemeluk agama lain. Juga mengganggu konsep unifikasi hukum dalam suatu negara. Penerapan hukum Islam biasanya juga dibenturkan dengan konsepsi pluralitas masyarakat. Jika kewajiban melaksanakan syariat Islam menjadi suatu ketetapan dalam konstitusi, maka--menurut mereka--hal itu akan menimbulkan tuntutan yang sama pada kelompok-kelompok agama lain. Jika hal ini dibiarkan, maka sudah pasti akan ada gesekan-gesekan antarumat beragama yang akan mengancam kesatuan nasional.

JAWABAN terhadap logika tersebut adalah sebagai berikut. Setiap agama sebenarnya memiliki tata aturan dan hukum sendiri-sendiri. Umat Islam justru senang jika pihak agama lain juga mengajukan tuntutan agar mereka juga "diwajibkan" melaksanakan ajaran dan hukum agama mereka. Anehnya, pihak agama lain justru tidak mengajukan hal itu, dan lebih suka "membuang" hukum-hukum agamanya sendiri.

Padahal, Yesus sendiri pernah menyatakan, *"Janganlah kamu*

menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena Aku berkata kepadamu bahwa sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat, sebelum semuanya terjadi. Karena itu, siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekali pun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam Kerajaan Sorga. Tetapi, siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam Kerajaan Sorga." (Matius 5: 17-19)

Hingga kini, dan sejak dulu, pihak Kristen tidak mengajukan tuntutan agar hukum-hukum mereka (hukum Taurat) diterapkan dalam kehidupan mereka. Kalangan luar Islam itu lebih suka menghalang-halangi orang Islam untuk menerapkan ajaran dan hukum Islam. Ini juga merupakan fenomena aneh dan ajaib di negeri ini. Sebagai contoh, di antara empat alternatif yang dikompilasi di Panitia Ad Hoc I MPR dalam amandemen pasal 29 UUD 1945 adalah "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan ajaran agamanya bagi pemeluknya masing-masing." Yang aneh, alternatif ini juga ditolak oleh partai-partai sekuler dan kalangan Kristen. Bukankah sangat bagus jika setiap pemeluk agama diwajibkan menjalankan ajaran agamanya?

Jika penerapan hukum Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dikatakan sebagai "penindasan" dan "pemaksaan" terhadap kelompok agama lain, apakah penerapan hukum kolonial (*hukum thaghut*) terhadap umat Islam bukan merupakan suatu penindasan juga? Bukankah banyak umat Islam yang tidak ridha dipaksa mengikuti hukum-hukum kolonial? Tetapi, karena tidak ada pilihan lain, mereka terpaksa mengikutinya. Penerapan hukum-hukum kolonial di negeri-negeri Islam juga dilakukan dengan paksa, tanpa kompromi.

Jika penerapan hukum Islam terhadap masyarakat plural dikatakan sebagai suatu "penindasan", maka Rasulullah saw. berarti telah melakukan penindasan. Sebab, beliau saw. menerapkan hukum Islam terhadap seluruh masyarakat, baik

muslim maupun nonmuslim. *Na'udzubillahi*, jika ada yang berani menyatakan seperti itu. Masalah hukum berkaitan dengan "kekuasaan". Karena Barat yang berkuasa, maka Baratlah yang kini memaksakan hukum-hukum mereka diterapkan terhadap negara-negara koloni mereka. Meskipun hukum-hukum Barat itu sangat merusak masyarakat, tetapi hingga kini, kaum muslimin terus dipaksa menerapkannya. Misalnya, pasal-pasal KUHP bikinan kolonial tentang soal susila dan pornografi.

Dalam KUHP warisan kolonial, zina tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan. Maka, segala hal yang dapat mendorong atau mendekatkan kepada perbuatan zina juga tidak dianggap sebagai masalah yang serius. Pergaulan bebas bukanlah dipandang kejahatan. Malah diberi fasilitas oleh masyarakat, misalnya dalam bentuk lokalisasi pelacuran. Berbeda sekali prinsip-prinsip kehidupan masyarakat Barat itu dengan aturan Islam yang dengan ketat memberi batasan agar manusia tidak melakukan hal-hal yang mendekati zina. Allah SWT berfirman,

> *"Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji dan mungkar."* (al-Israa`: 32)

Karena dikatakan perbuatan keji, banyak ulama yang mengharamkan mengawini pelacur. Mereka berpegang pada firman Allah SWT, *"Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan wanita yang berzina."* (an-Nuur: 3) Meskipun ayat ini bentuknya berita, tetapi hakikatnya merupakan larangan, sebab ayat ini diakhiri dengan, *"Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang mukmin."*

Ali r.a. pernah berkata, *"Apabila seorang laki-laki berzina maka ia harus diceraikan antara dia dengan istrinya. Demikian pula apabila seorang wanita berzina, maka harus diceraikan antara dia dengan suaminya."*

Begitu kerasnya larangan Al-Qur`an dalam soal zina, sehingga segala hal yang dapat mendekatkan pada perbuatan zina harus ditinggalkan. Khalwat--berduaan di tempat sepi--misalnya, dilarang keras oleh Rasulullah. Beliau bersabda,

> *"Barangsiapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Hari Akhir, maka sekali-kali janganlah dia berkhalwat dengan*

seorang wanita yang tidak disertai dengan seorang mahram dari pihaknya. Karena jika mereka hanya hanya berdua, maka yang ketiga adalah setan." **(HR Ahmad)**

Di dalam Taurat pun zina dipandang sebagai kejahatan berat. Di dalam Kitab Ulangan (Perjanjian Lama), ayat 20-22, disebutkan bahwa hukuman bagi pezina adalah hukuman "rajam", dilempari batu sampai mati,

"Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu, sehingga mati. Sebab, dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang wanita yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati: laki-laki yang telah tidur dengan wanita itu dan wanita itu juga. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel."

Tetapi, ketika Barat sudah melakukan sekularisasi dan membuang hukum-hukum Taurat, maka perzinaan tidak lagi dianggap sebagai suatu kejahatan. Itulah hukum yang sekarang di warisi kaum muslim dari penjajah kolonial Belanda. Di dalam KUHP, zina hanya dikenakan pada orang-orang yang telah menikah. Itu pun dengan pengaduan salah satu pihak. Atau, zina dilakukan dengan wanita di bawah umur. Hukumannya pun sangat ringan. Misalnya, pasal 287 menyebutkan, *"Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun."*

Dari pasal itu dapat dipahami bahwa kalau seseorang berzina dengan wanita yang telah dewasa, di atas lima belas tahun dan sudah waktunya untuk dikawin, maka itu bukan merupakan tindak pidana. Tentu pasal ini jauh sekali dari konsepsi hukum Islam. Pasal 285 yang mengatur tentang perkosaan juga sangat ringan hukumannya, yaitu penjara paling lama 12 tahun.

Kaum sekuler seperti tidak peduli ancaman Allah,

"Apabila perzinaan dan riba telah melanda suatu negeri, maka penduduk negeri itu telah menghalalkan turunnya azab Allah atas mereka sendiri." **(HR Thabrani dan al-Hakim)**

Gerakan Islam Liberal yang bertujuan menghambat penerapan syariat Islam di Indonesia mestinya justru menggali khazanah hukum Islam yang sangat kaya. Juga tidak apriori bahwa hukum kolonial lebih maju dan lebih bermartabat dibandingkan hukum Islam. Mereka mestinya merenungkan ayat Al-Qur`an,

"Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin?" **(al-Maa`idah: 50)**

Aspek hukum adalah aspek-aspek kehidupan yang seringkali berada di luar jangkauan akal manusia. Karena itulah, ketaatan kepada syariat banyak sekali yang berpijak kepada keimanan. Sepintar-pintar manusia dalam merumuskan hukum bagi manusia, tentu tidak akan pernah memahami semua sisi manusia, baik secara individual maupun komunal. Masyarakat bukanlah seperti pesawat terbang atau mobil. Dari waktu ke waktu, teknologi pesawat atau mobil makin sempurna, karena penemuan berikutnya senantiasa memanfaatkan penemuan-penemuan teknologi sebelumnya.

Berbeda dengan hukum-hukum masyarakat. Belum tentu hukum-hukum yang datang belakangan lebih baik dibandingkan hukum-hukum sebelumnya. Kasus yang terjadi di sejumlah negara Eropa dapat dijadikan contoh. Belanda, misalnya, seperti ditulis *Kompas* (18 April 2001), tercatat sebagai negara yang telah mengesahkan kebebasan penggunaan narkotika, melegalkan perkawinan sejenis yang dikenal sebagai revolusi merah jambu, dan juga mengesahkan praktik euthanasia melalui Euthahasiewet (Undang-Undang Euthanasia).

Euthanasia, pembunuhan terhadap pasien-pasien yang dianggap tidak mempunyai harapan hidup lagi, adalah praktik yang dijalankan oleh Hitler dalam memusnahkan orang-orang

cacat dan tidak berguna bagi masyarakat unggul. Korban euthanasia Hitler mencapai 5.000 anak-anak dan 10.000 orang dewasa. Hukum ini ditetapkan setelah memakan perdebatan yang panjang selama 25 tahun. Apakah hukum euthanasia itu merupakan hal yang lebih baik dari sebelumnya? Tentu saja tidak. Apakah hukum yang mengesahkan perkawinan sejenis (homo/lesbi) di Belanda, lebih baik dari hukum sebelumnya yang tidak mengesahkan praktik terkutuk itu? Tentu saja tidak. Itulah manusia. Mestinya kaum Liberal merenungkan masalah-masalah seperti ini, daripada mengerahkan segenap energi mereka untuk menghalangi diterapkannya hukum-hukum Allah di Indonesia, karena tuan-tuan sekuler di Barat tidak ridha jika syariat Islam diterapkan. Seyogianya firman Allah berikut ini direnungkan juga,

"Dan barangsiapa yang menentang Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya." **(al-Anfaal: 13)**

2. Syariat Islam Mana yang Diterapkan?

Dalam dikusi di PPIM IAIN itu, Olaf Schumann juga mempersoalkan "keragaman definisi" syariat Islam di kalangan kaum muslimin sendiri. Jika syariat Islam mau diterapkan, mazhab mana yang mau diterapkan? Bukankah begitu banyak mazhab fiqih dalam Islam?

Pertanyaan seperti itu, misalnya, juga muncul dalam tulisan Zuly Qadir, peneliti Interfidei Yogyakarta, di harian *Kompas*, 24 April 2002. Zuly menulis dalam artikelnya yang berjudul "Pemberlakuan Syariat Islam" itu, "Hukum Islam versi siapa yang akan diterapkan? Ini menjadi penting dibicarakan secara kritis dan jernih sebab di Indonesia menganut paling kurang empat mazhab besar yang menjadi anutan hukum Islam (fiqih)."

MENJAWAB pertanyaan seperti itu tidak terlalu sulit. Ketika itu, penulis menjawab logika Schumann bahwa seringkali ada standar ganda dalam memandang syariat Islam dan "syariat Barat". Jika dikatakan ada keragaman dalam syariat Islam (seperti dalam hal mazhab), bukankah dalam "syariat Barat" juga terdapat berbagai tingkat keragaman yang sangat tinggi. Hukum Barat yang dipelajari di Indonesia juga mengenal berbagai

mazhab, seperti mazhab Anglosaxon, mazhab continental, dan sebagainya. Pendapat para pakar hukum Barat juga menjadi rujukan dalam penentuan suatu hukum, atau jurisprudensi, sama dengan pendapat para pakar syariat Islam.

Keragaman hukum Islam pada tataran fiqih tidaklah masalah. Sejak memimpin negara Madinah sampai berabad-abad sesudahnya, kaum muslimin tidak pernah kerepotan menerapkan hukum Islam mana yang diterapkan. Pada level ubudiyah, setiap individu muslim dibebaskan untuk menjalankan ibadah menurut keyakinan atau mazhab yang dianutnya. Apakah ia shalat menggunakan qunut atau tidak, negara tidak berwenang mencampuri urusannya. Yang penting, dia tetap shalat lima waktu dan tidak mengingkari kewajiban shalat lima waktu. Tetapi, dalam tataran kemasyarakatan dan hukum positif, tentu harus ada satu pendapat hukum yang disahkan oleh negara.

Misalnya, untuk menentukan jenis-jenis harta apa saja yang wajib dizakati, pasti akan diambil satu pendapat atau mazhab, apakah pendapat Syafii, Hanafi, Maliki, atau mazhab lainnya. Hal seperti ini bukanlah hal yang rumit. Bahkan, selalu terjadi di setiap negara yang menerapkan hukum positif. Sebagai contoh, di Aceh saat ini diwajibkan menutup aurat di berbagai kawasan daerah tersebut. Yang diambil sebagai hukum positif adalah pendapat yang menyatakan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Pendapat yang mewajibkan penggunaan cadar seperti di masa Taliban tidak diterapkan di Aceh. Jadi, hal seperti ini adalah soal biasa dalam penerapan hukum positif. Bahwa di dalam upaya legalisasi suatu pendapat menjadi hukum positif akan terjadi perebutan pengaruh terhadap pusat-pusat kekuasaan, hal itu pun merupakan dinamika masyarakat yang terjadi pada hampir semua bangsa beradab.

3. Syariat Islam Rawan Intervensi Negara

Pelaksanaan syariat Islam oleh negara akan membuka kemungkinan campur tangan negara dalam wilayah agama yang akan mengakibatkan kemudharatan baik bagi agama itu sendiri maupun pada negara sebagai wilayah publik. Menurut pendapat

ini, ketaatan pada agama adalah cerminan dari kebebasan pribadi yang tidak bisa diatur-atur oleh institusi eksternal seperti negara. Pelaksanaan syariat yang diatur oleh negara akan menimbulkan bahaya hipokrisi. Pasalnya, ketaatan pada syariat yang disebabkan oleh paksaan negara hanyalah merupakan ketaatan semu belaka. Agama, pada intinya, harus menjadi wilayah yang otonom dari negara. Malah ada yang menyatakan, agama adalah wilayah yang sakral dan politik (negara) adalah wilayah yang profan, yang keduanya harus dipisahkan.

Pemikiran seperti itu berpijak pada rumusan bahwa agama harus menjadi urusan privat, ataupun jika muncul ke ruang publik, maka agama hanya akan menjadi sebatas penyumbang "nilai moral". Dalam tulisannya di *Kompas*, 23 April 2002, yang berjudul *"Problem Ruang" dalam relasi Agama-Negara*, Rumadi, mahasiswa S-3 IAIN Jakarta, menulis,

> "Di ruang publik, agama hanya berbicara tentang moralitas bersama, sebagai penjaga moralitas dan etika, tidak lebih dari itu. Tentu saja moralitas yang dimaksud adalah moralitas yang telah 'terobjektivikasi' di mana semua orang, tanpa melihat agama, secara objektif dapat melihat sesuatu sebagai 'baik' atau 'buruk'. Dengan demikian, di ruang publik, klaim universalitas agama tidak lagi bersifat absolut, tetapi relatif. Karena, bisa jadi masing-masing agama mempunyai klaim yang berbeda."

JAWABAN terhadap logika semacam itu juga tidak terlalu rumit. Sejak berdirinya negara Madinah yang memiliki konstitusi tertulis pertama di dunia (Piagam Madinah), Nabi Muhammad saw. sudah bertindak sebagai kepala negara, yang selain mengangkat pejabat-pejabat negara--termasuk sejumlah gubernur (wali) di berbagai wilayah--juga menjalankan hukum-hukum (syariat) Islam terhadap seluruh warga negara. Nabi Muhammad saw. tidak menggunakan hukum adat, hukum Persia, atau hukum Romawi untuk memutuskan perkara (mengadili) di antara rakyatnya.

Nabi Muhammad saw. menerapkan hukum cambuk dan rajam bagi pezina. Juga menerapkan hukum boikot sosial terhadap sejumlah warga negara yang enggan berperang. Beliau

saw. mengirim duta-dutanya ke negara-negara sekitar, dan mengajak mereka masuk Islam. Juga menarik zakat dan pajak dari rakyatnya. Jika mereka membandel, maka akan diterapkan hukum dengan paksa, seperti yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar.

Karena itu, ungkapan sejumlah tokoh bahwa "pelaksanaan syariat yang diatur oleh negara akan menimbulkan bahaya hipokrisi" adalah ungkapan yang aneh bin ajaib. Jika negara tidak campur tangan dalam penerapan syariat, maka yang terjadi adalah anarki. Sebab, setiap hukum--apakah hukum Tuhan atau hukum buatan manusia--pasti memiliki sifat "koersif" (memaksa) dan memiliki sanksi yang tegas. Hukum tidak sama dengan imbauan atau nilai-nilai moral yang tidak mempunyai sanksi.

Jika negara tidak boleh menerapkan hukum Islam, lalu siapa yang akan memaksakan pelaksanaan hukum Islam dan memberikan sanksi? Apakah hukum itu harus diterapkan oleh pimpinan ormas/parpol? Jika terjadi sengketa dalam soal tanah wakaf, waris, perdagangan, suami-istri, dan sebagainya, siapa yang akan menyelesaikannya? Bukankah negara yang mengatur pelaksanaan syariat Islam dalam bidang-bidang tersebut? Apakah pimpinan ormas boleh memotong tangan anggotanya yang mencuri; boleh memaksa anggotanya untuk membayar zakat; boleh melakukan eksekusi dalam sengketa warisan atau harta wakaf?

Jadi, pandangan yang mencoba memisahkan antara agama dan negara adalah sangat absurd. Soalnya, saat ini, banyak syariat Islam yang justru sudah disahkan sebagai hukum positif. Pemerintah sudah mengesahkan UU tentang Haji dan UU Zakat. UU tentang Pangan pun mengatur masalah "halal" dan "haram". Berdirinya Badan Arbritase Muamalat juga mengatur tentang pelaksanaan syariat Islam di seluruh sektor perdata. Berbagai peraturan di bidang keagamaan--seperti SKB No 1/1969, SK Menag No. 70/1978, SK Menag 77/1978, dan sebagainya--yang mengatur pendirian tempat ibadah dan tata cara penyiaran agama juga sudah diterbitkan.

Apakah semua peraturan di bidang keagamaan itu harus dibuang, agar agama menjadi wilayah yang otonom dari negara? Jelas sekali, pendapat yang menyatakan bahwa "agama, pada intinya, harus menjadi wilayah yang otonom dari negara" adalah pendapat yang naif dan impian belaka. Pendapat semacam ini juga sangat aneh. Mereka tidak protes, misalnya, saat negara menginterversi kehidupan privasi mereka, seperti memaksa rakyat memakai helm atau melarang merokok di tempat-tempat tertentu. Mereka juga tidak protes jika diwajbkan memakai SIM saat mengemudi. Bukankah itu sudah mencampuri urusan privat. Memakai helm saat mengendarai motor adalah urusan pribadi. Mengapa mereka tidak *ngotot* bahwa celaka atau tidak itu urusan pribadi. Mereka juga tidak protes jika negara melarang warganya mengkonsumsi narkoba. Nah, apa salahnya jika negara juga melarang dan memberikan sanksi pada warganya yang "meninggalkan shalat lima waktu", "berzina", "meminum khamar", "tidak berpuasa di bulan Ramadhan", dan berbagai jenis kemaksiatan lainnya? BUKANKAH LEBIH BAIK DIPAKSA MASUK SURGA, DARIPADA DENGAN IKHLAS MASUK NERAKA?!

Bagi seorang muslim, ruang publik dan ruang privat sangatlah sulit dipisahkan. Seorang yang meyakini bahwa ajaran Islam mencakup semua aspek kehidupan, akan sulit menerima pemisahan seperti itu. Misalnya, bagi seorang muslim, maka soal halal-haram, boleh-tidak boleh, sudah diatur dalam hukum Islam. Baik untuk wilayah privat maupun wilayah publik. Seorang yang minum khamar sendirian di kamar, sama saja haramnya dengan meminumnya di depan umum. Pelacuran itu tetap haram, apakah dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Apakah mayoritas publik sepakat atau tidak, perjudian tetap haram sampai hari kiamat. Apakah mayoritas masyarakat melakukan atau tidak, perzinaan tetap diharamkan sampai hari kiamat. Konsep pengebirian atau reduksi Islam menjadi sekadar wilayah privat pasti akan sia-sia. Pasalnya, begitu banyak ajaran Islam yang sulit dipisahkan dari peran negara dalam pelaksanaan atau aplikasinya.

F. Peringatan Rasulullah saw. Jika Mengabaikan Syariat Islam

Demikianlah berbagai jawaban terhadap logika-logika yang disebarkan secara luas ke tengah masyarakat, yang ujung-ujungnya adalah menolak penerapan syariat Islam, khususnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Seperti dipaparkan sebelumnya, gerakan penolakan atau pengebirian syariat Islam tidaklah lepas dari peta pertempuran peradaban global yang terjadi pada berbagai lini: politik, ekonomi, pemikiran, informasi, dan sebagainya. Sebagai kekuatan imperialistik, Barat mempunyai kekhawatiran besar terhadap setiap kekuatan yang dipandang akan mengganggu kepentingannya.

Karena itu, logis jika mereka senantiasa berupaya keras memberangus kekuatan-kekuatan Islam yang mereka nilai potensial mengganggu kepentingannya. Termasuk pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Inilah agenda imperialis sejati. Kaum muslimin harusnya bersatu padu untuk mendukung pelaksanaan syariat Islam. Hanya dengan itu, kaum muslimin akan mendapatkan berkah dari langit dan bumi. Rasulullah saw. sudah mengingatkan,

"Wahai kaum Muhajirin, ada lima perkara yang jika telah menimpa kalian, maka tidak ada kebaikan lagi bagi kalian. Dan aku berlindung kepada Allah SWT, semoga kalian tidak menemui zaman itu. Lima perkara itu ialah sebagai berikut. (1) Tidak merajalela praktik perzinaan pada suatu kaum, sampai mereka berani berterus-terang melakukannya, melainkan akan terjangkit penyakit menular dengan cepat, dan mereka akan ditimpa penyakit-penyakit yang belum pernah menimpa umat-umat yang lalu. (2) Tiada mereka mengurangi timbangan/ukuran, kecuali mereka akan diuji dengan kemarau panjang dan kesulitan mencari rezeki dan kezaliman dari kalangan pemimpin mereka. (3) Tidak menahan mereka akan zakat harta benda, kecuali ditahan juga untuk mereka air hujan dari langit. Jikalau tidak ada binatang (yang juga hidup di muka bumi ini) tentunya mereka tidak akan diberi hujan oleh Allah SWT. (4) Dan tiada mereka menyalahi akan janji Allah dan Rasul-Nya, kecuali Allah akan menurunkan kepada mereka musuh yang

akan merampas sebagian dari apa yang ada di tangan mereka. (5) Dan apabila pemimpin-pemimpin mereka tidak melaksanakan hukum Allah yang terkandung dalam Al-Qur`an dan tidak mau menjadikannya sebagai pilihan, maka Allah akan menjadikan bencana di kalangan mereka sendiri." **(HR Ibnu Majah)**

Dalam hadits lain, Rasulullah saw. mengingatkan,

"Kalian akan mengikuti jejak langkah umat-umat sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sehingga, jikalau mereka masuk ke lobang biawak pun, kamu akan mengikuti mereka. Sahabat bertanya, 'Ya Rasulallah, apakah (mereka) itu Yahudi dan Nasrani?' Nabi saw. menjawab, 'Siapa lagi!'" **(HR Muslim)**

Hadits Rasulullah saw. itu sangat menarik untuk direnungkan. Maraknya kaum muslimin mengikuti jejak langkah, pandangan, dan gaya hidup kaum Yahudi dan Nasrani meskipun mereka melakukan hal yang tidak masuk akal dan berbahaya, seperti masuk ke lobang biawak. Ketika kaum Yahudi mempopulerkan pola hidup hedonistis dan serba bebas, kaum muslimin pun berbondong-bondong mengikutinya, tanpa pikir panjang. Ketika Yahudi dan Nasrani ramai-ramai meninggalkan hukum-hukum agama mereka, dan menggantinya dengan hukum buatan mereka sendiri, kaum muslimin pun ikut-ikutan dengan menganggap bahwa hukum bikinan Yahudi dan Nasrani itulah yang terbaik bagi kaum muslimin. Berbagai alasan dapat dicari. Syariat Islam yang sudah baku diacak-acak dan dianggap kuno, ketinggalan zaman, tidak relevan lagi dengan nilai-nilai demokrasi Barat, dan seabrek alasan lain. *Wallahu a'lam.*

* * *

Bab Ke-5

ISLAM LIBERAL, IMPERIALISME BARAT, DAN ZIONISME

"Penyakit (Islam Fundamentalis) sedang menyebar secara cepat dan merupakan sebuah bahaya tidak hanya untuk masyarakat Yahudi, tapi juga bagi kemanusiaan secara umum."

(Herzog, Presiden Israel)

"Setelah tumbangnya komunisme, fundamentalisme telah menjadi bahaya paling besar bagi kita."

(Shimon Peres)

"... jika tidak ada upaya-upaya untuk mencegah dominannya pandangan keagamaan yang militan itu, boleh jadi, dalam waktu yang panjang, pandangan-pandangan kelompok keagamaan yang militan ini bisa menjadi dominan. Hal ini, jika benar terjadi, akan mempunyai akibat yang buruk buat usaha memantapkan demokratisasi di Indonesia."

(www.islamlib.com)

Salah satu kritik cukup serius dari Haidar Bagir terhadap Islam Liberal adalah persoalan metodologis. Dalam tulisannya di *Republika* (27 April 2002) berjudul *Hermeneutika dan Takwil,*

Haidar mencatat "bahwa siapa pun yang ingin melakukan inovasi dalam pengembangan pemikiran Islam, dituntut ketelatenan, kecermatan, dan kerendahhatian. Tentu juga wawasan yang kaya demi menjadikan inovasinya produktif dan bertanggung jawab. Tanpa itu semua, dikhawatirkan risiko penggagahan Islam atas nama modernisme, rasionalisme, ataupun liberalisme tak dapat sepenuhnya dihindarkan".

"Penggagahan Islam". Istilah yang digunakan Haidar itu sama maknanya dengan "perkosaan Islam". Islam diperkosa? Untuk apa diperkosa? Siapa yang memerkosa? Perkosaan bisa dilakukan demi memuaskan hawa nafsu si pemerkosa yang sudah telanjur dikuasai "nafsu setan" sehingga kehilangan akal sehat. Merek peduli bahwa korban perkosaan akan mengalami trauma dan kehancuran yang dahsyat di masa depannya.

Tulisan pada bagian akhir ini tidak akan membahas lebih jauh soal "perkosaan" atau "penggagahan" terhadap Islam. Tetapi, akan lebih menfokuskan pada satu persoalan penting dari eksistensi Islam Liberal. Khususnya, tentang bagaimana kelompok ini mempersepsikan "musuh bersama" sebagai pijakan eksistensi dirinya.

A. Perburuan Kaum Fundamentalis: "Lagu Lama Kaum Islamofobia"

Mungkin terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kaum imperialis Barat, termasuk kaum Zionis, menggunakan Jaringan Islam Liberal untuk menghancurkan musuh-musuhnya. Tapi, menariknya, slogan-slogan dan jargon-jargon yang diungkap oleh imperalis Barat, hampir sama dengan Islam Liberal. Pasca Perang Dingin, Barat rajin sekali mengkampanyekan bahaya "Islam fundamentalis". Hal itu pula yang dijadikan "musuh utama" dan "legitimasi" eksistensi Liberal. Padahal, berbagai kerancuan terminologis dan kategoris masih sangat menonjol.

Eksistensi Islam Liberal antara lain dibangun di atas landasan pemikiran yang sederhana, "hancurkan Islam fundamentalis!" Karena itu, berbagai gagasan yang diluncurkan oleh kelompok ini bisa dikatakan berputar-putar pada isu pokok tersebut. Untuk lebih memperjelas sosok "Islam Liberal", perlu ditelaah secara

kritis bagaimana kelompok ini mendefinisikan diri sendiri. Gampangnya, di sini akan diungkap sejumlah paparan tentang latar belakang pembentukan kelompok "Islam Liberal" sebagaimana yang diberikan oleh "Jaringan Islam Liberal" dalam situsnya www.islamlib.com.

> "Kekhawatiran akan bangkitnya 'ekstremisme' dan 'fundamentalisme' agama sempat membuat banyak orang khawatir akhir-akhir ini. Gejala yang menunjukkan perkembangan seperti ini memang cukup banyak. Munculnya sejumlah kelompok militan Islam, tindakan pengrusakan gereja (juga tempat ibadah yang lain), berkembangnya sejumlah media yang menyiarkan aspirasi 'Islam militan', penggunaan istilah 'jihad' sebagai alat pengesah serangan terhadap kelompok agama lain, dan semacamnya, adalah beberapa perkembangan yang menandai bangkitnya aspirasi keagamaan yang ekstrem tersebut. Sudah tentu, jika tidak ada upaya-upaya untuk mencegah dominannya pandangan keagamaan yang militan itu, boleh jadi, dalam waktu yang panjang, pandangan-pandangan kelompok keagamaan yang militan ini bisa menjadi dominan. Hal ini, jika benar terjadi, akan mempunyai akibat yang buruk buat usaha memantapkan demokratisasi di Indonesia. Sebab, pandangan-pandangan keagamaan yang militan biasanya menimbulkan ketegangan di antara kelompok-kelompok agama yang ada, sebut saja antara Islam dan Kristen... Pandangan-pandangan keagamaan yang terbuka, plural, dan humanis adalah salah satu nilai-nilai pokok yang mendasari suatu kehidupan yang demokratis."

Ada sejumlah hal yang bisa disimpulkan dari paparan pendirian kelompok Islam liberal tersebut. *Pertama,* gejala bangkitnya "Islam militan", "Islam fundamentalis", atau "Islam ekstrem" perlu dikhawatirkan, sebab akan berdampak buruk pada proses demokratisasi di Indonesia. *Kedua,* Islam militan biasanya menimbulkan ketegangan antarkelompok agama yang ada dan menjadi penghambat demokratisasi.

Jadi, secara ringkas, "misi suci" (atau "misi kotor"?) dari

"Islam Liberal" adalah untuk membunuh perkembangan "Islam militan" atau "Islam ekstrem" atau "Islam fundamentalis". Penggunaan istilah-istilah itu bisa dikatakan sebagai bagian dari pengacauan atau "teror" terhadap Islam dalam lapangan opini publik. Sebab, istilah itu sendiri tidak jelas maknanya, dan secara akademis sangat sulit dibuatkan standarnya.

Sebutlah istilah "Islam militan". Kata *"militan"* dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (1990), didefinisikan sebagai "bersemangat tinggi; penuh gairah; berhaluan keras". Jadi, secara leksikal, "Islam militan" dapat diartikan sebagai Islam yang bersemangat tinggi, penuh gairah, dan berhaluan keras. Ringkasnya, Islam yang tidak loyo. Maka, jika keberadaan "Islam Liberal" merupakan antitesa dari "Islam militan", berarti "Islam Liberal" dapat dimaknai sebagai Islam yang tidak bergairah, alias Islam loyo.

GH Jansen (1980:6) mencatat bahwa bangkitnya "Islam militan" adalah sebagai reaksi terhadap masalah bagaimana menghadapi tantangan cara hidup Barat yang telah menjadi cara hidup dunia. Karena tantangan ini meliputi seluruh dunia, jawaban Timur yang bersifat politik agama bukan hanya monopoli Islam militan, tetapi juga di agama lain. Sadeq al-Mahdi, mantan Perdana Menteri Sudan, menyatakan, "Kini kita terbelakang dan miskin, dipaksa berhadapan dengan raksasa ekonomi dan militer tetapi memiliki rasa moral dan mental seekor lalat."[1]

Misi kelompok "Islam Liberal" yang ingin memberangus "Islam fundamentalis" juga sejalan dengan misi imperialisme Barat. Sejumlah pakar dan tokoh Barat menunjuk sikap "anti-Barat" sebagai salah satu ciri kaum "fundamentalis". Menurut Fazlur Rahman, "semangat anti-Barat" adalah semangat yang melahirkan fundamentalisme. Mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon menyebut lima ciri kaum fundamentalis Islam. Yaitu, (1) mereka yang digerakkan oleh kebencian yang besar terhadap Barat, (2) mereka yang bersikeras untuk mengembalikan peradaban Islam yang lalu dengan membangkitkan masa

---

[1] GH Jansen, *Islam Militan*, Pustaka, Bandung, 1980, hal. 6

lalu itu, (3) mereka yang bertujuan untuk mengaplikasikan syariat Islam, (4) mereka yang mempropagandakan bahwa Islam adalah agama dan negara, (5) mereka menjadikan masa lalu itu sebagai penuntun bagi masa depan. Mereka bukan orang-orang konservatif, namun mereka adalah orang-orang revolusioner.[2]

Melihat adanya kesejajaran misi kelompok "Islam Liberal" dengan misi "Barat" untuk memberangus "Islam militan" atau "Islam fundamentalis", perlu dipertanyakan, apakah kelompok "Islam Liberal" memang bentukan Barat, agen misi Barat, atau bermaksud mengabdi–sadar atau tidak–pada proyek pelestarian imperialisme Barat. Bisa juga, proyek "Islam Liberal" ini merupakan manifestasi dari mental "*minderwaardigheids complex (mc)*". Karena memandang bahwa "Islam Liberal" adalah suatu kebenaran, maka orang-orang yang aktif di sini menjalankan misi Barat untuk memerangi "Islam militan" atau "Islam fundamentalis", tanpa diberi imbalan apa pun, alias tulus ikhlas.

Lalu, penggunaan istilah "Islam ekstrem" untuk menyebut kelompok-kelompok Islam tertentu yang berkeinginan menerapkan syariat Islam secara kaffah, pun sangat rancu. Sebab, istilah ini sendiri sudah menyimpang. "Ekstrem" atau "*tatharruf*" bisa diartikan sebagai penyimpangan dari garis kebenaran. Berbagai kalangan Islam menolak keras penyebutan istilah tersebut.

Istilah "ekstrem" yang digunakan kelompok "Islam Liberal", sebenarnya juga merupakan pengulangan lagu lama proyek Orde Baru era dominasi LB Moerdani dan Sudomo. Pada hekikatnya itu merupakan kelanjutan kebijakan Islam zaman kolonial bikinan Snouck Hourgronje. Ketika itu, setiap kelompok Islam yang menentang pemerintah kolonial akan dikatakan sebagai kelompok "ekstrem" atau kaum "ekstremis". Penggunaan istilah ini juga sangat sering digunakan oleh media-massa Barat dan Israel saat menyebut nama kelompok-kelompok Islam

---

[2] Lihat Yusril Ihza Mahendra, ***Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam***, Paramadina, Jakarta, 1999, hlm. 19. Pendapat Nixon tentang fundamentalis Islam diungkap dalam bukunya ***Seize the Moment*** dan dikutip oleh Muhammad Imarah dalam buku ***Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam***, GIP, Jakarta, 1999, hal. 35).

Palestina seperti Hammas dan Jihad Islam. Pasca 11 September 2002, Israel menyebut Hammas, Jihad Islam, dan sejenisnya, sebagai "teroris".

Sebagai contoh, pada 21 Januari 1997, Sudomo membuat pernyataan bahwa ancaman bangsa ini senantiasa muncul dari dua kelompok, yaitu kelompok *dissident* 'pembangkang' dan kelompok subversif. Kelompok subversif ini terdiri dari dua golongan, yaitu ekstrem kiri dan ekstrem kanan. (*Republika*, 27 Januari 2001). Menyusul terjadinya kasus Priok, Harian *Suara Karya* (16 September 1984) menyiarkan imbauan Try Sutrisno yang menyatakan agar masyarakat tetap waspada terhadap unsur-unsur ekstrem, baik berupa ekstrem kanan maupun ekstrem kiri. "Di mana pun dan kapan pun, unsur ekstrem itu pasti ada. Meski jumlah mereka tidak banyak, namun masyarakat harus waspada menghadapi mereka antara lain dengan selalu mengendalikan diri dan meningkatkan persatuan dan kesatuan," kata Try Sutrisno ketika itu.

Bandingkanlah ungkapan Try Sutrisno itu dengan ungkapan "Jaringan Islam Liberal" berikut, "*Kelompok-kelompok agama yang tergolong 'militan' tidak banyak jumlahnya. Bahkan dari segi jumlah, mereka ini bukanlah apa-apa dibanding dengan 'kelompok arus utama' yang jumlahnya jauh lebih banyak.*"

Lalu, bandingkan juga misi "Islam Liberal" dan misi Orde Baru dengan politik Islam pemerintah kolonial Belanda. Pemerintah kolonial Belanda ketika itu--atas nasihat Snouck Hurgronje--membagi masalah Islam ke dalam tiga ketegori. Yaitu, bidang agama murni dan ibadah, bidang sosial kemasyarakatan, dan bidang politik. Masing-masing bidang mendapat perlakuan yang berbeda. Resep Snouck Hurgronje inilah yang dikenal sebagai "Islam Politiek", atau kebijakan pemerintah kolonial untuk menangani masalah Islam di Indonesia.

Dalam bidang agama murni atau ibadah, pemerintah kolonial pada dasarnya memberikan kemerdekaan kepada umat Islam untuk melaksanakan ajaran agamanya, sepanjang tidak mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda. Dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah memanfaatkan adat kebiasaan

yang berlaku dengan cara menggalakkan rakyat agar mendekati Belanda, dan bahkan membantu rakyat menempuh jalan tersebut. Dan dalam bidang politik, pemerintah harus mencegah setiap usaha yang akan membawa rakyat kepada fanatisme dan Pan-Islam.[3]

Jika memang "Islam Liberal" merupakan proyek kolonialis-imperialis Kristen Barat, maka tidak sulit untuk memahami bahwa kelompok ini akan melanjutkan misi Snouck Hourgronje. Yaitu, berusaha keras memerangi "Islam militan" dan mencegah fanatisme keagamaan atau "Pan-Islam". Tidak heran, misalnya, jika kelompok ini sangat aktif berkampanye agar umat Islam jangan peduli pada masalah "Kristenisasi" dan jangan membawa-bawa agama dalam dunia politik.

Bahkan, saat umat Islam bangkit solidaritasnya karena saudara-saudaranya dibantai di Palestina, Ambon, Poso, Bosnia, Afghanistan, juga di berbagai belahan Dunia Barat--menyusul Kasus WTC dan Pentagon 11 September 2001--tidak sulit dipahami jika aktivis kelompok ini melakukan upaya penggalangan opini agar umat Islam tidak bangkit semangat keagamaan dan ruhul jihadnya. Juga, jangan heran, jika kelompok ini aktif menjadi juru bicara kepentingan Barat dan Kristen, seperti dalam kasus penolakan penerapan syariat Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Ketika umat Islam bangkit semangat jihadnya untuk membela saudaranya yang sedang teraniaya di Palestina oleh Zionis Israel, bahkan MUI mengeluarkan pernyataan bahwa melawan Zionis Israel adalah jihad fi sabilillah dan merupakan kewajiban bagi kaum musliminin, maka kalangan Islam Liberal juga tampak resah. Situs www.islamlib.com segera menurunkan wawancara dengan tokoh Kristen Dr. AA Yewangoe. Jumat (26 April 2002), situs tersebut memuat wawancara dengan Pendeta Dr. AA Yewangoe dengan judul "*A.A. Yewangoe: Palestina tidak Identik dengan Islam.*" Dijelaskan dalam wawancara tersebut bahwa "Proposal Damai yang ditelurkan oleh KTT Arab di

---

[3] Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, 1985, LP3ES, Jakarta, hal. 12.

Lebanon ternyata mati muda. Perdamaian di kawasan Timur Tengah tak sekadar jauh panggang dari api, tapi juga utopia. Ironisnya lagi, konflik Israel-Palestina selalu dibumbui dengan sentimen religius. Palestina selalu dianggap idem tito Islam. Salah pandang tentang konflik Arab-Israel akhirnya jamak terjadi. Ini, konflik agama yang melibatkan Islam vis a vis Yahudi, atau secara umum, dipersangkakan sebagai konflik Islam dengan Kristen yang diwakili oleh Amerika dan sekutu-sekutunya di Eropa".

Apa salahnya kaum muslimin yang meyakini bahwa masalah Palestina adalah identik dengan Islam. Selama ratusan tahun kaum musliminin berjuang membebaskan Tanah Suci ini. Tahun 636 M, Khalifah Umar ibnul-Khaththab r.a. berhasil membebaskan Jerusalem dari kekuasaan Byzantium. Tahun 1187 M, prestasi itu diulangi lagi oleh Shalahudin al-Ayyubi yang merebut Jerusalem dari pasukan Salib. Kaum Zionis Israel menguasai Jerusalem Timur secara resmi tahun 1967. Apa salahnya jika kaum muslimin memandang bumi Palestina sebagai bumi kaum muslimin dan wajib diperjuangkan pembebasannya dari cengkeraman penjajah Zionis Israel. Bagi kaum muslimin, sentimen dan semangat keagamaan dalam melawan kebiadaban penjajahan, merupakan hal yang wajar dan sangat vital. Banyak kaum muslimin Indonesia dulu menilai penjajah Belanda sebagai "penjajah kafir" yang wajib dilawan dengan jihad. Kaum Liberal tidak menyalahkan semangat kaum muslimin waktu itu, bahkan banyak yang memanfaatkannya. Mengapa sekarang, ketika kaum muslimin berjuang dengan landasan Islam dan memandang masalah Palestina sebagai masalah Islam, lalu sebagian kaum liberal meributkannya?

Bahkan, yang lebih ironis, ada orang Islam yang ketakutan jika fundamentalisme Islam bangkit gara-gara konflik Israel-Palestina terus berlangsung. Sebagai contoh adalah tulisan Khamami Zada yang berjudul *"Dampak Global Konflik Israel-Palestina"* di *Republika*, 15 April 2002. Pada dasarnya, Khamami mengungkap kerisauan dan ketakutannya bahwa dampak global yang yang paling mengkhawatirkan akibat serangan Israel atas Palestina adalah terjadinya "proses radikalisasi dan militansi

umat Islam di berbagai wilayah dunia, atau suburnya fundamentalisme Islam".

Khamami selanjutnya menulis, *"Proses radikalisasi ini pada perkembangan selanjutnya membentuk karakternya menjadi fundamentalis anti-Israel dan anti-Amerika. Karakter keberislaman yang seperti ini berlangsung secara simultan tidak saja dalam wilayah sosial, tetapi juga memasuki wilayah politik dengan gagasan-gagasannya yang radikal melawan Amerika. Pada gilirannya, kondisi ini akan mempersubur fundamentalisme Islam."*

Tesis yang dibangun Khamami sangat sederhana, kebangkitan fundamentalisme Islam berarti mengancam perdamaian dunia. Tercatat dalam artikel tersebut, *"Maka, sekarang ini fundamentalisme Islam pun bisa tumbuh subur bak cendawan dengan sentimen anti-Israel dan anti-Amerika. Bukankah ini adalah dampak serius sekaligus ancaman bagi masa depan perdamaian dunia?"*

Cermatilah, betapa si penulis mengkaitkan langsung sikap anti-Israel dan anti-AS sebagai ancaman bagi perdamaian dunia. *Mafhum mukhalafah*-nya, perdamaian dunia hanya bisa terjadi jika sikap anti-Israel dan anti-AS dihilangkan. Bukankah cara pandang seperti ini sangat aneh, mengingat dunia kini dengan mata telanjang menyaksikan betapa brutalnya tindakan Zionis Israel dan AS terhadap warga Palestina? Mengapa Khamami tidak berpikir sebaliknya bahwa Israel dan AS adalah ancaman terhadap perdamaian dunia?

Yang lebih fatal adalah pendapat Khamami tentang sebab ketiga munculnya fundamentalisme Islam, yaitu *"kekeliruan dalam menafsirkan doktrin agama yang cenderung literal dan radikal"*. "Akibatnya," lanjutnya, "Corak keberagamaan yang fundamental menjadi keyakinan teologis yang diklaim sebagai cara beragama yang paling benar. Pada gilirannya kekeliruan ini menjadikan agama hanya dipahami dari sudut pandang yang sangat sempit-paradoksal; **benar-salah, Islam-kafir, dan surga-neraka.**"

Di akhir tulisannya, Khamami menyarankan, *"Umat Islam pun perlu mendefinisikan kembali ekspresi keberagamaan mereka yang lebih otentik dan genuine, toleran, antikekerasan, dan menghargai pluralisme."*

Pendapat ini sangat aneh. Bukankah tujuan diturunkannya agama oleh Allah SWT adalah untuk memahami mana yang benar dan mana yang salah, mana yang masuk kategori iman dan mana yang masuk kategori kafir, dan mana tindakan yang diberi pahala (surga) dan mana yang diancam dengan siksa neraka. Kalau orang beragama tidak lagi menempatkan hal-hal pokok seperti itu, berarti ada yang salah dalam keberagamaannya. Itu bukan soal inklusif, pluralis, atau fundamentalis. Itu adalah soal pokok dalam beragama. Karena itu, sangat aneh, ada seorang muslim yang dengan gagahnya menggugat konsep dasar dalam beragama (Islam) tersebut. Berpikir tidaklah dilarang, tetapi tidak ada gunanya mempertontonkan "kegenitan" intelektual.

Cara berpikir Khamami Zada itu sangat riskan. Sadar atau tidak, dia sudah mengikuti jargon-jargon yang dikembangkan imperialis AS dan Zionis Israel. Mengapa? Zionisme adalah ideologi yang kejam, rasialis, dan tidak berperikemanusiaan. Pada tanggal 10 November 1975, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi 3379 (xxx) yang antara lain berbunyi, "Zionisme adalah sebentuk rasisme dan diskriminasi rasial." Atas prakarsa AS, pada 16 Desember 1991, Resolusi 3379 itu dicabut oleh Majelis Umum PBB dengan perbandingan suara 111 lawan 25 dan 13 abstain.

Menurut Roeslan Abdulgani, salah satu jiwa pokok dari Konferensi Asia-Afrika Bandung, 1955, adalah jiwa anti-Zionisme. Dalam konferensi tersebut Zionisme Israel oleh banyak delegasi dikatakan sebagai *"the last chapter in the book of old colonialism, and the one of the blackest and darkest chapter in human history"*.[4]

Dalam bukunya *A Hidden Agenda of Zionism*, Ralph Schoenman juga menyebutkan bahwa Zionisme memang lebih jahat daripada kolonialisme klasik Eropa abad ke-19 dan ke-20. Kolonialisme klasik hanya melakukan eksploitasi terhadap penduduk pribumi sebagai tenaga kerja murah sambil menguras sumber daya alam negeri yang dijajahnya. Sedangkan, tujuan

---

[4] Roeslan Abdulgani, *Indonesia Menatap Masa Depan*, 1987, hal. 310-311.

dari gerakan Zionis tidak hanya mengeksploitasi penduduk pribumi dan menguasai wilayahnya, tetapi juga membuang penduduk asli dan menggantinya dengan warga Yahudi. Bahkan, Schoenman sampai membuat kesimpulan, "Sejarah Zionisme, sebagian besar ditutup-tutupi, adalah menjijikkan."[5]

Apa itu Zionisme? Dalam Kongres Zionis Pertama di Basle, Swiss, pada bulan Agustus 1897, dirumuskan, "*The aim of Zionism is to create for the Jewish people a home in Palestine secured by public law.*" Di dalam buku hariannya, Herzl menargetkan bahwa negara Yahudi itu akan terwujud pada tahun 1947. Kenyataannya, negara Israel berdiri pada 14 Mei 1948.

Pendirian negara Israel adalah wujud nyata dari Zionisme. Maka, negara Israel adalah wujud nyata dari bentuk imperialisme yang paling jahat di abad ke-20. Negara Yahudi ini dibentuk--terutama--oleh AS dengan merekayasa keluarnya Resolusi MU PBB No 181 tahun 1947, yang membagi Palestina menjadi tiga bagian (Untuk Yahudi, Palestina, dan Jerusalem ditetapkan sebagai *corpus separatum*). Sejumlah tokoh Yahudi sendiri melihat pendirian negara Yahudi di Palestina itu merupakan suatu bentuk kejahatan.

Pada 1890, ketika Theodore Herzl memulai kampanye tentang perlunya pendirian negara Yahudi, para rabbi Jerman menolak pelaksanaan Kongres Zionis di Munich, sehingga Kongres Zionis dipindahkan ke Basle, Swiss. Para rabbi ini berpandangan bahwa "mendirikan sebuah negara Yahudi di Palestina adalah bertentangan dengan janji messianik Yudaisme". Pada tahun 1930, Albert Einstein menulis, "*Terlepas dari pertimbangan-pertimbangan praktis, kesadaran saya akan esensi Yudaisme menolak gagasan sebuah negara Yahudi, dengan garis perbatasan, angkatan bersenjata, dan sebuah tindakan temporal yang berlandaskan kekuatan, bukan kerendahhatian.*"[6]

Jadi, siapa pun yang mengakui keabsahan negara Israel di Tanah Palestina, sebenarnya telah menjadi Zionis, atau setidak

---

[5] Ralph Schoenman, *Mimpi Buruk Kemanusiaan–Sisi-Sisi Gelap Zionisme*, 1998, hal. 35, 82.

[6] Roger Garaudy, *Israel dan Praktik-Praktik Zionisme*, Pustaka, Bandung, 1988, hal. 28.

nya mengakui keabsahan Zionisme. PBB sendiri dengan menerima Israel sebagai anggotanya pada 11 Mei 1949, berarti telah mengakui penjajahan Yahudi atas Palestina. PBB hanya menolak pengesahan pendudukan Israel atas Tepi Barat, Jalur Gaza, dan Jerusalem Timur, dengan mengeluarkan resolusi 242 dan 338. Ketiga wilayah itu biasa disebut sebagai wilayah pendudukan (*occupied territory*). Proposal Arab Saudi yang didukung penuh AS juga mengacu pada kedua resolusi PBB tersebut. Itu artinya sama dengan mengakui penjajahan Israel atas 80 persen wilayah Palestina.

Bukankah sebenarnya sangat keterlaluan jika Israel bersikeras mengangkangi wilayah pendudukan, yang luasnya hanya 20 persen dari wilayah Palestina? Apalagi, Israel terus membangun permukiman-permukiman Yahudi dan mengusir warga Palestina. Perundingan damai yang digelar sejak 1993 sudah gagal total. Negara Palestina yang harusnya sudah berdiri pada 4 Mei 1999, juga masih impian. Maka tidak ada jalan lain bagi warga Palestina, selain menjadi "fundamentalis", "militan", "teroris", dan meyakini bahwa jihad adalah jalan satu-satunya menghadapi Israel.

Sejak Perundingan Oslo, 1993, Israel dan AS sudah memberikan syarat kepada Arafat agar menumpas kaum fundamentalis Islam di Palestina. Pasca Perang Dingin, AS memang menggeser musuh utamanya, dari komunisme menjadi fundamentalisme—terutama fundamentalisme Islam. Tak heran, jika banyak yang "ngiler" dengan proyek penumpasan kaum fundamentalis. Pasalnya, begitu banyak dana dan anugerah yang dikucurkan kekuatan Zionis untuk proyek ini.

Dalam kasus Palestina, penumpasan fundamentalis Islam dilakukan dengan cara menggelar berbagai perundingan. Pasca 11 September 2001, kaum fundamentalis Palestina lebih sering disebut sebagai "teroris". Ada tiga organisasi pejuang Islam Palestina yang masuk daftar teroris versi AS, yaitu Hammas, Jihad Islam, dan Hizbullah. Seperti yang dilakukan Yitzak Rabin dalam Kesepakatan Oslo, dalam Perjanjian Wye River II di Sharm El-Sheikh, 5 September 1999, Ehud Barak juga mensyaratkan

penumpasan "terorisme" terhadap Israel, sebagai imbalan diserahkannya sebagian wilayah Tepi Barat.

Menyusul perjanjian itu, sejumlah tokoh Hamas dan Jihad Islam ditahan oleh otoritas Palestina. Pasca Kesepakatan Oslo, Menteri Lingkungan Israel Yoshi Sharied menyatakan bahwa Israel membantu memperkuat PLO demi melemahkan musuh-musuhnya yang juga menjadi musuh Israel, yang secara terang-terangan disebutnya Gerakan Hamas. Maka, siapa pun tak perlu heran, jika ada yang begitu bernafsu ingin menumpas fundamentalis Islam, itu jelas-jelas bagian dari proyek global AS dan Zionis Israel. Setidak-tidaknya, sejalan dengan AS dan Zionis.

B. Perburuan Islam Fundamentalis: Terlalu Silau pada Kejayaan Barat

Barat telah menang. Dunia dan umat manusia telah sampai pada akhir sejarah. Tegasnya, kata Francis Fukuyama, demokrasi liberal mungkin merupakan "titik akhir dari evolusi ideologis umat manusia" dan "bentuk final pemerintahan manusia", sehingga ia dapat disebut sebagai "akhir sejarah". Lalu, Denny JA dalam tulisannya di *Koran Tempo* (27 November 2001), menyatakan, "Dalam kultur (Barat) itu, lahir kebebasan, yang membawa demokrasi dan hak asasi menjadi gejala dunia. Dalam kultur Barat itu juga tumbuh perekonomian yang tak alang kepalang. Kesejahteraan dan kekayaan membuat hidup menjadi lebih mudah." Akhirnya, Fukuyama merumuskan, musuh bersama umat manusia adalah "Islam radikal". Belakangan, Francis Fukuyama menegaskan, *"Radical Islamist, intolerant of all diversity and dissent, have become the fascists of our day. That is what we are fighting against."* [7]

Tampaknya, berangkat dari pandangan semacam inilah, banyak orang berpikir pragmatis bahwa kalau mau maju, contohlah Barat. Kemal Attaturk di Turki dulu juga berpandangan begitu. Maka, segala sesuatu yang dipandang baik

---

[7] Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalis dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Yogyakarta, 2001, hlm. 1. Juga, *Newsweek*, Special Davos Edition, December 2001-February 2002.

dari Barat, dicontoh dan dijadikan pedoman. Jika perlu, ajaran-ajaran agama yang bertentangan dengan paham dan nilai-nilai Barat, harus diubah dan disesuaikan dengan zaman. Padahal, dunia baru pimpinan AS, saat ini penuh dengan ketidakdilan dan penindasan. Dalam artikelnya di *International Herald Tribune* (3 Januari 2002), berjudul *"America's Empire Rules an Unbalanced World"*, Prof Robert Hunter Wade, guru besar ekonomi politik di London School of Economics, mencatat bahwa posisi AS di dunia saat ini, seperti posisi Imperium Romawi (*Roman Emperor*) yang berlaku sewenang-wenang terhadap dunia. Jauh sebelumnya, Muhammad Asad (Leopold Weiss) sudah menyatakan,

> "Peradaban Barat modern tidak mengakui perlunya penyerahan manusia kepada apa pun kecuali tuntutan-tuntutan ekonomi, sosial, dan kebangsaan. Dewanya yang sebenarnya bukanlah kebahagiaan spiritual melainkan keenakan, comfort. Falsafahnya yang riil dan hidup dilahirkan dalam kemauan untuk berkuasa demi untuk kekuasaan itu sendiri. Keduanya diwarisi dari peradaban Romawi Kuno. Konsep 'keadilan' bagi Romawi adalah 'keadilan' bagi orang-orang Romawi saja. Sikap semacam itu hanya mungkin terjadi dalam peradaban yang berdasarkan pada konsepsi hidup yang sama sekali materialistik."[8]

Tapi, di tengah kritik terhadap AS dan peradaban Barat pada umumnya, ada saja di antara manusia yang mau menempatkan dirinya sebagai bagian dari misi Barat untuk menumpas "musuh-musuh Barat". Dalam hal ini adalah perburuan terhadap kaum fundamentalis. Dalam ceramahnya yang berjudul *"Beberapa Renungan tentang Kehidupan Keagamaan di Indonesia untuk Generasi Mendatang"* di Taman Ismail Marzuki Jakarta, 21 Oktober 1992, Nurcholish mengatakan,

> "Karena itu, bagaimana pun juga kultus dan fundamentalisme hanyalah pelarian dalam keadaan tidak berdaya. Sebagai sesuatu yang hanya memberi hiburan ketenangan semu atau *palliative*, kultus dan fundamentalisme adalah

---

[8] Muhammad Asad, *Islam di Simpang Jalan*, Pustaka, Bandung, 1983, hal. 35-39.

sama berbahayanya dengan narkotika. Namun, narkotika menampilkan bahaya hanya melalui pribadi yang tidak memiliki kesadaran penuh ('teler'), baik secara perseorangan maupun kelompok, sehingga tidak akan menghasilkan sesuatu "gerakan" sosial dengan suatu bentuk kedisiplinan keanggotaan para pengguna narkotika–bukan keanggotaan sindikat para penjualnya. Adapun kultus dan fundamentalisme dengan sendirinya melahirkan gerakan dengan disiplin yang tinggi. Maka, penyakit yang terakhir ini adalah jauh lebih berbahaya daripada yang pertama ... Sebagaimana mereka memandang narkotika dan alkoholisme sebagai ancaman kepada kelangsungan daya tahan bangsa, mereka juga berkeyakinan bahwa kultus dan fundamentalisme adalah ancaman-ancaman yang tidak kurang gawatnya."

Tanpa memberikan definisi yang memadai tentang "fundamentalisme", Nurcholish Madjid ketika itu sudah menabuh genderang perang dengan apa yang dia sebagai sebagai "fundamentalisme"--sebuah istilah yang sama sekali tidak dikenal dalam khazanah Islam. Karena itu, penggunaan istilah ini lebih merupakan proses "stigmatisasi" terhadap kelompok tertentu yang dicap sebagai "fundamentalis".

Di era globalisasi, *image* yang dibentuk oleh media massa jauh lebih berpengaruh ketimbang realitasnya. Masyarakat tidak mampu memahami fakta yang sebenarnya. Kampanye negatif oleh media massa Barat terhadap "Islam fundamentalis" berlangsung dalam kurun waktu yang panjang. Sebab, kelompok Islam jenis inilah yang dianggap sebagai ancaman Barat. Daniel Pipes menyebutkan bahwa "fundamentalisme Islam" seringkali dianggap sebagai ancaman terbesar bagi stabilitas regional Timur Tengah dan kepentingan-kepentingan Barat di dunia Islam yang lebih luas.[9]

---

[9] Artikel Daniel Pipes berjudul *Fundamentalist Muslims* dimuat di Jurnal *Foreign Affairs*, Musim Panas 1986–seperti dikutip oleh Esposito dalam bukunya *The Islamic Threat: Myth or Reality?*, 1992, hal. 4.

Media massa Barat juga banyak memunculkan judul-judul berita yang membangkitkan ketakutan Barat terhadap Islam. Misalnya, *"Still Fighting the Crusades"* (Perang Salib masih Berlangsung) *"The New Crescent in Crisis: The Global Intifada"* (Bulan Sabit Baru dalam Krisis: Intifadhah Global), *"Rising Islam May Overwhelm the West"* (Kebangkitan Islam akan Menenggelamkan Barat), *"The Roots of Muslim Rage"* (Akar-akar Kekerasan Kaum muslimin), *"The Islamic War against Modernity"* (Peperangan Islam melawan Modernitas), dan sebagainya.[10]

Mungkin karena pertimbangan taktis dan strategis--untuk menghindari benturan dengan "adikuasa" Barat dan sorotan negatif dari publik internasional yang sudah telanjur memandang negatif terhadap "cap" fundamentalis--maka banyak kaum muslimin yang enggan disebut sebagai kaum "fundamentalis". Bahkan, mungkin untuk mengambil hati Barat, maka ada juga yang ikut-ikutan mengutuk dan menyerang kaum fundamentalis. Namun, bukan tidak mungkin ada yang memiliki keimanan sebagaimana orang-orang Barat (sekuler) yang memandang "fundamentalisme" sebagai penghalang besar dalam mencapai kemajuan sebagaimana dicapai oleh Barat.

Kelompok-kelompok "antifundamentalisme" itu kemudian lebih suka "menafsirkan" ajaran-ajaran dan hukum-hukum Islam ke dalam bentuk yang lebih bersahabat dengan Barat. Digunakanlah berbagai istilah yang "indah" untuk menggambarkan sosok dan aktivitas mereka. Misalnya, sebutan "modernis", "pembaru", "reformis", "liberal", "progresif", dan "moderat". Sementara kaum fundamentalis mereka beri sebutan-sebutan yang berkonotasi negatif. Misalnya, "kaku", "kolot", "garis keras", "ekstrem", antiperubahan, atau antipembaruan.

Seorang "modernis" Islam di India bernama Prof. Syed, melalui sebuah tulisannya berjudul *"The Muslim Attitude: A Plea for Reorientation"* menyerukan agar kaum muslimin menerima kenyataan bahwa berjuta-juta orang di dunia—termasuk kaum muslimin--telah kehilangan kepercayaan pada agamanya dan

---

[10] *Ibid.*, hal. 4-5.

menjadi pembangkang terhadap saknsi-sanksi yang diancamkan agama. Maka, satu-satunya cara untuk menghilangkan kejanggalan itu adalah "meninggalkan Islam sebagai pandangan hidup yang lengkap" dan menyatakan dengan terbuka bahwa identifikasi agama dengan negara telah gagal dalam sejarah Islam. Juga menerima sekularisme sebagai kenyataan dan menafsirkan Islam dalam pengertian terbatas sebagaimana agama (Kristen) dipahami oleh Barat saat ini. Itulah yang disebut sebagai "Islam modern".[11]

Maryam Jameela, seorang sahabat karib Abul A'la Maududi, menyebut ajakan kepada "modernisme" semacam itu sebagai bentuk kekalahan dan pesismisme. Modernisme semacam itu, menurut Jameela, tidak akan menjadi daya tarik yang kekal, karena tegak di atas kelemahan, kegagalan, dan kompromi. Jika doktrin dan hukum Islam harus ditafsir ulang sekarang ini, maka ia akan terus-menerus ditafsirkan lagi sejalan dengan perjalanan waktu yang terus berganti. Dengan demikian, diubah dan ditafsirkan kembali sampai akhirnya musnah sama sekali. Jameela juga menyamakan "modernisasi" dengan "westernisasi" yang diibaratkannya sebagai "kanker", yang tumbuh merambat menghancurkan jaringan-jaringan yang sehat maupun yang sakit. Modernisasi dunia Islam merupakan satu-satunya rintangan terbesar untuk menyebarluaskan Islam.[12]

Di era globalisasi yang masih didominasi oleh media Barat, tentu saja sulit bagi kaum "fundamentalis" untuk membangun citranya dengan baik. Sebaliknya, kaum "modernis" atau "kaum liberal" yang "lebih bersahabat" dengan Barat, sekurangnya "tidak anti-Barat", lebih mendapatkan kesempatan untuk berkembang dan mensosialisasikan gagasan-gagasan dan pemikirannya kepada masyarakat. Selain karena dukungan Barat, peluang yang lebih besar bagi kaum "modernis" itu juga didukung oleh pemerintah di negeri-negeri muslim yang kebanyakan masih tergan-

---

[11] Seperti dikutip oleh Maryam Jameela dalam tulisannya berjudul "*Seruan Islam kepada Manusia Modern*" (dimuat dalam buku *Benturan Barat dengan Islam)*, Bandung, 1993, hal. 102-103.

[12] *Ibid.*, hal. 103-104.

tung pada Barat dalam berbagai aspek (politik, militer, maupun ekonomi).

Dalam kancah opini global yang berkembang saat ini, sebutan "fundamentalis" Islam memang cenderung berkonotasi negatif. Bahkan, dalam berbagai kasus, "fundamentalis" identik dengan "teroris". *Image* negatif terhadap sebutan "fundamentalis" itu diperparah lagi dengan berbondong-bondongnya kaum cendekiawan muslim untuk mengadopsi istilah "fundamentalis" dan "fundamentalisme" beserta kriterianya, sebagaimana diungkap oleh para pakar Barat. Karena itulah, jarang sekali kaum muslimin yang senang dan merasa nyaman mendapat sebutan "fundamentalis". Kalau pun mau disebut "fundamentalis", maka biasanya mereka akan mengikutinya dengan "kriteria" yang dibuatnya sendiri.

Dalam wacana publik yang didominasi media massa Barat dan sekuler, istilah "modernisme" dan "fundamentalisme" sudah menjadi tidak netral lagi. Kantor-kantor berita Barat maupun banyak media massa di negeri muslim, sudah terbiasa menggunakan istilah "Islam modernis", "Islam moderat", dan sebagainya, dalam arti yang "positif". Modernisme dianggap merupakan usaha untuk mengadaptasikan Islam ke dalam nilai-nilai modern dan *up to date*. Sebaliknya, istilah "fundamentalisme" digunakan untuk menyebut gerakan-gerakan Islam "berhaluan keras" seperti di Libya, Aljazair, Iran, dan Lebanon. Akibat penggunaan istilah itu secara sederhana oleh media massa, maka pengertian "kaum fundamentalis muslim" kini cenderung diartikan sebagai kelompok Islam yang berjuang mencapai tujuannya dengan cara-cara kekerasan. Bagi media massa Barat, "fundamentalisme Islam" identik dengan "Islam yang kejam", "Islam yang terbelakang", dan sejenisnya.

Apalagi istilah "fundamentalis" itu sendiri tidak ditemukan dalam khazanah Islam. Istilah "modernisme" maupun "fundamentalisme" dimunculkan oleh kaum akademisi Barat dalam konteks sejarah keagamaan dalam masyarakat mereka sendiri. "Modernisme" pada awalnya diartikan sebagai aliran keagamaan yang melakukan penafsiran terhadap doktrin agama Kristen

untuk menyesuaikannya dengan perkembangan pemikiran modern. Sedangkan, "fundamentalisme" diartikan sebagai reaksi terhadap modernisme. "Fundamentalisme" dianggap sebagai aliran yang berpegang teguh kepada "fundamen" agama Kristen melalui penafsiran terhadap kitab suci agama itu secara *rigid* dan literalis.[13]

Kamus Larous Kecil mendefinisikan "fundamentalisme" sebagai sikap mereka yang menolak menyesuaikan kepercayaan dengan kondisi-kondisi yang baru. Dalam Kamus Larous Besar, "fundamentalisme" adalah sikap stagnan dan beku yang menolak seluruh perkembangan. Sedangkan Kamus Larous tahun 1987 menyebut "fundamentalis" sebagai sikap sebagian orang Katolik yang menolak seluruh kemajuan, dan hanya menisbatkan diri mereka kepada warisan lama. Ilmuwan Prancis, Roger Geraudy, menyatakan bahwa "fundamentalisme" adalah antitesa bagi "sekularisme". Geraudy termasuk ilmuwan yang terjebak dalam melakukan generalisasi konsep "fundamentalisme" Kristen untuk menganalisis fenomena sejenis di masyarakat muslim.[14]

Prototipe pemikiran yang menjadi ciri khas fundamentalisme di Barat adalah penafsiran Injil dan seluruh teks agama secara literal. Juga menolak seluruh bentuk penakwilan terhadap teks mana pun, walaupun teks-teks itu berupa metafor-metafor rohani dan simbol-simbol sufistik. Dengan model penafsiran literal seperti itu, kaum fundamentalis Protestan mempercayai akan datangnya Almasih kembali secara fisik untuk mengatur dunia selama 1000 tahun. Gerakan fundamentalisme Kristen di awal-awal abad ke-20 juga menggelar berbagai seminar dan mendirikan sejumlah organisasi. Yang paling menonjol adalah Organisasi Kitab Suci yang pada tahun 1902 telah mempublikasikan 12 buku dengan judul *Fundamentals.* Buku ini berisikan pembelaan penafsiran secara literal. Organisasi lainnya adalah

---

[13] Lihat Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Paramadina, Jakarta, 1999, hal. 5.

[14] Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, GIP, Jakarta, 1999, hal. 25-26.

Fundamental Kristen Internasional yang didirikan tahun 1919.[15]

Dalam bahasa Arab maupun wacana pemikiran Islam, tidak ditemukan istilah yang tepat untuk menggambarkan fenomena "fundamentalis" sebagaimana yang terjadi di dunia (Kristen) Barat. Dalam bahasa Arab, istilah "fundamentalisme" diterjemahkan menjadi *"ushuliyah"*. Sedangkan, kaum fundamentalis dikatakan sebagai *"ushuliyun"*. Menurut Imarah, di dalam Islam tidak ditemukan satu mazhab atau aliran pun yang memahami teks-teks Al-Qur`an dan Sunnah secara literal dan menolak takwil terhadap seluruh nash. Bahkan, mazhab Dawud Dhahiri juga tidak menolak takwil. Hanya saja yang berbeda adalah kadar takwil. Ahmad bin Hanbal tercatat sebagai tokoh yang paling sedikit menggunakan takwil. Sedangkan, yang terbanyak menggunakan takwil adalah kelompok Muktazilah. Karena itulah, tidak ada satu mazhab atau aliran pun dalam Islam yang dapat dikategorikan sebagai "fundamentalis" dengan pengertian dan ciri-ciri Barat.[16]

Menyusul bubarnya Uni Soviet, perspektif pendekatan "idealis"--dalam menelaah hubungan khusus Israel dan AS--menemukan dimensi baru dalam menentukan "musuh bersama", yaitu bangkitnya Islam fundamentalis. Edward N. Luttwak dalam tulisannya berjudul *"Strategic Aspecs of U.S.--Israeli Relations"*, menyebutkan bahwa saat ini para pembuat kebijakan di AS dan Israel cenderung merasa bahwa Islam fundamentalis adalah ancaman terhadap elite-elite Barat di negara-negara Islam. Juga terhadap kepentingan-kepentingan keduanya (dan negara-negara Barat lainnya) di negara-negara Islam, bahkan di negara masing-masing.[17]

Harian *Kompas* termasuk yang rajin menurunkan tulisan dari kalangan kaum muslimin yang "memojokkan" kaum fundamentalis. Bahkan, terkadang, ada penulisan berita yang kabur maknanya, antara "teroris" dengan "fundamentalis" atau "militan". Sebagai contoh, *Kompas* (31 Januari 2002) menurunkan berita

---

[15] *Ibid.*, hal. 11-12.
[16] *Ibid.*, hal. 14-17.
[17] Gabriel Sheffer, *US-Israeli Relations at The Crossroad*, 1997, hal. 209.

yang diberi judul "AS Mulai Perang *Terorisme* di Filipina". Di situ tertulis kata-kata sebagai berikut, "Pasukan Amerika Serikat (AS) membuka front baru dalam memerangi *terorisme*. Kamis (31/1), mereka mulai menggelar operasi yang dirancang untuk memberi pelatihan memerangi *kelompok militan*." Jadi, berita itu mengaburkan makna, apakah yang diperangi oleh AS itu "teroris" atau "militan"?

Pasca Perang Dingin, genderang perang melawan fundamentalisme agama kian nyaring ditabuh. Momentum perburuan "teroris" oleh AS yang kadangkala bergeser menjadi perburuan kaum pejuang muslim atau muslim militan, memberikan momentum yang pas, bagi aksi penumpasan kaum fundamentalis. Sebab, pada tataran opini publik, kini makna "militan" identik dengan makna "fundamentalis" atau "teroris". *Kompas* (1 Februari 2002), misalnya, menurunkan dua artikel yang "menyerang" kaum fundamentalis.

Artikel pertama ditulis oleh Abd A'la, berjudul "*Kekerasan 'Sumbangan' Modernisasi dan Fundamentalisme Agama*". Abd A'la menyimpulkan bahwa selain sebagai dampak modernisasi, kekerasan juga dipicu fundamentalisme agama. Gerakan fundamentalis merupakan fenomena global yang nyaris ada pada semua agama, masing-masing dengan karakteristiknya sendiri.

Penulis lain, M. Alfan Alfian M, dalam tulisannya berjudul *Momentum Kebangkitan Islam Moderat*, mencatat bahwa karena lebih mendahulukan "*nahi munkar*", maka gerakan-gerakan kaum fundamentalis-radikal lebih massif dan cenderung memakai kekerasan. Hal itu terpaksa dilakukan dengan dalih demi memberantas kejahatan dan kemaksiatan. Alfan menulis, "*Persoalannya adalah bagaimana penegakan hukum dilakukan di Indonesia, sehingga kelompok-kelompok fundamentalis-radikal tidak bertindak sendiri, yang mesti didasari niat baik, tetapi tetap melanggar hukum positif di Indonesia.*"

Wacana tentang fundamentalisme agama telah lama berkembang. Namun, setiap kali wacana ini diungkapkan, maka seketika itu pula muncul persoalan bias ketegoris, baik pada level wacana maupun pada level aplikasi di lapangan. Indikasi yang

dibuat Alfan tentang "fundamentalisme radikal", misalnya tentang penggunaan kekerasan untuk memberantas kejahatan/ kemaksiatan, mengarah pada kelompok-kelompok Islam tertentu seperti FPI dan Laskar Jihad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal faktanya, "penggunaan kekerasan untuk memberantas kemaksiatan" juga dilakukan di berbagai tempat.

Di kawasan Puncak, Parung, Tasikmalaya, Ngawi, dan sebagainya, aksi-aksi seperti itu berulangkali terjadi. Masyarakat tidak perlu menjadi "fundamentalis" untuk melakukan hal-hal itu. Bahkan, jika dicermati, aksi-aksi pembantaian oleh massa terhadap maling ayam, pencuri sepeda motor, dan sejenisnya, hampir terjadi setiap hari. Mereka tidak perlu menjadi fundamentalis untuk melakukan berbagai aksi penumpasan kemaksiatan tersebut.

Kenyataannya, di tengah masyarakat, istilah "fundamentalis" lebih merupakan istilah "politik" dan sebagai alat propaganda imperialis Barat untuk memojokkan "lawan-lawannya", khususnya dari kalangan Islam. Dalam hal ini media massa lebih berperan dalam menyebarkan makna ke tengah masyarakat.

Sebagai contoh, pada tanggal 16 April 1994, koran *Suara Pembaruan*, menurunkan berita berjudul *"Perang Saudara Ancam Aljazair"*. Tertulis di situ, *"Awal dari sengketa berdarah itu adalah dua tahun yang lalu ketika sebuah partai **fundamentalis** Front Penyelamatan Islam memenangkan mayoritas pada putaran pertama pemilihan bebas untuk parlemen tahun 1991... Kebanyakan pembunuhan dalam 24 bulan terakhir dilakukan **oleh kaum fundamentalis** dan diarahkan terhadap golongan intelektual dan pejabat."*

Persepsi publik yang ingin dibangun dari berita seperti itu adalah, bahwa FIS adalah fundamentalis dan biadab. Sehingga, dunia nyaris tak bereaksi apa pun ketika kelompok ini diberangus militer Aljazair dengan dukungan Barat. Kasus serupa terjadi pada Taliban di Afghanistan. Istilah-istilah "fundamentalis" seperti itulah yang selama ini banyak digunakan oleh media Barat untuk memberi julukan kepada kelompok-kelompok yang melakukan aksi-aksi kekerasan dalam memperjuangkan tuntutannya. Persepsi publik yang terbangun

bahwa "fundamentalis adalah jahat", akan sangat sulit jika dibawa ke dalam wacana akademis.

Kategorisasi pada level akademis akan menjadi lebih rumit jika dikaitkan dengan "kategorisasi realitas opini". Misalnya, dalam "Catatan Pinggirnya" di Majalah *Tempo*, 27 Januari 2002, Gunawan Muhammad menutup tulisannya dengan kalimat, "Fundamentalisme memang aneh dan keras serta menakutkan. Ia mendasarkan diri pada perbedaan, tetapi pada gilirannya membunuh perbedaan." Dalam pidatonya di TIM, 21 Oktober 1992, Nurcholish Madjid mengatakan, "Kultus dan fundamentalisme adalah sama berbahayanya dengan narkotika." Lalu, dalam disertasinya, Yusril Ihza Mahendra menyimpulkan bahwa Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Islami adalah fundamentalis.

Cobalah gabungkan kesimpulan Goenawan Mohamad, Nurcholish Madjid, dan Yusril Ihza Mahendra yang sama-sama menggunakan istilah "fundamentalis". Apakah tokoh-tokoh seperti Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Yusuf Qaradhawi, Abul A'la Maududi, Ahmad Yassin, dan sebagainya, pantas dicap "sama bahayanya dengan narkotika" dan "menakutkan", sehingga harus diberantas?

Kerancuan itu akan semakin menjadi-jadi jika ketagorisasi "fundamentalis" hanya didasarkan pada satu atau dua aksi bercorak kekerasan, dengan menafikan sederet aktivitas damai lainnya. Simaklah, misalnya, aktivitas Laskar Jihad, yang begitu banyak membangun pesantren, sekolah, poliklinik, dan berbagai institusi media massa. Tengoklah jadwal Habib Riziq Syihab yang begitu padat mengisi pengajian dari kampung ke kampung. Hanya sesekali saja, komandan FPI ini turun ke jalan melakukan aksi protes menentang kemaksiatan, kenaikan tarif listrik dan harga BBM, atau aksi-aksi menentang serangan AS ke Afghanistan.

Apakah karena satu dua aksi merusak tempat-tempat maksiat lalu FPI bisa dikategorikan sebagai "fundamentalis-radikal"? Kalau begitu, bagaimana dengan berbagai satgas parpol yang juga berwajah dan berperilaku "militer" yang terkadang melakukan pendudukan terhadap kantor media massa? Apakah mereka juga masuk fundamentalis-radikal? Bagaimana dengan

rakyat yang seringkali tidak memberi ampun pada maling-maling kecil?

Mengaitkan faktor kekerasan dengan fundamentalisme agama juga terlalu naif. Rezim-rezim biadab di berbagai belahan bumi, seperti Rezim Reza Pahlevi, Marcos, Apartheid Afsel, Pinoche, dan sebagainya, bukanlah pengikut "fundamentalis". Mereka adalah rezim sekuler. Rezim di Israel yang kejam juga bukan pengikut Yahudi fundamentalis atau ortodoks. Presiden George W. Bush yang tega membunuhi anak-anak dan warga sipil Afghan, Irak, Palestina, dan sebagainya, juga bukan fundamentalis Kristen.

Karena itu, sangat naif jika ada yang melakukan "stigmatisasi" dengan mengidentikkan aksi "kekerasan" dengan "fundamentalis". Membandingkan "kejahatan Osama bin Laden" dengan "kejahatan AS" adalah seperti membandingkan "bumi dengan langit". Osama bin Laden dituduh melakukan pembunuhan beberapa ribu orang, dengan merujukkan aktivitasnya pada beberapa dalil agama. Kelompok yang sering disebut sebagai "fundamentalis" seperti Hammas dan Jihad Islam di Palestina, melakukan berbagai aksi kekerasan karena mereka yakin bahwa tidak ada jalan lain untuk memperjuangkan kemerdekaan negerinya, kecuali melalui cara "kekerasan".

Dalam bukunya yang sangat terkenal, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order* (1996:215), Huntington mengungkap hasil polling di AS, November 1994, yang mengungkapkan, 33 persen publik AS melihat "Islam fundamentalis" sebagai ancaman. Di kalangan pimpinan AS, jumlahnya malah 39 persen. Dalam polling lain yang melibatkan 35.000 responden yang peduli pada kebijakan politik luar negeri AS, 61 persen responden menyatakan bahwa "Islamic revival" sebagai ancaman bagi AS.[18]

Karena wacana fundamentalisme--terutama dalam masyarakat muslim--begitu bias dan *debatable*, ada baiknya para analis

---

[18] Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, 1996, hal. 215.

tidak terjebak dalam bias opini yang sudah berkembang jauh sebelumnya di AS, tanpa mau mendalami persoalannya secara komprehensif. Jangan sampai "pena" yang begitu tajam digunakan untuk melakukan kezaliman terhadap sesama muslim. Ingat, "pena ulama" bisa lebih tajam dari "pedang". Maka, kekerasan melalui "pena" justru bisa lebih jahat daripada sekadar kekerasan melalui "pedang".

C. Perburuan Islam Fundamentalis: Proyek Amerika Usulan Zionis Israel

Setelah tragedi 11 September 2001, kebijakan politik Amerika Serikat (AS) terhadap "Islam militan" semakin terbuka kepada publik. Pemerintah AS tidak lagi menyembunyikan permusuhannya kepada Islam militan, Islam fundamentalis, atau dalam istilah AS saat ini, lebih banyak disebut sebagai "teroris". Perburuan teroris itu tidak hanya dilakukan di dalam negeri AS, tapi juga di Eropa, Timur Tengah, dan Asia.

Dalam kasus penyerangan brutal Israel terhadap rakyat Palestina (Maret-April 2002), negara-negara Barat di bawah pimpinan Amerika bersikap pasif dan hanya melakukan kecaman-kecaman semata. Meski AS dan PBB mengecam tindakan brutal Israel, mereka tidak memberikan ancaman sanksi atau *persiapan militer* apa pun seperti yang dilakukan terhadap Irak dan Afghanistan.

Yang justru terjadi adalah di tengah negara-negara besar itu--khususnya AS--melakukan "solidaritas kecaman", AS via PBB melakukan tindakan nyata dengan menyetop dana masuk untuk "teroris". Dengan kesepakatan itu, maka menyediakan atau mengumpulkan dana untuk melakukan serangan teroris akan resmi menjadi aksi kriminal. Konvensi Internasional untuk Menekan Pembiayaan Terorisme ditandatangani oleh 132 negara.[19]

Hamas--gerakan Islam militan di Palestina yang banyak melakukan aksi bom syahid ke Israel--adalah salah satu yang disebut PBB/AS sebagai teroris, selain Al-Qaida, Jihad Islam,

---

[19] *Republika*, 11 April 2002.

Jamaah Islamiyah, dan lain-lain. Jadi dalam tindakan politik riil, di balik pernyataan formal, Amerika saat ini justru telah membantu Israel dengan menutup rekening-rekening dana yang masuk ke Hamas!

Tanda-tanda AS main mata dengan Israel dalam perburuan terorisme itu bisa dilihat juga sebelumnya. Yaitu, ketika Presiden Bush dan Menteri Pertahanan AS Donald Rumsfeld bersama-sama mengecam aksi bom syahid Muslimin Palestina. "*Murderers are not martyrs...A whole generation of young people is being taught something that is totally inconsistent with that religion,*" kata Donald Rumsfeld yang *sok tahu* terhadap Islam. Sedangkan, Bush menyebut aksi bom syahid itu sebagai "*simple terror*".[20]

Apakah pemerintah Amerika memang kini sedang memburu Islam Militan (kaum Islamis)? Guru Besar *Sarah Lawrence College*, Fawaz A Gergez menganalisis, meski pemimpin-pemimpin AS menolak hipotesis *clash of civilization*, tapi kebijakan Amerika pasca perang dingin tampak dipengaruhi oleh ketakutan adanya "ancaman kaum Islamis" (*Islamist threat*). Dalam pandangan Amerika, beberapa kaum Islamis menampakkan retorika dan program yang menakutkan. Tapi, di samping itu kaum elite AS juga melihat adanya kelompok-kelompok Islam yang "baik" yang apolitis, moderat, dan pro-Barat seperti pemerintah Saudi, Mesir, Tunisia, Turki, Pakistan, Malaysia, dan Indonesia.[21]

Kebijakan pemerintah AS yang "paranoid" terhadap kaum Islamis ini mungkin juga dipengaruhi oleh pandangan warga negaranya. Pada tahun 1990, sebuah polling yang ditujukan ke warga Amerika yang plural, menghasilkan pandangan terhadap Islam yang "negatif". Polling itu menyimpulkan, "Orang-orang muslim cenderung fanatik dan agama Islam adalah agama yang antidemokrasi."[22]

---

[20] *BBC News*, 1 April 2002.

[21] Fawaz A Gerges, *America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests*, Cambridge University Press, 1999. hal. 4.

[22] *Ibid.*, hal. 8. Poling ini dilaksanakan oleh Survei Roper (Juli 1993), Koran *Los Angeles Times* (1993), Survei bersama antara American Muslim Council dan Zogby Group (1993), Gallup (Oktober 1994) dan Survei American Arab Institute (1995).

Dengan kata lain, bagi rakyat Amerika (non Islam), Islam dilihat sebagai sebuah kebudayaan yang antagonis dan sebagai sebuah ancaman bagi kepentingan dan nilai-nilai kebudayaan mereka.

Sikap kaum intelektual Amerika terhadap kelompok Islam politik, dibagi dua oleh Gerges. Yaitu, kelompok konfrontasionis dan kelompok akomodasionis. **Kelompok konfrontasionis** adalah kelompok cendekiawan yang menggolongkan Islam--yakni kelompok Islam fundamentalis--seperti kelompok totalitarian komunis yang antidemokrasi dan sangat anti-Barat. Intelektual yang berpandangan seperti ini di antaranya adalah Bernard Lewis dan Gilles Kepel. Bisa ditambahkan juga William B Liddle dan Samuel P. Huntington.

Huntington, bahkan menyimpulkan Islam secara intrinsik adalah nondemokratis. Menurutnya, negara Arab yang melanjutkan demokrasi hanya Libanon pada periode Kristen Libanon. "Bila muslim menjadi mayoritas, maka demokrasi di Libanon akan kolaps," kata Huntington.[23]

Kaum intelek konfrontasionis ini menganggap bahwa pertarungan antara Islam dan Barat tidak hanya pada kepentingan politik dan materi, tapi merupakan *clash* kebudayaan dan peradaban. Islam dinyatakan akan menggantikan komunisme sebagai ancaman utama paska perang dingin. *"The new threat is as evil as the Old Evil Empire,"* kata Charles Krauthammer, ilmuwan AS lainnya. Pendapat yang hampir serupa juga dinyatakan secara eksplisit oleh Huntington.

Terhadap Islam, beberapa ilmuwan Amerika (seperti Indyk, Kirkpatrick, dan Miller), berkesimpulan sebagai berikut. **Pertama**, orang Arab atau muslim telah diberi peluang untuk memilih pemerintahan secara bebas tetapi mereka memilih pemerintahan otokrasi. **Kedua**, Islam politik secara alamiah adalah antidemokrasi dan anti-Barat. **Ketiga**, tidak seperti kelompok masyarakat lainnya, kaum muslimin tidak siap untuk

---

[23] *Ibid*, hal. 22. Pernyataan ini dalam Samuel Huntington, ***Religion and The Third Wave***, The National Interest (Summer 1992), hal. 41.

demokrasi. Keempat, pembangunan rejim yang otoriter adalah pilihan lebih baik dari pilihan jelek dua setan (*the least of two evils* --maksudnya setan yang lainnya adalah Islam fundamentalis--pen) dan karena itu AS mesti terus menyokong rezim yang otoriter itu. "Jadi meskipun banyak kaum konfrontasionis merasa pemerintahan Timteng memperlakukan rakyatnya secara buruk, tapi rezim-rezim itu telah membantu AS untuk menetralisir Islam radikal--Islam politik--dan juga melindungi kepentingan AS," kata Gerges.

Bahkan intelektual Prancis, Maxime Rodinson menyatakan bahwa kaum Kristen Barat melihat Dunia Islam sebagai sebuah bahaya sebelum mereka melihat problem sebenarnya. Sejarawan Inggris, Albert Hourani melihat Islam adalah agama yang salah dan Muhammad bukan Nabi serta Islam dikembangkan dengan pedang.

Menurut penulis Israel, Haim Baram, sejak hancurnya Uni Soviet dan komunisme, pemimpin-pemimpin Israel telah mengusulkan kepada AS dan Eropa untuk berperang melawan Islam fundamentalis. Awal 1992, Presiden Israel Herzog di depan parlemennya menyatakan, "Penyakit (Islam Fundamentalis) sedang menyebar secara cepat dan merupakan sebuah bahaya tidak hanya untuk masyarakat Yahudi, tapi juga bagi kemanusiaan secara umum." (*The Guardian*, 19 Juni 1992).[24]

Dalam kunjungan-kunjungannya ke AS, PM Yitzak Rabin seringkali menggunakan istilah "bahaya Islam" (*Islamic Peril*) untuk meyakinkan warga Amerika bahwa Iran adalah sama bahayanya dengan Moskow di waktu lalu. Mantan PM Shimon Peres juga menyatakan, "Setelah tumbangnya komunisme, fundamentalisme telah menjadi bahaya paling besar bagi kita." Peres juga menyebut ancaman fundamentalisme Islam itu seperti perang melawan setan Nazisme dan Komunisme.

Menurut pejabat senior Departemen Pertahanan AS, pendapat-pendapat pemimpin Israel tentang Islam itu sangat mempengaruhi pejabat-pejabat AS. Politik luar negeri Amerika,

---

[24] *Ibid*, hal. 52. Pernyataan ini dalam Haim Baram, "*The Demon of Islam*", Middle East International, 2 Desember 1994, 2 Desember 1994, hal. 8.

menurut mantan anggota Kongres AS Paul Findley, memang banyak dipengaruhi oleh lobi Israel. Pengamat terkemuka AS, William Quandt mengakui, sebagian besar kebijakan politik AS menyangkut konflik Arab Israel dirancang oleh Israel atau para loyalisnya. Menurut Quandt, dalam setiap diskusi untuk mengambil keputusan menyangkut Timur Tengah, Israel atau para loyalisnya selalu diberi peluang memberi pengaruh terhadap suatu keputusan yang akan diambil.[25]

Hal yang sama juga diungkap mantan pejabat tinggi di Deplu AS, Arthur Lowrie. Menurutnya, para loyalis Yahudi berada di balik pemerintahan Bill Clinton dalam sanksi ekonomi terhadap Iran tahun 1995 dan tindakan keras terhadap gerakan-gerakan Islam politik. Selain itu, pemerintah AS juga senantiasa menentang keras upaya negara-negara Islam untuk memperoleh senjata nonkonvensional atau senjata pemusnah massal. Karena Amerika terus menekan Cina, Rusia, dan Korea Utara agar tidak mengekspor teknologi senjata nonkonvensional itu ke negara-negara Iran, Irak, Libya, Suriah, Sudan, dan lain-lain.

Intelektual Akomodasionis. Kaum Intelektual akomodasionis AS menolak anggapan kaum konfrontasionis bahwa kaum Islamis adalah inheren anti-Barat dan antidemokrasi. Mereka membedakan antara aksi-aksi politik kelompok Islamis dan kelompok minoritas ekstremis Islam. Di antara intelektual yang kritis kepada pemerintah AS dan bersikap akomodatif terhadap Islam, adalah John L. Esposito, Noam Chomsky, dan Leon T. Hadar.

Menurut Esposito, gambaran ancaman Islam yang monolitik baik di masa lalu maupun sekarang, yang terjadi di Barat, telah memisahkan realitas sejarah muslim sebenarnya. Islam sesungguhnya jauh dari antidemokrasi dan selain itu timbul perbedaan interpretasi--di kalangan muslim sendiri--tentang demokrasi dan diktator, republik, dan monarki. Juga tentang kelenturan terhadap norma-norma tradisi Islam.[26]

---

[25] *Kompas*, 21 November 2001.
[26] Fawaz A Gerges, *op cit* hal. 29.

Kaum akomodasionis juga mempertanyakan komitmen Barat terhadap pemerintahan Islam yang menerapkan demokrasi. Robin Wright di *Los Angeles Times* menyindir sikap pemerintahan George Bush (senior) yang dijuluki "polisi dunia" pada demokrasi yang terjadi Aljazair. Ia mempertanyakan kenapa Bush berdiam diri terhadap penundaan proses demokrasi Aljazair (pembatalan pemilu karena dimenangkan oleh FIS) padahal di mana-mana AS aktif melakukan kampanye pluralisme. Intelektual lain, Jochen Hippler mengkritik kebijakan Barat yang menentang *"Islamic Bomb"* karena ketakutan pada negara dunia ketiga yang mencoba keluar dari dominasi negara *super power*.

Selain itu, kaum akomodasionis melihat bahwa Islam politik adalah produk dari tekanan yang keras pada bidang politik dan sosial ekonomi. Islam bukanlah sebuah ideologi yang radikal utopis, sebagai anggapan kaum konfrontasionis. Mereka menyatakan bahwa gerakan-gerakan Islam dengan variasi yang berbeda, didasari motivasi untuk pembebasan dari tekanan politik dan ekonomi. Kelompok Islamis ini memang menentang terus berlangsungnya dominasi Barat pada dunia Islam. Mereka juga mengkritik kebijakan Washington yang mendukung rezim di Timur Tengah yang korup dan represif. Di samping juga dukungan AS untuk Israel, yang menyebabkan muslim di dunia ini menentang habis-habisan Amerika.

Intelektual akomodasionis ini malah menyarankan pemerintahan AS untuk tidak menentang penerapan hukum Islam atau gerakan-gerakan aktivis Islam, selama program mereka tidak mengancam kepentingan vital Amerika. "Kaum Islamis yang dominan sekarang ini, merepresentasikan sebuah tantangan daripada ancaman kepada AS dan konco-konconya di Timur Tengah," kata Gerges.[27]

Pendapat para intelektual akomodasionis dengan konfrontasionis memang seringkali bertentangan. Dalam serangan Amerika ke Afghanistan, Noam Chomsky salah seorang intelek-

---

[27] Fawaz A. Gerges, *op.cit.* hal. 32

tual akomodasionis, mengecamnya. Profesor Linguistik dari AS ini menyarankan Amerika lebih mengevaluasi kebijakan luar negerinya dan memahami kemarahan Usamah atau Dunia Islam daripada main bom-boman.

Chomsky menyatakan,

"Seperti pihak-pihak lain di kawasan ini, Bin Laden juga meradang karena dukungan panjang AS atas pendudukan brutal militer Israel yang sekarang memasuki tahun ke-35. Yakni, intervensi diplomatik, militer, dan ekonomi yang menentukan dari Washington; mendukung pembantaian, serangan yang keji dan destruktif selama bertahun-tahun. Dan seperti yang lain, Bin Laden membedakan (mengecam -pen) dukungan yang diberikan Washington dalam kejahatan-kejahatan tersebut dengan serbuan AS-Inggris terhadap warga sipil Irak. Serbuan yang telah menghancurkan masyarakat dan menyebabkan ratusan ribu orang tewas, sedang mereka terus memperkuat Saddam Hussein--yang menjadi sahabat baik dan sekutu AS-Inggris dalam melakukan tindakan-tindakan kejam termasuk pemusnahan suku Kurdi. Ini merupakan tindak kekejaman yang tidak mungkin terlupakan oleh rakyat di kawasan itu, meskipun seandainya Barat memilih untuk melupakannya. Sentimen tersebut sangat tersebar luas."

Dalam wawancara dengan radio B92 Belgrade itu, Chomsky mengkritik pemerintahan AS yang tidak mau secara rumit-rumit memahami latar peristiwa 11 September itu. Lanjutnya, "AS dan kebanyakan negara Barat, lebih suka mendengar versi yang lebih menyenangkan. Mengutip analisis utama *New York Times* (edisi 16 September 2001), para pelaku kejahatan itu bertindak atas dasar "kebencian pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi di Barat, seperti kebebasan, toleransi kesejahteraan, pluralisme agama, dan hak pilih."[28]

Uraian Chomsky ini memang sangat berbeda dengan uraian-uraian yang dikemukakan para pakar politik AS lainnya,

---

[28] Noam Chomsky, *"Maling Teriak Maling : Amerika sang Teroris?"*, 2001. hal. xvi.

misalnya komentar Pakar Politik dari Universitas Ohio, William Liddle. Bila Chomsky memaparkan aksi 11 September itu agar pemerintah Amerika "mengevaluasi" kebijakan-kebijakan luar negerinya, Liddle melihat kejadian hancurnya WTC dan Pentagon itu sebagai perang terhadap AS.[29]

Dengan kata lain, Lidlle sebenarnya ingin mengatakan perang harus dibalas dengan perang. Begitu pula Indonesianis lainnya, Donald K. Ammerson yang juga menyetujui dilancarkannya perang ke pemerintah Afghanistan--karena dianggap melindungi Usama bin Laden dan jaringan Al Qaida-nya.

Intelektual konfrontasionis, Emmerson, menyangkal pendapat Chomsky dengan menyatakan, "Pembantaian September bukanlah usaha perdebatan soal kebijakan luar negeri. Itu usaha membuat keganasan... Namun, apa yang terjadi di AS pada 11 September pun membutuhkan jawaban militer."[30]

Bahkan Emmerson, saking semangatnya membela perang biadab AS ke Afghan itu, sengaja membolak-balik pernyataan Usamah--yang sebenarnya Usamah menyatakan tidak memusuhi rakyat AS, tapi memusuhi pemerintah, pendukungnya, dan militer AS--dengan pernyataan, "Jika Usamah sungguh menginginkan perubahan kebijakan Amerika, ia tak akan menghasut pemusnahan warga AS dari muka dunia." Padahal Usamah tidak pernah menyatakan hal itu, apalagi memusnahkan kaum musliminin AS.

Meski media-media Barat atau media cetak Indonesia yang pro-Barat mencoba terus menerus menampilkan analisis-analisis imuwan model "Liddle dan Emmerson", tapi Chomsky tetap banyak penggemarnya. Intelektual kritis lainnya, John L. Esposito, Guru Besar dari *Georgetown University*, juga mendapat simpati dari kalangan muslim.

Dalam masalah Afghan ini, Esposito menulis artikel menarik yang di-*publish* oleh situs *Islamonline.net*. Di situ ia membuat tulisan ringkas menarik yang berjudul, "*America's New Crisis:*

---

[29] *Radio BBC*, 12 September 2001.

[30] *Majalah Tempo*, 21 Oktober 2001.

Understanding the Muslim's World."

Di artikel itu, Esposito memaparkan bahwa setelah peristiwa 11 September, terjadi perbenturan peradaban Barat dan Islam. Yang menarik ia membuat pertanyaan, "Mengapa umat Islam membenci kita (*Why do they hate us*)?" Esposito menjawab sendiri, "Adalah waktunya kita menyadari bahwa mereka melihat lebih banyak dari yang kita lihat. Anti-Amerika tidaklah muncul hanya karena fanatisme yang luar biasa terhadap agama yang diyakininya, tapi juga karena frustasi dan marah melihat dominasi politik Amerika di dunia muslim. Tidak seperti yang lalu-lalu, kini mereka menyaksikan tiap hari kekejaman dan kekerasan yang brutal di Palestina. Israel menggunakan senjata-senjata yang dipasok oleh AS dalam aksinya itu, seperti pengunaan pesawat F16 dan Helikopter Apache oleh Israel."

Esposito juga menyatakan bahwa kebijakan luar negeri AS selama ini sangat mengecewakan dunia Islam, baik di Kosovo, Kashmir, Chechnya, maupun Bosnia. Akhirnya, berlawanan dengan Emmerson, Esposito menyarankan agar AS menguji kembali kebijakan luar negerinya. *"Therefore, it is critical to adopt a long as well as short-term strategy based on a reexamination of U.S. foreign policy and an openness to press our allies, and to challenge ourselves to reconsider policies, strategies and tactics that diffuse the conflicts and clashes confronting future generations."*[31] Memang Amerika sering bersikap ganda dalam kebijakan luar negerinya. Dalam kasus Sudan misalnya, Washington melakukan tekanan yang keras dengan menjatuhkan sanksi ekonomi kepada pemerintah Omar Hassan Bashir di Sudan. Hal yang sama tidak dilakukan AS ketika Musharraf mengambil alih pemerintahan dengan mengkudeta Presiden Nawaz Sharif (tahun 2000). Masalahnya, Hassan Bashir dianggap anti-Amerika, terlalu dekat hubungannya dengan Front Nasionalis Islam pimpinan Hassan Turabi. Sehingga, dikhawatirkan Sudan akan menjadi kekuatan fundamentalis Islam yang baru. Sedangkan, Musharaf adalah pemimpin sekuler dan mau tunduk kepada Amerika.

---

[31] Lihat Situs www.islamonline.net, 15 Oktober 2001.

Tekanan dari Washington itu akhirnya memaksa Usamah bin Laden yang tinggal di Khartoum saat itu, harus meninggalkan Sudan tahun 1996. Waktu itu, Amerika juga menyerang Sudan dengan menghancurkan pabrik farmasi Ash-Shiffa dengan rudal-rudalnya, dengan dalih sebagai balasan atas pengeboman Kedubesnya di Kenya dan Tanzania.[32]

D. Kemunafikan Barat soal Demokrasi: Kasus FIS di Aljazair

Salah satu ide penting yang "diimani" oleh kaum Islam Liberal adalah "demokrasi" yang tentu banyak mengambil nilai-nilai dan sistem Barat. Menurut Denny J.A., "Dominan atau tidaknya kultur liberal di Islamlah, yang akan menentukan terkonsolidasi atau tidaknya demokrasi di Indonesia. Dia menyimpulkan, Islam Liberal adalah interpretasi Islam yang mendukung atau paralel dengan *civic culture* (seperti toleran dan pro-pluralisme).[33]

Lebih tegas lagi, Jaringan Islam Liberal juga bermaksud memerangi kaum fundamentalis atau kaum militan, karena dianggap menghalangi proses demokratisasi di Indonesia. *"Sudah tentu, jika tidak ada upaya-upaya untuk mencegah dominannya pandangan keagamaan yang militan itu, boleh jadi, dalam waktu yang panjang, pandangan-pandangan kelompok keagamaan yang militan ini bisa menjadi dominan. Hal ini, jika benar terjadi, akan mempunyai akibat yang buruk buat usaha memantapkan demokratisasi di Indonesia"*. (www.islamlib.com)

Para pemuja demokrasi tentu paham bahwa dalam soal demokrasi, Barat telah memainkan peran yang inkonsisten dan munafik. Mereka banyak mendukung rezim-rezim otoriter dan fasis di dunia, yang antidemokrasi, tetapi terus-menerus berkoar tentang pengembangan demokrasi. Kasus FIS di Aljazair menarik untuk dijadikan studi kasus bagaimana kemunafikan Barat itu berlangsung dengan telanjang, tanpa punya rasa malu lagi.

---

[32] *Kompas*, 21 Oktober 2001.

[33] Dikutip dari diskusi tentang Islam Liberal di Koran *Jawa Pos*, 19-21 November 2001.

Pada awal 1980-an sebenarnya Amerika merasa tidak perlu mengartikulasikan kebijakan politiknya ke kaum Islamis, karena Iran hanyalah dianggap negara teokrasi di wilayah Arab. Tapi, akhir 1980-an, gerakan-gerakan Islam mulai menyebar di seluruh dunia Arab dan Afrika Utara. Perkembangan baru ini, di samping juga keruntuhan komunisme dan isu global demokratisasi, membawa pertanyaan bagi pengambil kebijakan luar negeri AS tentang kebangkitan Islam, "Kita perlu tahu, apakah Islam cocok dengan demokrasi."[34]

Pemerintahan Bush semakin menaruh perhatian, ketika kaum Islamis memenangkan pemilihan umum secara mengesankan di Mesir, Tunisia, dan Yordan. Di Sudan, kudeta militer yang dipimpin oleh Omar Hassan Al-Bashir berhasil dengan menjalin kerja sama dengan Front Islam Nasional (pimpinan tokoh Islam Dr. Hasan Turabi). Tapi, yang membuat kekhawatiran Washington terutama adalah kemenangan FIS di Aljazair dalam pemilu tahap I pada Desember 1991. FIS sebenarnya tinggal selangkah lagi untuk menang, sebab pemerintah Aljazair menggunakan sistem pemilihan yang mirip dengan Prancis, dua tahap, dan sistem kemenangan mutlak *(a winner take all format).*

Tapi, awal Januari 1992, militer garis keras di Aljazair membatalkan pemilu, memberangus FIS, dan menahan ratusan anggotanya. Sehingga, negara itu terus menerus dalam perang sipil dan menimbulkan korban sampai 80 ribu jiwa. Pembatalan pemilu itu, di mana pemerintahan Bush menghormati keputusan militer Aljazair, dianggap sebagai suatu keputusan Washington yang membingungkan. Bahkan lebih jauh, ketika militer mengambil paksa pemerintahan Aljir pada Januari 1992, Departemen Pertahanan AS mengatakan hal itu dibenarkan dalam konstitusi Aljazair. Diplomat-diplomat Amerika secara pribadi juga setuju bahwa kemenangan kaum Islamis di Aljazair dapat menimbulkan efek anti Barat dan dapat menimbulkan gejolak yang luas di negara-negara lain. Pemerintahan Bush juga kha-

---

[34] Fawaz A Gerges, *op cit.* hal 74.

watir kemenangan Islam Fundamentalis ini menyeberang ke Afrika.

Menteri Luar Negeri AS di masa pemerintahan Bush, James Baker lebih jelas lagi menyatakan ketidakinginannya melihat hasil pemilu di Aljazair. Sebab ia melihat, FIS adalah sebuah gerakan Islam fundamentalis radikal yang benar-benar anti-Barat, anti-nilai-nilai demokrasi, kebebasan pasar, dan prinsip-prinsip serta nilai-nilai Barat. Baker menyatakan, "Kita tidak bisa hidup dengan gerakan itu (fundamentalis radikal) di Aljazair. Sebab, kita merasa bahwa pandangan-pandangan fundamentalis radikal bertentangan dengan apa yang kita yakini dan kita dukung serta bertentangan dengan kepentingan nasional AS."[35]

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh oleh seorang pejabat Pertahanan AS di Washington, kepada Fawaz A. Gerges. Menurut pejabat itu, AS takut terhadap potensi dampak negatif yang timbul akibat pemerintahan Islam di Aljazair baik terhadap proses damai Arab Israel maupun efeknya yang bisa meluas di Mesir dan negara-negara Afrika Utara. Pejabat Washington itu menyatakan, *"The United States who also worried about the potential negative impact of an Islamist government in Algeria on the Arab-Israeli peace process and the effect of any spillover Egypt and North African States."*

Bukan berarti keputusan Bush mendukung tindakan semena-mena militer Aljazair itu, tidak ada yang menentang. Keputusan Bush itu dikritik keras oleh Asisten Menlu untuk Kawasan Timur Tengah, Edward Djerejian. Asisten Menlu itu membeberkan ketidaksetujuannya pada keputusan pemerintah itu di "Meredian House International" di Washington, pada Juni 1992.

Djerejian mengingatkan, "Kita menuduh orang yang ikut dalam proses demokrasi itu untuk mengambil kekuasaan, tapi hanya untuk menghancurkan proses demokrasi itu untuk kemudian mempertahankan kekuasaan. Sesungguhnya bila kita yakin adanya prinsip *one person, one vote,* (tapi mengapa) kita tidak mendukung *one person, one vote, one time.*"[36]

---

[35] Fawaz A Gerges, *op cit.* hal 76-77.

[36] Fawaz A Gerges, *op cit.* hal. 79.

Djerejian setuju dengan kaum akomodasionis yang mempunyai premis bahwa ekstremisme Islam itu karena adanya frustasi dalam bidang politik. Untuk mengatasi ekstremisme itu, ia merekomendasikan strategi privatisasi, kebebasan, dan penguatan ekonomi kepada kaum Islamis.

Memang, keputusan Amerika (dan Prancis) mendukung junta militer Aljazair memberangus FIS, membatalkan pemilu, dan mengambil alih pemerintahan itu sungguh menyedihkan. Di situ terlihat ketika umat Islam setia mengikuti proses demokrasi dan menang, mereka pun dikhianati.

John L. Esposito juga mengkritik keras gaya koboi Amerika dan Barat soal Aljazair ini. Guru Besar *College of the Holy Cross* ini justru menyarankan, "Amerika Serikat pada prinsipnya tidak boleh keberatan kalau hukum Islam diterapkan atau aktivis Islam terlibat dalam pemerintah. Para pelaku dan kelompok politik yang berorientasi Islam supaya dinilai dengan kriteria yang sama dengan pemimpin potensial atau partai oposisi lainnya."[37]

Kegalauan terhadap langkah pemerintah Amerika itu juga dikeluhkan Wartawan *Times*, Christoper Ogden. Ia mengaku kecewa berat terhadap dukungan AS pada pembredelan pemilu di Aljazair hanya karena telah dimenangkan oleh gerakan Islam, FIS (*Front Islamique de Salute*).

Christoper Ogden *(dalam artikel "View from Washington", Time 3 Februari 1992)*, mengkritik keras tindakan AS untuk mendukung permainan kekuasaan antidemokrasi, yang merupakan suatu tindakan yang sangat keliru. Sikap AS dan Prancis yang menyatakan bahwa kudeta Aljazair "konstitusional", **tidak lain merupakan gejala penyakit gila paranoid (ketakutan tanpa dasar) terhadap Muslim Fundamentalis.** Ogden menulis bahwa nonsense menyatakan bahwa AS tidak dapat mempengaruhi perubahan di Aljazair. Presiden Bush (senior) tahu persis bahwa AS memiliki kapasitas yang luar biasa besarnya untuk "menyetir" Aljazair, bahkan dunia, antara lain lewat konsep Orde Barunya.[38]

---

[37] John L Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas?*, Mizan, 1996, hal. 246.

[38] *Suara Pembaruan*, 11 Maret 1992.

Pada pemilu putaran pertama, 26 Desember 1991, ketika FIS memenangkan pemilu multipartai di Aljazair dan tinggal selangkah lagi menguasai pemerintahan, pemerintah Aljazair dengan dukungan militer dan Barat (AS dan Prancis) tiba-tiba membredelnya. Pembatalan pemilu putaran kedua itu dilakukan hanya tiga hari menjelang pelaksanaan pemilu II, yang rencananya akan dilaksanakan 16 Januari 1992.

Padahal dalam pemilu di Aljazair itu, FIS memperoleh 167 kursi atau 81% suara. Partai pemerintah yang tergabung dalam Barisan Pembebasan Nasional (FLN), hanya berada di tempat ketiga dengan 16 kursi. Sedangkan tempat kedua, diduduki oleh Barisan Kekuatan Sosialis (FFS) pimpinan Ahmad Ben Bella, dengan 20 kursi. Jadi, FIS hanya butuh 49 kursi–99% pasti tercapai--untuk menguasai mayoritas mutlak di parlemen dan kemudian berhak mengendalikan pemerintahan Aljazair.

Tapi, anehnya FIS yang sudah ikut aturan demokrasi, tiba-tiba dijegal pemerintahan Aljir dengan didukung Perancis dan AS. Para pengamat pro-Barat waktu itu beralasan FIS hanya menggunakan proses demokrasi untuk membunuh demokrasi. Padahal, bukankah penjegalan terhadap FIS itu tindakan yang jelas-jelas antidemokratis?

Tindakan antidemokratis dan kebiadaban junta militer Aljazair saat itu mengakibatkan ribuan 10 aktivis dan pendukung FIS meninggal serta sekitar 30 ribu orang disekap dalam tahanan gurun yang panas. Padahal, bila FIS dibiarkan menang dan memimpin Aljazair, *insya Allah* tidak terjadi pembantaian tidak beradab itu, *dan* Aljazair mungkin bisa tenteram dan makmur sekarang. Tapi itulah sejarah demokrasi Barat. Seperti yang disebut oleh Ogden, Barat terkena penyakit paranoid terhadap "Islam Fundamentalis."

Tipuan Demokrasi

Kejadian pemberangusan FIS oleh rezim militer Aljazair ini, menimbulkan perhatian yang tinggi, baik oleh para aktivis Islam maupun para pengamat politik. Karena itu, di sini akan diulas lebih jauh peristiwa sebelum pemilu dan pasca pemilu di Aljazair (1991).

Menyambut pemilu multipartai yang pertama kali di Aljazair saat itu (1991), FIS gencar berkampanye ke masyarakat bawah. Dalam kampanye-kampanyenya, FIS selalu menyuarakan aspirasi dari nilai-nilai Islam. Slogan yang digunakan FIS di antaranya, "Tidak ada konstitusi dan tidak ada hukum. Aturan yang ada hanya Al-Qur`an dan hukum Allah." Dalam khotbah-khotbah Jumat, para imam dan khatib selalu menekankan sumber hukum Islam itu. Dengan penjelasan yang menarik, para khotib menyerukan masyarakat agar berperilaku islami, dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan Barat (pengaruh Prancis) yang menghancurkan akhlak. Selain itu, mereka juga menerangkan masalah politik kenegaraan, termasuk masalah pembagian kekuasaan dan sifat toleransi tinggi umat Islam kepada masyarakat lain.

Selain slogan di atas, slogan lain yang terkenal dan cukup akrab di rakyat Aljazair adalah, "Masyarakat kita tengah dilanda penyakit, obatnya tersedia 14 abad silam, yakni Islam dan FIS adalah dokternya." Seruan-seruan pembentukan negara dan masyarakat Islam, baik dalam bentuk ceramah atau buletin, juga bersebaran di jalanan ibukota menuju Masjid Kouba, tempat basis terkuat FIS.

Slogan, program, dan aspirasi yang dibawa FIS itu ternyata ampuh. Terbukti hingga tahun 1990, menjelang pemilu tingkat lokal, anggota resmi FIS yang terdaftar mencapai 3,5 juta orang. Sebagian besar mereka dalah golongan intelektual muda yang menetap di kota-kota besar.

Sebelum pelaksanaan pemilu, 26 Desember 1991, Presiden Aljazair Chadli Bendjedid berjanji akan menghormati apa pun hasil pemilu itu. Dalam pemilu itu, selain FIS dan FLN, partai yang ikut meramaikan pemilihan itu antara lain, Partai Gerakan Demokrasi Aljazair (pimpinan Ahmad Ben Bella), Partai Front Kekuatan Sosialis, Gerakan Budaya dan Demokrasi (minoritas suku Berber), sembilan parpol-parpol Islam lain di luar FIS dan lain-lain.

Hari pemilu tiba. Kamis, 26 Desember 1991, pemilu di Aljazair dilaksanakan. Pemerintah melaksanakan pemilu untuk

memperebutkan suara di parlemen secara demokratis. Sebelum pemilu itu dilaksanakan, melihat kondisi Aljazair, pengamat politik sendiri memperkirakan FLN akan keok dan kelompok Islam akan mengambil alih pemerintahan. Usai pemilu, kotak-kotak suara dibuka sejak pagi pukul 08.00. Pemilu yang memperebutkan 430 kursi parlemen Aljazair itu, diikuti total oleh 49 partai dan 5712 kandidat, 1029 di antaranya partai independen.

Perhitungan sementara sehari sesudah pemilu, FIS mengungguli FLN di delapan kota. Di kawasan gurun selatan Ouargia, lokasi ladang minyak terbesar di negara itu, calon-calon FLN memimpin di enam daerah pemilihan. Sedangkan, FIS memimpin di tiga daerah pemilihan dan partai Islam lainnya, Hamas (bukan Hamas Palestina -pen), di satu daerah pemilihan.[39]

Sebelum perhitungan pemilu usai, melihat antusias masyarakat, FIS sangat yakin dapat suara mayoritas dalam pemilu ini. Pemimpin baru FIS, Abdulqadir Hachani (mengganti Madani dan Belhadj yang ditahan), dalam konferensi persnya tidak lama setelah sebagian kotak suara mau dihitung, mengatakan, "Kami yakin akan memenangkan 70% suara dan itu adalah persentase minimum kalau pemilihan dilakukan secara adil dan jujur."

Pemungutan suara di Aljazair itu diawasi pula oleh wakil-wakil dari negara Tunisia dan Maroko, tempat para aktivis Islam dikontrol pemerintah secara ketat. Wakil-wakil dari Prancis, tempat kira-kira satu juta warga imigran Aljazair bertempat tinggal, juga mengawasi jalannya pemilu. Pemerintah Aljir sendiri juga menyatakan kegembirannya dengan jalannya pemilu yang demokratis itu. Sehingga, PM Ghozali saat itu mengatakan, "Pemilu akan dicatat dalam sejarah negeri kami sebagai hari kemajuan bagi rakyat."

Kemenangan Mutlak FIS. Setelah perhitungan suara dilakukan, para pejabat Aljazair, seperti dikutip *Reuter*, menyatakan FIS untuk sementara telah memenangkan lebih dari 80% kursi di parlemen dari perhitungan yang dilakukan di 224 daerah pemilihan.[40]

---

[39] *Media Indonesia*, 28 Desember 1991.

[40] *Pelita*, 28 Desember 1991.

Hasil resmi pemilu nasional babak I, yang memperebutkan 206 kursi itu, akhirnya diumumkan oleh Menteri Dalam Negeri Aljazair, Larbi Belkheir. Hasilnya, FIS memperoleh 167 kursi atau 81% suara. Barisan Pembebasan Nasional (FLN) hanya berada di tempat ketiga dengan 16 kursi. Sedangkan tempat kedua, diduduki oleh Barisan Kekuatan Sosialis (FFS) pimpinan Ahmad Ben Bella, dengan 20 kursi. Selain itu, tiga calon independen juga terpilih.

Belkheir juga menyatakan, 171 calon FIS, 158 calon FLN, dan 13 dari FFS akan bertarung dalam pemilu babak kedua, pada 16 Januari 1992. Mereka akan memperebutkan sisa kursi anggota parlemen Dengan hasil 167 kursi itu, FIS hanya perlu tambahan 49 kursi untuk menguasai mayoritas mutlak di parlemen yang total beranggotakan 430 orang tersebut.

Komentar-Komentar tentang Kemenangan FIS

"Itu adalah akhir dari sistem FLN," tulis Djaafar Said, redaktur harian berbahasa Prancis, *Quetdien d'Algerie*. Mengenai jumlah pemilih abstain yang tinggi sebanyak 40 persen, Djaafar mengatakan, "Tindakan abstain itu juga merupakan suatu pilihan untuk membuka kesempatan bagi masyarakat Islam."

Omar Belhouchet, penerbit El Wathan, setuju bahwa "FLN telah kehilangan kekuatan dan tidak lagi menjadi suatu kekuatan politik yang dominan, sementara FIS telah meraih suatu pengesahan yang tak perlu diragukan lagi".

Beberapa pengamat politik Aljir juga mengkhawatirkan adanya pengambilalihan pemerintah oleh militer, karena jatuhnya suara FLN. Mereka meramalkan akan timbul masalah UUD antara mayoritas anggota baru parlemen dan Presiden Bendjedid, yang mempunyai wewenang untuk membubarkan parlemen. Bendjedid sendiri posisinya diuntungkan, karena mendapat dukungan kuat dari Angkatan Darat Militer Aljazair.

Pemerintah Bendjedid memang sangat khawatir FIS akan menang dalam pemilu babak kedua. Karena itu, PM Ghozali kepada TV Prancis menyatakan bahwa situasi Aljazair dapat diselamatkan bila partai-partai yang berpikiran demokrat menfokuskan diri pada keadaan riil.

Optimisme FIS dalam Pemilu II

Dengan kemenangan pada Pemilu I, FIS yakin dapat melakukan hal yang sama pada Pemilu II yang direncanakan 16 Januari 1992. Saat itu, FIS juga menyerukan setelah Pemilu II nanti, dapat dilakukan pemilihan presiden secepatnya.

Pemimpin FIS yang baru, Abdulqadir Hachani, ketika ditanyakan apakah FIS dapat gagal dalam pemilu II? Ia mengatakan, "Itu suatu kemungkinan yang mutlak tersingkir... Kami akan menuntut pemilu presiden untuk mencegah hak prerogatif parlemen yang diterjang," katanya dengan penuh semangat, dalam sebuah konferensi pers.

Menanggapi tuntutan FIS itu, Presiden Bendjedid yang terpilih pada 1988 untuk masa jabatan ketiga kalinya, menjanjikan pemilihan presiden dijadwalkan sebelum 1993 (setelah pemilihan parlemen). Tapi, ia tidak menyebutkan waktu yang pasti. Melihat sikap Bendjedid yang cenderung objektif dalam melihat hasil pemilu itu, Ketua FIS pada hari Ahad 30 Desember 1991, menawarkan kerja sama dengan Presiden Aljazair yang telah merintis pemilu multipartai itu.

Hasil kemenangan FIS pada Pemilu I itu memang mencengangkan semua pihak. Tapi FIS tidak bangga diri. Tokoh-tokoh dan pendukung FIS justru menasihati lawan-lawan politiknya agar bertobat dan kembali ke Islam. Partai pemerintah, FLN justru saling menyalahkan di antara tokoh-tokohnya. PM Sid Ghozali mengatakan bahwa kemenangan kaum muslimin FIS itu justru karena kesalahan FLN sendiri. Partai-partai demokratis yang kecil membagi-bagi suara dengan FLN, partai pemerintah, sehingga suara FLN menjadi terpecah. "Itu adalah harga yang harus dibayar oleh demokrasi," ungkap seorang wartawan Aljazair. "Pemerintah melakukan tindakan untung-untungan. Kecuali para sekutu mereka bersatu sebelum 16 Januari. Kalau tidak, pemerintah bisa kalah," katanya menambahkan.

FIS Dijegal, Pemilu Dibatalkan

Menghadapi Pemilu II itu tampaknya pemerintah Aljir diam-diam melakukan pertemuan dan rekayasa dengan pihak militer. Hari Senin, 13 Januari 1992 tiga hari menjelang dilaksanakannya

Pemilu II, PM Sid Ahmad Ghozali dan para pemimpin militer menyatakan pembatalan Pemilu II. Mereka juga mengumumkan pengangkatan mereka sebagai penguasa baru di Aljazair.

Keputusan yang sangat mendadak itu, tentu mengagetkan masyarakat Aljir. FIS yang hampir memegang tampuk kekuasaan di pemerintah Aljazair, tiba-tiba dijegal tiga hari menjelang Pemilu II. Pembatalan Pemilu II itu dilakukan setelah Ketua Dewan Konstitusi Aljazair, Abdulmalek Benghabiles--Kepala Badan Yudikatif Tertinggi--menerima pengunduran diri Bendjedid hari Sabtu (11 Januari). Seperti sudah direncanakan, Abdulmalek kemudian langsung mengambil alih kedudukan sebagai Kepala Negara. Tapi sesuai konstitusi Aljazair, Abdulmalek dalam waktu 24 jam kemudian harus melepaskan jabatan Kepala Negara dan menyerahkannya kepada Dewan Keamanan Tertinggi.

PM Ghozali mengakui bahwa mundurnya Presiden Bendjedid 11 Januari itu, karena para pemimpin militer telah memaksa presiden untuk mengundurkan diri. Alasannya, kata Ghozali, pihak militer telah mengendus adanya persetujuan rahasia antara Bendjedid dengan FIS untuk memecat sejumlah tokoh militer. Ghozali juga menyatakan, ia telah memerintahkan tentara-tentara menuju tempat-tempat strategis untuk menjaga keamanan negara, begitu Bendjedid mundur. Tank-tank dan tentara tampak menjaga ketat gedung-gedung penting hari Senin itu (13/1/1992).

Kamis, 16 Januari 1992, Mohammad Boudiaf dipanggil oleh Dewan Keamanan Militer dari pengasingannya di Maroko untuk kemudian ditetapkan sebagai Ketua Dewan Keamanan Tertinggi, yang terdiri atas lima anggota, yaitu Mohammad Boudiaf, Khaled Nasser Menteri Pertahanan, Ali Haroun Menteri Hak Asasi Manusia, Tidjani Haddam Rektor dari Masjid Paris, dan Ali Kafi Ketua Organisasi Nasional Mujahidin.

Sikap FIS Usai Pembatalan Pemilu

Berkaitan dengan pembatalan Pemilu II yang sangat mendadak dan penuh rekayasa itu, Senin malam (13/1/1992), FIS langsung protes keras. FIS mengeluarkan pernyataan, "Rakyat Aljazair mesti bersiap untuk menyelamatkan negara yang dalam

situasi bahaya. Negara kita telah mengarah tidak menentu akibat ulah sekelompok orang yang biasa menindas dan menteror serta haus kekuasaan." Pernyataan itu dikeluarkan Dewan Pimpinan FIS setelah mengadakan sidang mendadak.

Abdulqadir Hachani yang menandatangani pernyataan itu, menyatakan bahwa Dewan Keamanan Tertinggi adalah suatu "Raksasa Ilegal" yang telah mencaplok pilihan rakyat untuk memuaskan kehausan akan kekuasaan dan orde baru dunia. Dewan yang dikuasai para militer itu, lanjut Hachani, telah mengkhianati negara dan rakyat. "Situasinya sangat gawat dan karena itu kita perlu siap menghadapi segala kemungkinan guna menyelamatkan negara, kedaulatan, dan rakyat," tandasnya.

FIS menolak keras keberadaan para pemimpin dadakan Aljazair itu dan menyebutnya sebagai "junta militer" tidak sah. FIS menyatakan bahwa jalan ke arah negara dan masyarakat Islam dapat dilanjutkan tanpa melalui kekerasan. Menurut FIS, Dewan Konstitusional tidak berhak membatalkan pemilu dan satu-satunya badan yang sah saat ini adalah kelompok anggota parlemen yang terpilih (Pemilu I).

Situasi Aljazair kemudian makin panas, karena pertentangan antara pemerintah junta militer dan FIS. Hari Rabu (15/1/1992), Hachani menyatakan bahwa pemerintahan baru itu telah mengkudeta negara Islam dan rakyat Aljazair. "Sebenarnya, masalahnya adalah suatu kudeta terhadap sebuah negara Islam. Bukan kudeta terhadap presiden, tetapi terhadap rakyat Aljazair," tegasnya. Pemimpin FIS ini juga menyatakan bahwa FIS menolak setiap penindasan dan perampasan kebebasan.

Bersamaan dengan itu, anggota parlemen FIS yang terpilih dalam Pemilu I (167 orang) menegaskan bahwa para anggota parlemen memiliki hak kekuasaan rakyat sejak pengunduran diri Presiden Bendjedid. Dalam pernyataan bersama hari Minggu (19/1), anggota-anggota parlemen FIS menuntut pemulihan legalitas konstitusional dan agar Pemilu II segera dilaksanakan. Tapi, pemerintahan junta militer Aljazair tetap represif dan keras kepala serta tidak mau FIS memimpin pemerintahan.

Komentar-Komentar tentang Pembredelan Pemilu II

Bisa ditebak, pembredelan Pemilu II oleh pemerintah Aljazair, menimbulkan sikap kontra yang luas dalam masyarakat Aljazair. Seorang pejabat Aljir menyamakan kemenangan FIS dengan revolusi Iran. Ia menyatakan, "Militer belajar dari pengalaman Iran dan tak akan membiarkan dirinya menjadi pihak pertama yang dieksekusi."

Kekhawatiran berlebihan dari pemerintahan militer Aljir itu, dibantah keras oleh masyarakat Islam di berbagai belahan dunia. *Harian Times*, terbitan Teheran misalnya, menulis bahwa pihak Barat jelas bersikap dikotomis dalam masalah Aljazair dengan peristiwa kudeta di Haiti, Oktober 1990. *Times* menuliskan komentarnya, "Sudah dipastikan bahwa prospek kemenangan mayoritas bagi FIS dalam pemilihan umum Kamis (16/1) telah membuat takut negara-negara Barat. Mereka terlalu banyak mengobral konsep demokrasi ala Barat, yang hanya menguntungkan partai-partai sekuler merebut kemenangan dalam pemilu."

Republik Islam Iran saat itu menyatakan keyakinannya bahwa rakyat Aljazair tidak akan membiarkan taktik militer menghalangi FIS memenangkan kekuasaan melalui pemilu. Wakil Presiden Iran, Hassan Habibi, mengharapkan rakyat Aljazair harus menolak keberadaan Dewan Keamanan Tertinggi dan berbagai dekrit yang dikeluarkannya.

Kecaman keras tidak hanya datang dari negara Islam atau organisasi-organisasi Islam di Aljazair. Kritikan keras juga datang dari organisasi sekuler Aljazair. Organisasi Liga Pembebasan Hak-hak Asasi Aljazair (LADDH), memberikan pernyataan, "Pemutusan proses demokratisasi yang brutal dan tanpa dasar itu, dengan menunda pemilu, merupakan kudeta militer dalam menerapkan pembekuan konstitusi." Liga itu sebelumnya juga menegaskan langkah pengunduran diri mendadak Presiden Bendjedid itu adalah rekayasa kudeta militer.

AS Dukung Pemerintah Militer Aljazair

Seperti dapat diduga, negara-negara Barat mendukung langkah licik pemerintah militer Aljir itu. Menyambut langkah Dewan Keamanan Tertinggi Aljazair yang membatalkan Pemilu II itu,

Amerika Serikat dan Perancis langsung mendukungnya. Pemerintah AS menyatakan bahwa prosedur yang dilakukan Dewan Keamanan itu tertera dalam konstitusi. Anehnya, negara Tunisia yang bersebelahan dengan Aljazair ikut-ikutan Barat. Memang pemerintah Tunisia terus mempertahankan sistem sekuler dan telah melarang partai Islam seperti FIS, yaitu partai An-Nahdhah.

Tentu masyarakat dunia bingung dengan kebijakan Barat yang menjegal kemenangan FIS lewat proses yang demokratis itu. Satu sisi membela pemilu demokratis, tapi bila partai Islam yang menang, maka "halal" bagi mereka untuk memberangus atau menjegalnya. Syafiq Basri, seorang kolumnis, menulis, "Seorang pembaca mingguan *The Guardian Weekly* belum lama berselang menulis bahwa berita *Guardian* tentang Aljazair sangat tidak adil, membingungkan, dan tidak bermoral. Menurut pembaca itu (Al-Kharraz dari Arab Saudi), tidak seorang pun sebenarnya yang dapat mendikte rakyat Aljazair tentang siapa yang mesti mereka pilih dalam pemilu. Kalau pun sekarang kondisi (FIS) belum seberapa ideal, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Karena *toh* kondisi mereka di bawah koloni Perancis dan di bawah pemerintah boneka Perancis jauh lebih buruk. "Eropa dan Amerika selalu bicara tentang kebebasan mengemukakan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri. Tapi ketika keduanya menjadi kenyataan (di negara seperti Aljazair), mereka pun segera menerapkan sikap standar ganda (*double standard*)," kata Al-Kharraz."[41]

Tidak hanya Al-Kharraz yang bingung, Christoper Ogden, wartawan majalah *Times* juga mengecam tindakan Barat dalam kasus ini. Syafiq Basri melanjutkan uraiannya, "Menurut Christoper Ogden (dalam artikel 'View from Washington', *Times*, 3 Februari 1992), tindakan AS untuk mendukung permainan kekuasaan antidemokrasi merupakan suatu tindakan yang sangat keliru. Sikap AS dan Prancis yang menyatakan bahwa kudeta Aljazair 'konstitusional', tidak lain merupakan gejala penyakit gila paranoid (ketakutan tanpa dasar) terhadap muslim fun-

---

[41] *Pelita*, 28 Desember 1991

damentalis. Ogden menulis bahwa nonsense menyatakan bahwa AS tidak dapat mempengaruhi perubahan di Aljazair. Presiden Bush tahu persis bahwa AS memiliki kapasitas yang luar biasa besarnya untuk 'menyertir' Aljazair, bahkan dunia, antara lain lewat konsep Orde Barunya.

Sikap senada juga ditunjukkan oleh harian berbahasa Inggris propemerintah, *The Egiptian Gazette*. Lewat tajuknya sehari setelah pembubaran Pemilu II. Harian itu mengingatkan bahwa cara yang ditempuh pemerintah Aljir tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan, akan menjadi preseden bagi munculnya gelombang kekerasan yang berkelanjutan.

Tapi pemerintah Aljir tidak peduli dengan suara-suara sumbang di berbagai belahan dunia itu. Tampaknya dukungan AS dan Prancis cukup bagi mereka untuk terus melanjutkan 'rencana memberangus FIS'. Beberapa pejabat pemerintah di Aljir menyatakan bahwa hasil pemilu yang dimenangkan FIS itu sebagai 'memanfaatkan demokrasi untuk menumbangkan demokrasi itu sendiri'."

Tudingan-tudingan Barat dan pemerintah militer Aljir yang "apologi" kepada FIS itu dikecam banyak pengamat atau tokoh Islam. Riza Shihbudi termasuk pengamat politik yang mengecam gaya Barat yang main bredel itu. Riza menulis, "Jika memang demikian halnya, mengapa FIS tidak dibiarkan saja untuk memerintah dan FIS pun akan jatuh dengan sendirinya jika terbukti tidak berakar. Jangan lalu muncul prasangka bahwa FIS akan memanfaatkan demokrasi untuk membunuh demokrasi."[42]

Memang ironis tindakan antidemokrasi dipakai dan disahkan oleh Amerika, ketika partai Islam (FIS) akan meraih kekuasaan dalam pemerintahan. Kemudian propaganda-propaganda licik dipakai dan diracunkan ke masyarakat bahwa FIS dalam pemerintahan nanti akan menghancurkan "demokrasi".

Penguasa Militer Aljir Bertindak Brutal

Setelah menguasai dan mengendalikan pemerintahan, pemerintah militer Aljir kemudian bertindak brutal untuk mem-

---

[42] *Kompas*, 8 Juli 1992.

berangus anggota-anggota partai Islam, FIS. Menyusul pembubaran Pemilu II, pemerintah kemudian menahan para anggota FIS. Tokoh FIS, Hachani menyatakan bahwa 50 orang FIS ditahan di Aljir, ibukota Aljazair. Surat kabar *Le Matin* menyebutkan bahwa 133 orang yang mengenakan "pakaian Afghanistan" simbol sebagian para pengikut FIS, telah ditahan di Masjid Echafi, pinggiran Kota Aljir, hari Selasa (14 Januari). Meski demikian, Hachani tetap menyerukan kepada anggota FIS untuk tetap tenang dan menegaskan bahwa perjuangan mereka tidak melalui kekerasan.[43]

Jumlah tahanan FIS oleh pemerintah militer kemudian meningkat cepat. Menurut Hachani, jumlah anggota FIS yang ditahan sampai mencapai 500 orang. Langkah penahanan besar-besaran oleh pemerintah itu, dinilai para pengamat politik, untuk memprovokasi FIS agar melakukan balasan kekerasan. Sehingga, nanti militer mempunyai legitimasi untuk melarang FIS secara total.

Hachani juga mempunyai prediksi seperti itu. Dalam wawancaranya dengan harian *L'Unita* di Roma, Hachani menilai tindakan-tindakan pemerintah itu sebagai aksi provokasi yang disengaja. Ia khawatir para pemimpin FIS tidak bisa mengendalikan seluruh pengikutnya. Hachani juga sangat menyayangkan situasi yang sengaja dibuat kacau oleh pemerintah itu. "Dalam hanya beberapa hari harapan rakyat Aljazair akan masa depan yang cerah, dengan pembangunan negara Islamnya, telah dirampas. Dengan demikian, menghadapkan negeri ini pada bahaya yang gawat," ujarnya.

Menghadapi situasi yang sulit itu, FIS juga mendapat dukungan dari Front Kekuatan Sosialis (FFS). Partai yang didukung masyarakat Berber non-Arab itu, dulu ketika Pemilu I menjadi saingan politik FIS. FFS dalam Pemilu I berhasil memperoleh beberapa kursi di parlemen.

Setelah membatalkan Pemilu II dan menahan tokoh-tokoh dan anggota FIS, PM Ghozali Ahmad dan pemerintah Aljir mulai melakukan rekayasa-rekayasa untuk melarang dan mem-

---

[43] *Pelita*, 17 Januari 1992.

bubarkan FIS. Selain itu, pemerintah juga berencana memulai lagi pemilu baru menggantikan sistem pemilu multipartai yang baru saja diterapkan. Setelah Madani dan Belhadj ditangkap beberapa hari pasca pembubaran Pemilu II, giliran kemudian pemerintah militer memasukkan ke penjara Abdulqadir Hachani (36 tahun), Ketua FIS baru. Hachani ditangkap ketika tengah berkendaraan di desa bagian selatan Aljazair yang juga merupakan markas FIS, hari Rabu 22 Januari 1992. Ia ditangkap atas desakan dan tuntutan pihak militer Angkatan Darat Aljazair, dengan tuduhan telah menyerukan aksi desersi melawan pemerintah.[44]

Perintah penangkapan itu dikeluarkan oleh Pengadilan Sipil Aljazair atas permintaan Menteri Pertahanan Aljazair, Mayjen Khaled Nezzar. Tuduhan resminya, Hachani dianggap telah "menyerukan Tentara Nasional Rakyat (ANP) untuk melakukan pemberontakan".

FIS masih menahan diri meski ketuanya yang baru, juga ikut dikerangkeng. Syekh Abdulqadir Charrati, Imam Besar Masjid di Markas FIS itu menyatakan kepada para pendukungnya agar tetap tenang menghadapi penangkapan Hachani. Tapi pemerintah junta militer Aljir tidak berhenti di situ. Bersamaan dengan melakukan penangkapan-penangkapan, pemerintah melarang masyarakat berkumpul di luar Masjid. Langkah ini dimaksudkan untuk membatasi ruang gerak FIS. Sebelumnya, sebenarnya pemerintah telah berusaha mati-matian membatasi aktivitas FIS. Yaitu, ketika April 1991, pemerintah Aljir mengeluarkan Undang-undang yang isinya menyatakan kegiatan partai politik tidak boleh dilakukan di dalam Masjid.

Tentu FIS menolak UU yang tidak realistis dengan budaya masyarakat itu. Dalam kegiatan harian dan sholat Jumat, FIS tetap menyinggung soal-soal politik. FIS berkeyakinan, masalah politik adalah bagian yang tak terpisahkan dari hukum-hukum Islam. UU April itu juga dalam kenyataan tidak pernah diterapkan. Tapi, setelah militer mengambil alih pemerintahan, UU itu

---

[44] *Kantor Berita Antara*, 23 Januari 1992.

dihidupkan kembali. UU itu juga mempercayakan manajemen masjid kepada komisi-komisi yang dipilih rakyat biasa. Komisi itu juga bertugas untuk mengawasi perawatan gedung-gedung dan pendidikan agama. Selain itu, pemerintah juga membuat program pengawasan masjid ke Kementerian Agama.

Setelah Ali Belhadj, Abbas Madani, dan Hachani ditangkap pemerintah Aljir, kini tinggal empat orang tokoh FIS yang berpengaruh dan menghirup udara bebas, yaitu (1) Mohammad Said (Imam Masjid Al-Arqam), pernah ditahan 3 bulan dan kemudian dibebaskan Oktober 1991, (2) Rabah Kebir, penanggung jawab Hubungan Luar Negeri FIS, (3) Abdulqadir Mughni, Imam masjid As Sunnah di Bab el Oued, dan (4) Osmam Aissani, anggota eksekutif FIS.

Presiden Boudiaf, yang mengambil alih kekuasaan dari Bendjedid pada 4 Februari 1992, menegaskan bahwa dirinya akan menghormati demokrasi dan tidak akan melarang keberadaan FIS. Dalam kesempatan yang sama, Boudiaf--meski dirinya tidak menghormati demokrasi--juga mengecam FIS untuk menghormati kekuasaan demokratis dan "menghindari penggunaan demokrasi untuk menghancurkan demokrasi".[45]

Meski desas-desus di luar pemerintah Aljir mengungkap bahwa FIS akan dilarang Dewan Keamanan Tertinggi, Boudiaf membantahnya. Ia menyatakan bahwa tidak ada niat sama sekali bagi Dewan untuk mempermasalahkan pengakuan dari FIS. Meski demikian, Dewan membatasi gerak FIS, dengan pernyataan, "FIS secara resmi dilarang menggunakan masjid-masjid dan agama untuk kepentingan-kepentingan politik."

Meskipun fakta yang ada jelas menunjukkan bahwa militerlah yang berperanan "memaksa" mundurnya Bendjedid, tapi Boudiaf berulang kali "berkelit" dan berbohong dengan menyatakan bahwa tentara Aljazair tidak menginginkan kekuasaan. Boudiaf juga mengatakan bahwa PM Ahmad Ghozali akan terus menduduki posnya sebagai Perdana Menteri, meskipun akan terjadi perombakan pemerintahannya.

---

[45] *Pelita*, 6 Februari 1992.

FIS Akhirnya Dilarang

Akhirnya, Presiden Boudiaf terbukti berdusta. Bila pada 4 Februari 1992, ia menyatakan FIS tidak akan dibubarkan, tapi 9 Februari 1992 (hari Minggu) pemerintah Aljir menyatakan membubarkan FIS dan menutup markas pusat FIS. Pemerintah militer Aljir beralasan bahwa bentrokan-bentrokan FIS dengan tentara telah merebak di berbagai kota. Dalam bentrokan dua hari itu, dikabarkan sekitar 40 orang terbunuh, 200 orang terluka, dan ratusan anggota FIS ditangkap. Dari 40 orang yang tewas itu, 38 orang dari FIS, sedangkan pihak tentara hanya 2 orang.

Dalam penutupan markas FIS, polisi-polisi Aljir menyerbu mendadak ke Markas Besar FIS dan menahan lima orang di sana, termasuk dua anggota Komite Kebijakan Partai FIS. Sekelompok polisi lainnya dengan brutal menutup Masjid Oumma yang berada tepat di seberang kantor FIS. Masjid Oumma itu kesehariannya digunakan untuk shalat berjamaah bagi anggota dan pendukung FIS. Sebelum markasnya ditutup, sehari sebelumnya (9/2) FIS menyatakan bahwa sambungan telepon ke kantor-kantornya telah diputus pemerintah.

Penutupan markas besar dan kantor-kantor FIS itu, menimbulkan kemarahan mahasiswa-mahasiswa di berbagai universitas Aljazair. Para mahasiswa dari empat Universitas di Aljazair kemudian melaksanakan demonstrasi besar-besaran (Kamis, 13/2). Menurut radio Aljazair, para mahasiswa di Constantine yang terletak di sebelah timur Aljir, melancarkan aksi mogok setelah mengadakan rapat umum mendukung FIS dan terbentuknya negara Islam Aljazair. Mereka juga mengibar-ngibarkan spanduk yang di antaranya bertuliskan, "Rakyat Tidak Hanya Butuh Roti." Jumlah mahasiswa yang melakukan demonstrasi itu berkisar 19 ribu orang. Di Aljir sendiri tidak kurang dari 3000 mahasiswa dari Fakultas Ilmu Pasti Alam di Bab El Zaour, sejak Selasa hingga Kamis itu, terus berdemonstrasi. Mereka menuntut dan mengecam keras presiden boneka militer, Mohammad Boudiaf.

Melihat situasi yang terus bergejolak di masyarakat, militer makin represif dengan mematikan aliran listrik di kota-kota,

sehingga suasana rumah-rumah penduduk menjadi gelap. Tindakan militer yang main tembak dan tangkap begitu saja, menyebabkan FIS memutuskan untuk melawan mereka dengan senjata pula. Beberapa aktivis FIS kemudian membentuk GIA untuk melawan kesewenang-wenangan pemeirntah militer Aljir (GIA itu kini dimasukkan oleh PBB/Amerika sebagai kelompok teroris yang harus diburu dan dibekukan rekeningnya). Sedangkan, beberapa anggota FIS yang tidak bersenjata membentuk barikade-barikade dan melawan tentara dengan batu. Para tentara itu membalas FIS dengan peluru-peluru panas.

Menghadapi situasi yang semakin kritis itu, di mana aktivis-aktivis banyak yang ditahan dan dibantai, FIS menyatakan tetap akan bertahan dan tidak akan mundur. FIS mengeluarkan pernyataan, "Untuk FIS, krisis akan berlanjut selama "junta" melindungi kekuasaan dalam kebijaksanaannya yang arogan dan menindas musuh-musuhnya." FIS juga mengecam pemerintah karena telah melakukan penindasan "keinginan rakyat dengan perlengkapan nerakanya, berupa penindasan-penindasan, sehingga menenggelamkan negeri ini dengan darah, air mata, dan dukacita".

Setelah ditekan terus agar FIS membubarkan partainya, maka pada Senin, 1 Maret 1992, FIS mengeluarkan pernyataan tegas, yaitu FIS akan melepaskan kendali massa pendukungnya jika langkah pemerintah untuk membubarkan partai itu dilanjutkan terus. Partai Islam itu juga menyatakan bahwa rakyat Aljazair akan menempuh jalan lain (selain Pemilu) untuk melawan penindasan dan mewujudkan cita-cita mereka. "Pembubaran FIS tentu tidak berarti para tiran akan mengubah sikapnya, karena dasar dan sumber eksistensi serta inspirasi FIS adalah Islam," tegas FIS. Pernyataan FIS itu ditandatangani oleh Abdurrazak Radjam, Kepala Penerangan FIS.

Mengenai jumlah orang yang ditahan, pejabat pemerintah menyatakan 5.000 orang telah ditahan dalam upaya penumpasan FIS. FIS juga membenarkan bahwa 5.000 orang ditangkap. Tapi menurut FIS, jumlah anggotanya yang ditahan total 30 ribu orang, termasuk 35 orang imam masjid. Pernyataan itu di-

keluarkan setelah markas-markas FIS dan tempat-tempat penting FIS lainnya digerebek oleh militer.[46]

FIS Resmi Dilarang

Setelah markas FIS di mana-mana ditutup dan secara tidak langsung dibubarkan, maka FIS akhirnya resmi dibubarkan penguasa militer Aljazair pada 4 Maret 1992. Alasan yang dibuat pemerintah Aljir adalah untuk stabilitas nasional Aljazair. Pembubaran itu dilakukan setelah keluar rekomendasi Departemen Dalam Negeri yang melakukan tuduhan resmi bahwa FIS telah menimbulkan kekacauan di dalam negeri.

Tuduhan pemerintah Aljir itu tentu mengada-ada. Kekacauan dan kerusuhan itu muncul karena pemerintah membubarkan Pemilu II dan menangkapi tokoh-tokoh dan aktivis FIS. Selain itu, tentara Aljir juga membunuh ratusan pendukung-pendukung FIS. Sehingga, akhirnya FIS mengadakan perlawanan rakyat dan risikonya partai "calon pemerintah" itu dipaksa bubar.

Keadaan Aljazair saat itu memang sangat mencekam. Masjid-masjid di seluruh kota Aljazair dikawal dan diawasi ketat oleh tank-tank dan para pasukan bersenjata berat. Para jamaah Jumat dan imam masjid-masjid juga diawasi. Selain itu, kantor-kantor FIS dan kampus-kampus tempat mahasiswa-mahasiswa aktivis FIS juga tidak luput dari intaian ketat.

Sampai Maret 1992, jumlah pendukung FIS yang ditahan sekitar 30 ribu orang. Sekitar 3.000 orang tahanan ditempatkan di kamp-kamp gurun sahara yang panas. Di mana dalam bulan April 1992, suhunya bisa mencapai 50 derajat celcius.

FIS Terpaksa Ambil Jalan Keras

Setelah FIS ditekan serta para anggotanya ditahan dan dibantai oleh penguasa militer Aljir, maka FIS akhirnya mengambil jalan keras. FIS menyerukan kepada rakyat Aljazair untuk meruntuhkan rezim militer itu, baik lewat jalan damai atau jalan

---

[46] *Merdeka*, 3 Maret 1992.

keras (perang). Seruan itu berbentuk selebaran gelap yang didapatkan dan disiarkan kantor berita AFP.[47]

FIS dalam buletinnya *Mimbar Al-Jumuah* (Berita Jumat) mendesak rakyat Aljazair untuk bergerak "mulai dari kata-kata sampai ke senjata-senjata, setelah usaha-usaha mengadakan dialog gagal". Penulis buletin FIS itu menyatakan, "Saya akan mencari senjata untuk membebaskan negeri saya." Tapi, belum jelas benar, apakah buletin yang diterima kantor berita AFP itu merupakan sikap resmi organisasi FIS atau pendapat pribadi.

Buletin Jumat itu juga menyatakan, "Seluruh bangsa telah diturunkan statusnya menjadi status tertuduh yang berada di bawah pengawasan polisi. Junta (kelompok pemerintah) itu telah menyetujui, mengesahkan, dan membenarkan kekejaman. Yakni, kematian sebanyak 200 orang Aljazair, lebih dari 700 lainnya luka-luka akibat peluru, lebih dari 60 ribu orang diinterogasi, lebih dari 30 ribu ditangkap, dan lebih dari 10 ribu orang dikirim ke kamp-kamp konsentrasi. Sementara sebanyak itu pula mengalami hidup sengsara di penjara-penjara seluruh negeri."

Begitulah, akibat sabotase terhadap FIS yang dilakukan pemerintah Aljazair dengan dukungan Prancis dan Amerika Serikat, rakyat Aljazair terus menerus tenggelam dalam penderitaan sampai kini. Kasus Aljazair merupakan kasus faktual, bagaimana sebuah kemunafikan dalam soal demokrasi dipertontonkan oleh Prancis dan AS yang mengaku sebagai kampium demokrasi. Ini membuktikan bahwa bagi Barat, demokrasi lebih merupakan alat kepentingan politik ketimbang sesuatu yang mereka idealkan. Bagaimanapun yang namanya penjajah tetap berpikir untuk kepentingan mereka sendiri.

* * *

---

[47] *Pelita*, Rabu 22 April 1994.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Azzam, *Kehancuran Khilafah dan Upaya Menegakkannya*, Pustaka Al-Alaq, 2001.

Abdul Majid Abdussalam Al-Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Kontemporer*, Al-Izzah, 1997.

Abdul Qadir Djaelani, *Menelusuri Kekeliruan Pembaharuan Pemikiran Islam Nurcholish* Madjid, Yadia, Bandung, 1994.

Ahmad Wahib, *Pergolakan Pemikiran Islam*, LP3ES, Jakarta, 1995.

Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, LP3ES, Jakarta, 1985.

Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, Pustaka, Bandung, 1985.

Abul A'la al-Maududi, *Sistem Politik Islam*, Bandung, 1990.

Ahmad Suhelmi, *Soekarno versus Natsir*, Darul Falah, Jakarta, 1999.

Ali Muhammad Jarisyah dan M. Syarif Az-Zaibaq, *Taktik Strategi Musuh-musuh Islam*, Pustaka Mantiq, Solo, 1993.

Abdullah Shodiq, *Sekularisme Soekarno dan Mustafa Kemal*, Garoeda Buana Indah, Pasuruan, 1994.

Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmu'ul Fataawa wa-Maqaalaat al-Mutanawwi'ah*, Jld. II.

Alex I. Suwandi PR, *Tanya Jawab Syahadat Iman Katolik*, Kanisius, Yogyakarta, 1992.

Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung, 1997.

A.A. Yewangoe, *Agama dan Kerukunan*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2001.

Adian Husaini, *Gereja-Gereja Dibakar: Membedah Akar Konflik SARA di Indonesia*, DEA Press, Jakarta, 2000.

Arend Th. Van Leeuwen, *Agama Kristen dalam Sejarah Dunia*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1997.

Ahmad Husnan, *Hukum Islam tidak Mengenal Reaktualisasi*, Pustaka Mantiq, Solo, 1989.

Abdul Aziz al-Badri, *Hidup Sejahtera dalam Naungan Islam*, GIP, Jakarta, 1999.

Amien Rais, *Cakrawala Islam*, Mizan, Bandung, 1997.

Budhy Munawar Rahman, *Islam Pluralis*, Paramadina, Jakarta, 2001.

Bambang Noorsena, *Menuju Dialog Teologis Kristen-Islam*, Yayasan Andi, Yogyakarta, 2001.

Charles Kurzman (ed), *Wacana Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-Isu Global*, Paramadina, Jakarta, 2001.

Daud Rasyid, *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, Usamah Press, Jakarta, 1993.

Donald E. Smith, *Agama dan Modernisasi Politik*, Rajawali, Jakarta, 1985.

Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1990.

Edy Effendy (ed), *Dekonstruksi Islam Mazhab Ciputat*, Zaman, Jakarta, 1999.

Ellen Hirsch, *Facts About Israel*, Israeli Information Center, 1996.

Francis Fukuyama, *Kemenangan Kapitalis dan Demokrasi Liberal*, Qalam, Yogyakarta, 2001.

Fawaz A Gerges, *America and Political Islam: Clash of Cultures or Clash of Interests*, Cambridge University Press, 1999.

Fazlur Rahman, *Islam dan Modernitas*, Pustaka, Bandung, 1985.

GH Jansen, *Islam Militan*, Pustaka, Bandung, 1980.

Gabriel Sheffer, *US-Israeli Relations at The Crossroad*, Frank Cass & Co. Ltd., London, 1997.

Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*, Paramadina, Jakarta, 1999.

Hartono Ahmad Jaiz, *Bahaya Islam Liberal*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 2002.

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, UI Press, Jakarta, 1986.

Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, Jakarta, 1975.

Hamka, *Tafsir al-Azhar*, juz VI, Pustaka Panjimas, Jakarta, 1982.

Hamka, *Said Jamaluddin al-Afghani*, Bulan Bintang, Jakarta, 1981.

Hans Kung dan Karl-Josef Kuschel, *Etik Global*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1999.

H.M. Rasjidi, *Empat Kuliah Agama Islam pada Perguruan Tinggi*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974.

H. Pidyarto O. Carm, *Mempertanggungjawabkan Iman Katolik*, Dioma, Malang, 1990.

Ibnu Taimiyah, *Al Jawaab as-Shahih li man Baddala Diin al- Masiih*, Juz I.

Ibnu Taimiyah, *Majmu' al-Fataawa*, Jld. XXXII, Darul Arabiyah, Beirut, 1398 H.

Iskandar P. Nugraha, *Mengikis Batas Timur dan Barat: Gerakan Theosofi dan Nasionalisme Indonesia*, Komunitas Bambu, Jakarta, 2001.

James A. Bill and Carl Leiden, *Politics in The Middle East*, 1979.

Joas Adiprasetya, *Mencari dasar Bersama*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2002.

Leonard Binder, *Islam Liberal*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001.

Lukman Hakim, *Fakta dan Data: Usaha-usaha Kristenisasi di Indonesia*, Media Dakwah,1991.

------, Lembaga Penelitian dan Perkembangan Agama (LPPA) Muhammadiyah, *Sorotan Terhadap Protokolat*, 1978.

——, Lima Dokumen Keesaan Gereja Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (LDKG-PGI), BPK Gunung Mulia, 1996.

Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Pemikiran Barat dan Islam*, GIP, Jakarta, 1999.

Muhammad Asad, *Islam di Simpang Jalan*, Pustaka, Bandung, 1983.

Maryam Jameela dkk, *Benturan Barat dengan Islam*, Bandung, 1993.

Muhammad Yaqzhan, *Anatomi Budak Kufar*, Al Ghirah Press,

Jakarta, 1993.

Muhammad Galib M., *Ahl al-Kitab: Makna dan Cakupannya*, Paramadina, Jakarta, 1998.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Jakarta, 2000.

Muhammad Sayyid al-Wakkil, *Wajah Dunia Islam*, Pustaka Al Kautsar, Jakarta, 1998.

Muhammad Nasib Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir*, Jld. 2, GIP, Jakarta, 2000.

Muhammad Rasyid Ridha, *Wahyu Ilahi kepada Muhammad*, Pustaka Nasional Pte Ltd, Singapura, 1984.

Muhammad Thahir at-Tannir, *Al Aqidatu'l Watsaniyah fi'd-Diyanati'n-Nashraniyyah*, 1330 H.

Moenawar Chalil, *Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad*, Jld. I, GIP, Jakarta, 2001.

Marcel Beding dll, *Gereja Indonesia Pasca Vatikan II, Refleksi dan Tantangan*, Kanisius, Yogyakarta, 1997.

Maryam Jemeela, *Islam dan Orientalisme*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

Mark Jurgensmayer, *Menentang Negara Sekular*, Bandung, 1998.

M. Thalib dan Haris Fajar, *Dialog Bung Karno-A. Hassan*, Sumber Ilmu, 1985.

Muhammad Amin Suma, *Pluralisme Agama menurut Al-Qur'an*, Pustaka Firdaus, 2001.

Muhammad Fahim Amin, *Rahasia Gerakan Freemasonry dan Rotary Club*, Al-Kautsar, Jakarta, 1991.

Noam Chomsky, *Maling Teriak Maling: Amerika sang Teroris?*, Mizan, 2001.

Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 2000.

Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta, 1995.

Nurcholish Madjid, *Islam Kemodernan dan Keindonesiaan*, Bandung, 1999.

—, *Palestina Nasibmu Kini*, Yayasan SIDIK, Jakarta, 1994.

Paul Findley, *Deliberate Deceptions-Facing the Facts about the US-Israeli*

Relationship, Lawraence Hill Books, New York, 1993.
Paus Johannes Paulus II, *Bersatu dengan Roh Yang Menghidupkan, Yubileum*
Agung Tahun 2000, Kanisius, Yogyakarta, 1998.
Roeslan Abdulgani, *Indonesia Menatap Masa Depan*, Pustaka Merdeka, Jakarta, 1987.
Ralph Schoenman, *Mimpi Buruk Kemanusiaan-Sisi-Sisi Gelap Zionisme*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1998.
Roger Garaudy, *Israel dan Praktik-praktik Zionisme*, Pustaka, Bandung, 1988.
R. William Liddle, *Islam, Politik, dan Modernisasi*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
Rahmat Subagya, *Kepercayaan dan Agama*, Kanisius, 1976.
-------, *Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI*, Setneg RI, 1995.
Rifyal Ka'bah, *Hukum Islam di Indonesia*, Universitas Yarsi Jakarta, 1999.
Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilization and the Remaking of World Order*, London, Touchstone, 1996.

Saripudin HA (ed), *Negara Sekuler Sebuah Polemik*, Putra Berdikari Bangsa, 2000.
Sukidi, *Teologi Inklusif Cak Nur*, Kompas, 2001.
Syihabudin al-Hamuy, *Mu'jamul Buldan, Jld. V.*
Taufik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas*, Mizan, Juni 1990.
Victor Silaen (ed), *Gereja dan Reformasi*, PGI, Jakarta, 1999.
Yusril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam Politik Islam*, Paramadina, Jakarta, 1999.
Yusuf Qaradhawi, *Bagaimana Islam Menilai Yahudi dan Nashrani*, Gema Insani Press,Mei 2000.
Yusuf Qaradhawi, *Al Quds Masalah Kita Bersama*, Pustaka Al Kautsar,1999.
Yusuf Qaradhawi, *Minoritas Nonmuslim dalam Masyarakat Islam*, 1994.
Yusuf Qaradhawi, *Fiqih Negara*, Robbani Press, Jakarta, 1997.
Ziaudin Sardar, *Rekayasa Masa Depan Peradaban Muslim*, Bandung, 1986.

Media Massa

Republika, edisi 24 Juni 2000 dan 11 April 2002.

BBC News, 1 April 2002.

Radio BBC, 12 September 2001.

Kompas, edisi 8 Juli 1992, 21 Oktober 2001, dan 21 November 2001.

Majalah Tempo, edisi 21 Oktober 2001 dan 19-25 November 2001.

Koran Tempo, edisi 22 April 2001.

Jawa Pos, edisi 19-21 November 2001.

Media Indonesia, edisi 28 Desember 1991.

Pelita, edisi 28 Desember 1991, 17 Januari 1992, 6 Februari 1992, dan 22 April 1994.

Suara Pembaruan, edisi 11 Maret 1992.

Antara (Kantor Berita), edisi 23 Januari 1992.

Merdeka, edisi 3 Maret 1992.

Gatra, edisi 1 Desember 2001.

Sabili, No 15 Th IX, 25 Januari 2002.

Sabili, No 19 Th VII, 8 Maret 2000.

The Strait Times, edisi 24 Januari 1991.

Newsweek, Special Davos Edition, December 2001-February 2002.

Internet

www.islamlib.com

www. newyorktimes.com, 16 Maret 2002.

www.islamonline.net, 15 Oktober 2001.

* * *

INDEKS

* * *

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

Adian Husaini, MA. Lahir di Bojonegoro, 17 Desember 1965. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Program Hubungan Internasional di Program Pascasarjana Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta, dengan tesis berjudul *"Pragmatisme Politik Luar Negeri Israel"*.

Saat ini aktif sebagai Sekjen Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam (KISDI), anggota Komisi Kerukunan antar-Umat Beragama MUI Pusat, narasumber tetap acara "Teropong Media" di FM Moslem Radio, 98,8 FM Jakarta, dosen mata kuliah jurnalistik di Universitas Ibnu Khaldun Bogor, penceramah rutin Pengajian Umum Ahad Pagi di Pesantren Husnayain Pekayon, Jakarta Timur.

Pernah menjadi wartawan di harian *Berita Buana*, harian *Republika*, tabloid *Abadi*, tabloid ekonomi *Daulat Rakyat*, dan majalah *Media Dakwah*. Pernah nyantri di PP Ar-Rosyid Kendal Bojonegoro, PP Ulil Albab Bogor, dan Kursus Bahasa Arab di LIPIA Jakarta.

Telah menulis lebih dari 15 buku, antara lain, *Habibie, Soeharto, dan Islam, Gereja-Gereja Dibakar:Membedah Akar Konflik SARA di Indonesia, Sekulerisme Penumpang Gelap Reformasi, Gus Dur Kau Mau Kemana: Kritik terhadap Politik dan Pemikiran Keagamaan*

Presiden Abdurrahman Wahid, Jihad Osama versus Amerika, Penyesatan Opini, dan *Mau Menang Sendiri: Israel Sang Teroris yang Pragmatis,* dan sebagainya.
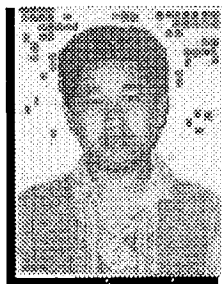
Nuim Hidayat, lahir di Bojonegoro, 20 Juli 1969. Saat ini sedang menempuh pendidikan S-2 di Universitas Indonesia, Program Kajian Timur Tengah dan Islam. Program S-1 diselesaikan di Institut Pertanian Bogor, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian.

Pernah menjadi santri di Pesantren Sendang Tuban dan Ma'had Al Adzhar, Bogor. Pernah aktif sebagai wartawan di majalah *Jurnal Halal* LP-POM MUI, tabloid *Abadi, Berpolitik.com,* dan majalah *Media Dakwah.*

Semasa mahasiswa aktif di Himpunan Profesi Miseta IPB (Sekum), Badan Kerohanian Islam (Humas), dan Forum Silaturahmi Mantan Lembaga Dakwah Kampus (Sekretaris). Selain itu juga pernah menjadi asisten dosen untuk mata kuliah Agama Islam dan Sosiologi Pedesaan.

* * *

SERI BUKU KARYA PENULIS DALAM NEGERI*